LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR 09 TAHUN 2022
TANGGAL 16 MARET 2022 M
13 SYABAN 1443 H

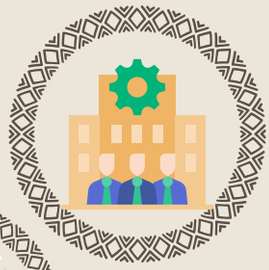
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
(RPD)
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023-2026













PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa...

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E nomor 6);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023-2026.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRA dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan.
8. Pembangunan kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027.
11. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 4 (empat) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang disusun setiap tahun.
13. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

16. Program ...

16. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

RPD merupakan:

a. dokumen perencanaan pembangunan Kota sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dalam mewujudkan pembangunan Kota yang berkesinambungan dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD; dan
b. penjabaran strategi pembangunan kota, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJP Kota.

Pasal 3

Penetapan RPD bertujuan untuk:

a. menyusun Renstra-OPD, RKPD, Renja-OPD dan perencanaan penganggaran;
b. mewujudkan perencanaan pembangunan Kota yang sinergis antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota;
c. mencapai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah;
d. menyediakan dokumen perencanaan pembangunan 4 (empat) tahun yang bersifat indikatif, yang memuat kerangka makro kota dan pilihan program prioritas; dan
e. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan OPD.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4

Sistematika RPD sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN
   Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan atar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika tulisan.
b. BAB II GAMBARAN UMUM
   Gambaran umum kondisi daerah menguraikan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

c. BAB III ...

c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
   Gambaran keuangan daerah menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.
d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
   Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJM karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Isu Strategis berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan, serta isu-isu yang berkembang secara Nasional dan International.
e. BAB V TUJUAN DAN SASARAN
   Dalam Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati.
f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
   Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
   Bab ini memuat program prioritas dalam tujuan dan sasaran pembangunan serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.
h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
   Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan sasaran Pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).
i. BAB IX PENUTUP

Pasal 5

Isi, uraian RPD, dan matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

(1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.
(2) Pengendalian dan evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan perencanaan pembangunan Kota; dan
    b. pelaksanaan rencana pembangunan Kota.

(3) Tata cara ...

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra OPD.

(4) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(5) Dalam hal terjadi perubahan RPD yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Dokumen perencanaan pembangunan Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.

BAB ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Maret13 Syaban 2022 M
1443 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 2022 M
1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN – PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DAFTAR TABEL VI
DAFTAR GAMBAR X
BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 6
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I - 7
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 9
1.5 Sistematika Dokumen RKPK ..... I - 9

BAB II GAMBARAN UMUM ..... II - 1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II - 1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ..... II - 1
A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... II - 1
B. Topografi ..... II - 2
C. Geologi ..... II - 3
D. Geomorfologi ..... II - 4
E. Hidrologi ..... II - 4
F. Klimatologi ..... II - 5
2.1.1.2 Demografi ..... II - 6
A. Jumlah Penduduk ..... II - 6
B. Struktur dan Indeks Ketergantungan Penduduk II - 6
2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah ..... II - 8
A. Rencanan Sistem Pusat Pelayanan Kota ..... II - 8
B. Rencana Pengembangan Kawasan Pusat Kota Lama Kota Banda Aceh ... II - 10
C. Penggunaan Lahan ..... II - 12
2.1.1.4 Wilayah Rawan Bencana ..... II - 13
2.1.1.5 Sosiologi ..... II - 15
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II - 16
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi ..... II - 16
A. Pertumbuhan PDRB ..... II - 16
B. Laju Inflasi ..... II - 19
C. PDRB Perkapita ..... II - 20
D. Indeks Gini ..... II - 20
E. Kemiskinan ..... II - 20
F. Pengangguran ..... II - 22
G. Angka Partisipasi Kerja ..... II - 23
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II - 25
A. Angka Melek Huruf (AMF) ..... II - 25
B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah ..... II - 25
C. Angka Harapan Lama Sekolah..... II - 26
D. Angka Kematian Ibu ..... II - 26
E. Angka Kematian Bayi ..... II - 27
F. Angka Usia Harapan Hidup ..... II - 27
G. Indeks Pembangunan Manusia ..... II - 28
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya ..... II - 28
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II - 29
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh ..... II - 29
A. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama ..... II - 29
a. Syariat Islam ..... II - 29

b. Pelaksanaan Ibadah ..... II - 32
B. Penyelenggaraan Kehidupan Adat ..... II - 33
C. Penyelenggaraan Pendidikan ..... II - 33
D. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah ..... II - 35
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib ..... II - 37
A. Layanan Urusan Wajib Dasar ..... II - 37
a. Pendidikan ..... II - 37
1) Angka Partisipasi Murni (APM) ..... II - 37
2) Angka Partisipasi Sekolah (APS) ..... II - 37
3) Angka Partisipasi Kasar (APK) ..... II - 37
4) Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT ..... II - 38
5) Angka Putus Sekolah (APtS) ..... II - 38
6) Angka Melanjutkan (AM) ..... II - 39
7) Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar ..... II - 39
8) Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar ..... II - 40
9) Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tercapai ..... II - 40
10) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV ..... II - 41
b. Kesehatan ..... II - 41
1) Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup ..... II - 41
2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi ..... II - 41
3) Rasio Posyandu per Satuan Balita ..... II - 42
4) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk ..... II - 42
5) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk ..... II - 43
6) Rasio Dokter per Satuan Penduduk ..... II - 43
7) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk ..... II - 44
8) Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) .. II - 44
9) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan ..... II - 45
10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD ... II - 45
11) Jumlah Kasus Baru HIV ..... II - 46
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II - 46
1) Pekerjaan Umum ..... II - 46
I) Kondisi Jalan ..... II - 46
II) Sanitasi ..... II - 47
III) Air Minum ..... II - 48
IV) Drainase ..... II - 51
V) Aksesibilitas terhadap Disabilitas ..... II - 53
2) Penataan Ruang ..... II - 53
I) Rasio Ruang Terbuka Hijau ..... II - 53
II) Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan ..... II - 53
III) Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya ..... II - 54
IV) Ketaatan Terhadap RTRW ..... II - 54
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... II - 55
1) Rasio Rumah Layak Huni ..... II - 55
2) Persentase Permukiman yang Tertata ..... II - 55
3) Persentase Kawasan Permukiman Kumuh ..... II - 56
e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II - 56
1) Cakupan Patroli Petugas Satpol PP ..... II - 56
2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) II - 57
3) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota ..... II - 57
4) Tingkat Waktu Tanggap (renponse time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) II - 58
5) Persentase Penegakan Perda ..... II - 58
f. Sosial ..... II - 59
1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) . II - 60
2) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS ..... II - 60
3) Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat II - 61

B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar ..... II - 61
a. Ketenagakerjaan ..... II - 61
1) Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun ..... II - 61
2) Pencari Kerja yang Ditempatkan ..... II - 62
3) Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah ..... II - 62
4) Rasio Lulusan S1/S2/S3 ..... II - 62
b. Pangan ..... II - 63
c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II - 63
1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (% ..... II - 63
2) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ..... II - 64
3) Kota Layak Anak (KLA) ..... II - 64
d. Lingkungan hidup ..... II - 65
1) Timbulan Sampah yang Ditangani ..... II - 65
2) Indeks Kualitas Lingkungan hidup ..... II - 66
3) IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) Gampong Jawa ..... II - 67
4) Pemanfaatan Gas Metana dari TPA Gampong Jawa ..... II - 67
5) Emisi Gas Rumah Kaca ..... II - 68
6) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ..... II - 69
7) Adipura ..... II - 70
e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II - 70
1) Kepemilikan KTP ..... II - 70
2) Rasio Bayi Berakte Kelahiran ..... II - 71
f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... II - 71
1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik ..... II - 71
2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik ..... II - 72
3) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ..... II - 73
4) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK ..... II - 73
5) Persentase PKK aktif ..... II - 74
6) Persentase Posyandu aktif . ..... II - 75
7) Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) ..... II - 76
8) Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota ..... II - 76
9) Presentase Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik ..... II - 77
10) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat ..... II - 78
11) Presentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang Baik ..... II - 78
12) Presentase Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik ..... II - 79
g. Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana ..... II - 79
1) Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga ..... II - 79
2) Ratio Akseptor KB ..... II - 80
h. Bidang Perhubungan ..... II - 80
1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum ..... II - 80
2) Rasio Ijin Trayek ..... II - 81
3) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum ..... II - 81
4) Persetase Kepemilikan KIR Angkutan Umum ..... II - 82
5) Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum ..... II - 82
6) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh ..... II - 82
7) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis ..... II - 83
8) Persentase Layanan Angkutan Darat ..... II - 83
9) Pemasangan Rambu-rambu ..... II - 83
10) Perparkiran ..... II - 83
j. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ..... II - 84
1) Persentase Koperasi Aktif ..... II - 84
2) Jumlah UMKM dan BPR/LKM ..... II - 84

k. Penanaman Modal ..... II - 84
1) Jumlah Investasi(PMDN/ PMA) ..... II - 84
2) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja ..... II - 85
l . Kepemudaan dan Olahraga ..... II - 86
1) Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Pemuda ..... II - 86
2) Olahraga ..... II - 86
3) Pembinaan Atlet dan Pelatih..... II - 86
m. Perpustakaan..... II - 87
n. Kearsipan ..... II - 87
C. Fokus Layanan Urusan Pilihan ..... II - 88
a. Pariwisata ..... II - 88
b. Pertanian ..... II - 89
1) Produktivitas Padi Per Hektar ..... II - 89
2) Cakupan Bina Kelompok Petani ..... II - 89
c. Peternakan ..... II - 89
d. Energi dan Sumber Daya Mineral ..... II - 90
e. Perindustrian ..... II - 90
1) Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Perbankan..... II - 90
2) Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi ..... II - 91
3) Jumlah Produk yang Menunjang Program One Village One Product ..... II - 91
4) Jumlah Pasar yang Sudah Berfungsi Sccara Optimal ..... II - 91
f. Kelautan dan Perikanan ..... II - 92
1) Cakupan Bina Kelompok Nelayan ..... II - 92
2) Produksi Perikanan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya II - 92
D. Fokus Penunjang Urusan ..... II - 93
a. Perencanaan Pembangunan ..... II - 93
b. Keuangan ..... II - 93
1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan II - 93
2) Persentase SILPA ..... II - 93
3) Persentase SILPA terhadap APBD ..... II - 93
4) Persentase Belanja Pendidikan ..... II - 94
5) Persentase Belanja Kesehatan ..... II - 94
6) Persentase Belanja Langsung dan Tidak Langsung II - 94
7) Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa ..... II - 94
8) Penetapan APBD ..... II - 95
c. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan ..... II - 95
d. Penelitian dan Pengembangan ..... II - 96
e. Pengawasan..... II - 96
f. Sekretariat DPRD ..... II - 97
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II - 97
2.1.4.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)..... II - 97
2.1.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II - 98
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita II - 98
B. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Non-Makanan 98 II -
2.1.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... II - 99
A. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih ... II - 99
B. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik ..... II - 99
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya ..... II - 100

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH ..... III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu ..... III - 2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ..... III - 2
3.1.2 Neraca Daerah ..... III - 8
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..... III - 11
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran ..... III - 11

3.2.2 Analisis Pembiayaan ..... III - 12
3.3 Kerangka Pendanaan ..... III - 16
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja ..... III - 16
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pembiayaan ..... III - 20

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..... IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh ..... IV - 1
4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... IV - 1
4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... IV - 2
4.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... IV - 4
4.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... IV - 9
4.2 Isu-isu Strategis ..... IV - 9

BAB V TUJUAN DAN SASARAN ..... V - 1
5.1 Tujuan Pembangunan ..... V - 1
5.2 Sasaran Pembangunan ..... V - 2
5.3 Penyelarasan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, RPA Tahun 2023-2026, dan RPJMN Tahun 2020-2024 ..... V - 6

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS ..... VI - 1
6.1 Strategi ..... VI - 1
6.2 Kebijakan ..... VI - 4
6.3 Program Prioritas ..... VI - 4

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII - 1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ..... VII - 1
7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ..... VII - 1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... VIII - 1
8.1 Indikator Makro Pembangunan ..... VIII - 1
8.2 Indikator Kinerja Utama ..... VIII - 1
8.3 Indikator Kinerja Daerah ..... VIII - 2

BAB IX PENUTUP ..... IX - 1
9.1 Pedoman Transisi ..... IX - 1
9.2 Kaidah Pelaksanaan ..... IX - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional 2020–2024	I - 2
Tabel 1.2	Perbedaan RPJMD dan RPD	I - 9
Tabel 2.1	Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh	II - 1
Tabel 2.2	Nama Sungai dan Luas Daerah Alirannya di Kota Banda Aceh	II - 5
Tabel 2.3	Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2015	II - 5
Tabel 2.4	Indikator kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 7
Tabel 2.5	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun	II - 8
Tabel 2.6	Rencana Pusat – Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh	II - 9
Tabel 2.7	Jenis Penggunaan Lahan di Kota Banda Aceh Tahun 2021	II - 13
Tabel 2.8	Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Banda Aceh	II - 17
Tabel 2.9	Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (Juta Rupiah)	II - 18
Tabel 2.10	Perkembangan Konstribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kota Banda Aceh	II - 18
Tabel 2.11	Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran, 2016-2020	II - 19
Tabel 2.12	Persentase Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan di Kota Banda Aceh 2017-2021	II - 21
Tabel 2.13	Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 23
Tabel 2.14	Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 24
Tabel 2.15	Jumlah Pencari Kerja Tahun 2017 – 2021	II - 25
Tabel 2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017-2021	II - 28
Tabel 2.17	Capaian Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 29
Tabel 2.18	Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh	II - 31
Tabel 2.19	Tabel Data Penerimaan Zakat Per Tahun	II - 31
Tabel 2.20	Jumlah Rumah dhuafa yang telah dibangun	II - 32
Tabel 2.21	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin di Kota Banda Aceh	II - 32
Tabel 2.22	Jumlah Dayah, Guru, Santri di Kota Banda Aceh, 2017-2021	II - 34
Tabel 2.23	Tabel Keputusan Keulamaan	II - 35
Tabel 2.24	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 37
Tabel 2.25	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 38
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 38
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2021	II - 39
Tabel 2.28	Perkembangan Angka Melanjutkan Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 39
Tabel 2.29	Tabel Jumlah Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh	II - 41
Tabel 2.30	Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 41
Tabel 2.31	Tabel Angka Kelangsungan Hidup Bayi	II - 42
Tabel 2.32	Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 42
Tabel 2.33	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 43
Tabel 2.34	Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 43
Tabel 2.35	Perkembangan Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 44
Tabel 2.36	Data Sebaran Kasus DBD Tahun 2017-2021	II - 46
Tabel 2.37	Tabel Jumlah Kasus Baru HIV	II - 46
Tabel 2.38	Data Status Kondisi Jalan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017-2021	II - 47
Tabel 2.39	Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase	II - 47
Tabel 2.40	Data Kondisi Drainase Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 52
Tabel 2.41	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 53

Tabel 2.42	Tabel Jumlah Ruang Publik yang Tersedia	II - 54
Tabel 2.43	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 55
Tabel 2.44	Tabel Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 55
Tabel 2.45	Persentase Luas Pemukiman Tertata	II - 55
Tabel 2.46	Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 56
Tabel 2.47	Tabel Cakupan Patroli Personil Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 57
Tabel 2.48	Tabel Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	II - 57
Tabel 2.49	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Banda Aceh	II - 58
Tabel 2.50	Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan	II - 58
Tabel 2.51	Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2017 – 2021	II - 58
Tabel 2.52	Tabel Persentase Penegakan Perda Tahun 2018-2021 Kabupaten/Kota	II - 59
Tabel 2.53	Daftar Penyandang Masalah Sosial di Kota Banda Aceh Tahun 2016-2021	II - 59
Tabel 2.54	Pencapaian Penanganan terhadap PMKS	II - 60
Tabel 2.55	Keberadaan PSKS di Kota Banda Aceh	II - 60
Tabel 2.56	Penerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	II - 61
Tabel 2.57	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Tahun 2017-2021	II - 62
Tabel 2.58	Pencari Kerja yang Ditempatkan	II - 62
Tabel 2.59	Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 per-satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2016-2021	II - 63
Tabel 2.60	Ketersediaan Pangan Utama	II - 63
Tabel 2.61	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 64
Tabel 2.62	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	II - 64
Tabel 2.63	Indikator KLA yang dicapai tahun 2017-2021	II - 65
Tabel 2.64	Realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Sampah Periode 2017-2021	II - 66
Tabel 2.65	Volume Tinja dibuang ke IPLT (m3)	II - 67
Tabel 2.66	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	II - 70
Tabel 2.67	Total Penghargaan Adipura di Kota Banda Aceh	II - 70
Tabel 2.68	Rasio Kepemilikan KTP di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 71
Tabel 2.69	Tabel Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 71
Tabel 2.70	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik	II - 72
Tabel 2.71	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik	II - 73
Tabel 2.72	Kelompok Binaan LPM Tahun 2017-2021 Kota Banda Aceh	II - 73
Tabel 2.73	Kelompok Binaan PKK Tahun 2017-2021 Kota Banda Aceh	II - 74
Tabel 2.74	PKK Aktif Tahun 2017-2021 Kota Banda Aceh	II - 75
Tabel 2.75	Jumlah Posyandu dalam Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 75
Tabel 2.76	Strata Posyandu Tahun 2017 – 2021 di Kota Banda Aceh	II - 76
Tabel 2.77	Data Partisipasi Masyarakat dalam Pilchiksung di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 76
Tabel 2.78	Data Mukim Dalam Kota	II - 77
Tabel 2.79	Fasilitasi Dana Pembangunan Untuk Gampong di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 77
Tabel 2.80	Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang Baik Tahun 2017-2021	II - 78
Tabel 2.81	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 78
Tabel 2.82	Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik Tahun 2017-2021 (dalam persen)	II - 79
Tabel 2.83	Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik Tahun 2017-2021 (dalam persen)	II - 79
Tabel 2.84	Jumlah Anak Per Keluarga	II - 79
Tabel 2.85	Ratio Akseptor KB	II - 80
Tabel 2.86	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 80
Tabel 2.87	Jumlah Penumpang dan Angkutan Umum Darat Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 81
Tabel 2.88	Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 81
Tabel 2.89	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 81
Tabel 2.90	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 82
Tabel 2.91	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Banda Aceh tahun 2017-2020	II - 82
Tabel 2.92	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 83

Tabel 2.93	Persentase Angkutan Darat tahun 2017-2021	II - 83
Tabel 2.94	Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 83
Tabel 2.95	Kondisi Perparkiran Di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021	II - 83
Tabel 2.96	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Tingkat Kecamatan	II - 84
Tabel 2.97	Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 84
Tabel 2.98	Perkembangan jumlah BPR/ LKM di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 84
Tabel 2.99	Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Banda Aceh Tahun 2016-2021	II - 85
Tabel 2.100	Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 86
Tabel 2.101	Perkembangan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020	II - 86
Tabel 2.102	Data Cabang Olahraga dan Atlit Binaan Dispora Kota Banda Aceh Tahun 2021	II - 87
Tabel 2.103	Kondisi perpustakaan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021	II - 87
Tabel 2.104	Kondisi Kearsipan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021	II - 88
Tabel 2.105	Kunjungan Wisatawan ke Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 88
Tabel 2.106	Wisatawan ke Kota Banda Aceh Menurut Daerah Asal Tahun 2020	II - 88
Tabel 2.107	Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kota Banda Aceh	II - 89
Tabel 2.108	Rumus Cakupan Bina Kelompok Pertanian	II - 89
Tabel 2.109	Data Potensi Ternak Tahun 2017-2021	II - 89
Tabel 2.110	Data Kelistrikan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020	II - 90
Tabel 2.111	Data Perkembangan Industri Kecil Kota Banda Aceh	II - 90
Tabel 2.112	Perkembangan Industri Kecil dan Menengah	II - 90
Tabel 2.113	Cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh	II - 91
Tabel 2.114	Nama Pasar di Kota Banda Aceh	II - 91
Tabel 2.115	Rumus Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	II - 91
Tabel 2.116	Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021	II - 91
Tabel 2.117	Opini BPK Tahun 2018 – 2021	II - 93
Tabel 2.118	Persentase SiLPA Kota Banda Aceh	II - 93
Tabel 2.119	Persentase SILPA Terhadap APBD	II - 93
Tabel 2.120	Persentase Belanja Pendidikan	II - 94
Tabel 2.121	Persentase Belanja Kesehatan	II - 94
Tabel 2.122	Persentase Belanja Langsung	II - 94
Tabel 2.123	Persentase Belanja Tidak Langsung	II - 94
Tabel 2.124	Persentase Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa	II - 94
Tabel 2.125	Penetapan APBD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 95
Tabel 2.126	Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan formal di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	II - 95
Tabel 2.127	Pejabat Struktural yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	II - 95
Tabel 2.128	Jumlah Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi	II - 96
Tabel 2.129	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2016-2021	II - 96
Tabel 2.130	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan BPK Tahun 2016-2021	II - 97
Tabel 2.131	Ketersediaan Daya Listrik	II - 99
Tabel 2.132	Tabel Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018-2021	II - 100
Tabel 2.133	Indikator Kinerja Daerah dalam Aspek Kesejahteraan	II - 101
Tabel 2.134	Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Pendidikan	II - 101
Tabel 2.135	Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Kesehatan	II - 103
Tabel 2.136	Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Pekerjaan Umum	II - 104
Tabel 2.137	Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II - 104
Tabel 2.138	Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Perencaaan Pembangunan Daerah	II - 105
Tabel 2.139	Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Perhubungan	II - 105
Tabel 2.140	Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota	II - 105
Tabel 2.141	Indikator Kinerja Daerah Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	II - 106
Tabel 2.142	Indikator Kinerja Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	II - 107

Tabel 2.143	Indikator Kinerja Daerah Bidang Sosial	II - 108
Tabel 2.144	Indikator Kinerja Daerah Bidang Tenaga Kerja	II - 108
Tabel 2.145	Indikator Kinerja Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	II - 109
Tabel 2.146	Indikator Kinerja Daerah Bidang Kebudayaan	II -110
Tabel 2.147	Indikator Kinerja Daerah Bidang Pemuda dan Olahraga	II - 110
Tabel 2.148	Indikator Kinerja Daerah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	II - 110
Tabel 2.149	Indikator Kinerja Daerah Bidang Sekretariat DPRK	II - 111
Tabel 2.150	Indikator Kinerja Daerah Bidang Inspektorat	II - 111
Tabel 2.151	Indikator Kinerja Daerah Bidang Keuangan	II - 112
Tabel 2.152	Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II - 113
Tabel 2.153	Indikator Kinerja Daerah Bidang Pangan	II -113
Tabel 2.154	Indikator Kinerja Daerah Bidang Pertanian	II - 114
Tabel 2.155	Indikator Kinerja Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	II - 114
Tabel 2.156	Indikator Kinerja Daerah Bidang Peternakan	II - 114
Tabel 2.157	Indikator Kinerja Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	II - 114
Tabel 2.158	Indikator Kinerja Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	II -115
Tabel 2.159	Indikator Kinerja Daerah Bidang Perpustakaan	II - 115
Tabel 2.160	Indikator Kinerja Daerah Bidang Kearsipan	II - 115
Tabel 2.161	Indikator Kinerja Daerah Bidang Pariwisata	II - 116
Tabel 2.162	Indikator Kinerja Daerah Bidang Keagamaan	II -116
Tabel 2.163	Indikator Kinerja Daerah Bidang Baitul Mal	II -116
Tabel 2.164	Indikator Kinerja Daerah Bidang Disdikdayah	II - 116
Tabel 2.165	Indikator dalam Aspek Daya Saing Daerah	II - 117
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	III - 4
Tabel 3.2	Realisasi APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dan Target APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022	III - 7
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	III - 9
Tabel 3.4	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	III - 12
Tabel 3.5	Defisit Rill Anggaran Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	III - 13
Tabel 3.6	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	III - 14
Tabel 3.7	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	III - 15
Tabel 3.8	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026	III - 17
Tabel 3.9	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	III - 21
Tabel 3.10	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	III - 23
Tabel 4.1	Permasalahan dan Isu Strategis RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	IV - 12
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	V - 3
Tabel 5.2	Penyelarasan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, RPA Tahun 2023-2026, dan RPJMN Tahun 2020-2024	V - 6
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	VI - 2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	VI - 4
Tabel 6.3	Program Pembangunan Kota Banda Aceh dan Pagu Indikatif Tahun 2023-2026	VI - 5
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	VII - 1
Tabel 7.2	Indikasi Rencanan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	VII - 2
Tabel 8.1	Penetapan dan Target Indikator Makro Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	VIII - 1
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Utama Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026	VIII - 2
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VIII - 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Target Pembangunan Makro Nasional ..... I - 2
Gambar 1.2 Proses Penyusunan RPD Kota Banda Aceh ..... I - 6
Gambar 1.3 Hubungan RPD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah ..... I - 8
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh ..... II - 2
Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh ..... II - 3
Gambar 2.3 Kondisi Geologi Kota Banda Aceh ..... II - 4
Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kota Banda Aceh ..... II - 5
Gambar 2.5 Jumlah Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2021 ..... II - 6
Gambar 2.6 Piramida penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2021 ..... II - 8
Gambar 2.7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh ..... II - 9
Gambar 2.8 Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman . ..... II - 10
Gambar 2.9 Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah ..... II - 11
Gambar 2.10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong ..... II - 12
Gambar 2.11 Konsep Pengembangan Nurul Arafah Islamic Centre ..... II - 12
Gambar 2.12 Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh ..... II - 14
Gambar 2.13 Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh ..... II - 14
Gambar 2.14 Peta Bahaya Gempa Kota Banda Aceh ..... II - 15
Gambar 2.15 Peta Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh ..... II - 15
Gambar 2.16 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020 ..... II - 16
Gambar 2.17 Grafik Laju Inflasi tahun 2016-2020 ..... II - 19
Gambar 2.18 PDB Perkapita Banda Aceh Tahun 2017-2021 ..... II - 20
Gambar 2.19 Indeks Gini Kota Banda Aceh ..... II - 20
Gambar 2.20 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan. Nasional Tahun 2017 – 2021 ..... II - 22
Gambar 2.21 Perbandingan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan oleh Pengangguran di Kota Banda Aceh, Aceh, dan Nasional tahun 2020 ..... II - 22
Gambar 2.22 Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017 – 2021 ..... II - 24
Gambar 2.23 Jumlah Pencari Kerja 2017-2021 ..... II - 24
Gambar 2.24 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2017 – 2021 ..... II - 25
Gambar 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Banda Aceh, 2017-2021 ..... II - 26
Gambar 2.26 Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh, 2016-2020 ..... II - 26
Gambar 2.27 Perkembangan AKB Banda Aceh dan Aceh Tahun 2017- 2021 ..... II - 27
Gambar 2.28 Angka Harapan Hidup di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021 ..... II - 28
Gambar 2.29 Indeks Kota Syariah di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2020 ..... II - 30
Gambar 2.30 Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Qanun Syariat Islam di Kota Banda aceh Tahun 2018 – 2020 ..... II - 31
Gambar 2.31 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Banda Aceh Tahun 2019-2020 ..... II - 37
Gambar 2.32 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Banda Aceh Tahun 2019–2020 ... II - 38
Gambar 2.32 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021 ..... II - 39
Gambar 2.33 Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021 ..... II - 40
Gambar 2.34 Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk Tahun 2018 – 2021 ..... II - 44
Gambar 2.35 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2016 - 2020 di Kota Banda Aceh ..... II - 45
Gambar 2.36 Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan ..... II - 45
Gambar 2.37 Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun Anggaran 2018 – 2021..... II - 47
Gambar 2.38 Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2017 – 2021 ..... II - 48
Gambar 2.39 Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy ..... II - 49
Gambar 2.40 Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029 ..... II - 50
Gambar 2.41 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Banda Aceh Tahun 20182-2021 ..... II - 51
Gambar 2.42 Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh..... II - 52
Gambar 2.43 Persentase Pengurangan Kawasan Rawan Banjir Genangan di Kota Banda Aceh ..... II - 52

Gambar 2.44	Bangunan Umum yang Memiliki Aksesibilitas terhadap Disabilitas, Tahun 2018-2021	II - 53
Gambar 2.45	Grafik Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021	II - 54
Gambar 2.46	Peran para pemangku kepentingan dalam mewujudkan KLA	II - 65
Gambar 2.47	Keadaan sampah di Kota Banda Aceh	II - 66
Gambar 2.48	Proyeksi BAU Baseline Emisi Kota Banda Aceh Tahun 2015-2025	II - 68
Gambar 2.49	Proyeksi BAU Baseline Emisi Sektor Transportasi Kota Banda Aceh Tahun 2015 – 2025	II - 69
Gambar 2.50	Proyeksi BAU Baseline Emisi Sektor Limbah Kota Banda Aceh Tahun 2015-2025	II - 69
Gambar 2.51	Serapan Tenaga Kerja dari PMDN dan PMA di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	II - 86
Gambar 2.52	Kondisi IKM Kota Banda Aceh Tahun 2021	II - 91
Gambar 2.53	Pengeluaran Perkapita per Tahun di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional pada Tahun 2017-2021	II - 98
Gambar 2.54	Pengeluaran Perkapita Non-Makanan per Tahun di Kota Banda	II - 99
Gambar 2.55	Cakupan Akses Air Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2017-2019	II - 99

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banda Aceh sebagai ibukota Propinsi Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan rencana pembangunan Aceh. Sebagai ibukota Provinsi Aceh, pembangunan Kota Banda Aceh memiliki peran strategis baik pusat pemerintahan maupun sebagai pusat pertumbuhan daerah dan pusat pendidikan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan telah habis masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023, diwajibkan untuk menyusun RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah.

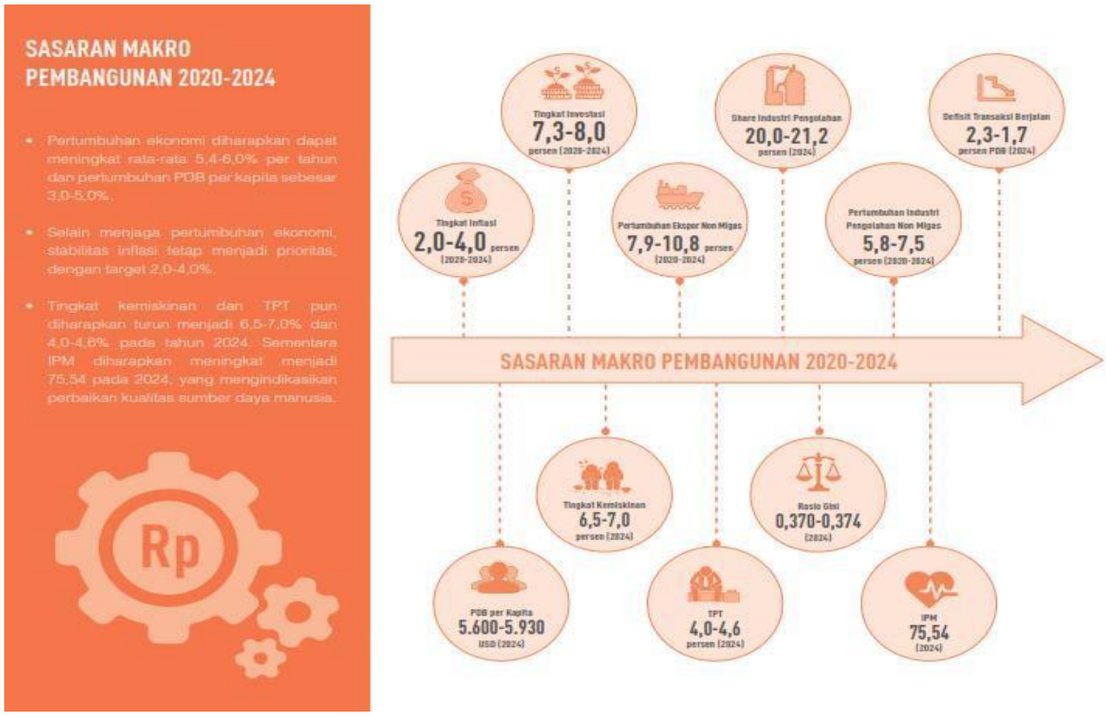
Merujuk pada pasal 201 ayat (9) disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diangkat pejabat Gubernur, Penjabat Bupati dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilu serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, berkewajiban untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang lebih lanjut untuk Kota Banda Aceh disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Dokumen RPD ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional.

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 RPD adalah penjabaran rencana pembangunan daerah periode 2023–2026 yang penyusunannya berpedoman pada target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Aceh 2023-2026, serta isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku. Target indikator makro nasional dan program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah:

A. Target Indikator Makro Indonesia

Target Indikator makro nasional tahun 2020-2024 menjadi acuan untuk menentukan target indikator makro daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Perekonomian Indonesia dapat tumbuh dengan rata-rata Pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,4-6,0 persen per tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar 3,0-5,0 persen.
2. Menjaga stabilitas inflasi dengan target inflasi 2,0–4,0 persen per tahun.
3. Tingkat kemiskinan menurun hingga 6,5–7,0 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 4,0-4,6 persen pada tahun 2024.
4. Perbaikan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM Aceh menjadi 75,54 pada 2024.
5. Distribusi pendapatan semakin merata dimana Indeks gini turun menjadi 0,370-0,374 pada tahun 2024.



Gambar 1. 1
Target Pembangunan Makro Nasional

B. Program Prioritas Nasional

Prioritas Nasional harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pemerintah Kota Banda Aceh dalam RPD 2023-2026. Pada periode 2020–2024 pemerintah Indonesia memiliki 6 (enam) Prioritas Nasional yang diturunkan dalam berbagai program prioritas pembangunan sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional 2020-2024

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
I	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**	**PN-1**
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	PN-1,PP1
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	PN-1, PP2
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi Pangan	PN-1, PP3
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	PN-1, PP4
5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	PN-1, PP5
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	PN-1, PP6
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	PN-1, PP7
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	PN-1, PP8
II	**Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**	**PN-2**
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	PN-2 PP-1
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	PN-2 PP-2
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	PN-2 PP-3
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	PN-2 PP-4
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	PN-2 PP-5
6	Pengentasan kemiskinan	PN-2 PP-6
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	PN-2 PP-7
III	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**	**PN-3**
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan Berkarakter	PN-3, PP1
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	PN-3, PP2

Sebagai Ibu Kota Provinsi maka Pembangunan Kota Banda Aceh juga berpedoman pada rencana pembangunan Aceh. Merujuk pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 dirumuskan 14 (empat belas) isu pembangunan Aceh yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana; dan
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan;

Seluruh isu pembangunan di atas disikapi pemerintah Aceh dengan menetapkan tujuan pembangunan Aceh periode 2023-2026, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Demokrasi;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional;
3. Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat Kesehatan;
5. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak social Ekonomi Covid-19;
6. Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana; dan
7. Meningkatkan Penguatan Perdamaian.

Agar tujuan pembangunan dapat dicapai dengan baik maka disusun arah kebijakan pembangunan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahunan pemerintah Aceh. Arah pembangunan tahunan periode 2023-2026 yaitu:

1. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah “Meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat untuk penurunan angka pengangguran dan kemiskinan dalam rangka mengatasi dampak social ekonomi dari *covid-19*”.
2. Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 adalah “Meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan pemenuhan hak-hak sipil, politik, social, ekonomi masyarakat dan mensukseskan agenda politik pemilihan umum legislative dan pemilihan umum kepala daerah secara serentak”.
3. Arah Kebijakan pembangunan tahun 2025 adalah “Pembangunan infrastruktur strategis untuk mengurangi ketimpangan wilayah dengan tetap menjaga kelestasian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta meningkatkan perdamaian”.
4. Arah Kebijakan pembangunan tahun 2026 adalah “Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan peningkatan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiscal”.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026 mengacu kepada RPJP Kota Banda Aceh 2007–2027 dengan visi RPJP “Terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami”. *Tamaddun* berasal dari bahasa Arab “*maddina*” yang artinya *Kota*. Kemudian berubah menjadi *tamaddana* dalam pengertian proses pengupayaan untuk sebuah kota yang mempunyai sifat dan karakter kemajuan. *Maddana* berarti membina bandar-bandar atau kota-kota. Kata *tamaddun* lebih menekankan kepada aspek kehidupan kota dan hidup kekotaan masyarakat yang tersusun dengan aturan-aturan dan memiliki peradaban (*civilization*) yang tinggi dan dilandasi oleh nilai-nilai yang Islami.

Modern diartikan dengan kemampuan berkembang dalam pemikiran yang cerdas dan cara hidup yang teratur dengan tetap menghormati kearifan atas dasar nilai-nilai utama yang telah

dimiliki. *Islami* diartikan bahwa nilai-nilai Islam dijadikan sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan sehari-hari.
Pada periode 5 (lima) tahun terakhir masa pelaksanaan RPJP Kota Banda Aceh, penyusunan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 mengacu kepada 7 (tujuh) Misi RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027, yaitu:

1. Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum.
3. Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota pendidikan yang berkualitas.
5. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan.
6. Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas.
7. Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata berbasis masyarakat dan budaya Islami.

Upaya mewujudkan visi RPJP Kota Banda Aceh tahun 2007-2027 tercermin dalam capaian RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yang merupakan periode 5 (lima) tahun yang ketiga dalam RPJP Kota Banda Aceh. Capaian indikator kinerja daerah selama periode 2017-2022 tersebut memberikan hasil capaian kinerja yang membanggakan. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang tercermin dalam indikator makro pembangunan. Pada tahun 2017, pencapaian indikator kinerja daerah menunjukan hasil yang membanggakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh tahun 2017 sebesar 83,95 meningkat menjadi 85,71 pada tahun 2021. Capaian IPM ini merupakan IPM terbaik ke dua nasional setelah IPM Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Banda Aceh berhasil menjaga kestabilan Inflasi pada kisaran 3± 1 persen, dimana Inflasi pada tahun 2017 4,86 persen dan Inflasi pada tahun 2021 sebesar 2,41 persen. Pendapatan perkapita meningkat dari Rp 62,94 juta pertahun pada tahun 2017 menjadi Rp 78,6 juta pertahun pada tahun 2021. Peningkatan pendapatan perkapita diikuti dengan semakin meratanya pendapatan distribusi pendapatan pada tahun 2020 (rasio gini 0,303), namun *gini ratio* pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,347 akibat pandemi *Covid-19* . Pandemi *Covid-19* juga menyebabkan persentase penduduk miskin di Kota Banda Aceh meningkat pada tahun 2021 (7,61 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (2020) yaitu sebesar 6,90 persen. Namun demikian, persentase kemiskinan Kota Banda Aceh ini masih berada di bawah persentase kemiskinan Aceh (15,53 persen).

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Mengingat bahwa RPD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, maka RPD Kota Banda Aceh memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2023–2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPD Kota Banda Aceh dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026.

RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPD disusun dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional. Penyusunan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dengan tahun pertama perencanaan 2023, merupakan Tahap IV (keempat) RPJPD Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya yang akhirnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders)* pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;

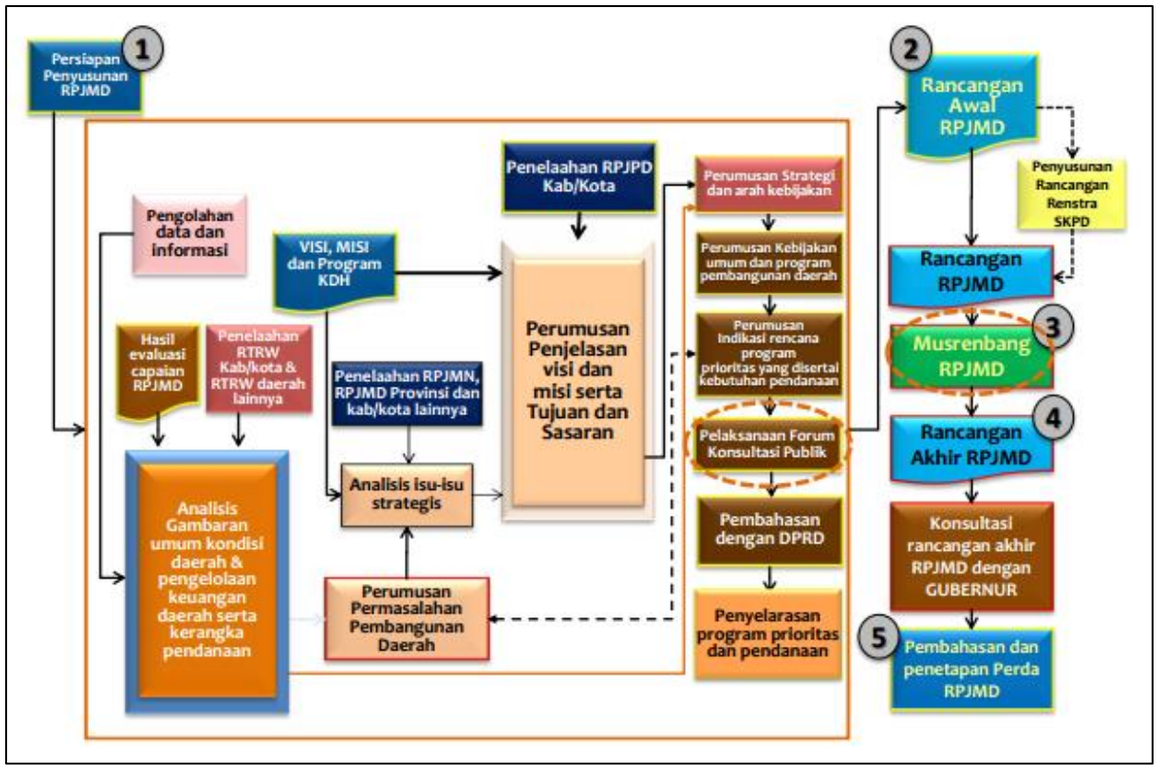
3. Pendekatan Atas-Bawah *(top-down*) dan Bawah-Atas *(bottom-up),* pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui forum Konsultasi publik Penyusunan Rencana pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, dan telah dilaksanakan secara konsisten.

Proses Penyusunan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

1. Bappeda Kota Banda Aceh bertanggung jawab menyusun Rancangan RPD Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan memperhatikan Rancangan Renstra OPD Tahun 2023-2026;
2. OPD menyusun Rancangan Renstra OPD Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta Rancangan RPD Tahun 2023-2026;
3. Bappeda Kota Banda Aceh melakukan Forum Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRK, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
4. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RPD Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra OPD Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi;
6. Sebelum ditetapkan menjadi RPD Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir RPD Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Bappeda Aceh dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi bappeda Aceh;
7. Surat Rekomendasi bappeda Aceh menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPD Tahun 2023-2026;
8. Rancangan Akhir RPD Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappeda Kota Banda Aceh kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
9. RPD Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra OPD Tahun 2023-2026;
10. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra OPD Tahun 2023-2026;
11. Rancangan Akhir Renstra OPD Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Proses penting lainnya dalam penyusunan RPD Kota Banda Aceh ini adalah pemahaman awal posisi Kota Banda Aceh yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor implementasi syariat Islam, karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 2
Proses Penyusunan RPD Kota Banda Aceh

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023 –2026 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukan bahwa RPD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
2. RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal dan Bappeda;
3. RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala SKPD selama 4 (empat) tahun;
4. RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selaras dengan arah kebijakan provinsi;
5. RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007–2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
23. Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai sebuah dokumen perencanaan dengan jangka menengah, maka Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Aceh. Penyusunan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026 memperhatikan pada RPJM Nasional, serta RPD Provinsi Aceh.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka diperlukan telaah terhadap rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN terutama rencana pembangunan yang terkait dan

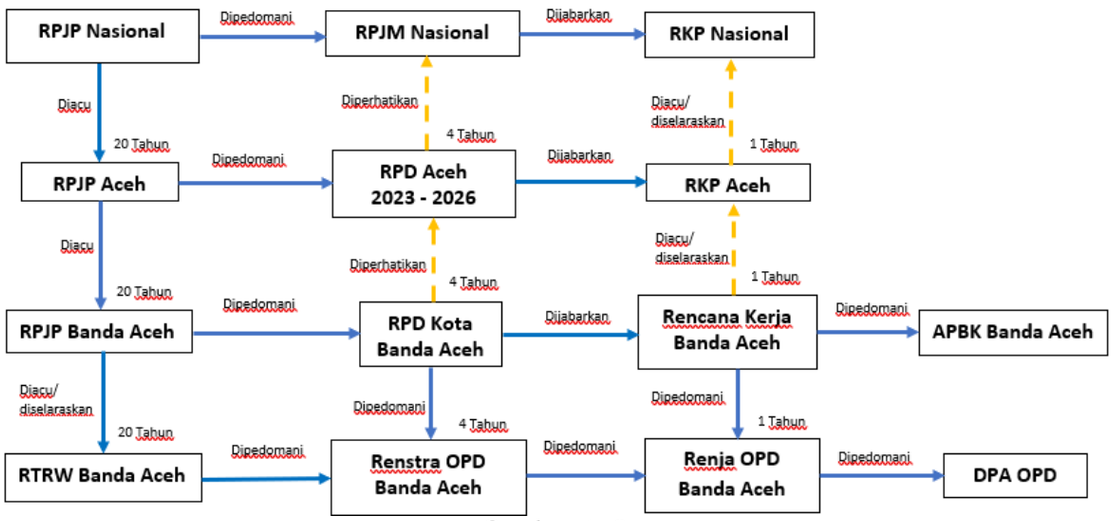
mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, telaah perlu dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Banda Aceh 2007–2027, Rencana Pembangunan Aceh 2023–2026 dan proyeksi data makro Banda Aceh.

Telaahan sebagaimana tersebut di atas dilakukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan yang bersinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

RPJMN 2020-2024 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **Terwujudnya Indonesia Maju, yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.**
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan berwibawa.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kegara kesatuan.

Adapun hubungan RPD dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 1. 3
Hubungan RPD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

Secara lebih terperinci hubungan antara RPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RPD Kota Banda Aceh berpedoman pada RTRW Kota Banda Aceh yaitu dengan menyelaraskan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kota. Penyusunan RPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.
2. Memperhatikan RTRW daerah regional, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2007-2027 juga merupakan pedoman yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPD dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Banda Aceh, yang kemudian akan dijabarkan secara tahunan kedalam dokumen RKPK. Renstra juga menjadi pedoman dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD yang mengacu pada RKPK. Pada akhirnya RKPK menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBK. RPD memiliki perbedaan mendasar dengan RPJMD. Beberapa perbedaan tersebut antara lain tercantum dalam Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1. 2
Perbedaan RPJMD dan RPD

No	Rincian	RPJMD	RPD
1	Masa Berlaku	5 tahun	4 tahun
2	Sifat Dokumen	Dokumen Politis yang bersumber dari visi dan misi kepala daerah terpilih	Dokumen teknis yang tidak bersumber dari Visi dan Misi Kepala Daerah
3	Kepala Daerah	Kepala Daerah Definitif	Pejabat Kepala Daerah
4	Bentuk Produk Hukum	Qanun	Peraturan Walikota
5	Keterlibatan DPRK	intensif	Hanya dalam Konsultasi Publik
6	Tahapan Penyusunan	Kompleks sesuai Permendagri 86/2017	Sederhana (Konsultasi Publik dan Fasilitasi Bappeda Aceh) menurut Inmendagri 70/2021
7	Dasar Hukum Penyusunan	Permendagri 86/2017	Permendagri 86/2017, PMDN 050/5889/2021, Inmendagri 70/2021
8	KLHS	Membutuhkan KLHS dalam penyusunan RPJM	Tidak Membutuhkan KLHS dalam penyusunan RPD

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026 ini adalah untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi RPJPD Kota Banda Aceh dalam bentuk strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD, KUA PPAS dan APBK Tahun 2023-2026;
3. Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan Tahun 2023-2026;
5. Merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi *Covid-19* dan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026;
7. Sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Banda Aceh dalam periode 2023–2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPD Kota Banda Aceh 2023–2026 ini adalah:

1. Menjabarkan agenda-agenda pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dan merumuskan dalam Renstra SKPD periode 2023–2026;
2. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Menetapkan berbagai program prioritas, dan arah kebijakan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023–2026.
4. Menetapkan indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2023–2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencaan Pembangunan

Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika tulisan.
BAB II GAMBARAN UMUM
Gambaran umum menguraikan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.
BAB III GAMBARAN KEUANGAN
Gambaran keuangan menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan dan isu strategis yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam dokumen RPJM karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Isu Strategis berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan, serta isu-isu yang berkembang secara Nasional dan International.
BAB V TUJUAN, DAN SASARAN
Dalam Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati.
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat program prioritas dalam tujuan dan sasaran pembangunan serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan sasaran Pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).
BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Banda Aceh

Gambaran Umum Kota Banda Aceh menguraikan beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.

Aspek geografi dan demografi menjelaskan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi, dan sosiologi.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah membahas luas dan batas wilayah administrasi, topografi, geogologi, geomorfologi, hidrologi, dan klimatologi.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

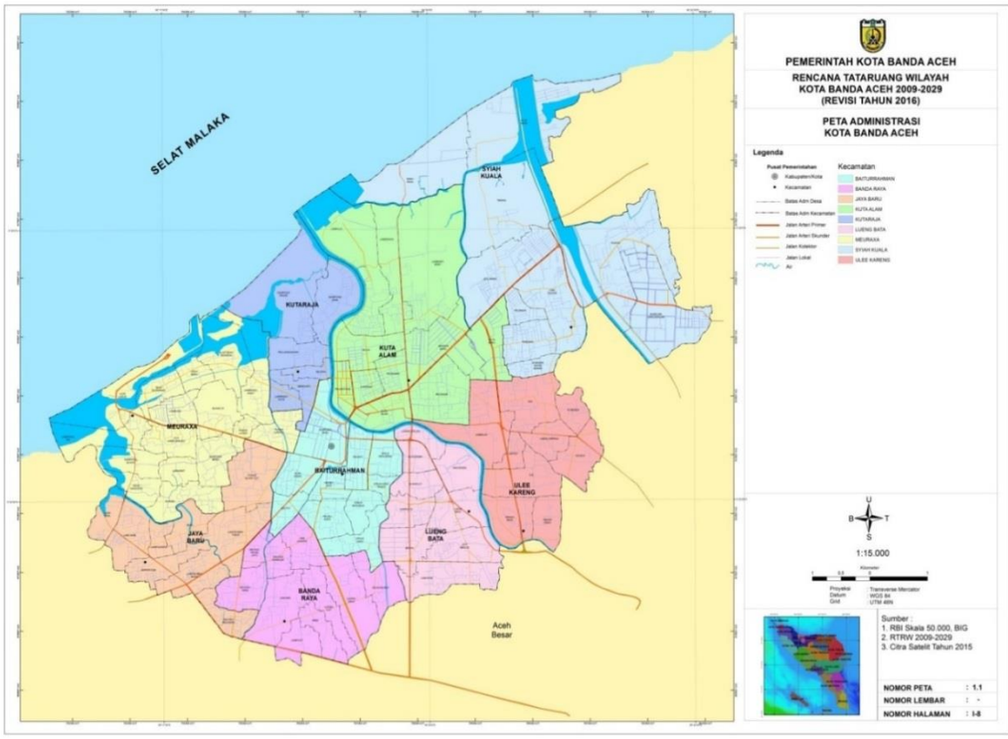
Secara geografis, letak Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat strategis. Kota Banda Aceh berada di bagian barat Indonesia dengan letak geografis berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT. Kota ini terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 90 Gampong. Luas wilayah Kota Banda Aceh secara administratif adalah 61,36 km^2 atau 6136 Ha, namun berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh secara spasial mengalami perubahan luas wilayah yaitu menjadi 59,002 km^2. Berkurangnya luas wilayah tersebut akibat adanya bagian daratan di pesisir sepanjang garis pantai Kota Banda Aceh yang masuk ke area perairan laut dan penyesuaian tapal batas gampong setelah terjadinya bencana Tsunami 2004. Luas wilayah administrasi Kota dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas Secara administrasi		Luas secara Digitasi Spasial	
		(Km²)	Persentase	(Km²)	Persentase
1	Kec. Meuraxa	7,260	11,83	8,459	14,34%
2	Kec. Baiturrahman	4,540	7,40	4,142	7,02%
3	Kec. Kuta Alam	10,050	16,38	9,587	16,25%
4	Kec. Syiah Kuala	14,240	23,21	13,591	23,03%
5	Kec. Ulee Kareng	6,150	10,02	5,182	8,78%
6	Kec. Banda Raya	4,790	7,81	4,949	8,39%
7	Kec. Kuta Raja	5,210	8,49	3,889	6,59%
8	Kec. Lueng Bata	5,340	8,7	4,445	7,53%
9	Kec. Jaya Baru	3,780	6,16	4,759	8,07%
Jumlah		**61,360**	**100,00**	**59,002**	**100,00**

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2021

Luas Wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018) dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh

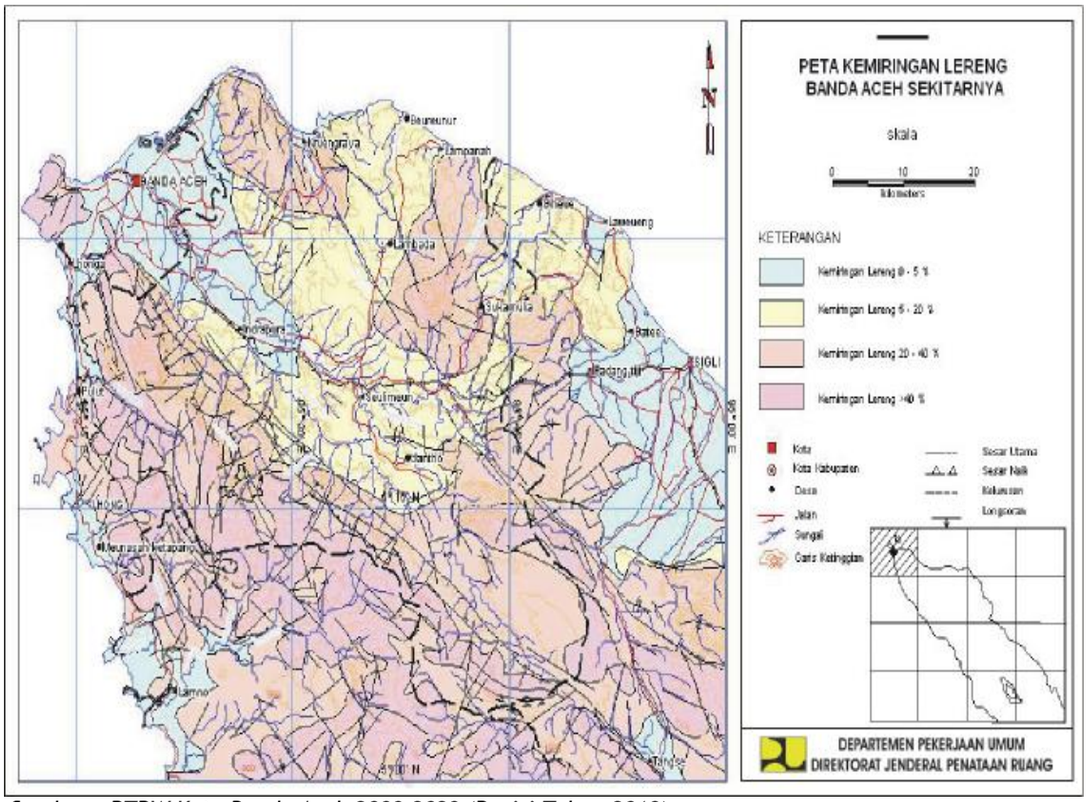
Secara administrasi batas-batas wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Selat Malaka
Sebelah Timur	:	Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Selatan	:	Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Barat	:	Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

B. Topografi

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara -0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2-8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian Utara atau pesisir pantai.

Dalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70% wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah Barat dan Timur dan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut. Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah Timur dan Selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut. Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 2
Peta Kemiringan Lereng Banda Aceh

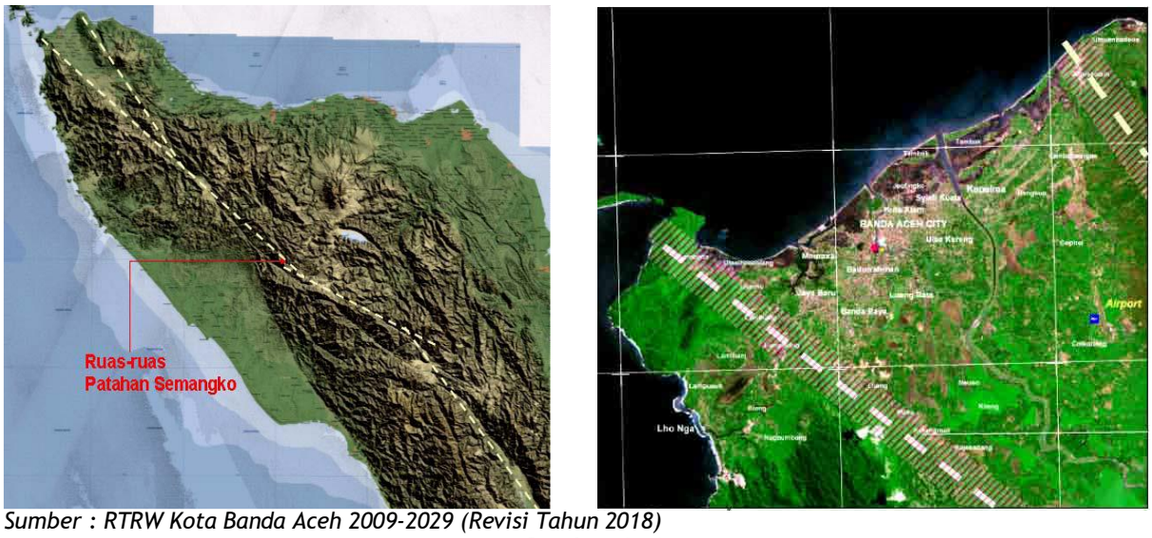
Berdasarkan Gambar 2.2 di atas dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh terletak pada dataran rendah dengan kemiringan 0-5%.

C. Geologi

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (*Semangko Fault*). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor. Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak ±130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap Tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :

- Alluvium
- Batuan Kuarter (sedimen dan volkanik)
- Batuan Tersier (sedimen dan volkanik)
- Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier

Untuk mengetahui kondisi geologi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 3
Kondisi Geologi Kota Banda Aceh

Pada Gambar 2.3 di atas menunjukkan ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukan-nya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota.

D. Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam. Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi dataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa. Daerah dataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/ koluvial dari daerah sekitarnya.

E. Hidrologi

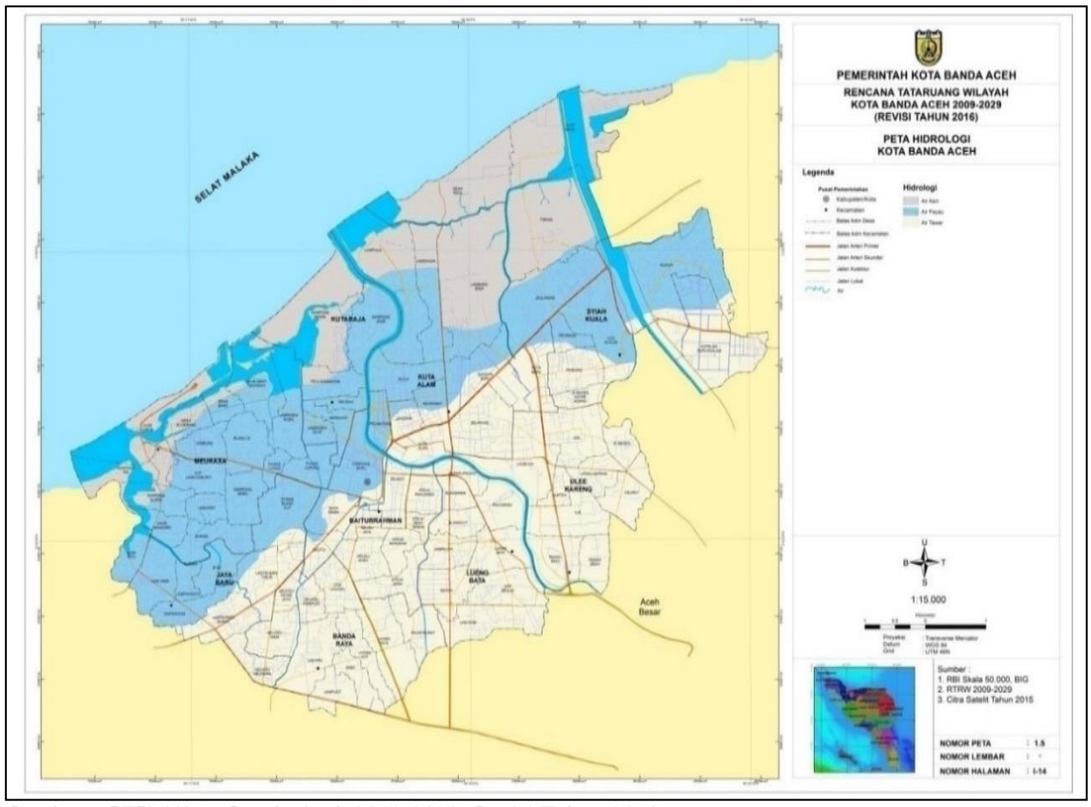
Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi diantaranya sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku dankegiatan perikanan. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng danKecamatan Banda Raya. Untuk mengetahui nama sungai dan panjang alirannya, dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2
Nama Sungai dan Panjang Alirannya di Kota Banda Aceh

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Krueng Aceh	723,60
2	Krueng Daroy	3,60
3	Krueng Doy	2,00
4	Krueng Neng	4,10
5	Krueng Lueng Paga	26,33
6	Krueng Tanjong	2,25
7	Krueng Titi Panjang	1,60
8	Krueng Kon Keumeh	3,27
9	Krueng Geunasen	1,25

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Peta Hidrologi di Kota Banda Aceh dapat di lihat pada Gambar 2.4 berikut ini.



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 4
Peta Hidrologi Kota Banda Aceh

F. Klimatologi

Menurut Schmidt dan Ferguson, untuk menentukan tipe iklim adalah dengan menghitung angka perbandingan antara rata-rata bulan kering (BK) dengan bulan basah (BB) dikali 100%. Bulan kering ditandai dengan jumlah curah hujan kurang dari 60 mm, sedangkan bulan basah adalah jumlah curah hujan di atas 100 mm. Kondisi iklim Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Kondisi Klimatologi Kota Banda Aceh Tahun 2020

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu (°C)	Kelembaban (%)
1	Januari	16.8	3	27	79
2	Februari	121.5	9	26.8	79
3	Maret	56.7	7	27.4	80
4	April	133.4	14	27.1	84
5	Mei	388.9	21	27	86
6	Juni	124.9	10	27.3	80
7	Juli	177.6	10	26.8	82
8	Agustus	95.1	7	27.4	78
9	September	109.1	13	26.6	81

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu (°C)	Kelembaban (%)
10	Oktober	101.2	14	26.8	78
11	November	225.9	20	26	88
12	Desember	284.8	18	26	87
Jumlah		1835.9	146	-	-
Rata-rata		153.0	12.2	26.9	81.8

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021

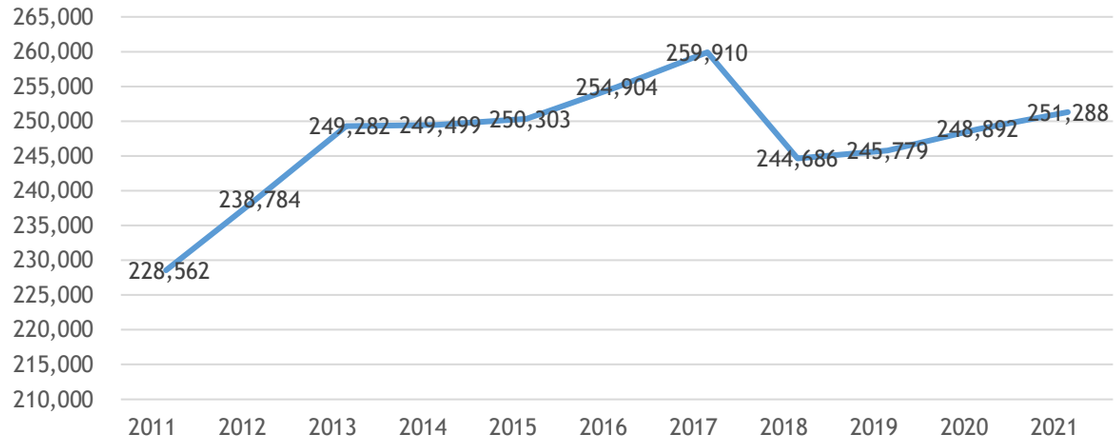
Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa curah hujan Kota Banda Aceh terbesar pada Tahun 2020 terjadi pada Bulan Mei yaitu sebesar 388,9 mm dan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Januari sebesar 16,8 mm yang berlangsung selama 3 (tiga) hari. Hari hujan terlama terjadi pada bulan Mei dan Bulan November, masing-masing selama 21 dan 20 hari. Secara keseluruhan, Jumlah curah hujan selama tahun 2020 yaitu sebesar 1835,9 mm, dengan rata-rata 153 mm/bulan. Rata-rata suhu udara pada Tahun 2020 adalah 26,9^{0}C dengan kelembaban rata-rata sebesar 81,8%. Dari hasil perbandingan BK dan BB didapatkan nilai Q sebesar 0,20 yang menunjukkan tipe iklim pada Kota Banda Aceh termasuk iklim tipe B (iklim basah).

2.1.1.2 Demografi

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi Kota Banda Aceh menguraikan jumlah penduduk, struktur dan indeks ketergantungan penduduk.

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah penduduk yang tercatat sebagai warga Kota Banda Aceh. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sebanyak 251.288 jiwa. Dibawah ini adalah jumah penduduk di Kota Banda Aceh dalam 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2011-2021.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 5
Jumlah Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2021 (Jiwa)

Jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mengalami perubahan yang fluktuatif. Perubahan ini cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2017, jumlah penduduk sebanyak 259.910 jiwa dan menurun menjadi 244.686 pada tahun 2018. Jumlah penduduk ini kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 2,24 persen dari 245.779 jiwa menjadi 251.288 jiwa pada tahun 2021.

B. Struktur dan Indeks Ketergantungan Penduduk

Selain dari jumlah penduduk, struktur kependudukan lainnya adalah pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan ratio jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Pertumbuhan jumlah penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk ini digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk suatu satuan wilayah yang dibagi dengan luas daerah tersebut. Kepadatan penduduk dinyatakan sebagai penduduk per km^2. Sedangkan ratio jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah perbandingan antara

jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dalam suatu daerah dengan periode waktu tertentu. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2. 4
Indikator Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

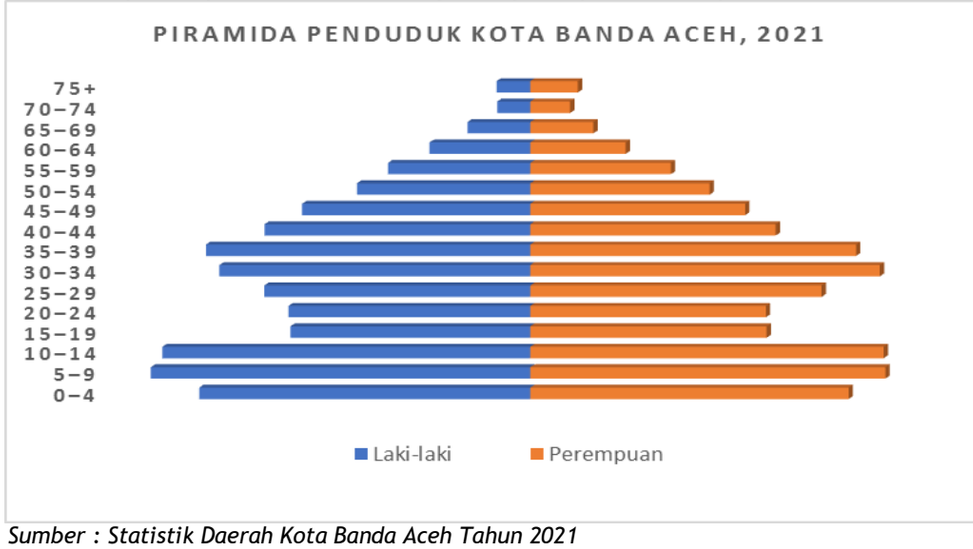
Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	Jiwa	259.910	244.686	245.779	248.892	251.288
Pertumbuhan	%	1,96	2,00	1,97	1,21	1,72
Kepadatan	Ribu Jiwa/km	4,24	4,32	4,41	4,12	4,10
Sex Ratio	%	106	105,93	105,84	102	100,24

Sumber : Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2021

Laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh mengalami peningkatan di tahun 2017 sampai dengan 2018, namun mengalami penurunan di tahun 2019 dan terus menurun di tahun 2020. Di tahun 2021, mengalami kenaikan kembali dari 1,21 menjadi 1,72 persen. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.240 jiwa per km^2 di tahun 2017 dan terjadi penurunan sampai dengan tahun 2021 menjadi 4.100 jiwa per km^2. Penurunan jumlah kepadatan penduduk ini memberikan arti bahwa terjadinya pengurangan jumlah penduduk di daerah tersebut.

Ratio penduduk Kota Banda Aceh berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh penduduk laki-laki dibandingkan dengan perempuan di tahun 2021. Data dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, ratio penduduk berdasarkan jenis kelamin menurun dari 106 menjadi 100,24. Artinya jumlah penduduk perempuan hampir menyamai jumlah penduduk laki-laki. Data tahun 2020 dan 2021 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki mengalami penurunan dari 127.435 jiwa menjadi 125.795 jiwa dan jumlah penduduk perempuan meningkat dari 125.464 jiwa menjadi 125.493 jiwa.

Piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida ini terdiri dari dua diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut.



Sumber : Statistik Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021

Gambar 2. 6
Piramida penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2021

Bila dilihat dari piramida penduduk pada gambar atas, Kota Banda Aceh didominasi penduduk dengan jenis kelamin perempuan dan usia anak-anak. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 26.404 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 10-14 tahun sebanyak 25.920 jiwa dan penduduk umur 30-34 tahun sebanyak 23.734 jiwa.

Indeks ketergantungan penduduk menjelaskan tentang gambaran perbandiangan antara jumlah penduduk produktif dengan jumlah penduduk tidak produktif. Kondisi indeks ketergantungan penduduk Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Banda Aceh 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia < 15 Tahun	71,727	169.031	167.582	75.845	75.667
2	Penduduk Usia > 64 Tahun	9,936	9.867	9.969	9.873	10.051
3	Penduduk Usia Tidak Produktif (< 15 tahun dan > 64 Tahun)	81,663	85.522	88.166	85.718	85.718
4	Penduduk Usia 15 – 64 Tahun	170,216	152.750	151.201	163.174	165.570
5	Rasio Ketergantungan	50,17	55,99	58,31	52,53	52,83

Sumber: BPS Pusat, BPS Propinsi Aceh dan BPS Kota Banda Aceh, 2021

Rasio ketergantungan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan, yang artinya jumlah penduduk produktif semakin banyak. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan 2021, jumlah ini mengalami penurunan. Jika dilihat dari struktur piramida penduduk di Kota Banda Aceh, diperkirakan Kota Banda Aceh akan mendapatkan bonus demografi dimana peduduk usia 15-64 tahun menjadi lebih banyak. Bonus demografi ini tentunya memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai daya saing melalui berbagai keahlian dan ketrampilan.

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

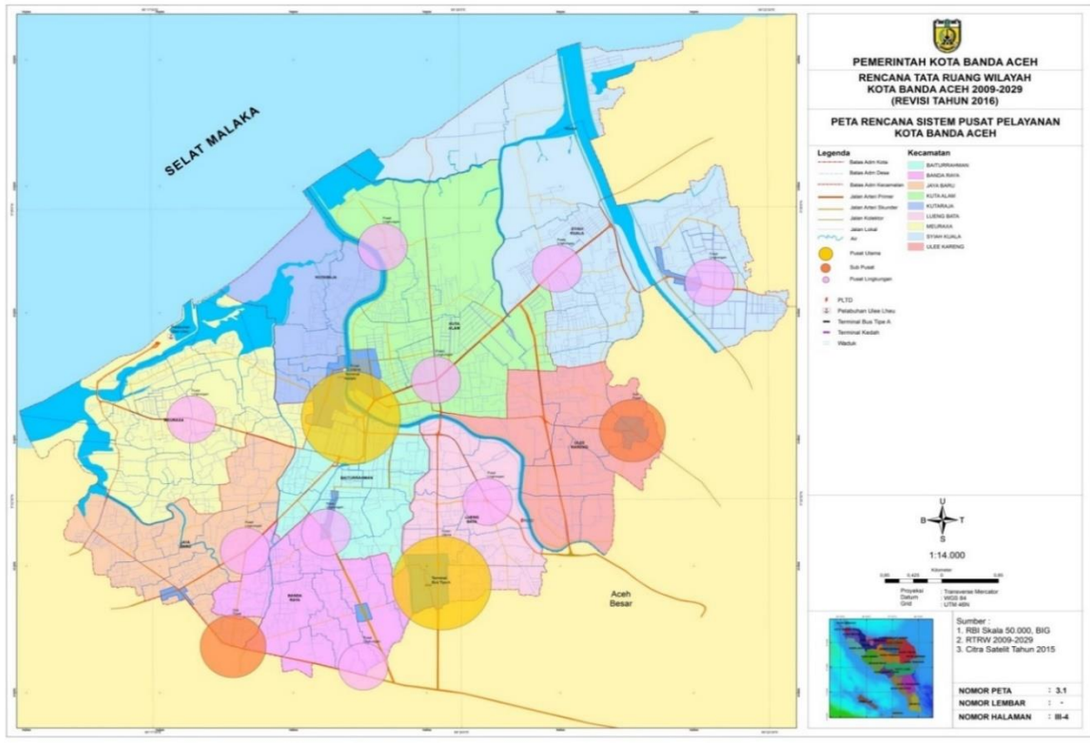
Dalam Sistem Perkotaan Nasional, Kota Banda Aceh ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana yang dikemukakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan status PKN juga sudah ditetapkan di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Penetapan Kota Banda Aceh sebagai PKN di dalam RTRW-Nasional merupakan suatu potensi kebijakan pengembangan wilayah Kota Banda Aceh untuk menjadi skala prioritas Nasional dalam pembangunan nasional.

A. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Rencana sistem pusat pelayanan dimaksudkan untuk memperjelas hirarki kota sesuai dengan struktur kota yang ditetapkan sehingga diperoleh suatu sistem pemanfaatan ruang yang optimal untuk setiap bagian kota. Dalam realitanya, pengembangan sistem pusat pelayanan akan mempermudah masyarakat kota untuk mendapatkan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam sistem struktur ruang Kota Banda Aceh, dikembangkan dengan Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan terdiri :

1. Pusat Kota Lama Pasar Aceh – Peunayong
2. Pusat Kota Baru Batoh/Lamdom
3. Sub Pusat Kota Lamtemen
4. Sub Pusat Kota Ulee Kareng



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 7
Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

Untuk lebih jelas mengenai sistem pusat pelayanan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.7 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh dan Tabel 2.6 Rencana pusat-pusat Pelayanan Kota Banda Aceh berikut ini.

Tabel 2. 6
Rencana Pusat - Pusat Pelayanan Kota Banda Aceh

No	Pusat Pelayanan / Subpusat Pelayanan/ Unit Lingkungan	Fungsi	Skala Pelayanan
A.	Pusat Kota		
1.	Peunayong / Kampung Baru (Pusat Kota Lama)	• Pusat pemerintahan Kota Banda Aceh • Perdagangan dan Jasa • Perkantoran	Regional & Kota
2.	Batoh/Lamdom (Pusat Kota Baru)	• Pusat pemerintahan / perkantoran yang baru • Pusat perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional Regional & Kota
B.	Sub Pusat Kota		
1.	Lamtemen	• Perdagangan dan Jasa • Permukiman	Regional dan Lokal
2.	Ulee Kareng	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
C.	Pusat Lingkungan		
1.	Lampulo	• Pelabuhan ikan • Galangan kapal • Industri pengolahan ikan • Perumahan nelayan	Regional & Kota
2.	Jambo Tape	• Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) • Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan Lokal
3.	Neusu	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal
4.	Kopelma Darussalam	• Pendidikan • Perdagangan dan jasa	Regional Kota dan lokal
5	Jeulingke	• Pusat Pemerintahan Prov Aceh & Perkantoran Provinsi Aceh (eksisting) • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional Kota dan Lokal
6	Lueng Bata	• Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan lokal

7	Mibo	• Pusat Pemerintahan dan Perkantoran Kota Banda Aceh • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Kota dan Lokal
8	Blang Oi	• Perdagangan dan jasa • Permukiman • Perikanan • Pelabuhan • Wisata	Kota dan lokal Regional dan Lokal
9	Lamteumen	• Perkantoran • Perdagangan dan jasa • Permukiman	Regional, Kota dan lokal

Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

B. Rencana Pengembangan Kawasan Pusat Kota Lama Kota Banda Aceh

Rencana pengembangan kawasan pusat kota lama Kota Banda Aceh, bertujuan untuk meningkatkan nilai *heritage* kawasan pusat kota lama, sehingga meningkatkan nilai historis Kota Banda Aceh. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian dalam rencana ini adalah:

1. Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman

Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman bertujuan untuk meningkatkan nilai historis dan memberikan citra baru terhadap *landmark* Provinsi Aceh, sehingga kawasan ini dapat terpadu sebagai kawasan *heritage* dengan kawasan komersial Kota Banda Aceh yang memiliki nilai yang tinggi terhadap fungsi dan citra kawasan. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan terhadap pengembangan kawasan ini adalah peningkatan *landmark* Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh serta mendukung penataan kawasan *water front city,* dimana Sungai Krueng Aceh dan jembatan Pante Pirak menjadi salah satu gerbang masuk ke kawasan Mesjid Raya Baiturrahman. Adapun luas kawasan yang akan digunakan untuk area pengembangan Mesjid Raya Baiturrahman ini adalah sekitar 12,08 Ha, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.8 Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 8
Kawasan Pengembangan Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman

2. Pengembangan Kawasan CBD Peunayong

Rencana Pengembangan Kawasan CBD Peunayong terdiri atas dua rencana pengembangan ; (1) Pengembangan Kawasan Terminal Keudah, yang terintegrasi dengan zona komersial; dan (2) Pengembangan Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah-Peunayong. Pengembangan kawasan ini adalah untuk me-revitalisasi kawasan Pusat Kota Lama kawasan Peunayong.

3. Pengembangan Kawasan Terminal Keudah

Pengembangan Kawasan Terminal Keudah bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik di Kota Banda Aceh, meningkatkan akses dan kenyamanan publik terhadap transportasi publik. Rencana pengembangan kawasan ini mengadaptasikan konsep *mix-use building*, dimana Kawasan Terminal Keudah akan diarahkan untuk menjadi kawasan *one-stop shopping*, sehingga kawasan ini mampu untuk menjadi titik transit bagi pengguna angkutan umum. Kawasan ini juga akan diarahkan untuk memiliki ruang parkir yang luas dan terintegrasi dengan sisi Barat (Jl. Tentara Pelajar) sebagai pintu masuk dan sisi Timur (Jl. Cut Mutia) sebagai pintu keluar. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pengembangan kawasan ini dapat dilihat pada Gambar 2.9. Rencana Pengembangan *Central Bussiness District* (CBD) Keudah berikut ini

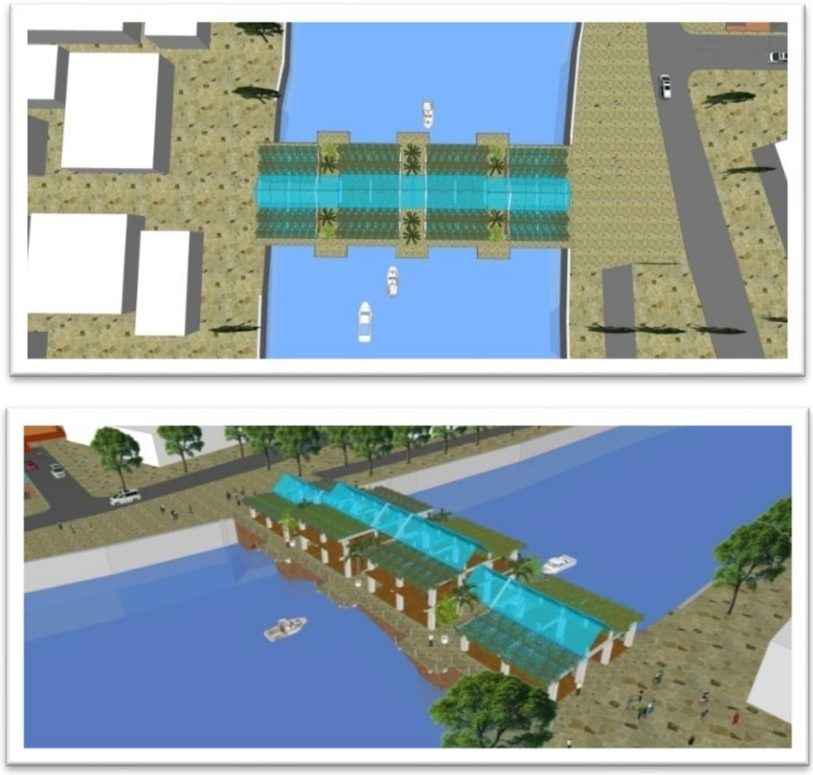


Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 9
Rencana Pengembangan Central Bussiness District (CBD) Keudah

4. Rencana Jembatan Penyebrangan Pedestrian Keudah-Peunayong

Jembatan penyebrangan pedestrian Keudah-Peunayong direncanakan selain fungsinya sebagai jembatan penyebrangan pedestrian, juga akan memiliki fungsi sebagai daya tarik antara Peunayong dan Keudah, jembatan ini diarahkan untuk dapat menciptakan ruang publik yang terpadu dengan kawasan perdagangan dan jasa (dengan spesialisasi kuliner; restoran, warung kopi, dan cafe). Konsep rencana pengembangan ini dapat dilihat pada Gambar 2.10 Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong berikut ini:



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 10
Konsep Pengembangan Jembatan Keudah-Peunayong

5. Rencana Lanjutan Pembangunan Nurul Arafah Islamic Center

Rencana pembangunan Nurul Arafah Islamic Center telah diselesaikan dokumen perencanaan pembangunannya dan pembebasan sebahagian lahan lokasi pembangunan. Lokasi Nurul Arafah Islamic Center berada di kawasan Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa. Rencana pembiayaan pembangunan Nurul Arafah Islamic Center ini bersumber dari pemerintah pusat dan investor. Gambar rencana pembangunan Nurul Arafah Islamic Center ini dapat dilihat pada Gambar 2.11.



Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 11
Rencana Pembangunan Nurul Arafah Islamic Centre

C. Penggunaan Lahan

Berdasarkan kondisi saat ini, kecenderungan perkembangan Kota Banda Aceh lebih mengarah pada bagian timur dan bagian selatan kota. Di bagian timur, berada di wilayah Ulee Kareeng

dan sekitarnya. Kawasan Ulee Kareng, saat ini telah didominasi oleh aktivitas perdagangan dan jasa dan aktivitas permukiman. Kawasan Ulee Kareeng semakin berkembang akibat adanya pergeseran atau perembetan perkembangan fisik kota dikarenakan kawasan ini tidak ikut terkena dampak bencana tsunami. Ditambah dengan lokasinya yang tidak jauh darikawasan pusat pendidikan yakni Kopelma Darussalam (IAIN, dan Unsyiah) dan Lampoh Keudee (Universitas Abulyama), kemudian menarik aktivitas lain seperti permukiman yang terlihat dari tingginya alih fungi lahan dari ex-persawahan menjadi permukiman – permukiman baru. Sedangkan untuk bagian selatan, perkembangan fisik kota sebagian bahkan telah merembet hingga ke wilayah kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan secara administratif, wilayah yang mengalami perkembangan berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Besar. Adapun perkembangan dibagian selatan ini meliputi sebagian wilayah kecamatan Baiturrahman (Neusu) dan kecamatan Banda Raya (Lamlagang, Lhong Raya, Lampeuot), dan wilayah Batoh dan Lamdom.

Perkembangan fisik kota dibagian selatan ini salah satunya dilatar belakangi karena bagian selatan ini tidak terkena dampak langsung bencana tsunami 2004 silam. Adapun aktivitas yang berkembang di bagian selatan ini meliputi aktivitas permukiman yang perdagangan dan jasa, permukiman dan olahraga (keberadaan Stadion Harapan Bangsa Lhoong Raya sebagai *sport center)*. Jenis penggunaan lahan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2. 7
Jenis Penggunaan Lahan di Kota Banda Aceh Tahun 2021

No.	Jenis Penggunaan	Luas Area (Ha)	Persentase
1	Pemukiman	1.105,92	18,74
2	Perkantoran dan Perdagangan	153,33	2,6
3	Fasilitas Kesehatan	16,04	0,27
4	Fasilitas Pendidikan	66,13	1,12
5	Pariwisata	7,14	0,12
6	Peribadatan	14,67	0,25
7	Olah Raga	11,25	0,19
8	Transportasi	1,59	0,03
9	RTH	232,03	3,93
10	Perairan	695,58	11,79
11	Jalan	377,71	6,4
12	TPA dan IPAL	0,62	0,01
13	Ruang Terbuka	3.218,62	54,54
14	Telekomunikasi	0,36	0,01
Jumlah		**5.900,99**	**100**

Sumber: PUPR Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 50 persen lahan di Kota Banda Aceh adalah ruang terbuka (3.218,62 Hektar), sedangkan pemukiman dan perairan masing-masing sebesar 18,74% (1.105,92 Hektar) dan 11,79 persen (695,58 Hektar). Penggunaan lahan untuk TPA dan IPA menempati bagian terkecl dari luas Kota Banda Aceh, yaitu seluas 0,62 Hektar (0,01 persen)

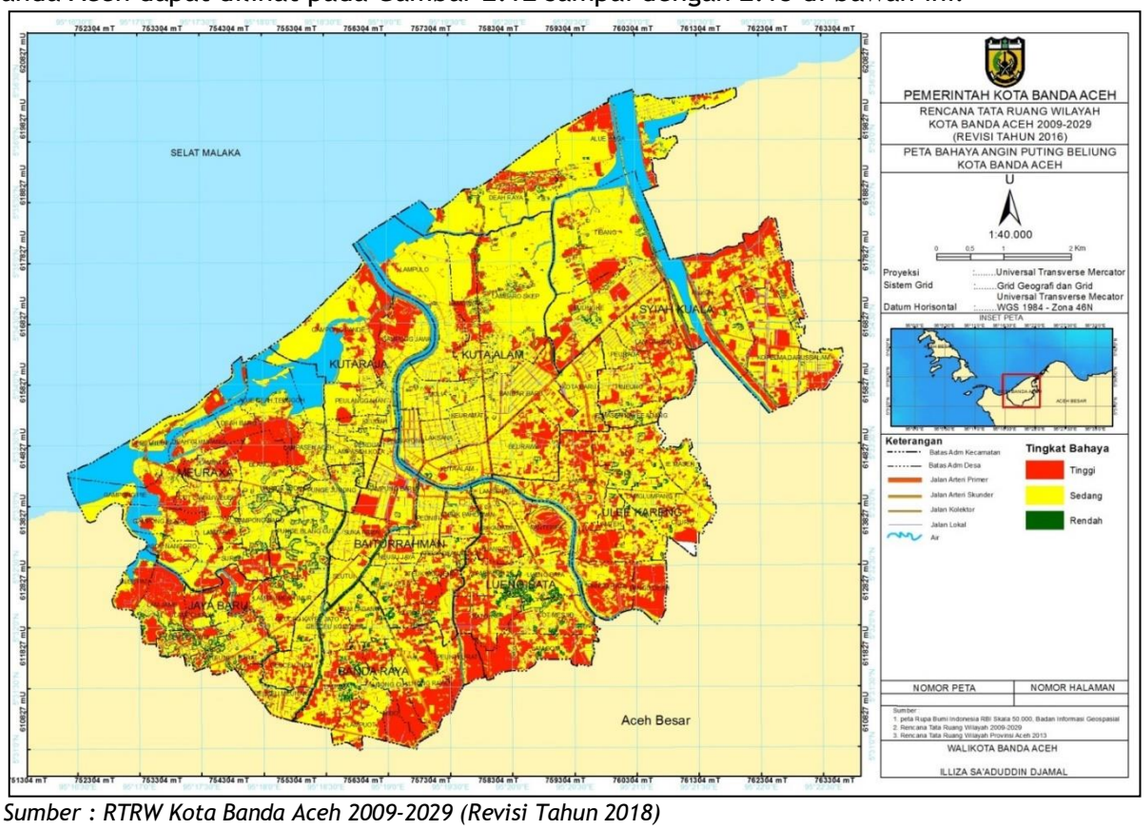
2.1.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Ditinjau dari wilayah rawan bencana, Kota Banda Aceh masih dalam kategori sedang. Berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Banda Aceh memiliki indeks resiko bencana dengan skor 127,31. Sementara itu, Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana Kota Banda Aceh berada pada kategori sedang dengan skor 0,58 pada tahun 2020. Adapun ancaman bencana di Kota Banda Aceh antara lain berupa:

1. Rawan bencana banjir
2. Rawan bencana gempa bumi
3. Rawan bencana tsunami
4. Ancaman kebakaran hutan dan lahan
5. Ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi
6. Ancaman tanah longsor
7. Ancaman kekeringan
8. Rawan bencana cuaca ekstrem

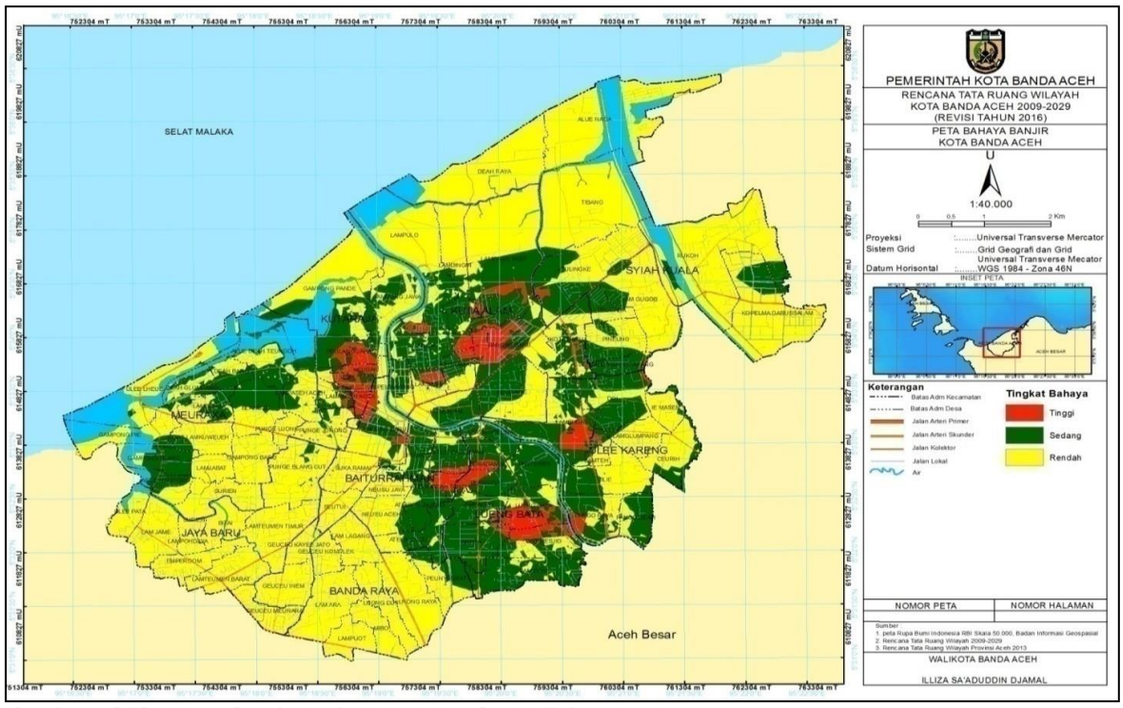
Kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan Banda Aceh ke depan baik dari segi penetapan struktur ruang dan pola ruang, maupun dalam menentukan pengaturan bangunan (*building*

code) dan manajemen mitigasi bencana. Untuk lebih jelasnya kawasan rawan bencana di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.12 sampai dengan 2.15 di bawah ini:



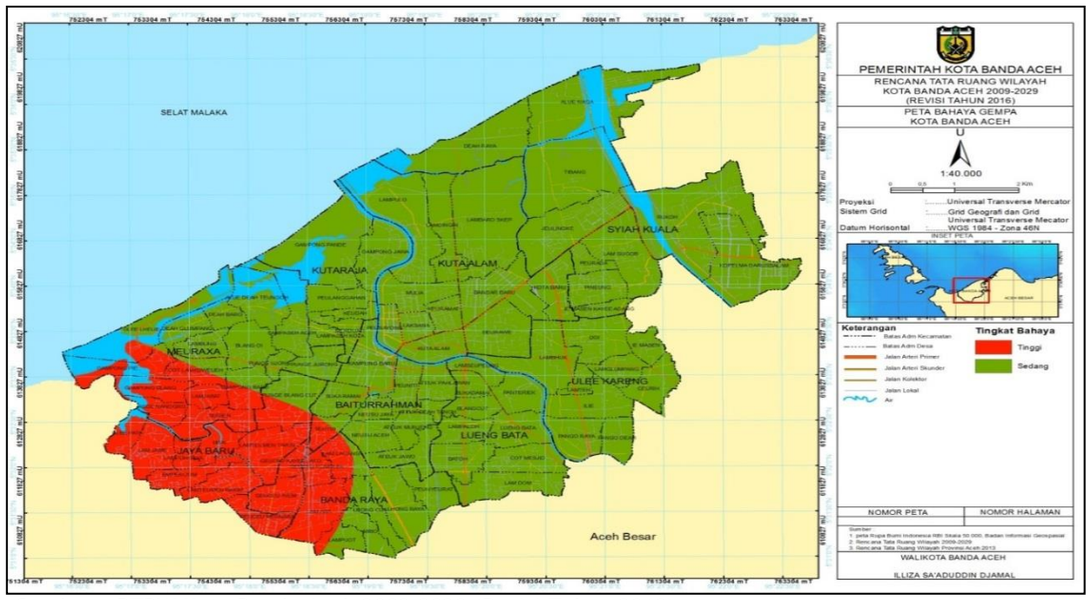
Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 12
Peta Bahaya Angin Puting Beliung Kota Banda Aceh



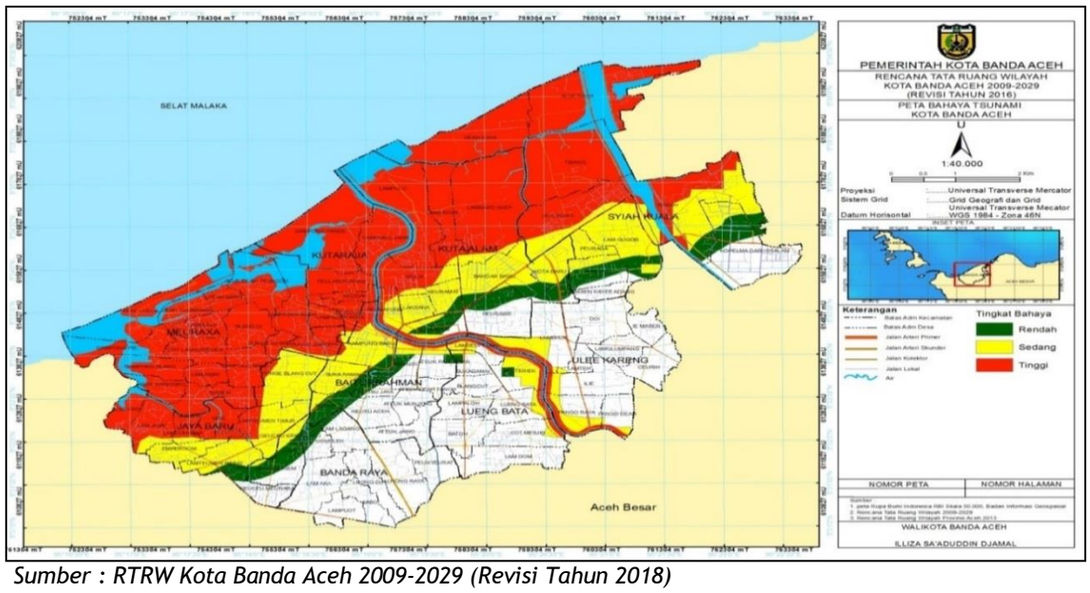
Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 13
Peta Bahaya Banjir Kota Banda Aceh



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 14
Peta Bahaya Gempa Kota Banda Aceh



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Revisi Tahun 2018)

Gambar 2. 15
Peta Bahaya Tsunami Kota Banda Aceh

2.1.1.5 Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Cara mempelajari ilmu sosiologi adalah dengan memeriksa dinamika bagian-bagian masyarakat penyusun, seperti institusi, komunitas, populasi, gender, ras, atau klompok umur. Sosiologi juga mempelajari status sosial atau stratifikasi, gerakan sosial, dan perubahan sosial. Selanjutnya juga mempelajari gangguan sosial dalam bentuk kejahatan, penyimpangan, dan revolusi. Penduduk Kota Banda Aceh sangat kental dengan nilai agama dan keislamannya. Hubungan yang dibangun oleh masyarakat selalu berdasarkan nilai, norma dan kaedah Islam. Tidak hanya melekat dalam kehidupan keseharian masyarakat, nilai keislaman ini juga melekat dalam tata pemerintahan Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh dan tatalaksananya sangat identik dengan syariat Islam yang diatur khusus dalam Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Dayah, dan MPU.

Dalam adat budaya, Kota Banda Aceh memiliki lembaga khusus yang menjaga adat istiadat Aceh melalui MAA (Majelis Adat Aceh). Pada tingkat provinsi, Aceh memiliki Lembaga Wali Nanggroe sebagai pemimpin adat di Aceh. Lembaga ini lahir sebagai bagian dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang mempunyai tugas sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, berwenang

untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

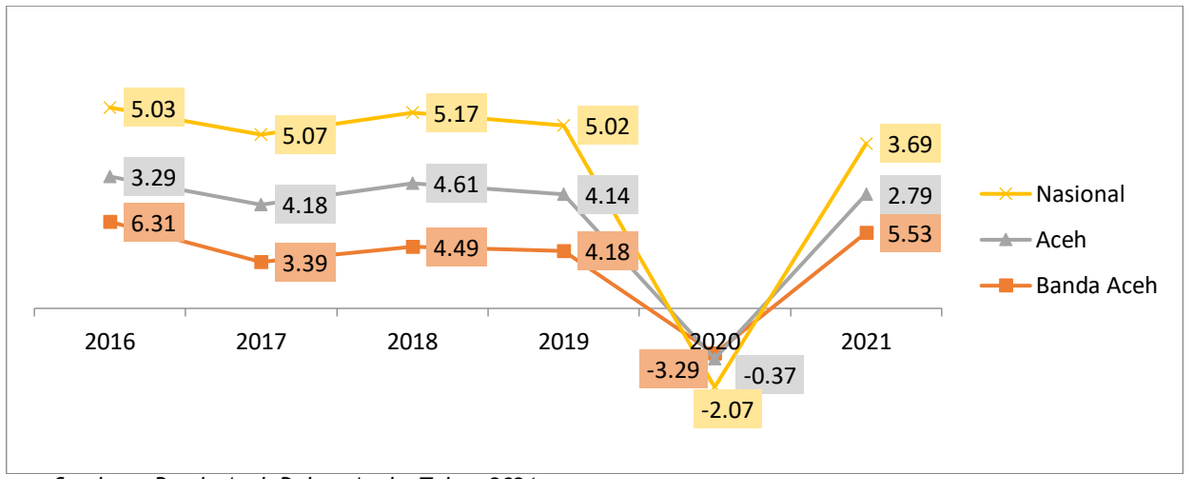
Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan seni budaya.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi membahas pertumbuhan PDRB, laju inflasi, perdapatan per kapita, indeks gini (ketimpangan pendapatan), kemiskinan, dan pengangguran.

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh selama periode 2016-2021, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Banda Aceh Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2. 16
Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2016-2021

Perekonomian Kota Banda Aceh sebagai kesatuan ekonomi yang menyeluruh digambarkan dengan PDRB menunjukkan trend yang fluktuatif. Setelah sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh pada tahun 2017 mengalami pelambatan dari 6,31 menjadi 3,39. Kemudian pada tahun 2018 mulai membaik atau meningkat 1.1 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami pelambatan kembali pada tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemi COVID-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami pelambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Pelambatan terjadi pada tahun 2019 sebanyak 0.31 persen dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya menurun drastis menjadi -3.29 di tahun 2020. Namun walau demikian, pasca pandemic COVID-19, pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh kembali meningkat menjadi 5,53 persen pada tahun 2021 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik.

Menurunnya nilai PDRB menunjukkan penurunan kinerja perekonomian. Pandemi *Covid-19* telah mengakibatkan penurunan perekonomian Kota Banda Aceh yang dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku selama lima tahun terakhir. PDRB ADHB secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp 497.160 milyar per tahun selama kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2020 PDRB meningkat sebesar Rp 2,48 triliun dari tahun 2016. Kenaikan PDRB selama 4 tahun terakhir disebabkan adanya peningkatan adminsitrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya sektor perdaganagn besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Kota Banda Aceh adalah pusat ibukota Provinsi Aceh menjadi tempat beraktivitas pemerintahan Provinsi Aceh. Struktur Kota Banda Aceh hingga tahun 2020 masih didominasi

oleh sektor jasa yakni Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kedua kategori tersebut memiliki peranan yang besar hingga 43,15 persen terhadap pembentukan PDRB (masing-masing 23,11 persen dan 20,04 persen). Namun peranan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung berkurang dari tahun ke tahun selama empat tahun terakhir (2017-2020).

Real estate dan jasa pendidikan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir mengalahkan sektor konstruksi yang mengalami pelambatan akibat pandemi *Covid-19*. Pengerjaan beberapa proyek infrastruktur berskala besar seperti Trans Studio Mall yang terhenti akibat pandemi *Covid-19* menjadi kegagalan dalam kegiatan ekonomi sebagai penyumbang nilai tambah yang besar sekaligus meningkatkan percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara keseluruhan.

Terdapat empat sektor yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2020 yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (23,11 persen), perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor (20,04 pesen). Sedangkan sektor lainnya masih dibawah 10 persen.

Tabel 2. 8
Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	154.320,8	0,98	169.581,9	1,02	196.534,6	1,12	219.587,4	1,18	235.258,97	1,29
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	317.841,1	2,01	375.895,6	2,25	397.586,0	2,26	391.352,9	2,11	374.717,93	2,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	47.729,5	0,30	57.299,5	0,34	62.381,3	0,35	68.619,2	0,37	70.512,82	0,39
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.900,1	0,12	21.275,0	0,13	22.666,9	0,13	30.672,7	0,17	30.268,36	0,17
6	Konstruksi	1.579.485,3	10,00	1.094.651,6	6,56	1.109.652,6	6,30	1.123.549,3	6,05	1.275.724,80	6,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.375.398,7	21,36	3.581.302,7	21,46	3.736.127.8	21,20	3.877.084,4	20,88	3.665.509,40	20,04
8	Transportasi dan Pergudangan	1.783.937,7	11,29	1.779.691,3	10,66	1.698.411,7	9,64	1.685.943,9	9,08	1.233.937,57	6,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	538.249,7	3,41	675.797,2	4,05	755.782,4	4,29	831.088,6	4,48	772.038,32	4,22
10	Informasi dan Komunikasi	957.348,3	6,06	972.007,0	5,82	910.508,0	5,17	910.234,0	4,90	999.394,57	5,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	459.951,1	2,91	505.976,1	3,03	530.561,6	3,01	608.614,9	3,28	621.614,75	3,40
12	Real Estate	1.081.187,3	6,84	1.289.289,0	7,73	1.439.289,0	8,17	1.598.126,9	8,61	1.593.839,00	8,72
13	Jasa Perusahaan	373.078,6	2,36	403.150,5	2,42	425.150,5	2,41	463.428,0	2,50	454.110,00	2,48
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.332.436,1	21,09	3.791.531,3	22,72	4.131.531,3	23,45	4.280.948,7	23,05	4.226.810,00	23,11
15	Jasa Pendidikan	922.468,1	5,84	1.035.561,4	6,20	1.212.461,4	6,88	1.375.476,6	7,41	1.533.452,80	8,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	580.124,3	3,67	621.140,7	3,72	650.140,7	3,69	724.413,6	3,90	809.385,26	4,43
17	Jasa lainnya	279.334,0	1,77	315.068,2	1,89	341.068,20	1,94	380.133,7	2,05	396.017,58	2,17
	PDRB	**15.801.791,28**	**100**	**116.689.219,3**	**100**	**17.619.854,62**	**100**	**18.569.275,19**	**100**	**18.287.592,13**	**100**

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2021

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga sehingga dapat memberikan pengertian yang salah akan perkembangan perekonomian. Untuk itu agar dapat melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2012. Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh pada tahun 2020 telah mencapai sebesar Rp 14,66 triliun, turun sebesar 498,69 milyar dari tahun 2019.

Tabel 2. 9
Nilai dan Kontribusi dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 Atas Dasar Harga Konstan Kota Banda Aceh (Juta)

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	128.549,51	0,95	138.368,42	0,99	148.509,89	1,02	162.470,76	1,07	170.013,74	1,16
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	268.244,04	1,98	291.771,30	2,09	316.357,08	2,17	322.743,91	2,13	305.463,39	2,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	51.470,93	0,38	54.989,23	0,39	59.366,07	0,41	65.084,77	0,43	68.836,54	0,47
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.827,20	0,09	13.485,07	0,10	13.760,07	0,09	18.293,41	0,12	17.816,63	0,12
6	Konstruksi	1.408.788,97	10,41	963.815,81	6,92	964.615,81	6,63	965.826,09	6,37	1.049,201,14	7,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.814.397,26	20,80	2.916.498,17	20,93	3.020.064,45	20,75	3.099.741,43	20,44	2.890.617,62	19,71
8	Transportasi dan Pergudangan	1.717.796,17	12,70	1.757.196,81	12,61	1.778.835,45	12,22	1.816.923,93	11,98	1.281.757,15	8,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	400.246,38	2,96	463.636,66	3,33	498.013,96	3,42	528.232,09	3,48	464.693,46	3,17
10	Informasi dan Komunikasi	1.105.564,23	8,17	1.130.418,50	8,11	1.131.419,50	7,77	1.137.489,77	7,50	1.288.756,98	8,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	339.224,78	2,51	357.925,43	2,57	361.944,70	2,49	406.394,70	2,68	415.505,15	2,83
12	Real Estate	838.247,46	6,20	953.265,58	6,84	1.038.134,38	7,13	1.133.057,86	7,47	1.127.917,00	7,69
13	Jasa Perusahaan	310.573,74	2,30	323.968,16	2,32	340.959,76	2,34	359.843,18	2,37	345.917,00	2,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.646.798,44	19,56	2.962.550,37	21,26	3.162.532,67	21,73	3.257.167,17	21,48	3.206.042,00	21,86
15	Jasa Pendidikan	761.390,87	5,63	824.337,57	5,91	896.333,17	6,16	984.078,93	6,49	1.068.331,84	7,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	485.843,72	3,59	522.854,28	3,75	543.850,28	3,74	597.275,19	3,94	654.528,10	4,46
17	Jasa lainnya	238.331,07	1,76	262.020,09	1,88	282.220,03	1,94	310.354,93	2,05	310.890,33	2,12
	PDRB	**13.528.294,78**	**100**	**13.937.101,46**	**100**	**14.556.917,28**	**100**	**15.164.978,10**	**100**	**14.666.288,07**	**100**

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2021

Bila dibandingkan untuk setiap lapangan usaha/sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 pada masing-masing lapangan usaha ada yang meningkat namun ada juga yang mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2018. Peningkatan laju pertumbuhan terbesar dialami sektor adminsitrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sektor ini mengalami peningkatan laju pertumbuhan sebesar 21,86 persen di banding tahun 2020. Terdapat dua kategori berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK yang tumbuh di atas 10 persen (dua digit) pada tahun 2020. Untuk PDRB ADHB, dua sektor tersebut yakni administrasi pemeritahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib (23,11 persen) dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (20,04 persen). Sedangkan untuk PDRB ADHK juga hanya dua sektor dengan nilai persentase yang berbeda administrasi pemeritahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib (21,86 persen) dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (19,70 persen).

Tabel 2. 10
Perkembangan Konstribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Kota Banda Aceh

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,98	0,95	1,02	0,99	1,12	1,02	1,18	1,07	1,29	1,16
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	2,01	1,98	2,25	2,09	2,26	2,17	2,11	2,13	2,05	2,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,30	0,38	0,34	0,39	0,35	0,41	0,37	0,43	0,39	0,47
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,09	0,13	0,10	0,13	0,09	0,17	0,12	0,17	0,12
6	Konstruksi	10,00	10,41	6,56	6,92	6,30	6,63	6,05	6,37	6,98	7,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,36	20,80	21,46	20,93	21,20	20,75	20,88	20,44	20,04	19,71
8	Transportasi dan Pergudangan	11,29	12,70	10,66	12,61	9,64	12,22	9,08	11,98	6,75	8,74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,41	2,96	4,05	3,33	4,29	3,42	4,48	3,48	4,22	3,17
10	Informasi dan Komunikasi	6,06	8,17	5,82	8,11	5,17	7,77	4,90	7,50	5,44	8,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	2,51	3,03	2,57	3,01	2,49	3,28	2,68	3,40	2,83
12	Real Estate	6,84	6,20	7,73	6,84	8,17	7,13	8,61	7,47	8,72	7,69
13	Jasa Perusahaan	2,36	2,30	2,42	2,32	2,41	2,34	2,50	2,37	2,48	2,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,09	19,56	22,72	21,26	23,45	21,73	23,05	21,48	23,11	21,86
15	Jasa Pendidikan	5,84	5,63	6,20	5,91	6,88	6,16	7,41	6,49	8,39	7,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,67	3,59	3,72	3,75	3,69	3,74	3,90	3,94	4,43	4,46
17	Jasa lainnya	1,77	1,76	1,89	1,88	1,94	1,94	2,05	2,05	2,17	2,12
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2021

Untuk Distribusi PDRB berdasarkan pengeluaran dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menunjukkan kontributor terbesar pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Komponen ini terlihat mendominasi dalam PDRB yang melebihi 50 persen.

Tabel 2. 11
Distribusi PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran, 2016-2020

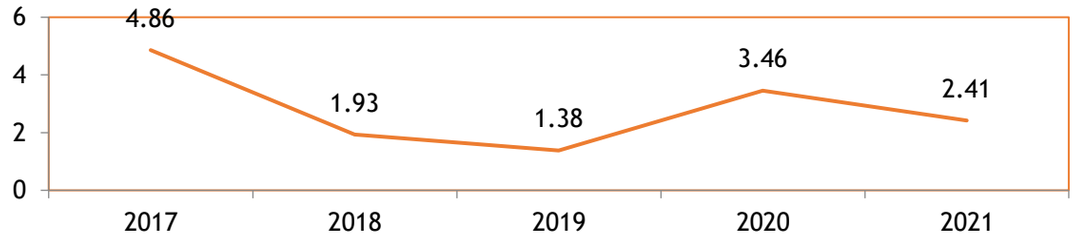
Komponen	2016		2017		2018		2019		2020	
	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)	HB (%)	HK (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	59,58	5,14	61,01	4,99	60,31	3,27	59,75	3,74	N/A	N/A
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,39	9,42	1,57	14,87	1,59	3,89	1,67	9,19	N/A	N/A
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	45,36	(23,10)	44,22	3,71	42,78	1,15	42,67	4,84	N/A	N/A
Pembentukan Modal Tetap Bruto	42,31	52,46	27,79	(32,21)	27,28	0,94	26,67	1,01	N/A	N/A
Perubahan Inventori	0,29	-	3,92	-	0,87	-	0,49	-	N/A	N/A
Net Ekspor	(27,83)	-	(20,10)	-	(15,93)	-	(15,23)	-	N/A	N/A
P D R B	100	5,93	100	3,29	100	4,49	100	4,18	N/A	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2020

Di tahun 2016 sampai dengan 2019 peningkatan PDRB juga dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi pemerintah. Kenaikan kontribusi dalam komponen pengeluaran pemerintah mencapai 40-an persen. Komponen pembentukan modal tetap bruto mencapai 20-an persen. Namun, kontribusi net ekspor menurun dari negatif 27,83 persen menjadi negatif 15,23 persen. Pengeluaran pemerintah selain belanja modal juga mengalami refocusing anggaran akibat dari Pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan rendahnya serapan anggaran sehingga kontribusi komponen pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan PDRB hanya sebesar 42,67 persen di tahun 2019. Kontribusi ini sangat menurun sedikit dari tahun sebelumnya yang mencapai 42,78 persen dimana tahun 2018. Penurunan kontribusi juga dialami komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang turun menjadi 59,75 persen dari tahun sebelumnya yaitu 60,31 persen.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Laju inflasi di Kota Banda Aceh mengalami penurunan jika dibandingkan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Laju Inflasi kota Banda Aceh dari tahun 2017-2021 ditunjukkan gambar berikut:



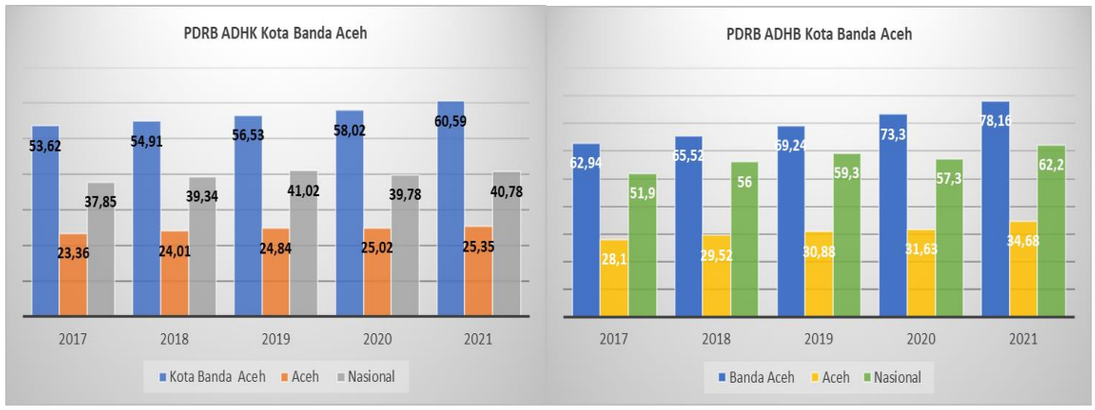
Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 17
Grafik Laju Inflasi tahun 2017-2021

Gambar di atas menunjukkan laju inflasi Kota Banda Aceh pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, laju inflasi mengalami peningkatan mencapai 2,08 persen. Fluktuasi dari laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya kejutan/shock yang disebabkan faktor-faktor penyebab inflasi baik dari sisi permintaan (masyarakat) atau yang lebih dikenal dengan istillah tarikan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) ataupun dari sisi penawaran (pelaku usaha) atau dikenal dengan istillah dorongan dari sisi penawaran (*cost push inflation*). Perhitungan inflasi ini menggunakan Indeks Harga Konsumen baru dengan tahun dasar 2012 sejak tahun 2014. Perbedaan perhitungan tahun dasar ini juga membedakan cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. IHK adalah dalah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.

C. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita yang dihitung dari PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu daerah. Untuk perbandingan antar waktu, penggunaan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Konstan (ADHK) lebih tepat, sedangkan untuk kondisi terkini dapat dilihat dari PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Perkembangan PDRB per kapita Kota Banda Aceh ADHK dan ADHB tercatat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah:



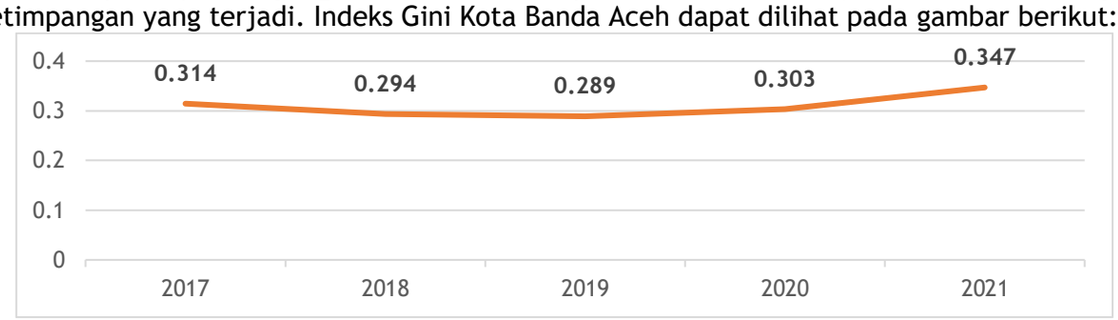
Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2022

Gambar 2. 18
PDRB Perkapita Banda Aceh Tahun 2017-2021 (Juta)

Apabila dihitung berdasarkan harga konstan PDRB perkapita Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sebesar 53,62 juta rupiah, selanjutnya pada tahun 2018 54, 91 juta rupiah, tahun 2019 sebesar 56, 53 juta rupiah, tahun 2020 sebesar 58,02 juta rupiah dan tahun 2021 sebesar 60, 59 juta rupiah. Semntara itu, Pendapatan per kapia berdasarkan harga berlaku menunjukkan nilai yang lebih besar yaitu 62,94 juta rupiah tahun 2017 dan meningkat menjadi 62, 2 juta rupiah pada tahun 2021 (Sumber Banda Aceh dalam Angka Tahun 2022)

D. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Nilai lindeks kndeks Gini ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Namun apabila mendekati 1, maka semakin nyata ketimpangan yang terjadi. Indeks Gini Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 19
Indeks Gini Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Indeks Gini Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Penurunan indeks gini menunjukkan angka yang terus mendekati nol yang artinya kesenjangan pendapatan di Kota Banda Aceh sangat kecil bisa disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan sudah hampir sama.

E. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang melingkupi banyak faktor termasuk ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Arti kemiskinan lebih dari sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari indikator kesejahteraan terukur seperti garis kemiskinan, namun berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan *(non-*

income factors) seperti akses kebutuhan dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Mengingat multidimensionalnya permasalahan kemiskinan, penanganannya memerlukan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin yang dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu. Dalam hal ini, perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin" yang ditetapkan misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/ pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita". dengan menggunakan definisi ini, penduduk miskin di suatu negara kaya dapat dikategorikan sebagai penduduk sejahtera di negara berkembang seperti Indonesia. (Ravallion, 1998 : 26).

Selain itu, juga dikenal terminologi kemiskinan lain seperti kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam "Suyanto (1995:59) mendefinisikan bahwa "Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan". Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang sehingga ia tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Dalam hal ini, faktor-faktor adat dan budaya justru menyebabkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini seperti yang dialami oleh suku terasing yang terikat dengan tradisi sosio-kultural seperti suku Badui, suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan lain-lain. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach)*. Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Tabel 2. 12
Persentase Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan di Kota Banda Aceh 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Banda Aceh (persen)	7,44	7,25	7,22	6,90	6,77
2	Provinsi Aceh (persen)	16,89	15,97	15,32	14,99	15,33
3	Nasional (persen)	10,64	9,82	9,41	9,78	10,14
4	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	19,23	19,13	19,42	18,97	20,95
5	Garis Kemiskinan (Rp.)	572.295	607.391	628.493	674.977	698.617

Sumber: BPS Pusat, BPS Propinsi Aceh dan BPS Kota Banda Aceh, 2021

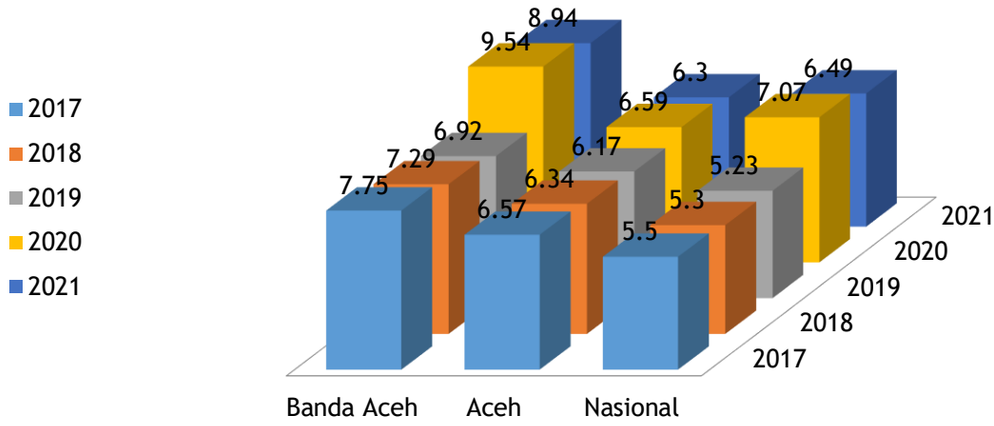
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 7,44 persen di tahun 2017 menjadi 6,77 persen pada tahun 2021. Ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan karena Kota Banda Aceh terus menuju pemberantasan kemiskinan. Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, angka kemiskinan Kota Banda Aceh masih lebih rendah dibandingkan keduanya.

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Banda Aceh, jumlahnya masih menunjukkan peningkatan. Walaupun jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan. Peningkatan jumlah penduduk miskin di tiga tahun tersebut tidak terlepas dari adanya pandemi *Covid-19* yang menghantam Kota Banda Aceh dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat.

Garis kemiskinan di Kota Banda Aceh terus menunjukkan peningkatan. Jika dilihat dari trend sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp126.332 dimana rata-rata peningkatan per tahun adalah Rp25.264.

F. Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi berbagai negara di dunia, tingginya angka pengangguran akan berakibat pada lambannya jalan perekonomian. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus dapat diatasi dengan baik. Pengangguran yang terlalu besar membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 2.20 berikut ini:

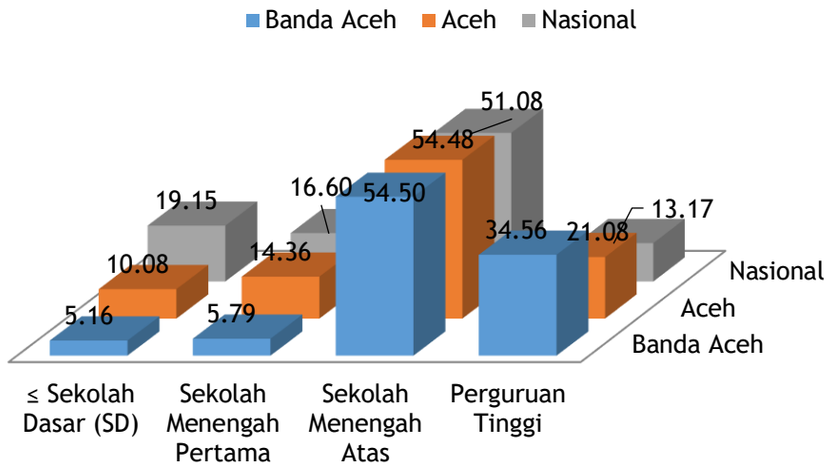


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2. 20
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari 7,75 persen pada tahun 2017 menjadi 8,94 persen pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh dan Nasional, kondisi pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2021 berada diatas keduanya. Tingkat pengangguran yang tinggi ini, terutama di tahun 2020 dan 2021 sangat dipengaruhi dengan melambatnya kondisi ekonomi Kota Banda Aceh yang terimbas dengan adanya pandemi *Covid-19*.

Selain dari pandemi *Covid-19*, faktor pendukung yang menjadi pemicu meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh adalah kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan sebagian angkatan kerja. Hal ini berdampak pada melambatnya perekonomian Kota Banda Aceh, ditambah lagi dengan kondisi melambatnya perekonomian secara nasional. Untuk tingkat pendidikan pengangguran di Kota Banda Aceh, Aceh, Nasional pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2. 21
Perbandingan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan oleh Pengangguran di Kota Banda Aceh, Aceh, dan Nasional tahun 2020

Gambar di atas menunjukkan komposisi pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Tingkat pendidikan pengangguran didominasi oleh tamatan SMA/sederajat sebanyak 54,50 persen. Selanjutnya sebanyak 34,56 persen yang menamatkan pendidikan pada level perguruan tinggi. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Aceh dimana pengangguran mempunyai pendidikan SMA/sederajat mendominasi sebesar 54,48 dan 21,08 persen mempunyai pendidikan pada level perguruan tinggi. Namun sedikit berbeda dengan tingkat pendidikan pengangguran secara Nasional. Walaupun 51,08 persen pengangguran yang menamatkan pendidikan SMA/sederajat masih mendominasi pengangguran secara nasional namun pada level selanjutnya, tingkat pendidikan SMP yang lebih banyak menganggur (16,60 persen) dibandingkan dengan pendidikan tingkat sarjana (13,17 persen).

G. Angka Partisipasi Kerja

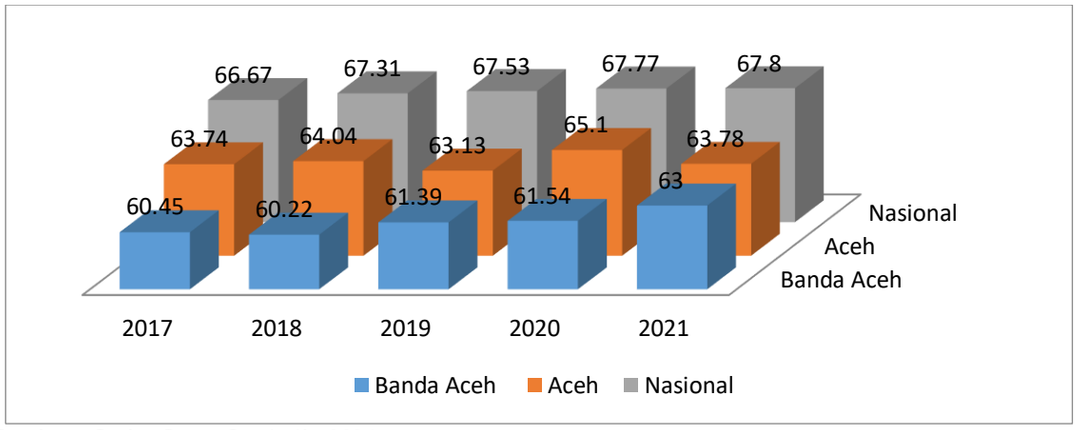
Tenaga kerja yang merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pembangunan pada suatu negara ataupun daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi isu disetiap daerah sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah pokok yang harus merangkul swasta untuk bersama-sama mengurangi dan menuntaskan masalah ketenagakerjaan di Indonesia khusunya di Banda Aceh. Banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan dalam usaha konkret, yaitu memperluas kesempatan kerja dan lapangan kerja serta meningkatkan mutu tenaga kerja. Gambaran kondisi ketenagakerjaan Kota Banda Aceh pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 13
Kondisi Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angkatan Kerja (jiwa)	119.439	122.81	126.580	131.147	136.675
	- Bekerja	110.184	114.34	117.822	118.637	124.46
	- Pengangguran	9.255	8.92	8.758	12.510	12.21
2	Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	78.157	78.93	79.605	79.605	80.27
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,45	60,2	61,39	61,54	6
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,75	7,2	6,92	9,54	8,9

Sumber : Badan Pusat Statitik Kota Banda Aceh 2021

Data BPS untuk jumlah angkatan kerja di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 tercatat 119.439 jiwa, pada tahun 2018 meningkat menjadi 122.810 jiwa. Jumlah angkatan kerja terus meningkat sampai dengan 2021 menjadi 136.675 jiwa. Peningkatan jumlah angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tersebut tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi, akibatnya jumlah pengangguranpun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi kondisi daerah, karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu daerah yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak di daerah tersebut. Selain masih terbatasnya lapangan pekerjaan, pengangguran di kota Banda Aceh disebabkan juga oleh beberapa faktor seperti arus urbanisasi dari daerah kabupaten lain ke Kota Banda Aceh untuk mencari pekerjaan, skill yang masih kurang dari pencari kerja yang tidak sesuai dengan standar dunia kerja dan masih kurangnya minat pencari kerja untuk berwirausaha secara mandiri.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2. 22
Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2017 – 2021

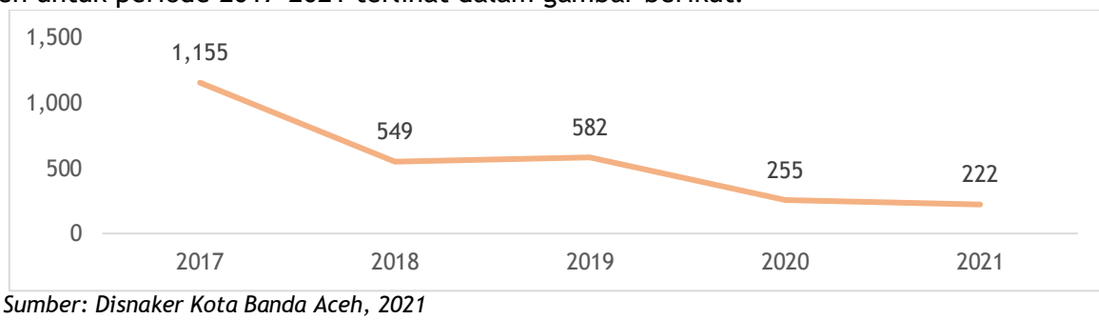
Dari Gambar 2.22 di atas, perkembangan TPAK setiap tahunnya semakin meningkat di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional. TPAK Kota Banda Aceh selama beberapa tahun terakhisr selalu lebih rendah daripada Provinsi Aceh dan Nasional. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh sebagai dinas yang berhubungan langsung dengan pengangguran telah melakukan usaha-usaha pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja setiap tahunnya melalui BLK Kota Banda Aceh. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan setiap tahun nya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 14
Jenis Pelatihan yang dilakukan Disnaker Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Kejuruan Pelatihan	Tahun					Jumlah
	2017	2018	2019	2020	2021	
Menjahit	20	102	96	80	32	410
Teknisi Cooling System	0	32	32	16	0	100
Teknisi Sepeda Motor	0	48	48	32	16	164
Las Listrik	20	32	32	32	36	172
Kewirausahaan Membuat Kue	40	102	102	32	32	270
Tata Rias dan Kecantikan	32	32	32	0	0	112
Operator Alat Berat	16	0	0	0	0	16
Pangkas	0	0	0	0	0	16
English for Tour Guides	0	20	20	0	0	20
Penggambaran Auto CD	0	0	0	0	16	32
Jumlah	**128**	**362**	**362**	**192**	**132**	**1.312**

Sumber: Disnaker Kota Banda Aceh, 2021

Tabel 2.14 menunjukkan secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir (2017-2021), Pemerintah Kota Banda Aceh hanya mampu memberikan pelatihan untuk pengangguran/pencari kerja sebanyak 262 orang per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah pencari kerja yang mencapai 552 orang per tahun, maka Kota Banda Aceh belum bisa memenuhi keseluruhan pencari kerja untuk mengikuti pelatihan yang diberikan. Jumlah pencari kerja di Kota Banda Aceh untuk periode 2017-2021 terlihat dalam gambar berikut:



Sumber: Disnaker Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 23
Jumlah Pencari Kerja Tahun 2017 – 2021

Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkatkan perbandingan antara jumlah pencari kerja terdaftar dengan pelatihan yang diberikan. Walaupun persentase antara para pencari kerja dengan pelatihan yang diberikan persentasenya masih belum mencapai 50 persen, namun jumlah capaian yang telah mencapai 47,5 persen menjadi keberhasilan Kota Banda Aceh.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Dalam fokus kesejahteraan sosial membahas tentang Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, dan Indeks Pembangunan Manusia.

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis. Angka Melek Huruf menjadi acuan pengembangan pendidikan di suatu daerah. Upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan pada umumnya lebih diarahkan pada usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk mecapai hal tersebut pemerintah berupaya menyediakan sarana wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan tahun 1984 menjadi wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Dengan demikian diharapkan tingkat pendidikan penduduk menjadi lebih baik dan jumlah penduduk buta huruf akan berkurang terutama pada usia sekolah (7-18 tahun). Gambaran angka melek huruf di Kota Banda Aceh, Aceh dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut:

Tabel 2. 15
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2016-2020

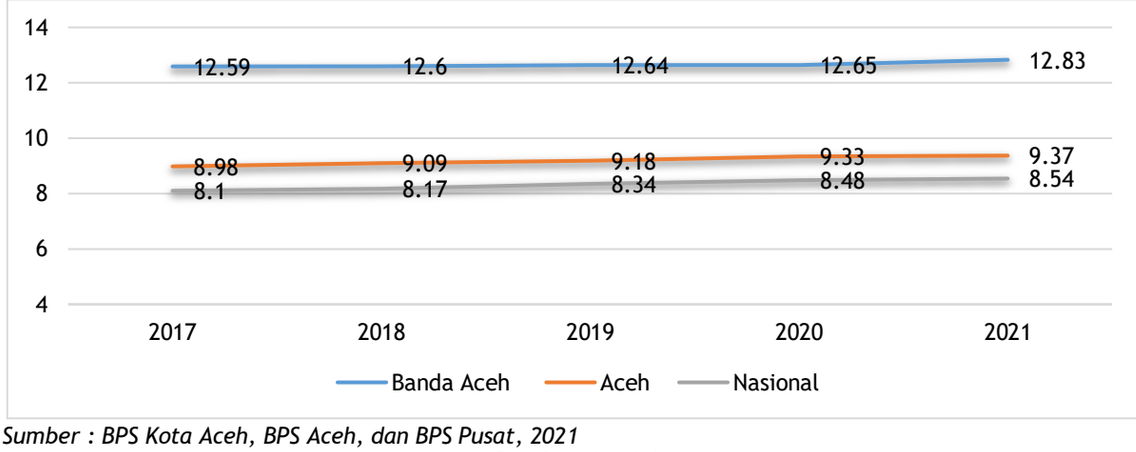
Uraia	Angka Melek Huruf					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kota Banda Aceh	99,10	99,42	99,66	99,69	99,79	99,58
Provinsi Aceh	97,74	97,94	98,08	98,21	98,25	98.04
Nasional	95,88	95,50	95,66	95,90	96,00	95,73

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel 2.15 di atas, dapat dilihat persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang mampu baca tulis di Kota Banda Aceh pada tahun 2016-2020 terus meningkat. Secara rata-rata, perkembangan angka melek huruf di Kota Banda Aceh sebesar 99,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Kota Banda Aceh sudah sangat baik dari sisi literasi. Nyaris tidak ada penduduk Kota Banda Aceh yang tidak mampu baca tulis. Ini menunjukkan sistem pendidikan dasar yang dijalankan di Kota Banda Aceh telah berjalan efektif. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, Kota Banda Aceh memiliki angka melek huruf yang lebih tinggi daripada keduanya.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di suatu daerah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Grafik berikut menggambarkan perbandingan kondisi angka rata-rata lama sekolah di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional selama lima tahun terakhir.



Sumber : BPS Kota Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2021

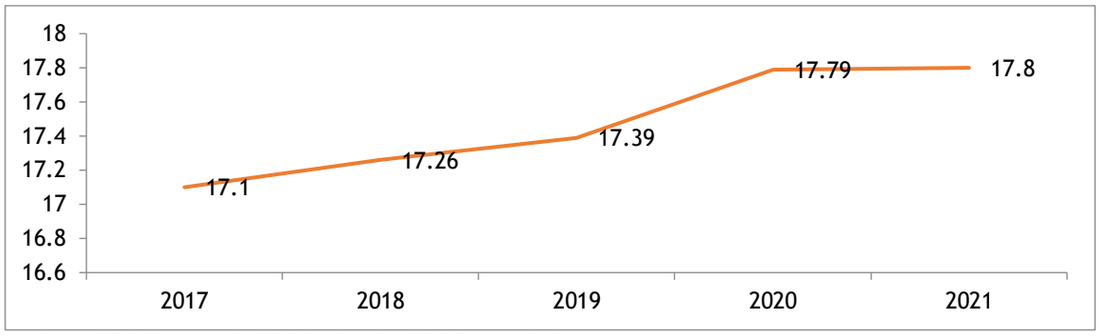
Gambar 2. 24
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Banda Aceh mencapai 12,83 tahun pada tahun 2021, artinya penduduk Kota Banda Aceh usia 15 tahun ke-atas sudah menyelesaikan pendidikan

SMA sederajat. Angka rata-rata lama sekolah sejak tahun 2017-2021 di Kota Banda Aceh menunjukkan trend yang meningkat. Angka rata-rata tersebut mengalami peningkatan dari 12,59 tahun pada tahun 2017 menjadi 12,83 tahun pada tahun 2021. Pencapaian angka pada tahun 2017 sampai dengan 2021 tersebut sudah memenuhi target pencapaian nasional rata-rata 12 tahun. Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional, penduduk usia sekolah di Kota Banda Aceh mendapatkan masa pendidikan jauh lebih lama dibandingkan rata-rata lama sekolah pada Provinsi Aceh dan Nasional.

C. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah (AHLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. AHLS Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



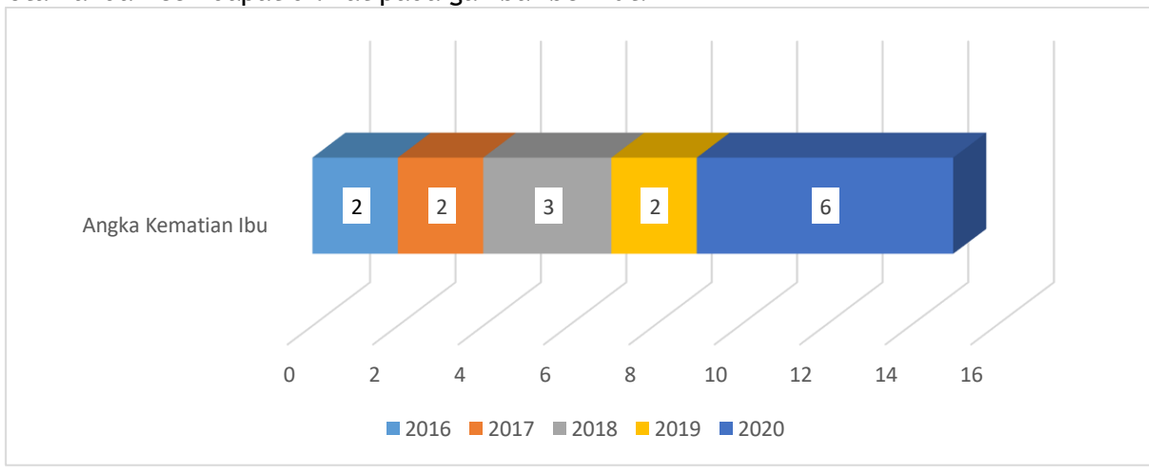
Sumber : BPS Kota Aceh, BPS Aceh, dan BPS Pusat, 2021

Gambar 2. 25
Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Banda Aceh, 2017-2021

Dari gambar di atas terlihat bahwa, angka harapan lama sekolah di Kota Banda Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 17,80 tahun atau sampai dengan strata-2 (*magister/master*). Pencapaian ini sangat menggembirakan dan harus terus dijaga serta ditingkatkan.

D. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu Melahirkan yang dilaporkan pada tahun 2020 cukup tinggi yakni sejumlah 6 kasus dari 100.000 kelahiran hidup. Hal ini dipengaruhi faktor masih kurangnya ibu-ibu yang memeriksakan kesehatan pasca melahirkan, sehingga berbagai faktor penyebab tidak terpantau dan dukungan suplemen yang tersedia tidak diakses. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya tata cara adat yang memberikan larangan atau pantangan-pantangan makanan bagi ibu pasca melahirkan sehingga menyebabkan suplai gizi yang sangat dibutuhkan untuk pemulihan ibu serta kesiapan menyusui menjadi kurang. Gambaran angka kematian ibu di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Profil Kesehatan Aceh, 2020

Gambar 2. 26
Angka Kematian Ibu di Kota Banda Aceh, 2016-2020

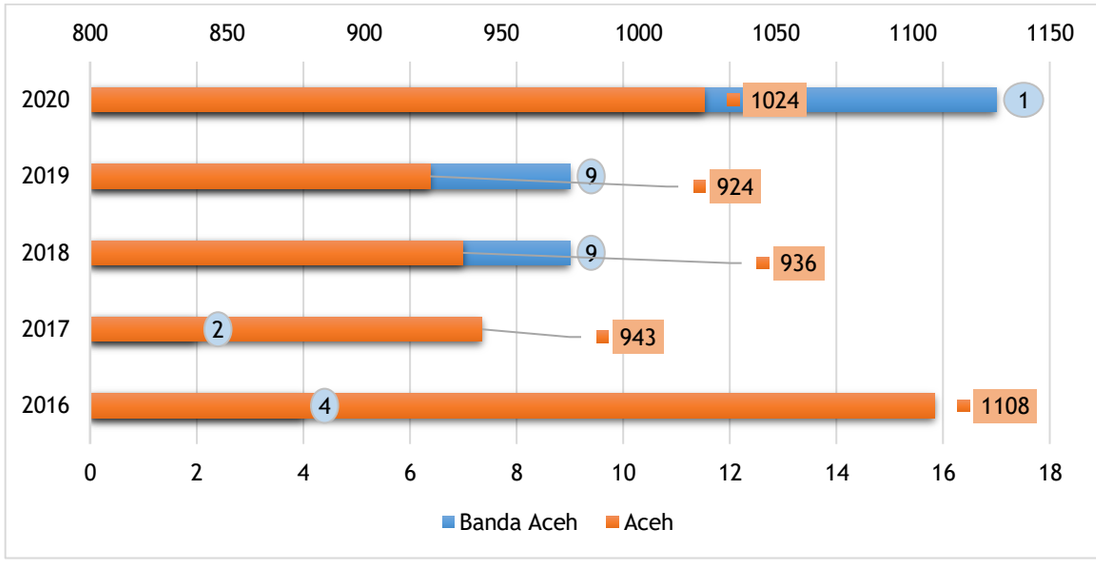
Gambar di atas menunjukkan angka kematian ibu di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan dari 2016 sampai dengan 2020. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak terkait agar angka kematian ibu ini bisa menurun.

E. Angka Kematian Bayi (AKB)

Salah satu indikator utama kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan naik turunnya angka kematian bayi, diantaranya :

1) masih ada ibu dengan penyakit penyerta yang ingin hamil tanpa direncanakan dengan baik;
2) masih rendahnya kepedulian dan keterampilan petugas dalam penatalaksanaan ibu hamil dan bayi;
3) kurangnya kepedulian keluarga terhadap ibu hamil dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perawatan bayi;
4) wanita usia subur (WUS) yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia kurang mendapat perhatian sehingga saat hali akan menimbulkan risiko bagi janin yang dikandung.

Sampai dengan akhir tahun 2020 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Banda Aceh sebanyak 17 bayi per 1000 kelahiran hidup. Jumlah ini meningkat dibandingkan kasus kematian bayi tahun 2016 dimana AKB sebesar 4 per 1000 kelahiran hidup. Ada banyak faktor yang mempengaruhi AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB.



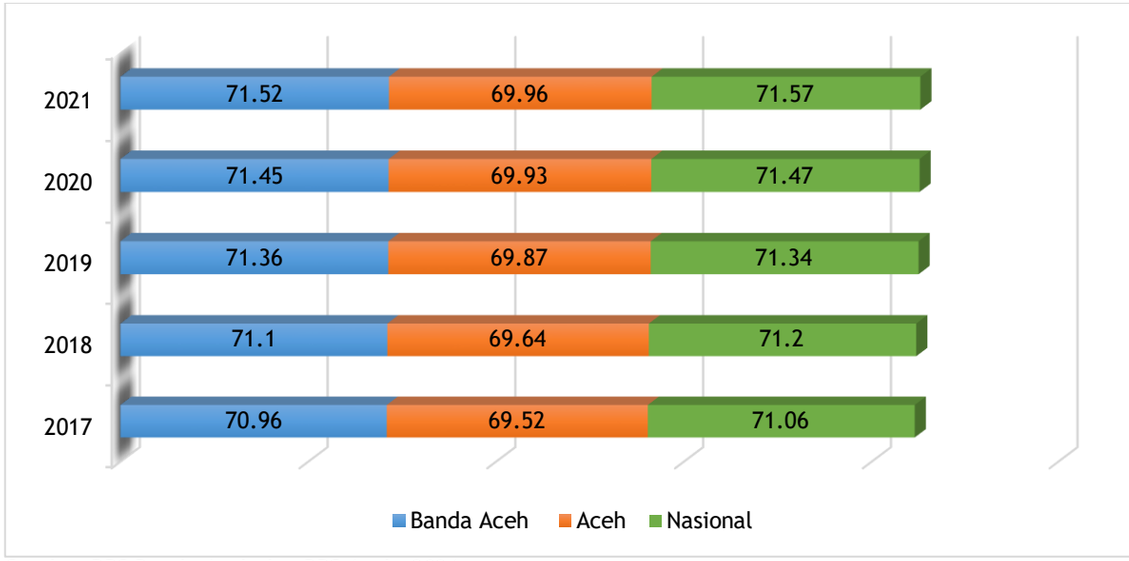
Sumber; Profil Kesehatan Aceh, 2021

Gambar 2. 27
Perkembangan AKB Banda Aceh dan Aceh Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan angka kematian bayi di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan. Walaupun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kematian bayi di Provinsi Aceh, namun angka trend yang meningkat ini perlu mendapat perhatian dari pihak terkait. Diperlukan usaha dari pihak terkait untuk terus berupaya menurunkan angka kematian bayi.

F. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.



Sumber BPS Banda Aceh dan BPS Aceh, 2021

Gambar 2. 28
Angka Harapan Hidup di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Angka harapan hidup di Kota Banda Aceh secara konstan mengalami peningkatan dari 70,96 tahun 2017 menjadi 71,52 tahun 2021. Peningkatan AHH sejak 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan derajat kesehatan penduduk Kota Banda Aceh sudah membaik. Gambaran perbandingan perkembangan AHH antara Banda Aceh, Aceh, dan Nasional pada tahun 2017-2021 terlihat Kota Banda Aceh masilh dibawah nasional namun sudah diatas Provinsi Aceh. Namun pencapaian tersebut tetap harus terjaga dan diupayakan terus meningkat karena Kota Banda Aceh masih dibawah nasional. Oleh karenanya program-program peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus tetap dijalankan.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk). Dengan kata lain, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM dapat digunakan sebagai data strategis untuk mengukur kinerja Pemerintah. Di Indonesia, IPM juga merupakan salah satu faktor penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM digunakan dengan mengukur 3 dimensi, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Ada 4 indikator yang digunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan. IPM juga dapat digunakan untuk memperbandingkan kualitas pembangunan manusia lintas daerah dan tingkat adminintrasi. IPM Kota Banda Aceh dibandingkan dengan Propinsi Aceh dan nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	IPM Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29
2	IPM Propinsi Aceh	70,60	71,19	71,90	71,99	72,18
3	IPM Kota Banda Aceh	83,95	84,37	85,07	85,41	85,71
4	Pertumbuhan IPM Kota Banda Aceh	0,26	0,50	0,83	0,40	0,35

Sumber: Banda Aceh Dalam Angka dan BPS Pusat, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa IPM Kota Banda Aceh menunjukkan trend yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda Aceh terus membaik seiring berjalannya waktu. IPM Kota Banda Aceh telah melewati IPM Aceh dan Nasional. Kesenjangan IPM antara Banda Aceh dan Propinsi Aceh menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Kota Banda Aceh dan kabupaten lainnya di Propinsi Aceh. Kesenjangan ini adalah salah satu pemicu tingginya migrasi penduduk terutama tenaga kerja ke Kota Banda Aceh.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral,

beretika, berbudaya dan beradab. Kota Banda Aceh memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Pengembangan seni budaya diharap dapat menjadi pendorong berkembangnya potensi daerah. Di bawah ini disampaikan data capaian pembangunan tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kota Banda Aceh, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 17
Capaian Kebudayaan Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Capaian Pembangunan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	66	70	73	73	73
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	1	1	1	1	1

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat perkembangan grup kesenian dan gedung kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah grup kesenian tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017, dan terus meningkat di tahun 2019 sampai dengan 2021 menjadi 73 grup. Sedangkan jumlah gedung kesenian yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh hanya 1 unit. Banda Aceh memiliki keragaman budaya yang disebabkan karena posisi geografis yang strategis sebagai pintu masuk negara sehingga mempunyai banyak etnis masyarakat. Keragaman budaya ini dapat dilihat dari banyaknya peninggalan sejarah yang ada di Kota Banda Aceh baik dalam bentuk benda ataupun bukan benda.

Peninggalan sejarah yang ada di Banda Aceh tehitung sebanyak 85 jenis dengan rincian 49 makam, 6 mesjid, 6 tugu, 1 rumah tradisional, 3 monumen, 13 bangunan/gedung, 6 tempat bersejarah dan 1 benda. Dari seluruh cagar budaya dalam bentuk benda yang ada di Kota Banda Aceh, ada yang sudah mengalami kerusakan dan yang sangan memprihatinkan khususnya di wilayah yang terkena bencana dan tsunami, seperti di Gampong Pande yang belum tertata dengan baik. Kondisi memprihatinkan juga terlihat pada Makam Syiah Kuala. Seyogyanya untuk melestasrikan budaya, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya ini perlu dibenahi sehingga bisa menjadi objek wisata yang akan menguntungkan Kota Banda Aceh.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Dalam bagian ini akan dijelaskan fokus layanan urusan keistimewaan aceh, fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan, dan penunjang urusan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

Pada bagian ini menguraikan penyelenggaran kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

A. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

Bagian ini memberikan gambaran tentang syariat Islam dan pelaksanaan ibadah.

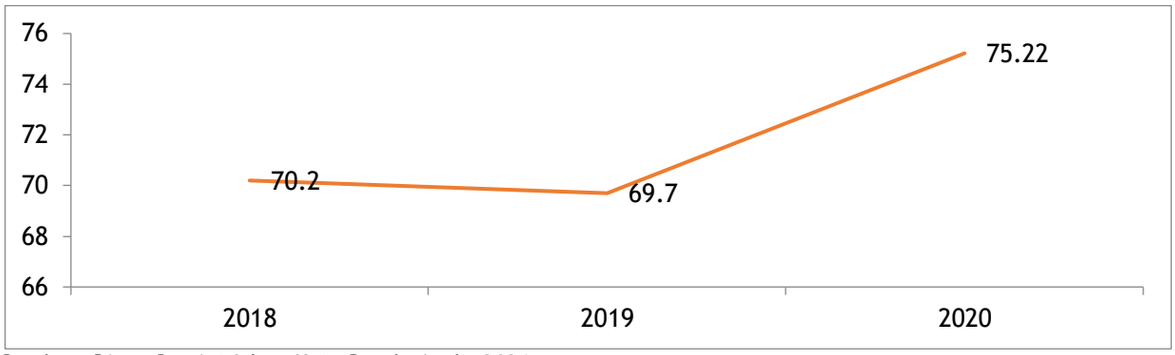
a. Syariat Islam

Aceh merupakan salah satu daerah yang diberi status khusus oleh Pemerintah untuk melaksanakan penerapan kekhususan di bidang Syari'at Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berwenang untuk melaksanakan keistimewaan Aceh yang berkaitan dengan Syari'at Islam. Pelaksanaan Syariat Islam meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam yang ketentuannya diatur dalam Qanun (Peraturan Daerah).

Kota Banda Aceh memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan Syariat Islam, sebagai ibukota propinsi otomatis Kota Banda Aceh menjadi barometer dan sorotan terhadap penerapan Syariat Islam. Kota Banda Aceh yang memiliki penduduk heterogen, merupakan tempat berkumpulnya orang dengan suku, adat istiadat, budaya, dan agama berbeda, sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Pelaksanaan Syariat Islam diukur melalui Indeks Kota Syariah (IKS). IKS adalah suatu ukuran yang menggambarkan pencapaian penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh. IKS dihitung dengan mempertimbangkan berbagai dimensi dalam konsep *Maqasid Syari'ah* sebagai kerangka teori dasar. Maqasid Syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusnya dalam mensyariatkan hukum demi mewujudkan

kemashlahatan umat. Dalam konsep *Maqasid Syari'ah,* ada 5 dimensi yang yang tercakup, terdiri dari sub-sub dimensi. Setiap sub dimensi terdiri dari sejumlah indikator. Adapun 5 dimensi tersebut adalah: (1) *Hifdzu din* (melindungi agama)*; (2). Hifdzu nafs* (melindungi jiwa); (*3). Hifdzu aql* (melindungi pikiran), (*4). Hifdzu mal* (melindungi harta), dan (*5). Hifdzu nasb* (melindungi keturunan).

Kota Banda Aceh mampu meningkatkan indeks keberhasilan penerapan syariat Islam dari 70,2 pada tahun 2018 menjadi 75,22 pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



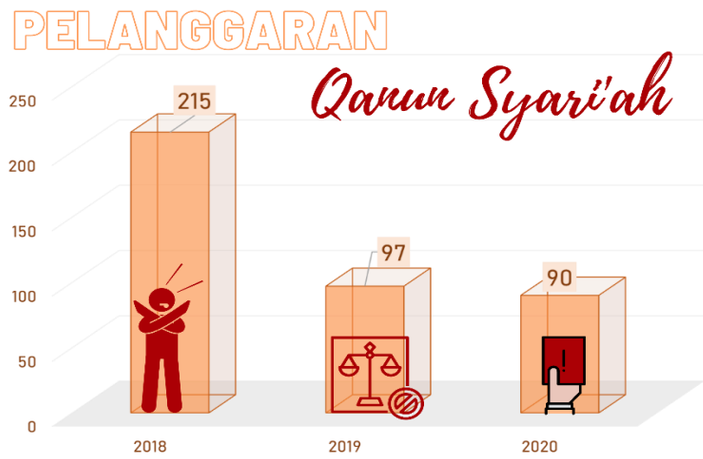
Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 29
Indeks Kota Syariah di Kota Banda Aceh, 2018-2020

Aturan-aturan dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh diatur dalam Qanun, yang berasal dari Bahasa Arab yang diartikan Undang-undang. Dalam sistem pemerintahan Aceh, sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah. Karena itu dikenal adanya dua macam qanun, *pertama,* Qanun Aceh, yaitu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. *Kedua,* Qanun Kabupaten/Kota, yaitu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Qanun Syariah adalah qanun yang mengatur pelaksanaan syariat Islam. Sesuai dengan pasal 125 ayat 3, UU Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Syariah adalah Qanun Aceh, dalam arti penyusunan qanun ini berada dibawah kewenangan pemerintahan Aceh, apakah di provinsi atau kabupaten/kota. Ruang lingkup dari Qanun Syariah ini adalah meliputi semua aspek syariat Islam yang terdiri dari bidang aqidah, syariah, dan akhlak. Pasal 125 ayat 2, UU No. 11 Tahun 2006 merinci ruang lingkup qanun syariah adalah dalam bidang: (1). Ibadah; (2) Akhwal Al-Syakhshiyah (hukum keluarga); (3) Muamalah (hukum perdata); (4) Jinayah (hukum pidana); (5) Qadla' (Peradilan); (6). Tarbiyah (Pendidikan); dan (7) Dakwah, Syiar, dan Pembelaan Islam.

Sejak tahun 2017, Kota Banda Aceh telah mampu meningkatkan penerapan Qanun Syariah atau menurunkan pelanggaran Qanun Syariah. Penurunan angka kasus pelanggaran qanun syariat Islam berhasil diturunkan dari 215 kasus di tahun 2018 menjadi 97 kasus pada tahun 2019 dan terus menurun di tahun 2020 menjadi 90 kasus.



Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2020

Gambar 2. 30
Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Qanun Syari'at Islam di Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2020

Gambar di atas menggambarkan jumlah pelanggaran Qanun Syari'at Islam selama 2018 – 2020. Jumlah pelanggaran Qanun Syariah baik tentang Khalwat dan Mesum, pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Khimar, dan Maisir terus menurun. Hal ini sangat menggembirakan karena masyarakat semakin sadar untuk tidak melanggar Qanun. Penurunan ini menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan terus dijalankan dalam rangka penegakan qanun Syariat Islam.

Selain dari sisi IKS dan Qanun Syariat Islam, dalam pelaksanaan Syariat Islam diharapkan Kota Banda Aceh mampu menjadi kota yang mempunyai pendapatan yang besar. Salah satunya melalui suber dana zakat. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal terus meningkatkan upaya penerimaan zakat dari masyarakat. Sejak tahun 2017 penerimaan zakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga amil zakat pemerintah yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selain zakat penghasilan, zakat perniagaan, infaq dan sadaqah. Baitul Mal juga melaksanakan pemotongan zakat pada setiap SP2D belanja daerah sesuai ketentuan yang telah di tetapkan melalui peraturan Walikota

Tabel 2. 18
Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Thn	Target	Realisasi Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Ribu)				
		Zakat Penghasilan	Zakat Perniagaan	Infaq	Shadaqah	Jumlah
2017	18.604.500.000	11.142.052.723	2.406.302.868	1.083.732.234	7.856.690	14.639.943.416
2018	18.604.500.000	13.637.978.329	2.302.095.736	1.209.527.170	6.100.985	17.155.702.285
2019	19.604.500.000	14.011.017.230	1.175.188.643	1.268.791.804	6.360.321	16.461.357.998
2020	22.064.260.000	13.714.128.368	1.554.162.106	1.631.728.035	2.573.489	16.902.591.999
2021	24.349.130.000	11.182.953.209	1.275.607.379	1.640.282.993	4.430.860	14.103.274.443

Sumber : Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2021

Tabel 2.18 di atas menunjukkan realisasi penerimaan zakat, infaq dan sadaqah. Dari seluruh realisasi penerimaan yang ada, persentase penerimaan zakat yang berasal dari zakat penghasilan dan perniagaan masih lebih besar daripada penerimaan infaq dan sadaqah. Selengkapnya untuk perkembangan jumlah penerimaan zakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 19
Tabel Data Penerimaan Zakat Per Tahun

Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat
2017	13.548.354.591
2018	15.940.074.129
2019	15.186.205.873
2020	15.268.290.474
2021	12.458.560.589

Sumber : Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2021

Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan penerimaan zakat dari Rp 13.548.354.591 sampai Rp 15.268.290.474. Peningkatan penerimaan zakat ini merupakan

hasil upaya sosialisasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Baitul Mal kepada masyarakat dan dunia usaha. Namun, pada tahun 2021, penerimaan zakat menjadi berkurang. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi *Covid-19* yang mengurangi penghasilan dan perniagaan para pembayar zakat.

Penyaluran zakat yang terkumpul telah disalurkan untuk beberapa kegiatan kemasyarakatan antara lain pembangunan dan perbaikan rumah dhuafa, penyaluran beasiswa, bantuan modal usaha, bantuan fakir miskin, dan fakir uzur. Untuk penyaluran zakat kepada rumah dhuafa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 20
Jumlah Rumah Dhuafa yang telah Dibangun

Tahun	Jumlah Rumah
2017	24
2018	24
2019	19
2020	20
2021	20
Total	**107**

Sumber: Sekretariat Baitul Mal, 2021

Jumlah rumah dhuafa yang telah dibangun pada tahun 2017 sampai dengan 2021 berjumlah 107 unit. Diharapkan jika jumlah penerimaan zakat meningkat maka pembangunan jumlah dhuafa bisa bertambah. Selain disalurkan untuk pembangunan rumah dhuafa, zakat juga disalurkan untuk beasiswa untuk keluarga miskin. Adapun jumlah penerima beasiswa miskin yang berasal dari penerimaan zakat di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.21 dibawah ini:

Tabel 2. 21
Jumlah Penerima Beasiswa Miskin di Kota Banda Aceh

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	Beasiswa ½ penuh	Beasiswa Tahfidz	Beasiswa santri Salafi	Total
2017	989	926	50	193	19	47	3.849
2018	991	926	64	199	15	39	2.234
2019	995	939	632	295	14	43	2.917
2020	991	992	87	396	13	39	2.506
2021	1.000	1.000	100	299	0	48	2.447
Jumlah	**4.966**	**4.783**	**933**	**1.382**	**61**	**216**	**13.953**

Sumber: Sekretariat Baitul Mal, 2021

Jumlah penerima beasiswa miskin di Kota Banda Aceh yang bersumber dari zakat pada tahun 2017 dengan total penerima 3.849 jiwa. Beasiswa diberikan untuk berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Beasiswa juga diberikan untuk beasiswa tahfidz dan santri salafi. Pada tahun 2021, jumlah penerima beasiswa berkurang menjadi 2.447 siswa.

b. Pelaksanaan Ibadah

Masjid merupakan bangunan monumental bagi umat Islam yang dibangun dengan banyak menyita perhatian bahkan dengan mengerahkan segala daya upaya, sehingga untuk mewujudkan bangunan yang megah dilakukan penggalangan dana baik dengan swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, swasta atau dengan bantuan dari luar negeri. Agar segala daya upaya tersebut tidak menjadi pekerjaan yang sia-sia, maka peran dari BKM dan juga masyarakat untuk menjaga, memelihara menjadi hal yang mutlak diperlukan. Kondisi masjid yang jorok, kotor kumuh dan tatakelola yang tidak transparan akan berpengaruh kepada kelancaran proses pelaksanaan ibadah di masjid tersebut.

Sebagai salah satu bentuk peran dan tanggung jawab Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepada pengurus masjid mengenai tata kelola sebagaimana yang diharapkan sehingga para jamaah yang akan melaksanakan ibadah merasa aman, nyaman dan tentram. Pembinaan tersebut diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan kepada Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) untuk dapat mengelola masjid secara professional.

Adapun materi pembinaan tersebut meliputi beberapa unsur, yaitu:

- Bidang Idarah yang meliputi aspek administrasi dan aspek organisasi dan pendukung bidang idarah.

- Bidang Imarah yang meliputi aspek peribadatan dan aspek kegiatan pendukung bidang imarah.
- Bidang Riayah yang meliputi aspek sarana dan prasarana, fisik bangunan, dan aspek kebersihan dan keindahan.dp

Dari hasil pembinaan dan penilaian terhadap mesjid-mesjid tersebut akan dilanjutkan dengan penilaian untuk memilih beberapa masjid yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai pemenang lomba kebersihan dan ketertiban masjid dalam Kota Banda Aceh. Dengan terlaksananya pembinaan secara rutin setiap tahun diharapkan tingkat pemahaman dan pengetahuan bagi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) dalam mengelola rumah ibadah semakin baik sehingga akan berdampak kepada meningkatnya tingkat kemakmuran di masjid-masjid dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Selain pembinaan mesjid, pelaksanaan ibadah lainnya adalah melalui MTQ, yang merupakan ajang kreatifitas bagi para qari-qariah, hafizh-hafizah, pensyarah dan penghapal Al-Qur'an. Event ini juga bertujuan untuk mensyiarkan Islam melalui media Al-Qur'an. Khususnya untuk Kota Banda Aceh kegiatan MTQ sudah dilaksanakan secara kontinyu setiap 2 (dua) tahun sekali dan sampai saat ini telah dilaksanakan sebanyak 34 kali. Demikian pula halnya dengan MTQ Aceh yang dilaksanakan secara rutin setiap dua tahun sekali.

B. Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2011 untuk mengisi Keistimewaaan Aceh dibidang Adat Istiadat yang merupakan seperangkat nilai-nilai keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat Istiadat tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh merupakan lembaga non struktural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Dalam menentukan kebijakan di bidang adat serta untuk melestarikan, membina, mengkaji dan mengembangkan Adat-istiadat.

C. Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan Islami merupakan sebuah upaya menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, dan manis tutur katanya baik lisan maupun tulisan. Upaya meningkatkan pendidikan Islami salah satunya adalah melalui dayah yang sudah melembaga dan membudaya di Aceh. Walaupun Aceh memiliki lembaga pendidikan baru namun mayarakat Aceh tetap menjaga keberadaan dayah ini.

Dayah sebagai pusat peradaban nusantara, telah memainkan perannya dalam peningkatan sumber daya manusia terutama dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Gemilang. Dalam Konteks Banda Aceh saat ini Dayah di Banda Aceh berjumlah 33 Dayah dengan 2 Tipe yaitu Salafi (Tradisional) dan Terpadu (Modern).

Tabel 2. 22
Jumlah Dayah, Guru, Santri di Kota Banda Aceh, 2017-2021

Target	Jumlah Dayah, Guru, dan Santri				
	2017	2018	2019	2020	2021
Dayah	29	32	42	45	38
Guru	693	719	899	901	819
Santri	5,875	5,890	6,404	6,451	5934
Ratio Guru/Santri	1:8	1:8	1:7	1:7	1:7

Sumber: Disdikdayah Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 jumlah dayah turun menjadi 38 dayah dibandingkan tahun 2020 sebanyak 45 dayah. Penurunan tersebut karena setelah dilakukan evaluasi terhadap dayah-dayah yang terdaftar dan dikatagorikan sebagai dayah terdapat 7 dayah yang dikeluarkan dari katagori dayah sesuai dengan standar dayah di Kota Banda Aceh. Penurunan jumlah dayah tersebut mengakibatkan penurunan jumlah guru dan santri.

Sampai dengan tahun 2021, tenaga pengajar yang tersedia di 38 Dayah sebesar 819 Guru. Sementara Jumlah Santri nya sebesar 5934 Santri. Meningkatnya jumlah dayah, guru, dan santri menjadi potensi besar dalam mendukung terciptanya Kota Syari'at Islam dalam rangka menyongsong Banda Aceh sebagai Kota Gemilang. Hal ini menjadi peluang dalam mewujudkan sinergisitas antara ulama dengan umara.

Bahwa saat ini semua guru dayah belum bersertifikasi karena belum ada format dari Instansi Pemerintah. Untuk itu perlu dipikirkan langkah-langkah strategis guna mewujudkan sertifikasi Guru Dayah. Terkait dengan akreditasi Dayah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Berdasarkan Data dari Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh sudah ada 12 dayah dengan rincian 4 dayah terakreditasi A, 6 dayah terakreditasi B, 9 dayah terakreditasi C dan 7 dayah terakreditasi Non Tipe (D).

Dalam Konteks saat ini, Dinas Pendidikan Dayah telah melakukan terobosan guna memetakan ciri khas masing-masing Dayah. Secara Umum dapat dibagi menjadi 3 pola Kurikulum yang berkembang Yaitu Pola Kurikulum Pantai Barat Selatan dengan Pendekatan Darussalam, Pantai Timur dengan Pola Al-Aziyah dan Utara dengan Pendekatan Al-Fata. Pendekatan Model Kurukulm yang saat ini muncul khusunya pada Dayah Tradisional tidak terlepas pada 3 Pendekatan diatas. Selain keistimewaan dalam pendidikan dayah yang identik dengan pendidikan islami, Kota Banda Aceh juga mempunyai Majelis Pendidikan Daerah (MPD) merupakan sebuah lembaga setingkat Musyawarah Pimpinan Daerah sebagaimana lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU/MUI) dan Majelis Adat Aceh (MAA).

Lembaga ini hanya ada di Aceh sebagai sebuah kekhususan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. MPD adalah lembaga yang mengkhususkan diri dalam urusan pendidikan. MPD Banda Aceh merupakan lembaga yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. MPD lahir sejak tahun 1990 di Banda Aceh yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990. Kemudian juga dilahirkan di seluruh kabupaten di Aceh.

a. Tugas Pokok MPD
1. Memberi pendapat dan pertimbangan mengenai pendidikan
2. Menyusun konsep-konsep pengembangan sistem pendidikan Islami
3. Mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan
4. Menampung aspirasi masyarakat mengenai pendidikan dan mendorong partisipasi mereka dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan
5. Meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Provinsi Aceh

b. Fungsi MPD
1. Sebagai badan pemikir (*Think tank body*)
2. Sebagai badan pemberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai pendidikan (*advisory body*)

3. Sebagai badan penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan (*motivating body*)
4. Sebagai badan pengawas pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan (*controlling body*)
5. Sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat (*mediating body*)

c. Wewenang MPD

1. Mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.
2. Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Provinsi Aceh.
3. Menjaga standar mutu pendidikan.
4. Mengembangkan sistem pendidikan Islami di Provinsi Aceh.

D. Peran Ulama dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Majelis Permusyawaratan Ulama yang disingkat dengan MPU adalah suatu lembaga independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRK. MPU merupakan wadah untuk meningkatkan peran ulama dalam pembangunan Kota Banda Aceh. MPU merupakan mitra kerja Pemerintahan Daerah dan DPRK dalam perumusan Kebijakan Daerah, yang berfungsi ” memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan berdasarkan Syariat Islam serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan Syariat Islam ”. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, maka MPU Kota Banda Aceh mempunyai tugas:

a. Memberi masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syariat Islam
b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam
c. Melakukan pengkaderan Ulama.
d. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

Kewenangan MPU adalah:

a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh;
b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh telah melaksanakan segenap kegiatan yang telah direncanakan secara proposional dan terstruktur pada sistem perencanaan, dan telah pula melakukan kegiatan yang didasari pada prakarsa insidental, temporal dan profesionalisme keulamaan dengan mengeluarkan:

Tabel 2. 23
Keputusan Keulamaan

No	Tahun		Keterangan
1	2016	a.	Surat Keputusan hasil Mudzakarah Ulama MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Melalui Mudzakarah Ulama Kita Tingkatkan Peran Pemerintah dalam Penetapan Mekanisme Pasar yang Syar'i"
		b.	Surat keputusan hasil Rapat Kerja MPU Kota Banda Aceh dengan tema " Kemitraan MPU dan Pemerintah Kota dalam Meningkatkan Kinerja yang Bersyariah di Kota Banda Aceh"
		c.	Surat Keputusan hasil Lokakarya Ulama dengan tema " Melalui Lokakarya Ulama Kota banda Aceh Kita Aktualisasikan Praktek Penyembelihan Yang Halal dan Higienis "
		d.	Hasil Penelitian tentang Gampong Syariat di Kota Banda Aceh
		e.	Tausiyah tentang Larangan Perayaan Valentine Day Bagi Umat Islam
		f.	Rekomendasi MPU tentang Produk Makanan Halalan Thayyiban kepada Pemerintah Aceh
		g.	Surat Arahan Kepada Pemko Banda Aceh tentang Hasil pembahasan terhadap penulisan Kaligrafi Asma'al-Husna pada Tugu Simpang Lima Kota Banda Aceh
		h.	Surat Arahan kepada Pimpinan PT. Bintang Perkasa Indah Motor
		i.	Surat Arahan kepada Ketua Stand-Up Comedy Banda Aceh
		j.	Surat Arahan kepada Pimpinan CV. Cipta Bintang Manajemen
		k.	Surat Arahan kepada CV. Mahkota Production selaku penyelenggara konser musik religi
		l.	Surat Arahan kepada Pimpinan Boesa Management selaku penyelenggara Aceh Fashion Week
		m.	Surat Arahan kepada Pimpinan CV. Mahkota Production selaku penyelenggara acara Signature Moment

No	Tahun		Keterangan
2	2017	a.	Hasil Penelitian Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat terhadap Konsep Wisata Halal
		b.	Rumusan hasil Mudzakarah Ulama tentang wakaf tunai menuju pemberdayaan ekonomi ummat
3	2018	a.	Tidak ada keputusan apapun pada Tahun 2018 dikarenakan belum terbentuknya pengurusan baru MPU
4	2019	a.	Surat Arahan untuk Kegiatan Malam Resepsi HUT Kota Banda Aceh ke-841
		b.	Surat Arahan untuk Kegiatan PLN Aceh tentang "BUMN Hadir untuk Negeri di Provinsi Aceh Tahun 2019"
		c.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang "Pekan Kreatif Banda Aceh Tahun 2019"
		d.	Surat Arahan Kegiatan untuk Bank Indonesia tentang " Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh (Fesa) 2019"
		e.	Surat Arahan Kegiatan untuk PT Era Baru Mandiri tentang " Amazing Muharram Hijrah & Ukhuwah"
		f.	Surat Arahan kepada Dinas PU Kota Banda Aceh untuk Pembangunan Tugu Tauhid di Ulee Lheue
		g.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Perhubungan Aceh tentang "Malam Keakraban Hari Perhubungan Nasional Tahun 2019"
		h.	Surat Arahan Kegiatan untuk Zawiyah Nurun Nabi "Zikir Akbar, Shalawat dan Doa Bersama Masyarakat Kota Banda Aceh
		i.	Surat Arahan Kegiatan untuk Teater Wanito Ngunandiko Yogyakarta
		j.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang "Banda Aceh Coffee Festival"
		k.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh tentang "Aceh Agro Expo"
		l.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Koperasi dan UKM Aceh tentang "Aceh UMKM Expo 2019"
		m.	Surat Arahan Kegiatan untuk BRI (Persero), Tbk tentang “Pesta Rakyat Simpedes BRI Tahun 2019”
		n.	Surat Arahan Kegiatan untuk Gudang Garam tentang “Pawai Budaya Bersama Gudang Garam”
		o.	Surat Arahan Kegiatan untuk Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tentang " Kutaraja Festival"
		p.	Keputusan Plt. Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/01/2019 tentang Pelaksanaan Musyawarah Ulama Pembentukan MPU Tahun 2019
		q.	Keputusan Plt. Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/02/2019 tentang Penetapan Tim Penguji Baca Kitab Calon Anggota MPU Kota Banda Aceh, pada Musyawarah Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2019
		r.	Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 152 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggota MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		s.	Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 155 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		t.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/010/2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - I Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		u.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/011/2019 tentang Pembentukan Komisi-Komisi MPU Kota Banda Aceh Masa Khidmat 2019-2024
		v.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 017/2019 tentang Pedoman Zakat Fitrah Tahun 2019
		w.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 024/2019 tentang Identifikasi Aliran Sesat dan Wahabi Salafi
		x.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/026 /2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - II Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		y.	Keputusan Ketua MPU Kota Banda Aceh Nomor 451/031/2019 tentang Pelaksanaan Sidang Paripurna - III Tahun 2019 MPU Kota Banda Aceh
		z.	Saran dan nasehat tentang penolakan kedatangan DR. Firanda Andirja Lc, MA
		aa.	Saran dan nasehat tentang Fungsi Masjid di Kota Banda Aceh
5	2020	a.	Tausiyah MPU Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Siaga darurat *Corona virus Disease (Covid-19)* di Kota Banda Aceh
		b.	Tausiyah MPU Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan Dalan Situasi pandemi *Corona Virus Disease (Covid*-19) di Kota Banda Aceh
6	2021	a.	Tausiyah MPU tentang penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dalam situasi pandemi Corona Virus Deseare (COVID-19) di Kota Banda Aceh
		b.	Tausiyah MPU tentang Peperangan Ghaza Palestina dan Pencegahan COVID-19
		c.	Tausiyah MPU tentang pelaksanaan Qurban 1441 h dan pelaksanaan ibadah sesuai protocol kesehatan di masa pandemic Covid-19
		d.	Tausiyah MPU tentang Pemilihan Geuchik Langsung
		e.	Tausiyah MPU tentang pemberian tahun Hijriah pada surat dinas
		f.	Tausiyah MPU tentang Qanun penyelenggaraan pariwisata natal Kota Banda Aceh

Sumber: MPU Kota Banda Aceh, 2021

Sertifikasi produk halal dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan lembaga pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan (LPPOM). Untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ke LPPOM MPU Aceh. Adapun persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku usaha sebagai pemohon, antara lain: KTP, Profil Perusahaan, matrik bahan baku dan diagram

alur proses produksi. Tata cara sertifikasi halal dimulai dengan menyampaikan pengajuan permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MPU, melengkapi persyaratan yang diminta dan penjadwalan audit.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan wajib menguraikan layanan urusan wajib dasar dan layanan urusan wajib non-dasar.

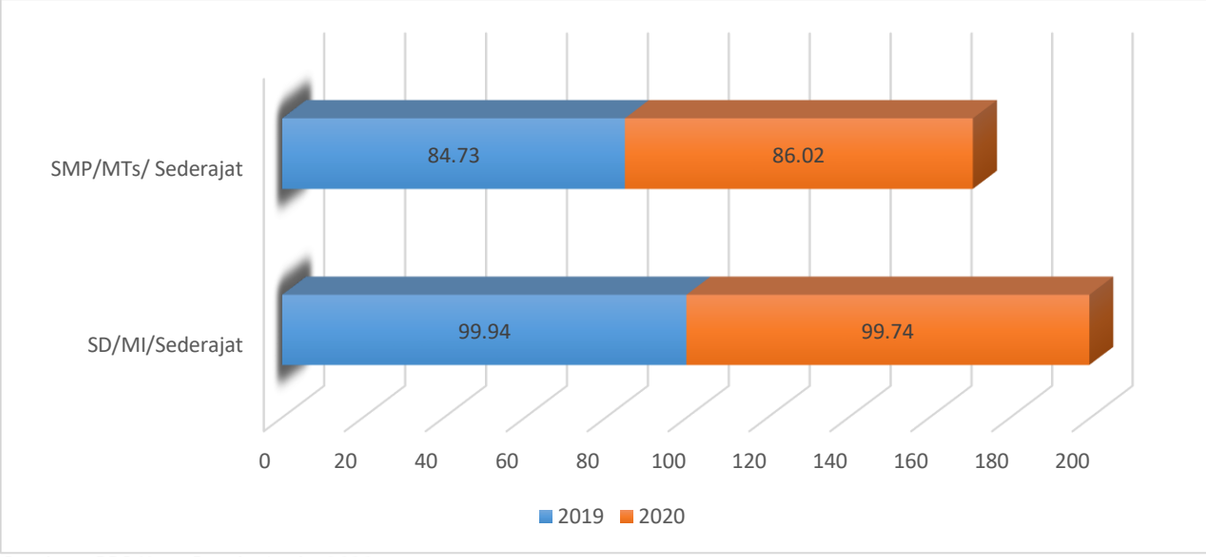
A. Layanan Urusan Wajib Dasar

Layanan urusan wajib dasar menjelaskan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan social.

a. Pendidikan

1) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. APM tahun 2020 di Kota Banda Aceh untuk tingkat SD/MI adalah 99,74 persen dan SMP/MTs 86,02 persen. Penyebaran sekolah untuk jenjang SD/MI sampai SMP/MTs sudah merata dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh sampai ke daerah pinggiran kota. Grafik berikut mengambarkan perkembangan APM Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2020.



Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2020

Gambar 2. 31
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kota Banda Aceh Tahun 2019-2020

2) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio anak yang masih sekolah pada usia tertentu (usia sekolah) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sama tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APS juga merupakan indikator yang digunakan sebagai petunjuk keberhasilan program wajib belajar. Program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS umur 7 – 12 tahun lebih dari 95 persen dan APS umur 13 – 15 tahun lebih dari 70 persen. Berdasarkan tabel dibawah ini diketahui bahwa pada tahun ajaran 2021 APS usia 7 – 12 tahun sebesar 99,98 persen. Sedangkan untuk APS usia 13 – 15 tahun di tahun 2021 mencapai 99,99 Angka tersebut menunjukkan pencapaian APS usia 13 – 15 tahun dan APS usia 7 – 12 tahun sudah melebihi standar yang ditetapkan.

Tabel 2. 24
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	APS SD/MI (usia 7 -12 tahun)	100	100	99,95	99,99	99,98
2	APS SMP/MTs (usia 13 – 15 tahun)	100	100	100	99,89	99,99

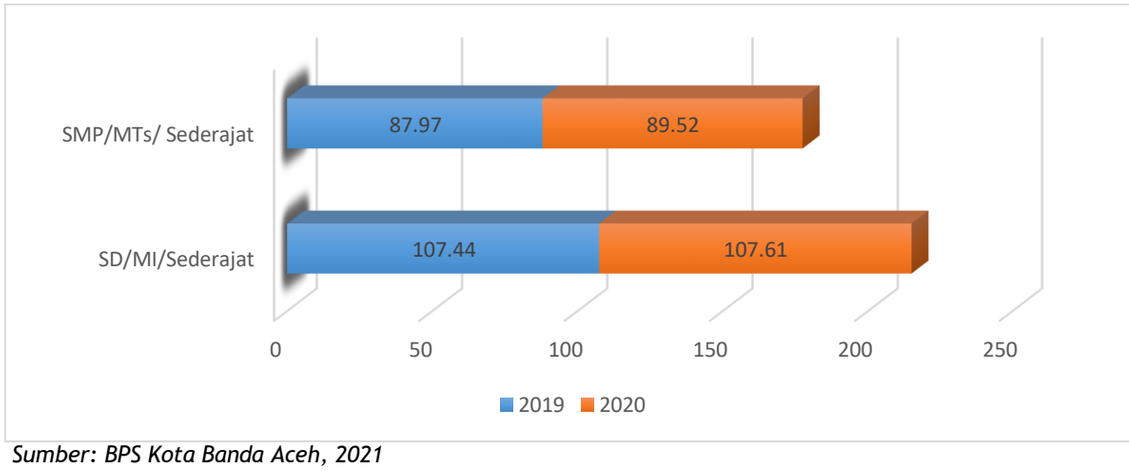
Sumber BPS Kota Banda Aceh, 2021

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya

serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK yang tinggi menandakan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tercatat pada tahun 2019, APK tertinggi di Kota Banda Aceh terdapat di tingkat SD/MI/Sederajat yaitu 107,44 persen dan yang terendah di tingkat SMP/MTs/Sederajat yaitu 87,97 persen. Pada tahun 2020, baik tingkat SD dan SMP mengalami kenaikan Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut ditambah dengan siswa lain penduduk luar Kota Banda Aceh yang bersekolah di Kota Banda Aceh. Berikut grafik penjelasan perkembangan APK Kota Banda Aceh tahun 2019 – 2020.



Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2021

Tabel 2. 25
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Banda Aceh Tahun 2019 – 2020

4) Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan juga semakin besar dan dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan, sedangkan pengaruh tidak langsung akan terlihat pada pola pikir masyarakat, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka cara berpikir juga akan lebih maju dan mudah menerima perubahan.

Berdasarkan tabel berikut menunjukkan angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Banda Aceh pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs tahun 2020/2021 mencapai 100 persen yang artinya pencapaian tingkat kelulusan sudah sangat baik. APT selama kurun waktu 2017/2018 – 2020/2021 terus meningkat sehingga mencapai 100 persen.

Tabel 2. 26
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	**SD/MI**					
1.1.	Jumlah siswa Lulusan di jenjang pendidikan SD/MI	4.217	5,035	5,771	5,703	5,611
1.2.	Jumlah Siswa Tkt. VI	4,218	5,035	5,771	5,703	5,611
1.3.	APT SD/MI	99,97	100	100	100	100
2	**SMP/MTs**					
2.1.	Jumlah siswa lulusan di jenjang SMP/MTs	4,471	4,427	4,417	5,237	4,874
2.2.	Jumlah siswa Tkt. III	4,471	4,432	4,420	5,237	4,874
2.3.	APT SMP/MTs	100	99,89	99,93	100	100

Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, 2021

5) Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu, hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan dibidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan

anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan adanya keterbatasan si anak.

Jumlah siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah pada tahun 2021 mengalami penurunan. Dari data yang diperolah bahwa di kecamatan Banda Raya yang masih sedikit lebih banyak untuk siswa putus sekolah. Sedangkan di Kecamatan Baiturrahman, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng. Menurut jenis kelamin kelompok siswa laki-laki memiliki kecenderung yang lebih tinggi untuk meninggalkan sekolah dibandingkan siswa perempuan. Hal ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 27
Perkembangan Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Banda Aceh Tahun 2021

No.	Kecamatan	Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan									Keterangan
		7-12 thn			13-15 thn			16-18 thn			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Meuraxa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Baiturrahman	-	-	-	1		1	-	-	-	
3	Kuta Alam	-	-	-				-	-	-	
4	Syiah Kuala	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
5	Kuta Raja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Ulee Kareng	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
7	Lueng Bata	-	-	-				-	-	-	
8	Banda Raya	-	-	-	1	1	2	-	-	-	
9	Jaya Baru	-	-	-				-	-	-	
		-	**-**	**-**	**3**	**2**	**5**	-	-	-	

Sumber Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, 2021

6) Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan adalah persentase lulusan dari sekolah pada level dasar untuk melanjutkan sekolah ke level selanjutnya. Di Kota Banda Aceh, jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SMP dan jumlah lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 28
Perkembangan Angka Melanjutkan Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2021

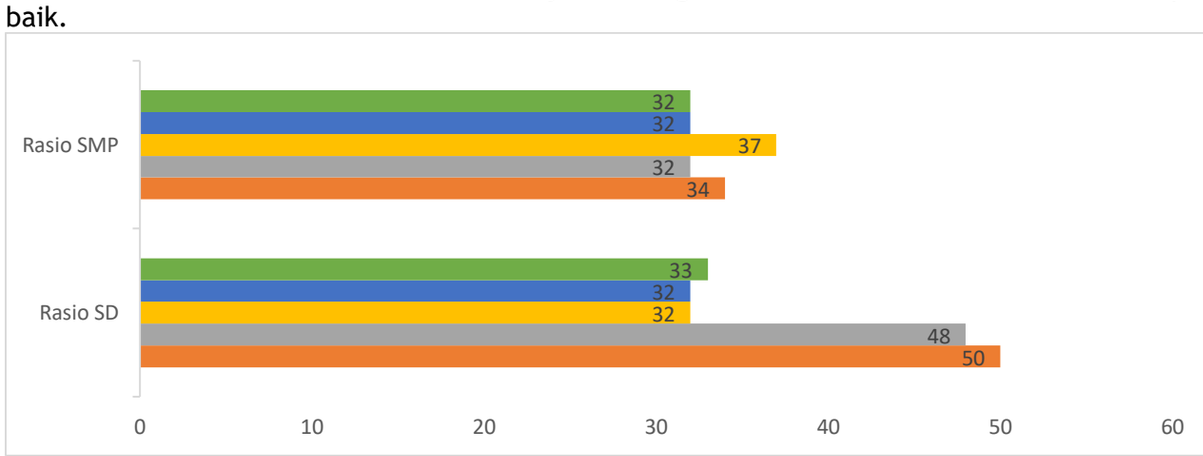
No	Jenjang Pendidikan	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
1	SMP/MTs/Paket B	105,75	72,92	89,80	91,82	100
2	SMA/SMK/MA/ Paket C	138,50	0	0	0	0

Sumber Profil Pendidikan 2017 s.d 2021

7) Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI cukup baik.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 1 : 33. Kondisi ini menujukkan bahwa ketersediaan SD/MI sudah ideal. Jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 1 : 32. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketersediaan SMP/MTs sudah cukup baik.



Sumber: Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2021

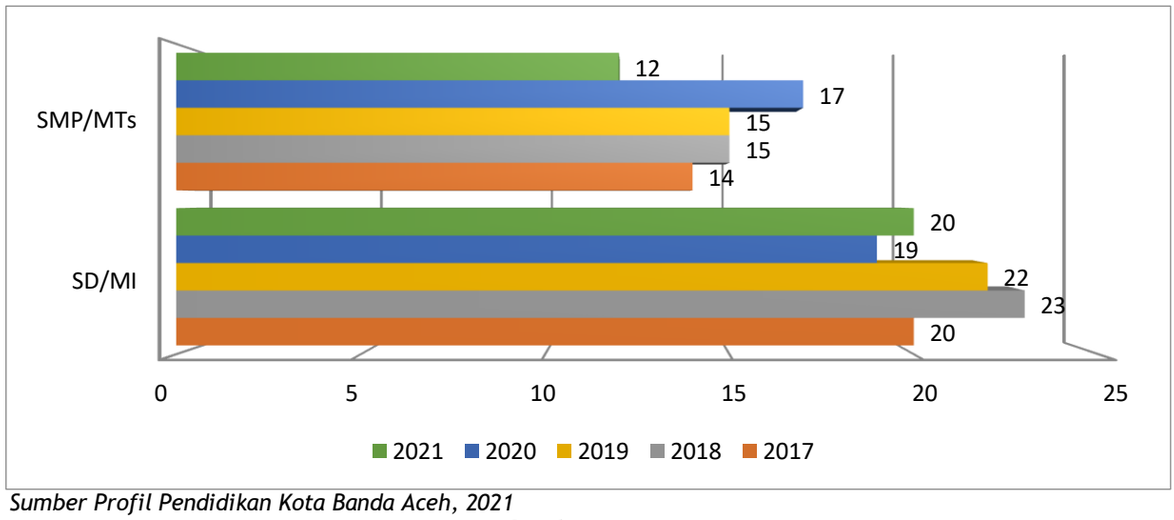
Gambar 2. 32
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

8) Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang mulai berlaku efektif tahun ajaran 2016/2017menetapkan tunjangan profesi akan didapatkan oleh guru jika mengajar di satuan pendidikan dengan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru adalah sebagai berikut :

a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 1 : 15;
b. untuk SD atau yang sederajat 1 : 20;
c. untuk MI atau yang sederajat 1 : 15;
d. untuk SMP atau yang sederajat 1 : 20;
e. untuk MTs atau yang sederajat 1 : 15;
f. untuk SMA atau yang sederajat 1 : 20;
g. untuk MA atau yang sederajat 1 : 15;
h. untuk SMK atau yang sederajat 1 : 15; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 1 : 12.

Untuk rasio guru terhadap murid SD/MI dan SMP/MTs yang ada di Kota Banda Aceh pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber Profil Pendidikan Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 33
Rasio Guru/Murid Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

Selama tahun 2017 hingga tahun 2021, dibandingkan standar nasional terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa pada per-jenjang sekolah sudah memenuhi standar minimal. Pencapaian ini sangat menggembirakan. Sudah saatnya Kota Banda Aceh tidak hanya melihat rasio jumlah kuantitas guru terhadap murid saja namun perlu melihat rasio jumlah ketersediaan guru menurut mata pelajaran yang ada di SD/MI dan SMP/MTs. Hal ini untuk mendapatkan pemerataan yang proporsional di setiap sekolah dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh.

9) Jumlah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang Tercapai

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 SNP, yaitu : 1) standar isi, 2) standar kompetensi lulusan,

3) standar proses 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 11 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/ madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Pencapaian SNP di Kota Banda Aceh dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan secara rata-rata. Pada tahun 2020, capaian untuk SNP SD dan SMP mencapai 94 persen dan 90,64 persen. Namun pada tahun 2021, capaian SNP mengalami penurunan secara rata-rata. Pada SNP SD capaian yang diberikan adalah 85,27 persen dan SMP adalah 81,71 persen. Penurunan SNP ini harus segera menjadi perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kembali meningkatkan pencapaian delapan indikator SNP tersebut. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 29
Tabel Jumlah Standar Nasional Pendidikan di Kota Banda Aceh

No	Indikator SNP	2020				2021			
		Nilai Capaian SNP		Capaian SNP (%)		Nilai Capaian SNP		Capaian SNP (%)	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,98	6,99	99,71	99,86	6,27	6,02	89,57	86,00
2.	Standar Isi	6,96	6,96	99,43	99,43	5,84	5,48	83,43	78,29
3.	Standar Proses	6,97	6,98	99,57	99,86	5,80	5,59	82,86	79,86
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,99	6,99	99,86	99,86	6,32	6,03	90,29	86,14
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5,88	5,85	84,00	83,00	6,72	6,44	96,00	92,00
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	5,07	4,57	72,43	58,14	4,98	4,96	71,14	70,86
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,91	6,44	98,71	85,29	6,17	5,76	88,14	82,29
8	Standar Pembiayaan	6,96	6,97	99,43	99,71	5,65	5,48	80,71	78,29
Rata-rata SD dan SMP		**6,59**	**6,47**	**94,14**	**90,64**	**5,97**	**5,72**	**85,27**	**81,71**

Sumber: Disdikbud Kota Banda Aceh, 2020-2021

10) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang amat penting sebagai penjamin mutu pendidikan. Oleh karena itu, guru sebagai penjamin mutu dalam proses pendidikan merupakan tenaga pendidik profesional yang dituntut mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompetensi yang teruji yang dinyatakan dengan sertifikat profesi untuk dapat mewujudkan kinerja yang bermutu.

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik yang dimiliki oleh para guru. Dari data perkembangan guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-!V terus mengalami peningkatan. Perkembangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 30
Perkembangan Guru Memenuhi Kualifikasi S-I/D-IV Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan
1	Guru yang memenuhi kualifiksi SI/ D-IV	82,00	69,16	86,96	89,07	90,59	Tidak termasuk Guru Depag

Sumber: Profil Pendidikan, 2017-2021

Peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan strata-1 dan diploma-4 terus mengalami peningkatan di sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Namun, diharapkan kualifikasi pendidikan guru yang memenuhi S-1 dan D-IV bisa mencapai 100 persen sehingga diharapkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh bisa menjadi lebih baik.

b. Kesehatan

1) Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal merupakan pantauan terhadap kasus kematian bayi yang berumur kurang dari 1 bulan pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup dikalikan 1000. Di kota banda aceh, angka kematian neonatal ini hanya terdapat 3 kasus/kejadian atau 0.07% saja. Umumnya dikarenakan faktor gizi, kurangnya pemeriksaan pada periode kehamilan, adanya komplikasi sehingga bayi lahir dengan berat badan rendah.

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah jumlah bayi yang hidup per 1.000 bayi. Angka kelangsungan hidup bayi ini dihitung dari per-1.000 jumlah bayi dikurangin jumlah kematian bayi. Semakin besar angka kelangsungan hidup bayi menunjukkan semakin baik indikator kesehatannya.

Tabel 2. 31
Tabel Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Tahun	Angka Kelangsungan Hidup Bayi
2017	998
2018	998
2019	998
2020	998
2021	999

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2021

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa Angka kelangsungan hidup bayi di kota Banda Aceh dalam 5 tahun terakhir stabil dan meningkat di tahun 2021 yang mencapai 999. Adanya peningkatan terhadap angka kelangsungan hidup bayi dapat tercapai di sebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama meningkatkan mutu SDM kesehatan dengan pelatihan dan akreditasi fasilitas kesehatan, kedua dengan melakukan penguatan manajemen dan sistem informasi (seluruh kematian dilakukan audit), ketiga meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (melalui program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga /PIS-PK) dan hal lain peningkatan sistem rujukan, menjamin ter integrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier.

3) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Jadi posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Posyandu dibentuk bertujuan untuk :

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas)
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Tujuan pembentukan posyandu tersebut didukung dengan 5 kegiatan pokok posyandu, yaitu :

1. KIA
2. KB
3. lmunisasi
4. Gizi
5. Penanggulangan Diare.

Tabel 2. 32
Perkembangan Rasio Pelayanan Posyandu Per-Satuan Balita di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
2017	113	20.653	1 : 182
2018	113	21.739	1 : 192
2019	114	20.838	1 : 182
2020	114	27.572	1 : 241
2021	114	11.323	1 : 99

Sumber Statistik Banda Aceh, 2021

Perkembangan rasio pelayanan posyandu di Kota Banda Aceh untuk per-satuan balita terus meningkat. Dari tahun 2017 yang hanya bisa melayani 1 posyandu untuk 182 balita, maka pada tahun 2001 sudah bisa melayani 1 posyandu untuk 99 balita. Jumlah ini sangat menggembirakan karena setiap gampong semakin sadar untuk berperan aktif untuk memantau dan menjaga terus kesehatana balita yang ada di lingkungannya melalui layanan Posyandu.

4) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia meliputi pelayanan rujukan yang berupa:

1. Pelayanan Kesehatan Dasar
   Pada umumnya pelayanan dasar dilaksanakan di puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Pelayanan lainnya di wilayah kerja puskesmas selain rumah sakit.
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan
   Pada umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Pelayanan keperawatan diperlukan, baik dalam pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Pelayanan kesehatan dasar yang diterapkan di Indonesia memegang peranan penting dalam pemberian layanan kesehatan yang dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan. Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang terjangkau, maka sarana dan prasarana pelayanan kesehatan harus tersedia atau tersebar di setiap kecamatan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajad kesehatan yang lebih baik. Kota Banda Aceh saat ini telah memiliki 11 puskesmas, 27 puskesmas pembantu, 34 polindes/poskedes, 114 posyandu, 54 klinik/balai kesehatan, dan 7 puskesmas keliling yang tersebar di 9 kecamatan dan 90 gampong. Gambaran fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 33
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2021

Fasilitas Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Sakit Umum	12	13	13	13	14
Rumah Bersalin	7	7	7	7	7
Puskesmas	11	11	11	11	11
Puskesmas Pembantu	27	27	27	27	27
Polindes/Poskedes	34	34	34	34	34
Posyandu	113	113	114	114	114
Klinik/Balai Kesehatan	33	33	39	39	54
Puskesmas Keliling	7	7	7	7	7

Sumber: Statistik Banda Aceh, 2021

5) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan dibidang pelayanan langsung seperti Rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian.

Pelayanan kesehatan rumah sakit di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kinerja yang baik. Ketersediaan rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta sudah tersebar dan mencukupi untuk pelayanan kesehatan rujukan. Dengan adanya program BPJS dan JKA pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat sudah memberikan pelayanan yang maksimal.

Tabel 2. 34
Perkembangan Rasio Rumah Sakit Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Sakit (Umum + Swasta)	12	13	13	13	14
Jumlah Penduduk	259,913	265,111	268,156	252,899	276,223
Rasio	0,063877315	1 : 22	0,0628125	1 : 21	1 : 18

Sumber Statistik Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dilihat bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit masih memenuhi standar rasio rumah per-satuan penduduk. Idealnya satu rumah sakit melayani seratus ribu penduduk, sementara data diatas menunjukkan rata-rata rumah sakit melayani penduduk dibawah seratus ribu penduduk. Namun over capacity pelayanan dapat terjadi apabila banyaknya pasien dari luar wilayah Kota Banda Aceh yang dirujuk ke rumah sakit di Banda Aceh terutama rumah sakit pemerintah.

6) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk adalah Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah (di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain) per 100.000

penduduk. Ketersediaan jumlah dokter memberikan gambaran pelayanan kesehatan dari sisi kuantitas tenaga medis terhadap masyarakat. Pola hidup yang semakin berubah terutama diperkotaan menjadikan masyarakat rentan terhadap gejala penyakit maupun keluhan kesehatan lainnya yang membutuhkan penanganan dokter. Kota Banda Aceh sebagai pusat pelayanan kesehatan di Provinsi Aceh memiliki beban besar dalam pelayanan kesehatan terutama penyediaan tenaga medis. Tabel berikut menggambarkan kondisi pelayanan dokter terhadap penduduk di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 35
Perkembangan Rasio Dokter Per-Satuan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

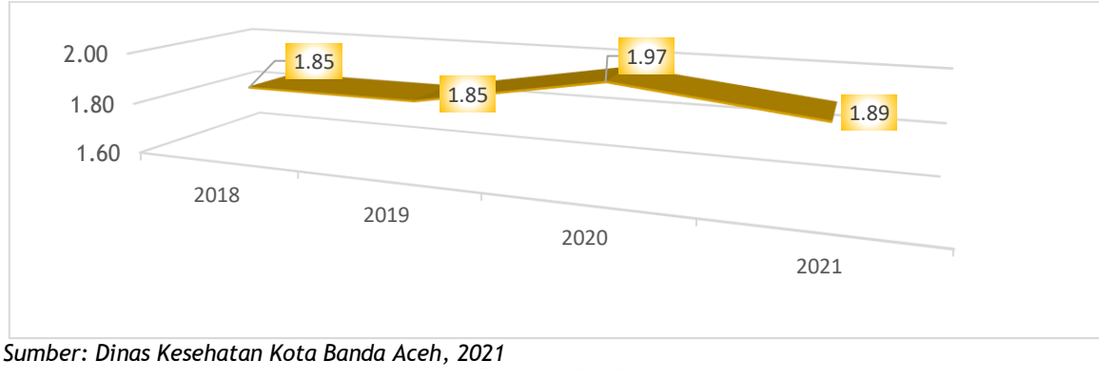
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Dokter (rumah sakit dan puskesmas)	724	585	637	469	697
Jumlah Penduduk	259,913	265,111	268,156	276,304	276,223
Rasio/100.000 penduduk	1 : 29	1 : 14	1 : 33	1 : 16	1 : 32

Sumber BPS Kota Banda Aceh dan Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah dokter yang tersedia di Kota Banda Aceh cenderung menurun sejak tahun 2017 sampai dengan 2021. Penurunan jumlah dokter terbesar terjadi pada tahun 2020 yang diakibakan karena pandemi *Covid-19*. Namun, pada tahun 2021 jumlah dokter kembali meningkat. Jika dilihat dari rasio dokter per satuan penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan jumlah dokter yang ada di Kota Banda Aceh sudah sangat cukup dalam melayani 100.000 penduduk. Bahkan rasio ini sangat kecil yang artinya di tahun 2021, 1 orang dokter melayani 32 penduduk.

7) Rasio Tenaga Medis di Puskesmas per Satuan Penduduk

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Salah satu pengelompokan tenaga kesehatan adalah tenaga medis. Rasio tenaga medis persatuan penduduk Tahun 2018 s/d 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 34
Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk Tahun 2018-2021

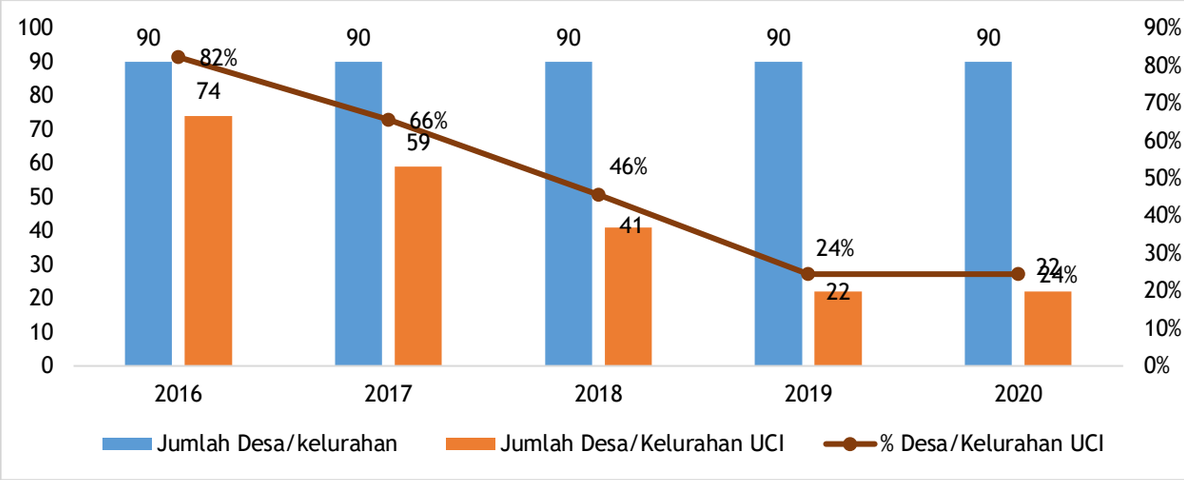
Rasio tenaga medis di Puskesmas Kota Banda Aceh Tahun 2017 adalah 1.85. Rasio ini terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 sebesa 1,89. Terjadi peningkatan rasio ini diakibatkan karena adanya penurunan jumlah tenaga medis yang melakukan pelayanan pada UPTD Puskesmas Kota Banda Aceh.

8) Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Imunisasi sangat penting untuk melindungi bayi dari penyakit berbahaya dan menular, imunisasi bersifat komunitas maknanya adalah imunisasi harus bersifat menyeluruh atau dalam kata lain keseluruhan anak harus diimunisasi, kalau ada anak yang tidak diimunisasi akan terlindungi dari anak yang di imunisasi di lingkungan nya yang ditarget dalam standar desa UCI *(universal child immunization)*.

Sedangkan untuk desa UCI (Universal Child Immunization) yang bermakna suatu keadaan dimana suatu desa minimal bayi terimunisasi lengkap 80%. Namun persentase masyarakat yang melakukan imunisasi di desa menjadi lebih kecil. Pada pada tahun 2016 ada 74 desa (82%), pada tahun 2017 ada 59 desa (66%), pada tahun 2018 ada 41 desa (46%), pada tahun 2019 dan 2020 ada 22 desa (24%) dari 90 desa di Kota Banda Aceh. Target yang paling baik

untuk desa UCI adalah 100%, dimana angka tersebut masih jauh dari pencapaian untuk Kota Banda Aceh.



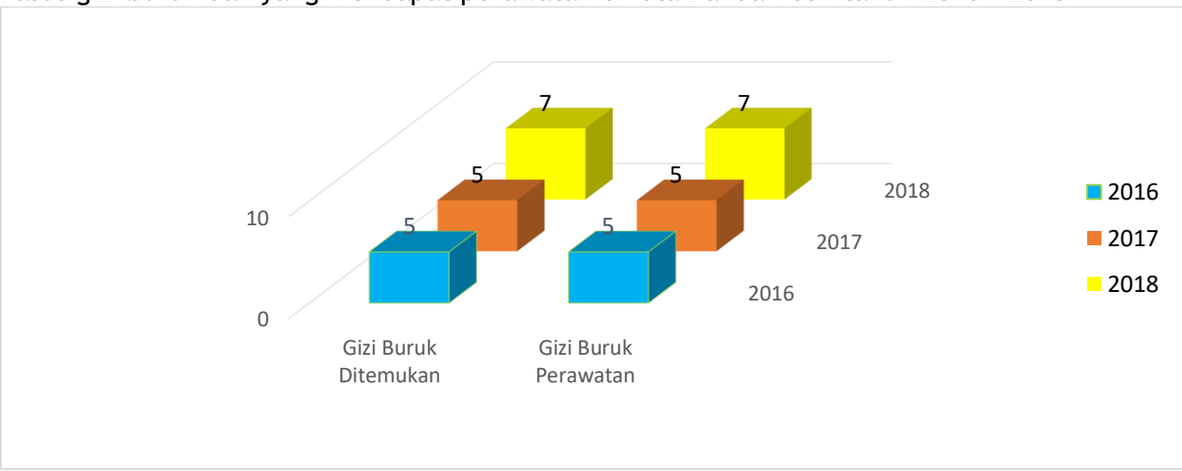
Sumber: Profil Kesehatan Aceh, 2021

Gambar 2. 35
Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Tahun 2016-2020 di Kota Banda Aceh

Dari hasil persentase cakupan desa UCI angkanya mengalami penurunan. Namun hal ini bukan langsung disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melakukan imunisasi menjadi rendah. Hal yang menyebabkan penurunan ini bisa saja disebabkan karena sebagian masyarakat terutama masyarakat berpendapatan menengah keatas yang ada di Kota Banda Aceh melakukan imunisasi langsung ke rumah sakit atau praktek dokter. Berbagai telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan desa UCI seperti, sosialisasi dari program imunisasi dan dari ulama, peningkatan kapasitas petugas, sweeping langsung ke masyarakat dan lain-lain, supaya cakupan desa UCI bisa menigkat lebih baik.

9) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Perkembangan kasus balita gizi buruk di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan di tahun 2018, namun kesemuanya mendapat perawatan sesuai standar kesehatan sehingga gizi buruk yang dialami tersebut dapat ditangani dengan baik. Grafik berikut memberikan gambaran perkembangan cakupan kasus gizi buruk dan yang mendapat perawatan dikota Banda Aceh tahun 2016 – 2018



Sumber: Profil Kesehatan Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 36
Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit demam berdarah *dengue* (DBD) adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan oleh nyamuk aedes aegypty. Penyakit DBD masih merupakan salah satu penyakit yang menjadi

masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya tingginya curah hujan sehingga banyak terjadi genangan air pada wadah atau tempat yang dapat menampung air hujan sebagai tempat perindukan nyamuk DBD di lingkungan luar sekitar rumah, faktor yang lainnya juga dapat dilihat dari tingkat pengetahuan, pemahaman dan kepedulian serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat yang masih rendah, bisa dikarenakan tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai kesempatan untuk memantau tempat-tempat perindukan nyamuk DBD yang ada di dalam rumah, seperti ditempat penampungan air dispenser, kulkas, bak mandi, vas bunga, talang air yang tersumbat dan lain lain. Hal ini menjadi salah satu faktor berkembang biaknya nyamuk DBD secara cepat.

Tabel 2. 36
Data Sebaran Kasus DBD Tahun 2017-2021

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Kuta Alam	32	13	49	14	3
Lueng Bata	32	7	34	9	1
Meuraxa	15	23	41	11	4
Syiah Kuala	26	15	60	15	0
Ulee Kareng	21	6	36	6	3
Banda Raya	25	11	31	14	1
Jaya Baru	37	13	42	15	0
Kuta Raja	11	11	13	2	0
Baiturrahman	37	17	38	12	0
Total	**236**	**111**	**344**	**98**	**13**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2021

Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jauh mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 (236 kasus), tahun 2018 (111 kasus), tahun 2019 mencapai angka tertinggi di 344 kasus yang terlaporkan. Namun di tahun 2020 menurun menjadi 98 kasus dan pada tahun 2021 menjadi 13 kasus.

Penanggulangan DBD yang masih sangat efektif adalah dengan melakukan Gerakan 3M Plus, yaitu Menguras, Menutup dan Mengubur serta Menghindari Gigitan Nyamuk. Pengasapan atau *fogging* hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik nyamuk DBD masih tetap bertahan hidup dan menjadi nyamuk dewasa setelah beberapa hari kemudian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pemberantasan tempat-tempat perindukan nyamuk DBD dengan cara Pemberdayaan Masyarakat melalui Kader JUMANTIK = Juru Pemantau Jentik.

11) Jumlah Kasus Baru HIV

Pada tahun 2021, jumlah kasus baru positif HIV adalah 41 orang dan positif AIDS sebanyak 21 orang dengan proporsi kelompok umur pada usia 20-24 tahun dan terbanyak pada usia 25-49 tahun. Kasus ini sangat berkaitan dengan hubungan seksual yang berisiko atau bukan dengan pasangan yang sah, meski tidak tertutup kemungkinan penularan dengan cara-cara non seksual seperti penggunaan narkoba.

Tabel 2. 37
Jumlah Kasus Baru HIV

No	Kelompok Umur	HIV				Aids			
		L	P	L+P	Proporsi Kelompok Umur	L	P	L+P	Proporsi Kelompok Umur
1	≤ 4 Tahun	0	0	0	0,00	0	0	0	0.00
2	5 - 14 Tahun	1	0	1	0,00	0	0	0	0.00
3	15 - 19 Tahun	1	0	1	0,00	0	0	0	0.00
4	20 - 24 Tahun	15	0	15	0,00	1	0	1	0.00
5	25 - 49 Tahun	23	1	24	0,00	18	1	19	0.00
6	≥ 50 Tahun	0	0	0	0,00	1	0	1	0.00
Jumlah		**40**	**1**	**41**		**20**	**1**	**21**	

Sumber: Bidang P2PL Dinkes Kota Banda Aceh Tahun 2021

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pekerjaan Umum

I) Kondisi Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh mutlak diperlukan, mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan Kota Banda Aceh. Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan

barang. Kota Banda Aceh pada tahun 2021 ini memiliki jalan nasional 32,56 Km, jalan provinsi 22,61 Km, dan jalan kota 620,96 Km. Untuk kondisi jalan Kota Banda Aceh bisa dilihat pada tabel berikut.

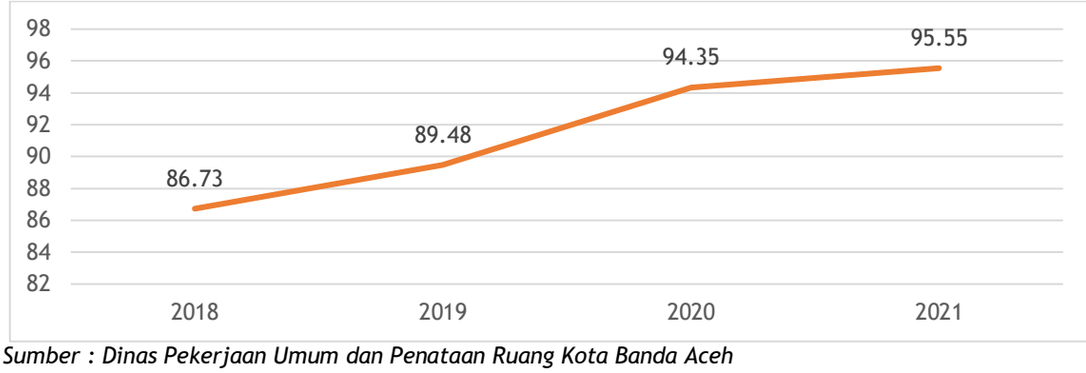
Tabel 2. 38
Status Kondisi Jalan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Panjang Jalan (km) (SK No. 221A Thn 2010)	Kondisi Ruas Jalan							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2017	707,343	569.780	80,55	92.110	13,02	31.470	4,44	13.983	1,97
2018	707,343	542.712	76,73	97.596	13,80	61.297	8,67	5.738	0,81
2019	707,343	558.634	78,98	101.646	14,37	42.365	5,99	4.698	0,66
2020	620.960	585.890	94,35	22.329	3,59	10.795	1,74	1.949	0,31
2021	620.960	591.030	95,18	18.891	3,04	9.112	1,47	1.926	0,31

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2021

Tabel 2.38 menunjukkan menunjukkan status kondisi jalan Kota Banda Aceh pada tahun 2021, 95,18 persen dalam kondisi baik, 3,04 persen dalam kondisi sedang 1,47 persen dalam kondisi rusak ringan, dan hanya 0,31 persen dalam keadaan rusak berat.

Pertumbuhan sosial, ekonomi, dan pembangunan di kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan infrastruktur jalan yang memperlancar, merangsang dan memacu aktifitas pembangunan. Saat ini panjang jalan di Kota Banda Aceh 620,960 km dengan kondisi baik 95,55 persen.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh

Gambar 2. 37
Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2018 - 2021

Gambar di atas terlihat bahwa trend panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 terus menunjukkan peningkatan.

Dari total jalan yang ada di Kota Banda Aceh, panjang jalan yang memiliki trotoar mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebelumnya 23,753 km menjadi 59,435 km di tahun 2021. Walaupun mengalami peningkatan namun jika melihat persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Banda Aceh masih sangat kecil. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyediakan trotoar dan drainase untuk menciptakan Kota Banda Aceh yang bebas dari banjir. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.39.

Tabel 2. 39
Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	23,753	59,435	59,435	59,435	59,435
Panjang seluruh jalan kota (km)	707,343	707,343	707,343	620,960	620,960
Persentase	3,36	8,40	8,40	9,57	9,57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2021

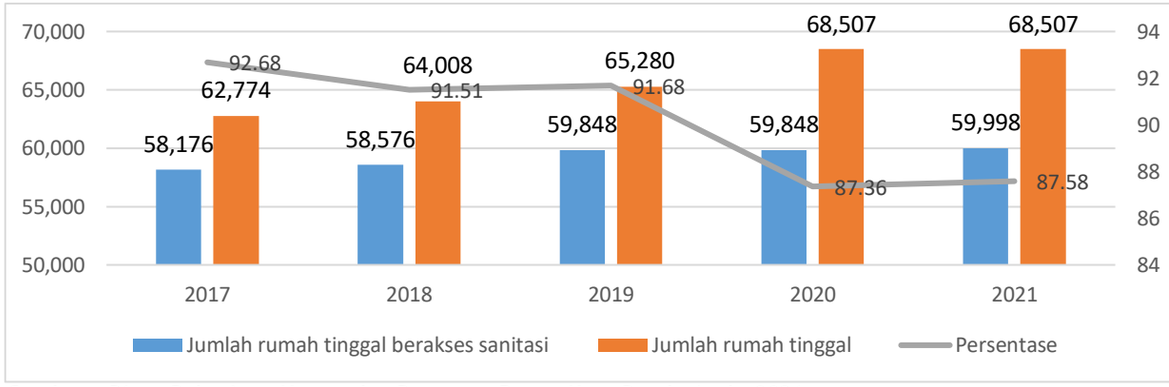
II) Sanitasi

Sektor sanitasi yang mencakupi bidang air limbah, persampahan dan drainase merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pengelolaan sanitasi secara komprehensif, berkelanjutandan partisipatif untuk mencapai target layanan sektor sanitasi yang mengacu

pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sanitasi maupun peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Pusat maupun Daerah.

Pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta pelayanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Koordinasi mendalam antar dinas/ SKPD perlu dilakukan untuk dapat melaksanakan pengembangan sanitasi secara terpadu dan berkesinambungan sebagai bentuk percepatan pembangunan sanitasi kota.

Sebagai gambaran terhadap jumlah rumah tinggal yang berakses sanitasi pada tahun 2017 mencapai 92,68 persen. Namun pada tahun 2021, jumlah rumah tinggal yang berakses sanitasi menurun menjadi 87,58 persen. Penurunan ini menjadi perhatian Kota Banda Aceh dan perlu ditingkatkan karena seharusnya jumlah rumah tinggal bersanitasi perlu untuk terus ditingkatkan per tahunnya, hingga mencapai 100 persen. Lebih jelasnya rincian jumlah rumah tangga berakses sanitasi ini dapat dilihat pada gambar 2.38.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 38
Jumlah Rumah Tangga yang Bersanitasi Tahun 2017 – 2021

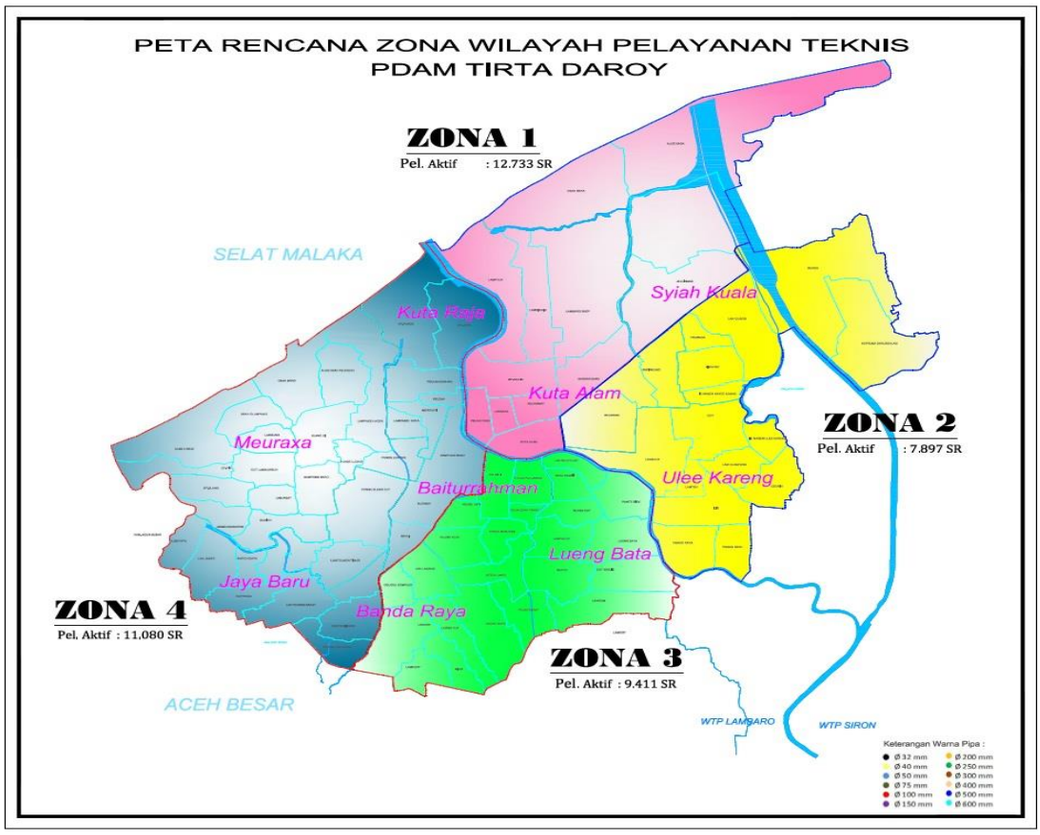
III) Air Minum

Kebutuhan akan air bersih saat ini meningkat dengan tajam sejalan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air minum untuk hidup sehat. Dilain pihak kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas produksi dan jaringan pipa distribusi air minum.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku, Kota Banda Aceh mempunyai potensi sumber air yang dapat dipergunakan,yaitu Sungai Krueng Aceh yang mempunyai debit minimal 10,38m^3/ detik atau 10.000 liter/detik pada musim kemarau panjang. Terdapat dua unit Instalasi Pengolahan Air Minum yang sampai saat ini beroperasi di Kota Banda Aceh, yaitu IPA Lambaro dengan kapasitas terpasang 435 liter/detik dan IPA Siron ber-kapasitas 60 liter/detik. Lokasi *intake* kedua IPA tersebut adalah di Sungai Krueng Aceh.

PDAM Tirta Daroy diharapkan telah mampu merehabilitasi dan membangun kembali seluruh sarana dan prasarana sistem penyediaan air bersih, berupa instalasi pengolahan, sistem distribusi dan sarana penunjangnya sampai dengan tahun 2029. Target pelayananan terhadap pelanggan PDAM Tirta Daroy sampai dengan tahun 2029 minimal mencapai 100%. Untuk mendukung terlaksananya dengan baik system penyediaan air minum Kota Banda Aceh, system pendistribusian dan pola pelayanan air minum Kota Banda Aceh pun harus mengikuti pertumbuhan kepadatan kota yang terus meningkat yaitu salah satunya dengan membentuk Zona Distribusi untuk membagi blok pelayanan secara teknis perpipaan. Tujuan pembentukan Zona Distribusi, antara lain :

1. Standar Pelayanan 4 K dapat tercapai dan terlaksanan dengan baik;
2. Memudahkan dalam manajemen pengelolaan;
3. Memudahkan dalam manajemen pemeliharaan;
4. Meminimalisir tingginya tingkat kehilangan air (NRW).



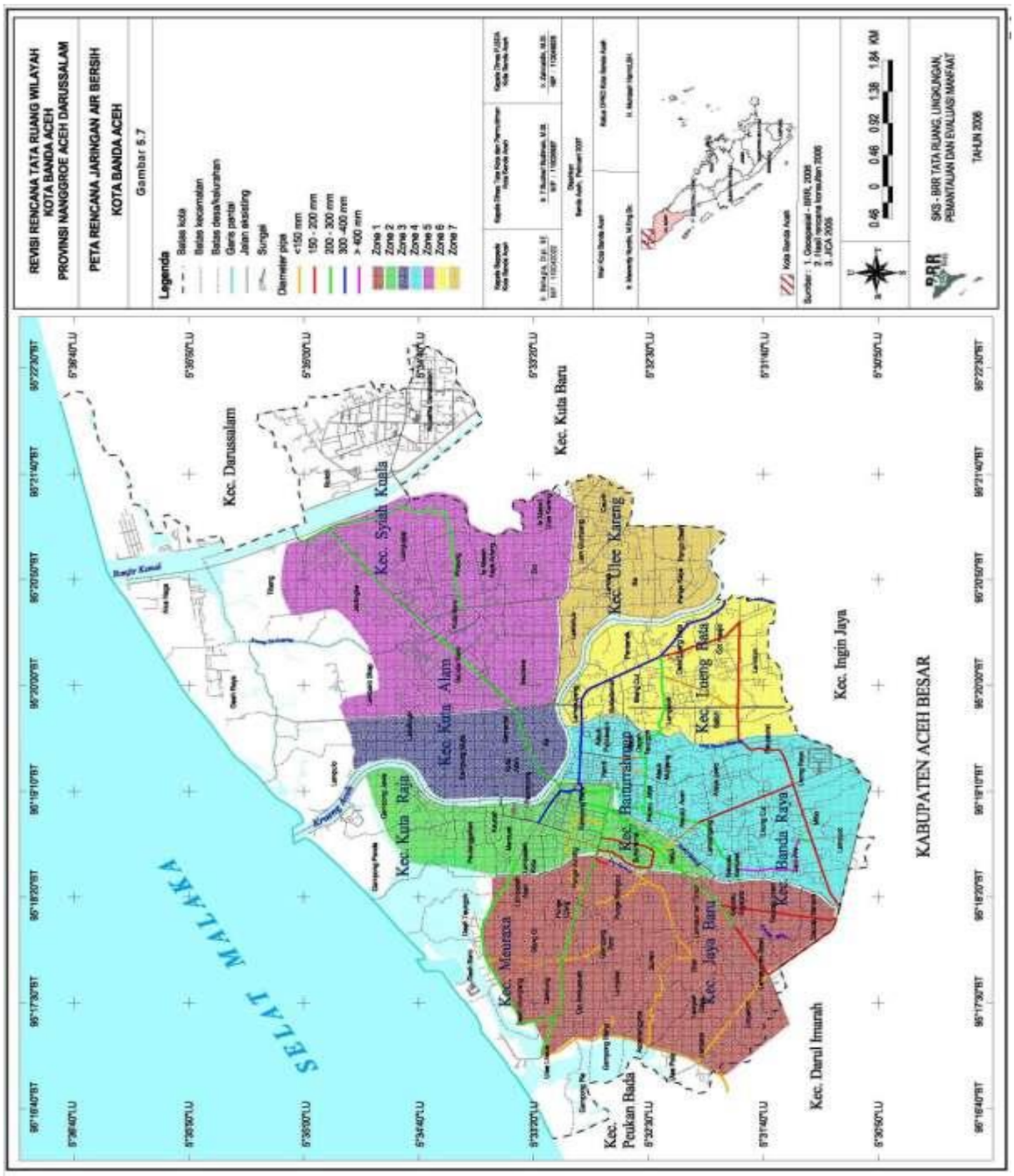
Sumber :PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahun 2017

Gambar 2. 39
Peta Rencana Zona Wilayah Pelayanan Teknis PDAM Tirta Daroy

Sumber air yang digunakan oleh PDAM Tirta Daroy adalah dari Krueng Aceh, sungai terbesar yang membelah Kota Banda Aceh. Untuk menjaga adanya intrusi air laut kedalam sungai Krueng Aceh telah terpasang unit bendung karet. Namun demikian, kondisi bendung karet saat ini dalam keadaan rusak dan membutuhkan perbaikan atau pembangunan unit yang baru. Saat ini pemerintah Kota Banda Aceh melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumetera 1 tengah merencanakan pembangunan bendung karet baru sehingga kualitas air baku dapat terjaga dengan optimal.

Berdasarkan data tahun 2008, pada tahun 2007 debit Sungai Krueng Aceh 177,88m^3/detik atau dengan rata-rata per-bulan sebesar 14,82 m^3/detik, sehingga sungai Krueng Aceh sebagai sumber air baku yang potensial bagi penyediaan air bersih Kota Banda Aceh dan perlu dijaga dengan baik, karena air permukaan sangat rawan terhadap pengaruh pencemaran. Upaya-upaya untuk tetap menjaga kuantitas air dan kualitas air yang baik harus dilaksanakan dengan strategi yang jelas dan program kegiatan yang baik, antara lain dengan:(lihat Gambar.2.40)

- Menjaga kualitas air baku agar tetap memenuhi daya dukungnya dengan melakukan monitoring secara rutin,
- Menindak tegas tanpa ada tawar menawar pada semua industri dan atau lainnya yang membuang limbah cairnya kebadan air sehingga kualitas mengalami penurunan,
- Melakukan pengamanan terhadap kawasan daerah pengaliran sungai, agar tetap menjadi daerah tangkapan air yang baik bagi Sungai Krueng Aceh.



Sumber: Dinas PUPR Kota Banda Aceh, 2008

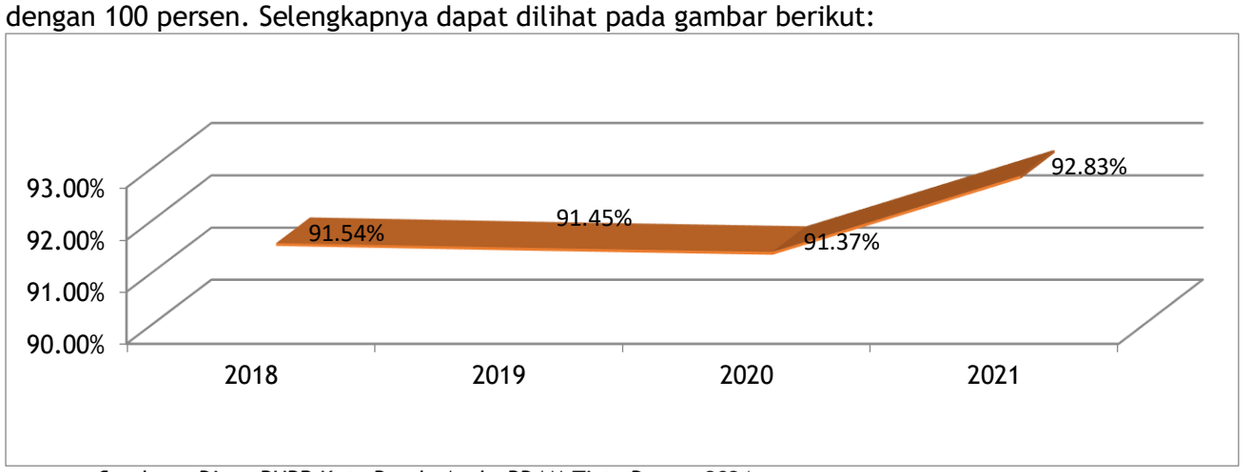
Gambar 2. 40
Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kota Banda Aceh Tahun 2029

Salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini adalah pemanfaatan Sungai Sarah sebagai sumber air bersih untuk warga Kota Banda Aceh. Sungai Sarah lebih tepat untuk menjadi sumber air karena masih alami dan belum tercemar. Walau begitu pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar harus mengkomunikasikan hal ini dengan baik, karena sungai Sarah berada di wilayah Aceh Besar.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum disebutkan bahwa setiap pelanggan air minum berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Data Tahun 2018-2021 menunjukkan persentase cakupan pelayanan air minum di Kota Banda Aceh telah mencapai 92,83 persen. Walaupun persentase menunjukkan kenaikan namun cakupan layanan ini belum mencapai 100 persen. Untuk itu, Pemerintah Kota Banda Aceh

masih perlu untuk memberikan cakupan layanan air minum kepada penduduknya sampai dengan 100 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinas PUPR Kota Banda Aceh, PDAM Tirta Daroy, 2021

Gambar 2. 41
Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Banda Aceh, Tahun 2018-2021

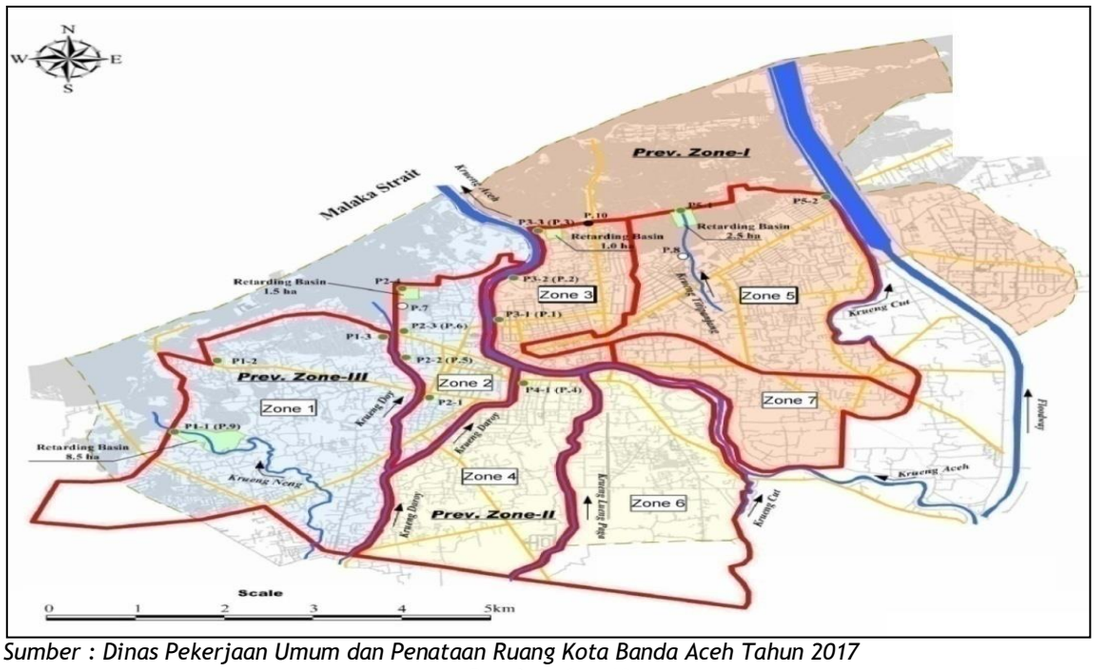
IV) Drainase

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa pemeliharan jaringan drainase merupakan upaya menjaga dan mengamankan jaringan drainase kota agar dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Pengertian pemeliharaan adalah semua pekerjaan rutin dan berulang yang diperlukan untuk memelihara suatu fasilitas sehingga fasilitas tersebut dapat berfungsi maksimal sesuai dengan perencanaan.

Untuk itu dalam perencanaan drainase terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan perlu pertimbangan seperti : pendangkalan saluran (sedimentasi), limbah, sampah dan pasang surut air laut, dan pada tempat-tempat tertentu seperti pada pertemuan drainase dengan badan air *(receiving waters)* khususnya di dekat pantai perlu direncanakan bangunan kolam pengumpul yang dilengkapi dengan pumping station karena aliran secara gravitasi sudah tidak mungkin dilakukan secara optimal.

Kota Banda Aceh termasuk salah satu kota pantai, dengan topografi yang berada pada elevasi 0,80 meter di atas permukaan air laut. Secara hidrolis Kota Banda Aceh menerima banjir kiriman, banjir genangan dan banjir pasang air laut, berhubung kondisi topografi yang relative datar maka banjir ini tidak dapat dibuang dengan gravitasi.

Pada tahun 2005 melalui Satuan Kerja Sementara Pengendalian Banjir Kota Banda Aceh dan Pengaman Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi Aceh melaksanakan SID Drainase Induk Kota Banda Aceh dan melakukan Review Master Plan Drainase Banda Aceh dengan membagi wilayah pengaliran air menjadi 8 zona drainase seluas 4.706 Ha, sebagaimana terlihat pada gambar 2.42.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2017

Gambar 2. 42
Peta Pembagian Zona Drainase Kota Banda Aceh

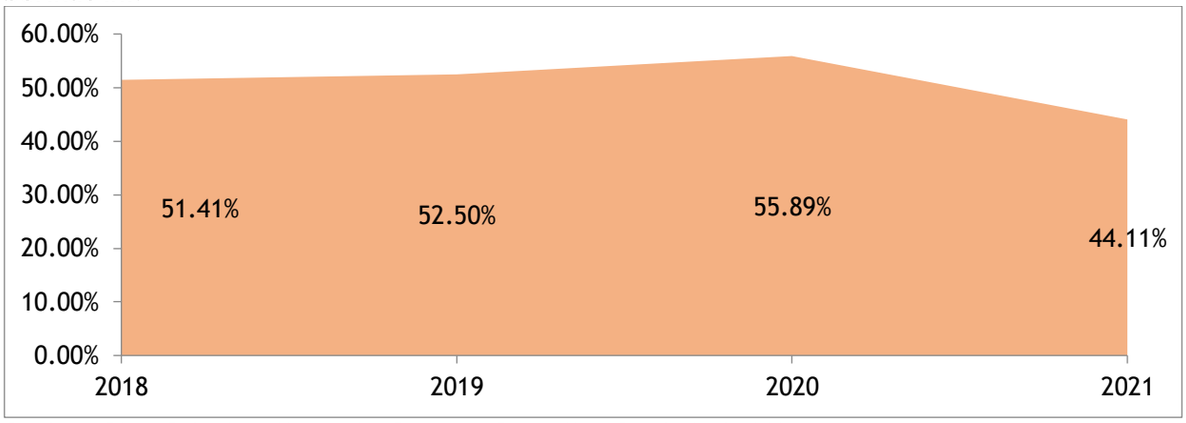
Panjang saluran drainase khususnya drainase utama *(main drain)* di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 adalah ± 191,83 km, dengan rincian kondisi baik sepanjang 191.69 km dan kondisi rusak sepanjang 31,99 km. Adapun rincian target pencapaian kondisi *maindrain* dalam keadaan baik dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.40 dibawah.

Tabel 2. 40
Data Kondisi Drainase Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Tahun	Panjang Total Drainase (km)		Kondisi Drainase							
	Makro	Mikro	Baik (km)		Sedang (km)		Rusak Ringan (km)		Rusak Berat (km)	
			Makro	Mikro	Makro	Mikro	Makro	Mikro	Makro	Mikro
2017	186,61	2.248,24	155,72	1.729,37	5,80	48,910	21,82	465,96	3,26	4
2018	188,90	2.258,90	157,38	1.745,34	5,80	47,673	22,95	461,91	2,75	4
2019	189,70	2.260,40	159,46	1.769,64	5,80	45,941	22,95	440,82	1,51	4
2020	190,30	2.262,55	160,48	1.812,13	5,80	45,858	22,95	400,56	1,09	4
2021	191,83	2.263,30	191,69	1.821,78	5,80	44,570	22,95	392,91	9,04	4

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2021

Banjir genangan adalah banjir yang berasal dari air hujan lokal yang kemudian menyebabkan genangan. Genangan artinya peristiwa dimana air terkonsentrasi disuatu tempat yang umumnya pada tempat rendah. Kota Banda Aceh terus berupaya mengurangi terjadinya kawasan banjir genangan. Gambaran kawasan banjir genangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



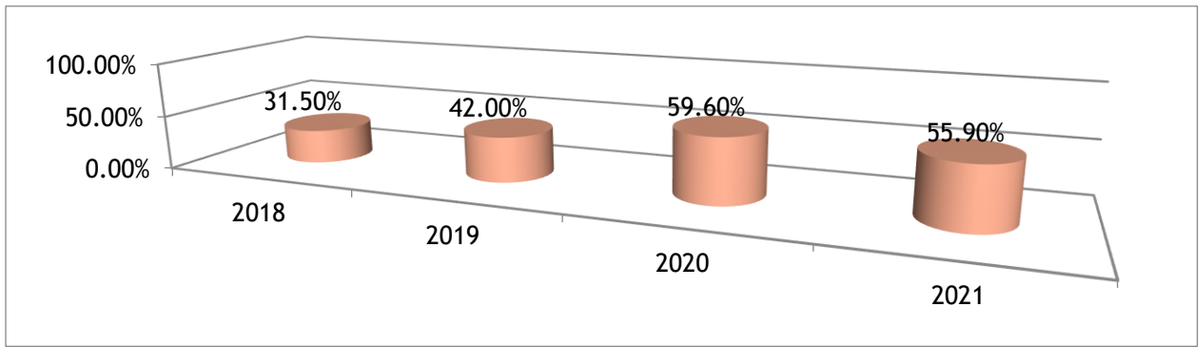
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 43
Persentase Pengurangan Kawasan Rawan Banjir Genangan di Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2021

Jumlah luas kawasan rawan banjir genangan di Kota Banda Aceh mengalami penurunan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dari 55,89 persen menjadi 42,67 persen dari keseluruhan luas kawasan yang berpotensi tergenang. Diharapkan Kota Banda Aceh bisa terus mengurangi jumlah kawasan rawan banjir genangan sehingga Kota Banda Aceh bisa mewujudkan kota tanpa banjir genangan.

V) Aksesibilitas terhadap Disabilitas

Bangunan umum yang memiliki aksesibiltas terhadap disabilitas merupakan hal yang perlu disediakan dalam setiap daerah. Hal ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Pedoman Teknis ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia. Kota Banda Aceh sudah memiliki 55,90 persen bangunan umum yang memiliki aksesibiltas terhadap disabilitas pada tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.44 berikut:



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2017

Gambar 2. 44
Bangunan Umum yang Memiliki Aksesibilitas terhadap Disabilitas, Tahun 2018-2021

Dari Gambar 2.43 terlihat bahwa Kota Banda Aceh sudah mempunyai bangunan umum yang mempunyai aksesibilitas terhadap disabilitas melebih 50 persen. Selanjutnya perlu adanya peningkatan menjadi 100 persen.

2) Penataan Ruang

I) Rasio Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau *(Green Openspaces)* adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/ kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau *(Green Openspaces)* di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki Pemerintah Kota Banda Aceh dari Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel 2.41 sebagai berikut.

Tabel 2. 41
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	779,42	779,42	779,42	779,42	779,42
2.	Luas wilayah	6.136	5.903	5.903	5.903	5.903
3.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (2:1)	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

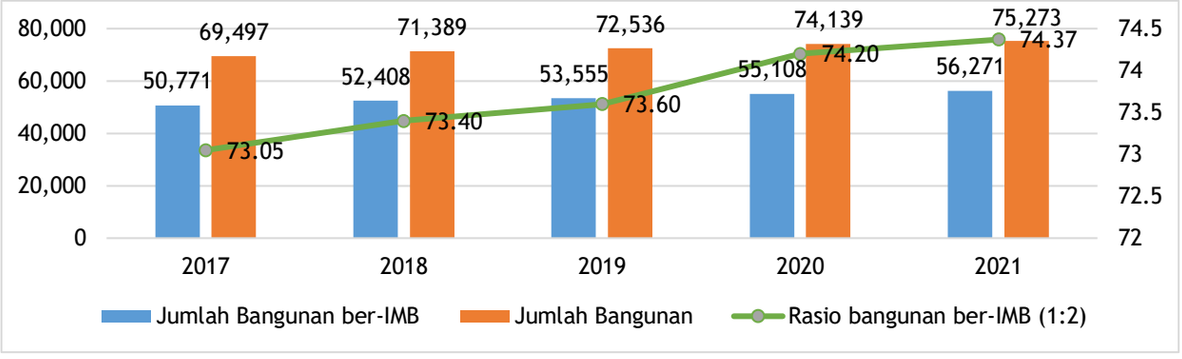
Target capaian Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 persen dari luas wilayah, yaitu 10 persen RTH private dan 20 persen RTH Publik. Adapun luas RTH publik Tahun 2021 yang ada di Kota Banda Aceh saat ini baru mencapai 13,20% persen dari luas kota. Ini belum memenuhi RTH yang ditetapkan. Perlu upaya pemerintah Kota Banda Aceh untuk mensiasati pemenuhan RTH.

II) Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Jumlah bangunan di Kota Banda Aceh Tahun 2021 sebanyak 75.273 unit. Bangunan di Kota Banda Aceh yang terbangun sebelum tahun 2004 (sebelum terjadinya bencana Tsunami) tidak memiliki akurasi yang lengkap terhadap dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengingat banyak arsip IMB yang hilang pasca terjadinya tsunami. Pasca tsunami terjadinya

pertumbuhan bangunan yang begitu pesat dari tahun ke tahun, bahkan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005 sampai dengan 2009 adanya pertumbuhan bangunan antara 2.000 unit sampai dengan 3.000 unit bangunan setiap tahunnya. Data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, untuk bangunan yang telah terbangun sebelum tahun 2004 diprediksikan 50% memiliki IMB, sedangkan pasca tsunami pada saat rehab dan rekon pembangunan bangunan yang memiliki IMB sebanyak ±60% bangunan telah melakukan pengurusan IMB dari jumlah yang dibangun.

Analisis data bangunan yang memiliki IMB di Kota Banda Aceh, dikaji dengan perkiraan persentase pada bangunan yang terbangun sebelum tahun 2004 dan dikombinasikan dengan data bangunan yang mengurus IMB baik bangunan telah ada maupun bangunan yang dibangun baru dari tahun ke tahun. Rasio bangunan ber IMB di Kota Banda Aceh tersebut dapat dilihat pada gambar 2.45.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, 2021

Gambar 2. 45
Jumlah Bangunan ber IMB Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Jika dilihat dari persentase jumlah bangunan yang memiliki IMB dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Artinya hampir 75 persen jumlah bangunan yang ada di Kota Banda Aceh sudah memiliki izin bangunan.

III) Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Jumlah ruang publik yang berubah peruntukannya adalah jumlah ruang publik yang tersedia dibandingkan dengan jumlah ruang publik yang berubah fungsinya. Dari data yang ada di Tabel 2.43. Kota Banda Aceh tidak mempunyai ruang publik yang berubah peruntukannya.

Tabel 2. 42
Jumlah Ruang Publik yang Tersedia

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah ruang publik yang tersedia	779,42	779,42	779,42	779,42	779,42
2.	Ruang publik yg berubah fungsi (ha)	0	0	0	0	0
3.	Ruang publik yg berubah peruntukannya (%)	0	0	0	0	0

Sumber: - RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029

IV) Ketaatan Terhadap RTRW

Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan Penataan Ruang yang berpijak pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Qanun (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam pengembangan Kota Banda Aceh yang mengacu pada Qanun tersebut seperti penyesuaian pemanfaatan lahan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang yang ada dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Salah satu indikator ketaatan terhadap RTRW Kota adalah pelaksanaan pembangunan baik bangunan pemerintah, bangunan swasta, bangunan masyarakat yang dibangun sesuai dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW Kota Banda Aceh. Peningkatan pemahaman dalam implementasi penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi penataan ruang

kepada setiap *stakeholder*, sehingga diprediksikan setiap tahunnya ditargetkan adanya peningkatan kesesuaian pembangunan dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan dan berimplikasi pada peningkatan rasio ketaatan terhadap RTRW.

Tabel 2. 43
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi RTRW	71,07	73,41	73,83	78,57	81,07
2	Rencana Peruntukan RTRW	100	100	100	100	100
3	Rasio (1/2)	0,71	0,73	0,74	0,79	0,81

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan jumlah kesesuaian pembangunan yang dilihat dari ketaatan terhadap RTRW mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2017-2021. Kenaikan dari terjadi sebesar 10 persen. Artinya kesadaran dalam pembangunan di Kota Banda Aceh dalam melakukan pembangunan sudah semakin membaik.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rasio Rumah Layak Huni

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi perumahan layak huni makin besar seiring dengan meningkatnya jumlah pembangunan perumahan yang merupakan dampak dari meningkatnya jumlah penduduk. Dalam lingkungan perumahan harus terdapat fasilitas-fasilitas yang menunjang berkegiatan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelayakan perumahan yang dihuni sehingga dapat memberikan rasa nyaman, aman, tentram dan sejahtera bagi penghuninya. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan katalisator. Dalam mewujudkan perumahan yang layak huni, dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni menjadi penting. Gambaran jumlah rumah layak huni dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 44
Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah	63.806	66.024	67.613	68.507	54.689
2	Jumlah Rumah Layak Huni	63.480	64.144	65.852	64.314	50.424
Persentase		**99,44**	**97,88**	**98,13**	**93,88**	**92,20**

Sumber: Dinas Perkim Kota Banda Aceh, 2021

Jumlah rumah layak huni pada tahun 2017 telah mencapai 63.480 unit. Namun, jumlah rumah layak huni pada tahun 2021 menurun menjadi 50.424 unit. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam mengindentifikasi rumah layak huni sebelum tahun 2020. Namun, ini tetap menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah melalui dinas terkait dimana jika dibandingkan antara jumlah rumah dengan jumlah rumah layak huni yang ada di tahun 2021, masih ada 7,80 persen lagi rumah yang belum layak huni di Kota Banda Aceh.

2) Persentase Permukiman yang Tertata

Pemukiman yang tertata adalah permukiman yang dibangun menurut tata ruang yang tepat dengan memperhatikan hal dasar dalam sebuah permukiman, seperti akses jalan, sanitasi, air bersih, dan sebagainya. Persentase permukiman yang tertata dapat diukur dari perbandingan luas pemukiman yang tertata dengan jumlah permukiman keseluruhan. Persentase luas pemukiman yang tertata di Kota Banda Aceh bisa dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2. 45
Persentase Luas Pemukiman Tertata

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Luas Area Permukiman tertata (Ha)	464,23	480,39	620,56	1.485,83
2	Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha)	2.635.99	2.635.99	2.635.99	1.936,83
	Persentase	**17,61**	**18,22**	**23,54**	**76,71**

Sumber: Dinas Perkim, 2021

Persentase permukiman yang tertata di Kota Banda Aceh terus meningkat sejak 2018 sampai dengan 2021. Pada tahun 2018, jumlah permukiman yang tertata adalah 17,61 persen, kemudian meningkat menjadi 18,22 persen di tahun 2019. Peningkatan terus terjadi di tahun 2020 sebesar 23,54 persen dan tahun 2021 sebesar 76,71 persen.

3) Kawasan Permukiman Kumuh

Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh belum sepenuhnya terlepas dari permasalahan lingkungan bersih yang bebas dari kawasan kumuh. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman kumuh yang umumnya terjadi pada masyarakat miskin adalah rendahnya kualitas lingkungan dan kesehatan yang dianggap sebagai bagian kota yang harus disingkirkan. Terbentuknya pemukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slump area* sering dilihat berpotensi menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena bisa menjadi sumber timbulnya berbagai masalah lingkungan, kesehatan, dan perilaku menyimpang, seperti kejahatan, serta sumber penyakit sosial lainnya.

Tertatanya kawasan permukiman kumuh akan memberikan manfaat terhadap lingkungan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan mengurangi kekumuhan
2. Mengurangi dampak pencemaran lingkungan
3. Mengurangi tingkat bahaya pada saat bencana
4. Mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi karena tidak tersedianya drainase lingkungan yang layak

Berdasarkan hasil Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Tahun Anggaran 2021, luas area permukiman kumuh mengalami penurunan dari 461,48 ha menjadi 451 ha. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan yang telah dilakukan di berbagai wilayah permukiman kumuh sudah baik. Namun perlu juga dilakukan upaya pencegahan agar tidak ada penambahan lokasi kumuh di Kota Banda Aceh. Diharapkan Kota Banda Aceh bisa mewujudkan terciptanya kotaku (kota tanpa kumuh) sehingga target 0% daerah kumuh dapat terwujud.

Tabel 2. 46
Luas Kawasan Kumuh Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	537,19	485,29	21,06	461,48	451,40
2	Luas Wilayah (Ha)	59.002	59.002	59.002	59.002	59.002
3	Luas Penanganan (Ha)	51,9	464,23	16,16	4,90	N/A
4	Sisa Luas Kawasan (Ha)	485,29	21,06	4,90	456,58	451,40

Sumber: Dinas Perkim, 2021

Tabel 2.47 menunjukkan luas kawasan kumuh yang ada di Kota Banda Aceh sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 terus menurun. Pada tahun 2020, luas kawasan kumuh meningkat yang disebabkan karena perbedaan dalam penilaian kawasan kumuh. Sejak tahun 2020, luas kawasan kumuh dihitung tidak hanya dalam penanganan kawasan kumuh saja, namun telah menambahkan luas kawasan yang yang berpotensi kumuh dan perlu dicegah menjadi kawasan kumuh.

Pembangunan kawasan permukiman kumuh yang perlu ditekankan adalah pada pembangunan sarana prasarana dasar permukiman seperti jalan, drainase, pengelolaan sampah dan lampu jalan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena kebutuhan dasar dari sarana prasarana permukiman merupakan hal utama terkait dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, yaitu meningkatnya akses masyarakat dari kawasan permukiman ke pusat aktifitas perekonomian berupa pertokoan dan pasar.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh dengan kenderaan dinas sehingga menciptakan rasa tentram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat. Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dalam wilayah kecamatan Kota Banda Aceh. Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Tabel 2. 47
Cakupan Patroli Personil Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Regu	8	13	13	13	14
2	Jumlah Wilayah	9	9	9	9	9
3	Cakupan Patroli	2,67	4,33	4,33	4,33	4,66

Sumber: Satpol PP Kota Banda Aceh, 2021

Dari Tabel 2.48 di atas, tabel cakupan patroli sudah memenuhi 3 (tiga) kali patroli sebagai standar minimal, sejak tahun 2018 sampai dengan 2021.

2) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Pelanggaran terhadap perda/ qanun yang mengandung unsur pidana, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melalui PPNS meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 Tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 48
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (kasus)	126	241	66	163
2.	Jumlah pelanggaran K3 (kasus)	129	273	66	164
3.	Persentase penyelesaian K3 (%)	97,67	88,28	100	99,40

Sumber: Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2021.

Pada Tahun 2018 sampai dengan 2021, persentase penyelesaian K3 terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2021, dari 164 pelanggaran K3, sebanyak 163 kasus berhasil diselesaikan. Hanya 1 kasus belum berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian kasus di Tahun 2021 sebesar 99,40 persen dari total kasus. Di samping itu, pada tahun 2024 akan diadakan kegiatan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pilkada dan Pilchiksung, ini merupakan kegiatan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, Pilpers, Pileg, Pilkada direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Sedangkan Pilchiksung di Kota Banda Aceh akan dilaksanakan khusus kepada Kepala Desa atau keuchik yang direncanakan akan diadakan serentak pada tahun 2023 dan 2025.

3) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman, perindustrian/ pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pda kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Rumus Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran yaitu:

$$\frac{\Sigma \text{ Luas WMK (luas lingkaran)}}{\Sigma \text{ luas potensi kebakaran}} \times 100\ \%$$

$$\frac{6 \text{ WMK } (7.5)}{61{,}36} \times 100\ \%$$

$$= 73,\ 34\ \%$$

Oleh Karena itu Kota Banda Aceh harus membentuk 2 (dua) WMK lagi untuk Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 100 %.

$$\frac{8 \text{ WMK } (7{,}5)}{61{,}36} \times 100\ \%$$

$$= 97{,}78\ \%$$

Tabel 2. 49
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Banda Aceh

Tahun	Wilayah Manajemen Kebakaran (km²)			Luas Kota Banda Aceh (km²)	Persentase (%)
2017	19,64	5	Pos	61,36	160,04
2018	19,64	5	Pos	61,36	160,04
2019	19,64	5	Pos	61,36	160,04
2020	19,64	5	Pos	61,36	160,04
2021	19,64	5	Pos	61,36	160,04

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh, 2021

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Banda Aceh sejak 2017 sampai dengan 2021 masih memiliki 5 pos.

4) Tingkat Waktu Tanggap *(Renponse Time Rate)* Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)

Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/ penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap *(Response Time Rate)* daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/ industri yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 2. 50
Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time) Layanan

Tahun	Kasus di WMK yang Tanggap 15 Menit	Kasus Kebakaran Dalam WMK	Persentase(%)
2017	58	58	86,56
2018	42	42	100
2019	26	26	100
2020	48	48	100
2021*	50	50	100

**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Data tingkat waktu tanggap darurat layanan untuk kebakaran di Kota Banda Aceh sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 terus membaik. Seluruh kasus kebakaran yang terjadi di Kota Banda Aceh, pelayanan DPKP sudah memenuhi waktu tanggap darurat mencapai 100 persen.

Jumlah kasus kebakaran sejak tahun 2017–2021 adalah 395 kasus, yang didominasi oleh perumahan/permukiman sebanyak 140 kasus, kemudian bangunan perkantoran sebanyak 139 kasus, dan hutang/ilalang sebanyak 116 kasus.

Tabel 2. 51
Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2017 – 2021

No	Jenis Kebakaran	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Bangunan Perkantoran Pemerintah/ Swasta	36	7	7	20	43
2	Perumahan/pemukiman penduduk.	34	13	30	17	24
3	Hutan/ ilalang/ semak bulukar	15	13	59	3	7
	JUMLAH	**85**	**33**	**96**	**40**	**74**

Sumber : DPKP Kota Banda Aceh

Jika dilihat trend kasus setiap tahunnya untuk tahun 2017-2021, jumlah kasus kebakaran di tahun 2017 adalah 85 kasus dan kemudian menurun menjadi 33 kasus di tahun 2018. Namun pada tahun 2019 kembali meningkat dan kemudian menurun pada tahun 2020 dan 2021.

5) Persentase Penegakan Perda

Penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk menjamin dan memastikan perda/qanun dan peraturan walikota tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda/ qanun dan peraturan walikota, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Penegakkan Perda/ Qanun Daerah dari

Tahun 2018 sampai Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 52
Persentase Penegakan Perda Tahun 2018-2021 Kabupaten/Kota

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penyelesaian penegakan perda (kasus)	372	762	421	436
2	Jumlah pelanggaran perda (kasus)	531	920	421	436
3	Persentase penegakan perda (persen)	70,06	82,83	100	100

Sumber: Satpol PP dan WH, 2021

Persentase penegakan perda yang terbesar terjadi di tahun 2020 dan 2021 yang mencapai 100 persen. Sedangkan persentase terkecil terjadi tahun 2018 sebesar 70,06 persen dimana dari 531 jumlah pelanggaran perda yang dapat diselesaikan sebanyak 372 penegakan perda.

f. Sosial

Aspek sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tahun 2012 dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sedangkan PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam masyarakat memang terdapat masalah sosial tetapi perlu diakui bahwa potensi penyelesaiannya juga berasal dari masyarakat. Oleh karena itu perlu pembinaan yang baik dan tepat dari pemerintah sebagai pengayom masyarakat.

Pendataan mengenai PMKS Kota Banda Aceh periode 2017–2021 dari segi jumlah PMKS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 53
Daftar Penyandang Masalah Sosial di Kota Banda Aceh Tahun 2016-2021

No	Jenis Permasalahan Sosial	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak dengan Kecacatan	98	98	98	98	-
2	Anak Yatim, Piatu, dan Anak Yatim Piatu	2.077	2.080	2.080	2.080	-
3	Anak Terlantar	37	30	13	21	44
4	Anak Bermasalah Hukum	40	52	108	51	31
5	Anak Jalanan	30	45	55	50	14
6	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	930	930	930	930	-
7	Lanjut Usia Terlantar	7	5	3	11	15
8	Lanjut Usia	2.490	2.490	2.495	439	43
9	Penyandang Disabilitas	477	477	477	389	202
10	Pengemis	69	65	103	132	95
11	Gelandangan	5	4	3	47	17
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	2	2	3	NA	NA
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA	18	18	15	NA	NA
14	Fakir Miskin #(rumah tangga)	12.777	12.777	12.777	12.253	24.250
15	Keluarga Rentan ##(rumah tangga)	2.044	2.044	2.044	3.214	-

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2021

#Data Diperoleh Dari DTKS (Penetapan Oktober 2021 Data DTKS Kota Banda Aceh bertambah dikarenakan terjadinya penggabungan Jenis Bantuan seperti PKH, BPNT, BST dan PBI menurut penjelasan dari Pusdatin dan Data DTKS dan bisa berubah ubah pada saat pengesahan perbulan).
##'Data Diperoleh Dari DTKS (Penetapan Oktober 2021 Data DTKS Kota Banda Aceh) Dari Desil Ke IV / Tingkat Kesejahteraan Keluarga Rentan Miskin namun untuk penetapan Oktober 2021 belum memperoleh perekapan perankingan dari Pusat sehingga belum diperoleh angka jumlah keluarga rentan untuk Tahun 2021.

1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berbagai masalah yang dihadapi oleh PMKS ini merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah kota melalui program dan kegiatan yang menjadi bagian layanan publik terutama dinas sosial. Capaian yang telah diraih oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam membantu PMKS ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 54
Pencapaian Penanganan terhadap PMKS

No	Indikator	2018	2019	2020	2021*
1	Persentase PMKS yang Mampu Memiliki Kemandirian Ekonomi	0,02%	0,04%	5,07%	50,86%
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	36,88%	36%	40%	50,86%
3	Persentase PMKS yang Tertangani	36,88%	36%	84,94%	100,00%
4	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar	46,00%	36,00%	99,83%	51,68%
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	8%	15,00%	27,00%	66,94%
6	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan uang duka	365 jiwa	637 jiwa	746 jiwa	253 Jiwa

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2021

Pada tahun 2018 jumlah KPM PKH yang terealisasi sebanyak 90 KPM dari total 5791 KPM dan Tahun 2019 Dinsos menargetkan 90 KPM PKH namun yang terealisasi hanya 201 KPM dari jumlah 4640 KPM yang ada. Pada tahun 2020 target penerima PKH sebanyak 4398 KPM dan yang terealisasi sebanyak 223 KPM. Pada Tahun 2021 jumlah Fakir Miskin dari Data DTKS (penetapan Oktober 2021) sebanyak 24.250 Ruta dan penerima bantuan PKH sebanyak 3.964 KPM dan Bantuan BPNT sebanyak 8.318 KPM dan UEP sebanyak 51 Orang. PMKS yang telah tertangani di Tahun 2021 adalah Lansia sebanyak 43 orang dari, Anak Terlantar yang tertangani sebanyak 44 anak dan Gelandangan Pengemis yang tertangani sebanyak 112 orang dari target 121 orang.

Jumlah disabilitas dan lansia sebanyak 245 jiwa yang mendapatkan bantuan dari 323 jiwa (Penyandang disabilitas fisik dan mental) dan 245 jumlah lansia dan disabilitas. Jumlah penerima uang santunan sebanyak 746 jiwa namun baru disalurkan pada tahun 2020 sebanyak 481 jiwa dan pada tahun 2021 terhitung dari Bulan Januari s.d Bulan Mei disalurkan uang santunan kepada 253 jiwa. Target Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2021 adalah 100%. Pelayanan dasar ini telah terealisasi seluruhnya sebanyak 20 KK dengan jumlah 80 jiwa, kejadian bencana yang terjadi sepanjang tahun 2021 yaitu sebanyak 16 Kejadian bencana baik itu bencana kebakaran sebanyak 19 KK dan angin kencang 1 KK, dari keseluruhan korban kejadian kebakaran dan angin kencang."

2) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Penanganan terhadap permasalahan PMKS bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga bekerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sosial ini. Peran PSKS juga mempunyai andil besar dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial. Berikut adalah peran serta PSKS yang tercermin dari beberapa indicator seperti keberadaan Lembaga kesejahteraan social terakreditasi, tenaga kesejahteraan sosial bersertifikat, dan juga wahana kesejateraan sosial berbasis masyarakat.

Tabel 2. 55
Keberadaan PSKS di Kota Banda Aceh

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	0%	37%	8,33%	8,33%
2	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	0%	58%	0%	0%
3	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	18,00%	21,00%	30,00%	0%

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2021

Pada tahun 2021 hanya Satu LKS yang telah terakreditasi dan belum ada TKSK yang memiliki sertifikasi daklam pelayanan kesejahteraan social. Keberadaan pelayanan non panti dalam bentuk WKSBM yang ada di Kota Banda Aceh berjumlah 379 WKSBM yang terdiri dari 90 gampong. Untuk tahun 2018 jumlah WKSBM yang dibantu sebanyak 16 WKSBM sehingga capaian pelayanan sebesar 18%. Untuk tahun 2019 jumlah WKSBM sebanyak 398 dalam 90 gampong, bantuan yg bersumber dari dana APBA yg diberikan hanya kepada 19 WKSBM sehingga capaian sebesar 21%, hal ini disebabkan minimnya dana yg ada.

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Luar Panti untuk tahun 2020 Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan

target sebesar 56% dari total WKSBM (sebanyak 90 gampong). Pada tahun 2020 Dinsos tidak memiliki anggaran untuk membantu penyediaan sarana/prasarana. Namun WKSBM di 90 gampong yang telah memiliki fasilitas sarana dan prasarana secara akumulatif adalah sebesar 30%. Pada Tahun 2021 tidak tersedianya anggaran sehingga kegiatan tidak dilaksanakan

3) Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Penanganan terhadap korban bencana dilakukan Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial dengan cara memberikan bantuan untuk meringankan kemalangan yang diderita masyarakat.
Berikut rincian jumlah penerima bantuan social akibat bencana.

Tabel 2. 56
Penerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jenis Bencana	Kebakaran dan Banjir	Banjir	Angin Kencang	Banjir	Kebakaran dan Banjir	Kebakaran dan Angin Kencang
Penerima	62 KK	41 KK	24 KK	18 KK	95 KK	20 KK
Sumber Dana	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK	APBK

Sumber Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2021
#'- Angin Kencang = 1 KK (7 Jiwa); '- Kebakaran = 19 KK (73 Jiwa)

B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Berdasarkan UU no 23/2014 pasal 11 dan 12 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

a. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dengan baik. Ketenagakerjaan selain menunjukkan keberhasilan pembangunan juga menyangkut dengan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu penanganan terhadap berbagai permasalahan ketenagakerjaan menjadi salah satu indicator pelayanan publik bagi pemerintah.

1) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam suatu hubungan industrial. Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa “Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu perselisihan maka telah diatur pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Kota Banda Aceh sebagai kota yang terus berkembang juga menjadi pemangku kepentingan dalam hal ini. Dimana dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pemerintah merupakan mediator dalam penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lakukan pada Dinas Tenaga Kerja melalui peran serta Mediator dan Konsiliator. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh memiliki tenaga Mediator sebanyak 1 (satu) orang dan tenaga Konsiliator sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan konsiliator Provinsi Aceh diperbantukan di Kota Banda Aceh.

Pada periode 2017–2021 sebanyak 795 kasus. Metode penyelesaian kasus perselisihan dapat dilakukan dengan bipartit atau tripartit yang melibatkan mediator dan konsiliator bahkan jika tidak selesai maka dapat diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Penyelesaian perselisihan industrial di Kota Banda Aceh berdasarkan metode penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 57
Jumlah Penyelesaian Perselisihan Tahun 2017-2021

Jenis Kasus/Perkara yang Masuk	Tahun																				Keterangan Jumlah			
	2017				2018				2019				2020				2021							
	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P	J	M	K	P
Perselisihan Hubungan Kerja	15	14	1	0	15	10	0	5	21	19	0	2	631	30	0	10	52	30	0	29	795	127	1	50

Sumber: Dinas tenaga kerja
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Keterangan :
J : Jumlah kasus
M : Mediator
K : Konsiliator
P : Pengadilan PHI

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat besar yaitu 631 kasus. Hal ini terjadi karena pandemi telah menyebabkan perusahaan harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun demikian Sebagian besar masalah dapat diselesaikan secara bipartite di tingkat perusahaan dan pekerja sehingg jumlah kasus yang harus di mediasi oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja hanya 30 kasus dan hanya 10 kasus yang perlu anjuran untuk diselesaikan melalui pengadilan.

Informasi pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2017 kasus perselisihan dapat diselesaikan dengan menggunakan mediator dan konsiliator sehingga tidak ada yang perlu diselesaikan pada pengadilan. Namun, pada periode berikutnya yaitu 2018 sampai dengan 2021 terdapat kasus yang harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

2) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Tenaga kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja diidentifikasi melalui Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK 1). Para pencari kerja ini kemudian akan difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan melalui pengantar kerja atau pun Job Fair yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Pencari kerja terdaftar di Dinas Tanaga Kerja yang ditempatkan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58
Pencari Kerja yang Ditempatkan

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tenaga Kerja Terdaftar	1155	549	582	255	222
2	Tenaga Kerja Ditempatkan	376	381	332	105	116
	Persentase	32,55	69,39	57,04	41,17	52,25

Sumber: Dinas tenaga kerja

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penempatan tenaga kerja sangat berfluktuasi, hal ini tergantung pada factor tenaga kerja yang terdaftar dan jumlah lowongan kerja yang tersedia. Kondisi pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 52,25 persen pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja telah berhasil mendapatkan pekerjaan dan ditempatkan.

3) Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Selama kurun waktu 2017 – 2021, perselisihan antara Buruh dan Pengusaha dengan pemerintah di sebut dengan perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini timbul dalam hubungan kerja karena kondisi ekonomi yang memburuk akibat pendemi yang menyebabkan perusahaan harus melakukan PHK terhadap pekerja. Perselisihan ini telah dapat diselesaikan baik melalui metode penyelesaian bipartite, melalui mediator dan hanya sedikit yang diselesaikan pada tingkat pengadilan hubungan industrial.

4) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Tingkat Pendidikan yang berhasil ditamatkan oleh penduduk di Kota Banda Aceh sudah mencapai kondisi sangat baik dimana 1 dari 6 penduduk sudah dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rasio lulusan perguruan tinggi per satuan penduduk.

Tabel 2. 59
Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 per-satuan Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2016-2021

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	34.089	34.827	34.751	36.220	37.827	38.630
2	Jumlah penduduk	252.342	251.879	244.586	245.779	248.892	251.288
3	Rasio lulusan S1/S2/S3	1 : 7,4	1 : 7,2	1 : 7,0	1 : 6,7	1 : 6,6	1 : 6,5

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh,2021

b. Pangan

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) untuk memastikan bahan pangan tersedia dengan cukup di Kota Banda Aceh. Berikut perkembangan ketersediaan pangan utama di Kota Banda Aceh periode 2017-2021:

Tabel 2. 60
Ketersediaan Pangan Utama

Urusan	Rumus	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan pangan utama	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) / Jumlah Penduduk x 100%	-	105,15 Kg/ Thn	100,60 Kg/ Thn	121,31 Kg/Thn	-

Sumber : DP2KP, 2021

Ketersediaan pangan untuk penduduk di Kota Banda Aceh pada tahun 2018 adalah 105, 15 kg/tahun per jiwa dan pada tahun 2020 telah menjadi 121,31 kg/tahun per jiwa. Penetapan ketersediaan pangan ini masih diproxy dengan konsumsi beras, dimana cadangan beras yang perlu disediakan oleh kota berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/ Permentan/ Kn.130/I/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penentuan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten/kota (CBPK) ditentukan oleh jumlah penduduk; konsumsi beras per kapita per tahun; dan proporsi terhadap cadangan beras nasional. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa perhitungan dilakukan sebagai berikut

Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota (CBPK) "Y" =
80% x cadangan beras total provinsi "X" x rasio jumlah penduduk kab/kota "Y" terhadap jumlah penduduk Provinsi "X".
Ketetapan terkini untuk Kota Banda Aceh adalah 102 ton per tahun yang dicadangkan oleh provinsi Aceh. Penggunaan cadangan ini dapat digunakan untuk keperluan seperti terjadinya kondisi rawan pangan atau bencana yang harus mendapatkan penanganan cepat tanggap. Cadangan pangan yang juga disediakan untuk keperluan tersebut selain beras antara lain berupa telur, minyak, gula, tepung dan mie instant.

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Banda Aceh secara resmi baru dimulai sejak dibentuknya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Di bidang pemberdayaan perempuan, upaya-upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah melalui kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian perempuan dalam perempuan, antara lain :

1) tersedianya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrena;
2) pengajuan Draft Qanun Kota Ramah Gender;
3) memfasilitasi terbentuknya organisasi perempuan di tingkat masyarakat, yaitu Women Development Center (WDC) dan Balee Inong;
4) memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG dan Tim Vocal Point;

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)

Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang bekerja untuk pemerintah baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Proses penerimaan pegawai negeri ini mengikuti ketetapan pemerintah dan berlaku di seluruh Indonesia dan dapat bekerja di berbagai tingkat

pemerintahan setelah lulus tanpa memandang perbedaan gender. Demikian juga pegawai negeri sipil yang bekerja untuk Kota Banda Aceh. Komposisi pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 61
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
Jumlah Pegawai Negeri Sipil	4.307	4.191	4.272	4.255	4.161
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki-laki	1.455	1.414	1.422	1.400	1.358
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan	2.852	2.777	2.852	2.855	2.803
Persentase Laki-laki	**33,8**	**33,7**	**33,3**	**32,9**	**32,64**
Persentase Perempuan	**66,2**	**66,3**	**66,8**	**67,1**	**67,36**

Sumber: BKPSDM
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Periode tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah pegawai negeri sipil perempuan sudah mencapai 66 persen dan menjadi 67 persen pada tahun 2020 dan 2021 atau dengan kata lain dua per tiga dari total pegawai negeri sipil Kota Banda Aceh adalah perempuan. Hal ini menggambarkan tidak adanya perbedaan gender dalam penerimaan pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Sampai saat ini belum ada ketentuan resmi mengenai komposisi pegawai negeri yang ideal antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal penerimaan pegawai negeri sipil seharusnya mengikuti kebutuhan dari pemerintah daerah itu sendiri dan proses penerimaan juga mengikuti kemampuan pelamar bukan berdasarkan gender.

2) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Keluarga merupakan unit terkecil dalam bernegara tetapi merupakan unit yang utama dalam penentuan kesejateraan. Perhatian terhadap perlindungan anak dan perempuan dalam rumah tangga telah menjadi sorotan utama dan menjadi factor penting dalam aspek kesejahteraan. Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara khusus dikeluarkan demi kepentingan ini. Oleh karena itu, rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi indicator penting dalam aspek kesejahteraan. Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) secara definisi adalah jumlah KDRT dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100. Perkembangan rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2. 62
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

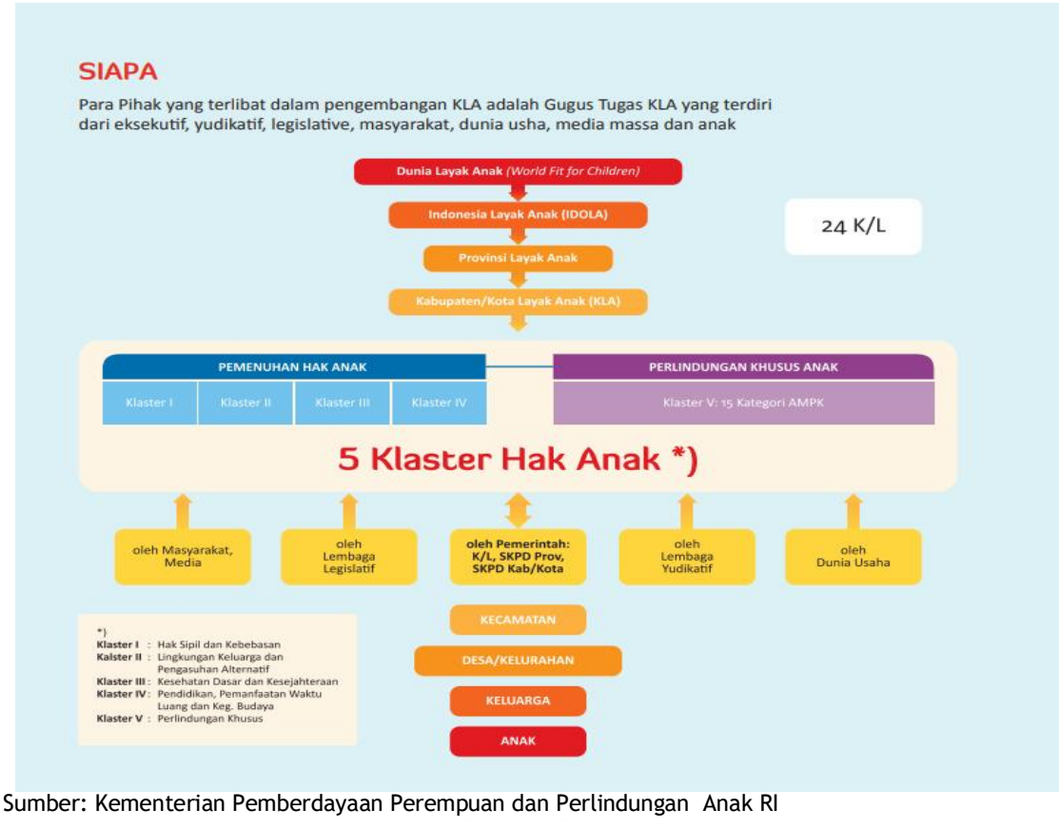
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Perempuan	0,23	0,12	0,10	0,05	NA
Anak	0,13	0,09	0,10	0,04	NA

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2021
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Tren Rasio KDRT terus menurun dalam periode 2017-2021. Penurunan ini merupakan hal yang menggembirakan yang menggambarkan bahwa penanganan terhadap KDRT semakin baik dari tahun ke tahun. Kondisi ini dapat dicapai dengan koordinasi yang baik antara para pemangku kepentingan dan terbentukan ya system jejaring yang baik terutama dengan Balee Inong yang sampai dengan 2016 sudah terbentuk sebanyak 19 Balee Inong.

3) Kota Layak Anak (KLA)

Pembentukan Kota Layak Anak merupakan salah satu bentuk komitmen perlindungan hak dan perlindungan anak. Kabupaten/Kota merupakan salah satu pemangku kepentingan untuk tercapainya Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030. Pencapaian ini diukur dengan 31 indikator KLA yang terbagi dalam 5 klaster yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Perlindungan khusus. Peran para pemangku kepentingan dalam mewujudkan KLA dapat dilihat pada skema berikut.



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Gambar 2. 46
Peran para pemangku kepentingan dalam mewujudkan KLA

Pemenuhan standar KLA yang ingin dicapai melalui beberapa tingkatan. Peringkat yang ditetapkan menunjukkan posisi keberhasilan kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA. Kategori penilaian yang diberikan meliputi Score 500-600: Pratama; Score 601-700:Madya; Score 701-800: Nindya; Score 801-900:Utama;Score 901-1000: KLA. Pencapaian yang diraih Kota Banda Aceh periode 2017 -2021 diperlihatkan pada Tabel 2.78 berikut ini:

Tabel 2. 63
Indikator KLA yang dicapai tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6
Indikator KLA yang dicapai	503,3	645	764	764	792

Sumber : DP3AP2KB Kota Banda Aceh, 2021

Sejak tahun 2017 Kota Banda Aceh sudah mencapai predikat Pratama sebagai Kota Layak Anak dengan skor 503,3. Selanjutnya menjadi peringkat Madya pada tahun 2018 dan mulai 2019 hingga 2021 sudah berada pada peringkat Nindya. Peningkatan peringkat dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen yang kuat bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak (KLA). Namun demikian, masih diperlukan upaya, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA).

d. Lingkungan Hidup

1) Timbulan Sampah yang Ditangani

Pelayanan persampahan di Banda Aceh terdiri dari 2 sistem yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sistem langsung adalah layanan yang diberikan dengan sistem "*door to door*" kepada masyarakat. Sedangkan secara tidak langsung adalah dengan menyediakan tong komunal atau kontainer sampah di titik-titik pemungutan sampah mencakup wilayah gampong yang diletakkan pada jalan umum. Cakupan wilayah yang dilayani adalah 90 gampong yang tersebar di 9 kecamatan di seluruh Kota Banda Aceh. Berikut realisasi persentase cakupan pelayanan sampah periode 2018-2021:

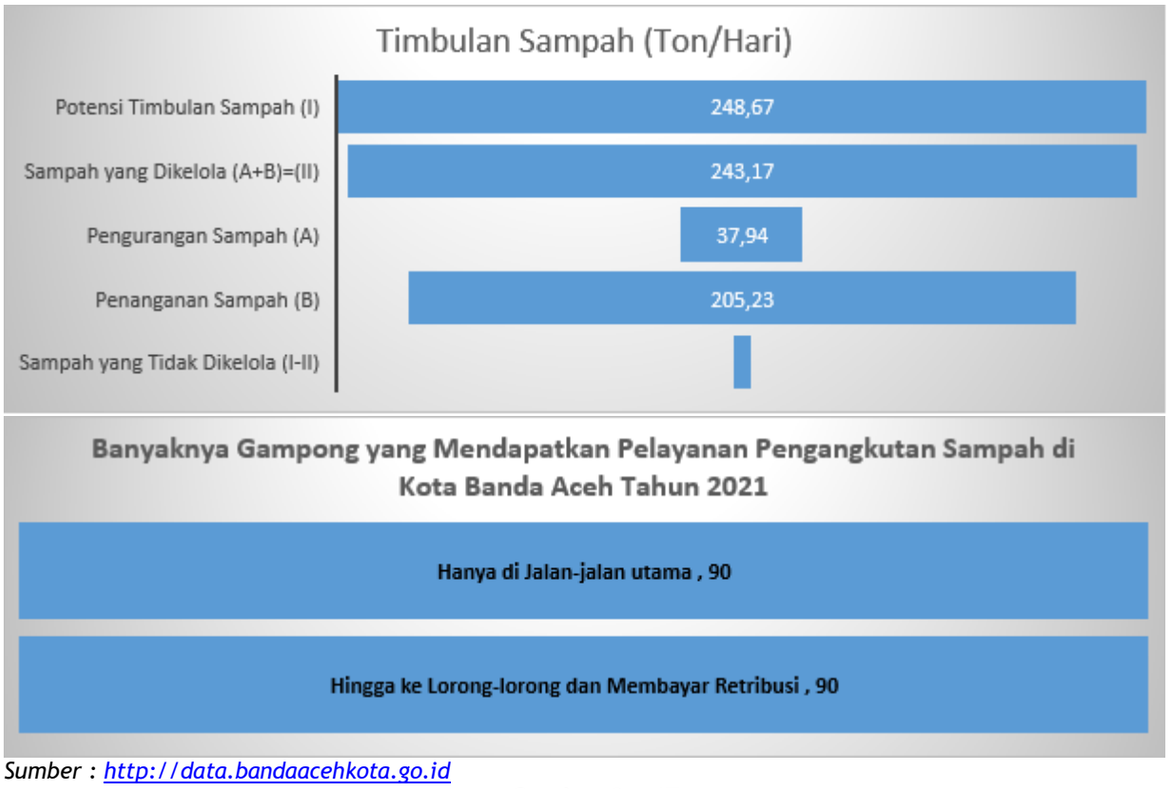
Tabel 2. 64
Realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Sampah Periode 2018-2021

No	Persentase Penanganan Sampah	Target dan Capaian Setiap Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7
1	% Target	84%	87%	89%	91%
2	% Realisasi	95,94%	95,15%	92,89%	97,42%

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2021

Pelayanan yang penangan sampah ini belum mencapai 100 persen akibat adanya beberapa kendala seperti, terbatasnya armada dan petugas, juga akibat dipengaruhi oleh kondisi jaringan dan luasan jalan yang tidak dapat dilalui oleh armada. Selain itu partisipasi masyarakat untuk mentaati jadwal pengambilan sampah di gampong juga masih sangat terbatas sehingga terkadang masyarakat membuang sampah setelah jadwal pengambilan dan berakibat sampah tidak terangkut tepat waktu.

Kondisi saat ini DLHK3 memiliki dumptruck 60 unit (hanya 11 truk baru); pick up 33 unit , becak 17 unit, 7 armroll unit, 4 compactor unit, 6 unit pengangkut sampah ke TPA regional dengan kapasitas 15 ton serta 636 orang petugas. Kondisi ini memerlukan perbaikan terutama dari sisi armada dumptruck yang sudah memerlukan penggantian. Penggantian armada ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengambilan sampah. Apalagi pada saat ini TPA yang digunakan adalah TPA Regional Blang Bintang yang terletak di luar Kota Banda Aceh. Selain itu, potensi timbulan sampah yang dihasilkan untuk Kota Banda Aceh tahun 2021 mencapai 248,67 ton per hari. Rincian penanganan sampah yang dilakukan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : http://data.bandaacehkota.go.id

Gambar 2. 47
Keadaan sampah di Kota Banda Aceh

2) Indeks Kualitas LIngkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator yang memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Predikat IKLH adalah sangat baik apabila IKLH ≥ 90; bernilai baik apabila nilai IKLH adalah 70 – 89,9; predikat sedang apabila nilai IKLH adalah 50 – 69,9; predikat buruk apabilai nilai IKLH adalah 25 – 49,99; dan sangat buruk apabila nilai IKLH adalah < 24.

Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup, Kota Banda Aceh pada tahun 2019 memiliki IKLH 69,71 atau masuk dalam predikat sedang. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020, nilai IKLH menurun menjadi 67,01 dan tahun 2021 turun lagi menjadi 57,29.

3) IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) Gampong Jawa

IPLT merupakan tempat penampungan tinja yang bertujuan untuk menampung dan mengolah hasil pengurasan lumpur tinja dari septic tank masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya sebelum kelingkungan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan. DLHK3 saat ini mengelola 2 (dua) unit IPLT, instalasi yang pertama menggunakan teknologi kolam oksidasi (konvensional), hanya mengandalkan waktu tinggal dengan kapasitas 50 m3/hari. Saat bencana tsunami 2004, sempat hancur, namun sudah direhab kembali oleh JICA tahun 2005. Tahun 2007 dibangun instalasi kedua oleh UNICEF yang berlokasi berdampingan dengan IPLT JICA dengan kapasitas 85 m3/hari. IPLT ini menerapkan kombinasi pengolahan secara anaerobik dan aerobik. Beberapa teknologi anaerobik yang digunakan antara lain: digester, sludge stabilization, buffle reactor dan anaerobic filter. Sementara teknologi aerobik yang digunakan adalah planted gravel filter, kolam dan bak pengering lumpur tinja.

Tabel 2. 65
Volume Tinja dibuang ke IPLT (m^3)

Tahun	Volume Tinja Dibuang ke IPLT					
	Truk DK3		Truk Swasta		Total	
	Trip	Volume	Trip	Volume	Trip	Volume
2017	559	1799	208	625	767	2424
2018	306	1003	270	875	576	1878
2019	267	823	320	965	587	1788
2020	229	499	323	1089	552	1588
2021	439	1539	347	1039	786	2578

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2021

IPLT bukan hanya kegiatan yang memberikan layanan public untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat tetapi juga merupakan layanan yang mampu menghasilkan pendapatan melalui layanan ini dan menjadi salah satu penyumbang PAD. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 117 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Jamban pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Jamban, tarif retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Jamban :

- Mobil penyedotan tinja dalam kota dengan volume jamban 1-2 m^3 sebesar 100.000 rupiah dan volume 2 – 4 m^3 sebesar 135.000 rupiah.
- Mobil penyedotan tinja luar kota dengan volume jamban 1-2 m^3 sebesar 100.000 dan volume 2 – 4 m^3 sebesar 135.000 rupiah ditambah dengan 10.000 rupiah setiap penambahan jarak tempuh 1-5 km.

4) Pemanfaatan Gas Metana dari TPA Gampong Jawa

TPA Kota Banda Aceh menerima sampah yang masuk setiap harinya sebesar 160 - 170 ton diperkirakan mampu menghasilkan gas metan dengan kapasitas 4.000 m3/hari bila pengumpulannya dilakukan secara optimal. Di tahun 2015 pemerintah kota Banda Aceh melalui DK3 telah melakukan upaya pengumpulan dan pemanfaatan gas metan di TPA dengan memasang 12 pipa pengumpul gas vertikal tambahan dimana sebelumnya sudah terpasang 6 pipa pengumpul, sehingga saat ini gas metan sudah dapat dikumpulkan dari 18 pipa pengumpul vertikal yang ada. Untuk tahap pertama DK3 telah mengumpulkas gas metan TPA dari 4 pipa pengumpul vertikal dan telah berhasil disalurkan melalui 2 unit compressor yang dihidupkan secara bergantian ke 23 rumah penduduk yang ada di sekitar TPA yaitu masyarakat Gampong Jawa. DK3 menargetkan pada tahun 2017 gas metan yang dihasilkan TPA Kota Banda Aceh dapat disalurkan ke 100 rumah warga Gp. Jawa sebagai salah satu bentuk kompensasi Pemerintah Kota Banda Aceh bagi masyarakat yang tinggal di dekat lokasi TPA.

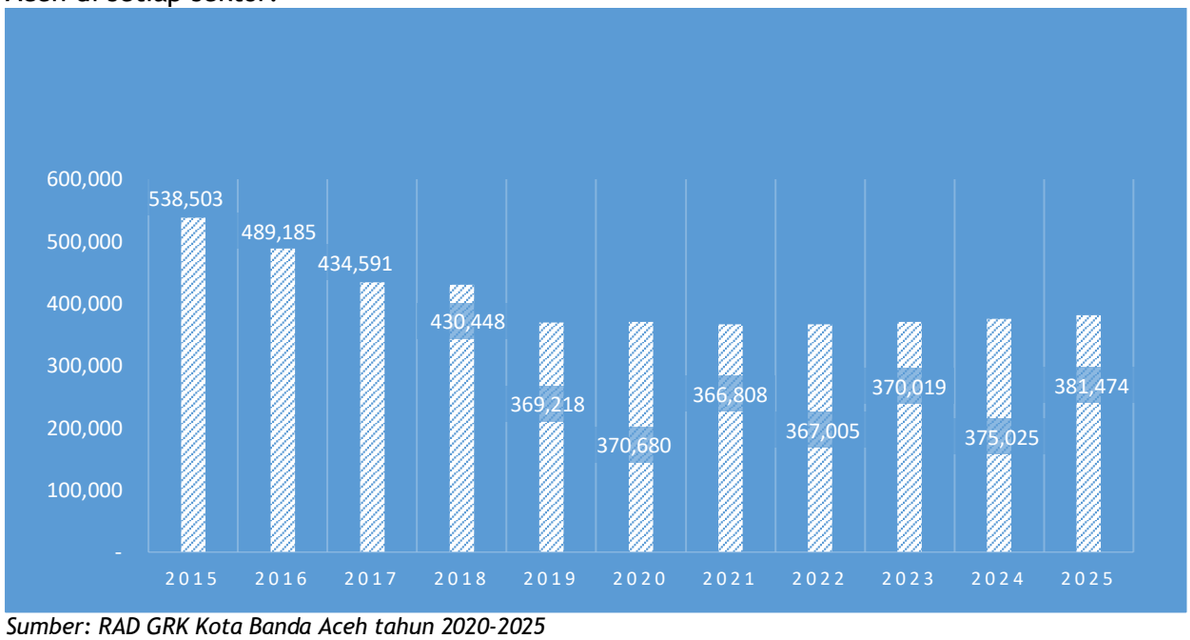
Hal yang membedakan program pemulihan gas metan TPA yang dilakukan oleh Kota Banda Aceh dengan daerah lainnya adalah pengumpulan gas metan TPA Kota Banda Aceh dilakukan pada lahan TPA yang masih aktif dengan tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan dan kemudahan operasional alat berat pada lahan urug. Masyarakat Gp. Jawa penerima gas methan gratis dari TPA Kota Banda Aceh sangat senang dan merasakan manfaat yang cukup besar dari gas methan yang mereka terima. Bahkan salah seorang masyarakat mengatakan

bahwa sejak adanya gas methan dari TPA, penggunaan elpiji 3 kg di rumahnya dapat dihemat dari 3 tabung/bulan menjadi hanya 1 tabung /bulan. Pemakaian elpiji masih dilakukan untuk mengantisipasi keperluan memasak pada saat jadwal distribusi harian dihentikan. Selama ini jadwal penyaluran gas methan dari TPA mulai pukul 08.00 s/d 12.000 dan 15.00 s/d 17.30.

Pemerintah Kota saat ini sedang mendorong masyarakat penerima manfaat gas methan gratis ini untuk memanfaatkan gas methan tidak hanya untuk kebutuhan memasak sehari-hari, tetapi juga untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha rumah tangga (home industry) berbasis bahan bakar gas seperti usaha membuat nasi bungkus, membuat keripik, kacang goreng, dsb untuk dititipkan di warung-warung.

5) Emisi Gas Rumah Kaca

Upaya untuk mengatasi permasalahan emisi gas rumah kaca sudah dimulai oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan menyiapkan dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca Kota Banda Aceh tahun 2020-2025 (RAD GRK) pada tahun 2020 yang lalu. RAD GRK menguraikan profil emisi di setiap sektor yang menjadi sumber emisi gas rumah kaca. Sektor yang berkontribusi kepada emisi gas rumah kaca ini yaitu energi, transportasi, pengelolaan limbah, kehutanan, pertanian, dan industri. Dokumen ini juga menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca serta berbagai rencana aksi mitigasi penurunan gas rumah kaca di Kota Banda Aceh di setiap sektor.

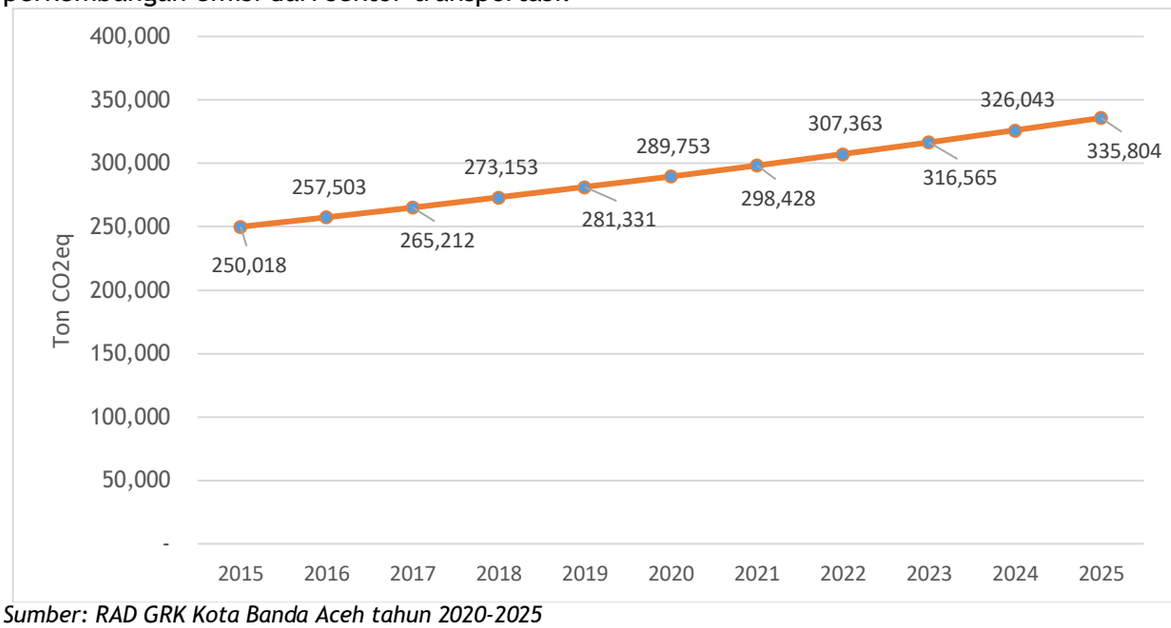


Sumber: RAD GRK Kota Banda Aceh tahun 2020-2025

Gambar 2. 48
Proyeksi BAU Baseline Emisi Kota Banda Aceh tahun 2015 - 2025

Tabel di atas menunjukkan perkembangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Kota Banda Aceh yang merupakan hasil perhitungan yang menjadi kondisi baseline dalam analisis GRK di Kota Banda Aceh untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Saat ini pemerintah telah melakukan berbagai program untuk mendukung penurunan emisi dari sektor energi, diantaranya pemasangan solar panel di atap gedung pemerintah yang saat ini telah terpasang di atap kantor Bappeda Kota Banda Aceh dan Pool Truck DLHK3. Solar panel di atap kantor Bappeda memiliki 1600 WP dengan sistem off grid. Sementara solar panel di truck pool DLHK3 memiliki 6600 WP dengan sistem kombinasi on grid dan off grid. Selain itu, pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menambah jumlah lampu LED yang hemat energi sebagai LPJU untuk menggantikan lampu merkuri yang dikenal boros energi. Saat ini proporsi lampu LED telah mencapai 12% total LPJU. LPJU ini termasuk lampu LPJU solar panel. LPJU solar panel mencapai 2% dari total LPJU. Sementara 86% masih menggunakan lampu merkuri. Sumber emisi GRK di sektor pertanian di Kota Banda Aceh adalah lahan tanaman pangan dan peternakan Emisi dari sektor industri dihasilkan dari emisi GRK akibat pembakaran bahan bakar dari penggunaan mesin untuk kepentingan industry. jenis bahan bakar yang dikonsumsi oleh sektor industri di Banda Aceh didominasi oleh minyak bio solar, yang termasuk kategori diesel. Sementara itu, sumber emisi dari sektor kehutanan diabaikan karena Kota Banda Aceh tidak memiliki area hutan yang signifikan.

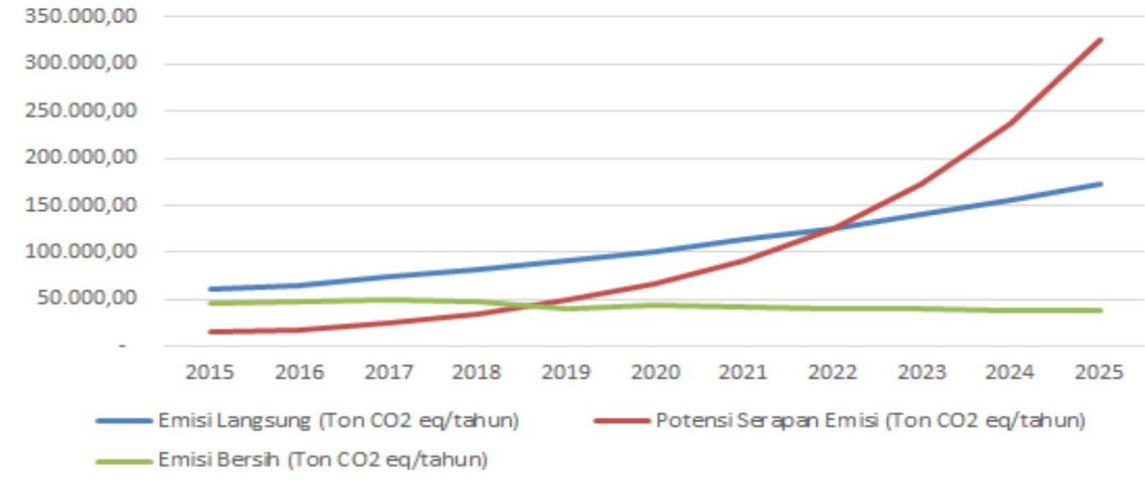
Sumber utama emisi di Kota Banda Aceh adalah sektor transportasi dan limbah. Berikut perkembangan emisi dari sektor transportasi:



Sumber: RAD GRK Kota Banda Aceh tahun 2020-2025

Gambar 2. 49
Proyeksi BAU Baseline Emisi Sektor Transportasi Kota Banda Aceh tahun 2015 - 2025

Potensi emisi dari sektor transportasi berasal dari transportasi darat, udara dan air. Namun, emisi karbon dari laut, udara dan sungai masih sangat kecil mengingat tidak adanya bandar udara dan belum signifikannya penggunaan transportasi sungai. Emisi dari sektor transportasi berasal dari pembakaran bahan bakar fosil kendaraan bermotor. Transportasi darat terdiri dari mobil penumpang, bus, mobil barang dan sepeda motor. Pengelolaan limbah mencakup limbah padat/sampah dan limbah cair. Sumber limbah padat dan cair domestik meliputi; rumah tangga, pasar, pertokoan, kawasan pendidikan, pasar dan sebagainya. Potensi emisi pada RAD GRK ini difokuskan pada limbah domestik padat.



Sumber: RAD GRK Kota Banda Aceh tahun 2020-2025

Gambar 2. 50
Proyeksi BAU Baseline Emisi Sektor Limbah Kota Banda Aceh tahun 2015 – 2025

6) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pengelolaan ruang terbuka hijau mengaju pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dimana ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Berikut adalah tabel yang menunjukkan luas RTH di Kota Banda Aceh periode 2017 sampai dengan 2021.

Tabel 2. 66
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

No	Jenis RTH Publik	Luas (Ha) 2017	Luas (Ha) 2018	Luas (Ha) 2019	Luas (Ha) 2020	Luas (Ha) 2021*
1	RTH Taman Kota	52,71	66,71	58,56	58,59	58,59
2	RTH Hutan kota	27,06	39,36	32,95	33,00	33,00
3	RTH Lapangan Olah Raga	57,23	57,23	57,23	58,56	58,56
4	RTH Jalur Hijau Jalan	40,92	46,52	43,85	43,86	43,86
5	RTH Makam	20,87	20,87	21,66	22,77	22,77
6	RTH Sabuk Hijau/RTH-Pengaman	129,54	129,54	183,58	183,58	183,58
7	Hutan Bakau	483,90	483,90	445,47	445,48	445,48
Jumlah luasan RTH Total		812,23	844,13	843,30	845,84	845,84
Luas Kota Banda Aceh		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Presentase luas RTH terhadap Luas Kota Banda Aceh		13,76	14,31	14,29	14,34	14,34

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2021
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Data di atas menunjukkan bahwa Kawasan RTH Kota Banda Aceh sudah sulit untuk diperluas, hanya 14 persen sejak 2018 sampai saat ini. Kondisi ini memerlukan kebijakan yang lebih agresif dan bijaksana apabila ingin mencapai target yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

7) Adipura

Penghargaan Adipura adalah penghargaan untuk kota yang berhasil mengelola kebersihan dan lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk memacu pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Kriteria pemilihan meliputi kriteria fisik dan non fisik. Selama periode 2017 sampai dengan 2021, pencapaian Adipura Kota Banda Aceh tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 67
Total Penghargaan Adipura di Kota Banda Aceh

Kinerja	Perhitungan Indikator	Target/ capaian	Kondisi Awal Periode 2017	2018	2019	2020	2021	2022**	Kondisi Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meraih Adipura	Nilai Fisik dan Non Fisik Adipura	Target	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil
		Capaian	Berhasil	Gagal	Masih menunggu pengumuman dari KLHK	Masih menunggu pengumuman dari KLHK	Masih menunggu pengumuman dari KLHK		

Sumber: DLHK3 Kota Banda Aceh, 2021
** Tahun berjalan

Data di atas menunjukkan bahwa target meraih Adipura pada tahun 2017 berhasil direalisasikan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya target yang ditetapkan belum dapat diraih. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan lokasi TPA dari TPA Kota Banda Aceh sekarang sampah dibawa ke TPA regional di Blang Bintang, Aceh Besar, sehingga pengelolaan tidak dapat diatur oleh pemerintah kota lagi.

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Kepemilikan KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi bagi warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Kartu indentitas ini dapat dimiliki apabila warga sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah menikah. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal, 1 point 14 bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) diproses secara komputerisasi dan dilengkapi cip yang berfungsi untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan.

Tabel 2. 68
Rasio Kepemilikan KTP di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan	155.063	131.173	139.640	165.307	167.922
Jumlah Wajib KTP Elektronik	172.387	2845	3072	165.415	169.097
Rasio	90	95,30	99,48	99,93	99,31

Sumber Disdukcapil Kota Banda Aceh
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa Kota Banda Aceh sudah menyelesaikan perekaman KTP-el hingga 99,31 persen pada tahun 2021.

2) Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Ratio Bayi berakta kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama

Tabel 2. 69
Tabel Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun.	103.097	123.779	131.173	139.640	146.878
Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun.	2.543	5.781	2.845	3.072	2.713

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2021

Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengatur lebih lanjut tentang pemberian akta kelahiran. Menurut UU tersebut setiap bayi yang lahir, 60 hari setelah itu harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Untuk mewujudkan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan berbagai upaya percepatan dan perluasan cakupan pencatatan kelahiran, antara lain: sosialisasi, upaya proaftif dengan pelayanan yang menjangkau dan bekerjasama dengan klinik serta tenaga pembantu kelahiran, terakhir melakukan kemudahan pelayanan dengan meluncurkan aplikasi online untuk pencatatan kelahiran yang menjangkau hingga tingkat gampong. Semua layanan yang disediakan tidak dipungut biaya (gratis).

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Sarana dan prasarana perkantoran desa merupakan pendukung seluruh aktifitas pemerintahan di desa/gampong. Kondisi sarana dan prasarana yang baik akan sangat mempengaruhi layanan yang diberikan oleh aparat gampong bagi masyarakat. Berikut cakupan sarana dan prasarana perkantoran gampong yang baik di gampong-gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh dalam periode 2017-2021.

Tabel 2. 70
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik

No	Kecamatan	Jumlah gampong	2017		2018		2019		2020		2021	
			jumlah kantor pemerin-tahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	jumlah kantor pemerin-tahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	jumlah kantor pemerin-tahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	jumlah kantor pemerin-tahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	jumlah kantor pemerin-tahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7=6/3 *100)	(8)	(9=8/3*100)	(10)	(11=10/3 *100)	(12)	(13=12/3*100)
1	Baiturrahman	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	90
2	Kuta Alam	11	10	90,91	10	90,91	10	90,91	10	90,91	11	100
3	Meuraxa	16	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100

4	Syiah Kuala	10	9	90	9	90	9	90	9	90	10	100
5	Lueng Bata	9	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100
6	Kutaraja	6	6	100	6	100	6	100	6	100	6	100
7	Banda Raya	10	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
8	Jaya Baru	9	8	88,89	8	88,89	9	100	9	100	9	100
9	Ulee Kareng	9	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	**90**	87	96,67	87	96,67	88	97,78	88	97,78	90	100

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2021
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan cakupan sarana dan prasarana di gampong-gampong di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 masih terdapat 3 gampong yang kondisi sarana dan prasarananya belum baik. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 hanya 2 gampong saja yang belum baik kondisi sarana dan prasarananya. Pada tahun 2021 seluruh gampong sudah mempunyai sarana dan prasarana yang baik kondisinya sehingga cakupan sarana dan prasarana perkantoran gampong sudah mencapai 100 persen. Cakupan yang sudah sangat baik ini haruslah diikuti oleh layanan yang juga dapat memuaskan keperluan masyarakat gampong. Sarana dan prasaran yang dimaksud adalah berupa bangunan fisik perkantoran dan juga sarana seperti mobile, peralatan kantor dan akses internet.

Permasalahan yang dialami sebelumnya antara lain untuk kecamatan Kuta Alam, Gampong Peunayong, kantor geuchiek adalah ruko milik pemko. Kecamatan Syiah Kuala Gampong Kopelma Darussalam, terjadi perselisihan kepemilikan dengan pihak lain dan saat ini digunakan gedung pkk bersama. Pada kecamatan Jaya Baru, Gampong Ulee Pata, kantor kecil sulit melakukan pelayanan. Sekarang sudah mendapat gedung baru dan fasilitas lengkap. Sedangkan di Kecamatan Baiturahman, Gampong Peuniti: kantor di rubuhkan tetapi tidak dapat di bangun kembali karena pada wilayah tersebut hanya boleh dibangun toko dan bukan perkantoran.

2) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik

Mukim merupakan bentuk keistimewaan Aceh yang diterapkan dalam pemerintahan. Kota Banda Aceh secara khusus menuangkan peran mukim dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemerintahan Mukim. Dalam qanun ini dituangkan bahwa terdapat fungsi mukim diantaranya pengoordinasian penyelenggaraan pemerintah gampong dalam mukim, penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam, pengorodinasian pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejehateraan dan kehidupan berdemokrasi secara inklusif dan berkeadilan gender, penyelesaian sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat gampong, dan juga termasuk pengawasan fungsi lilngkungan hidup dan pengelolan sumber daya alam dalm mukim. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Cakupan sarana dan prasarana pada tingkat mukim di Kota Banda Aceh ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 2. 71
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Mukim yang Baik

No	Kecamatan	Jumlah mukim	2017		2018		2019		2020		2021	
			jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik	jumlah kantor mukim yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran mukim yang baik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*100)	(6)	(7=6/3 *100)	(8)	(9=8/3*100)	(10)	(11=10/3 *100)	(12)	(13=12/3*100)
1	Baiturrahman	2	0	0	0	0	2	100	2	100	2	100
2	Kuta Alam	2	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
3	Meuraxa	2	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
4	Syiah Kuala	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lueng Bata	1	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
6	Kutaraja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Banda Raya	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Jaya Baru	2	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50
9	Ulee Kareng	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	**17**	4	23,53	4	23,53	6	35,29	6	35,29	6	35,29

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2021
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Cakupan sarana dan prasarana perkantoran mukim pada tahun 2017 adalah 23,53 persen yang berarti baru 4 mukim yang memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang baik. Namun, kondisi ini terus diperbaiki sehingga tahun 2020 dan 2021 sudah menjadi 35,29 persen.

3) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga/ wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Sedangkan kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah gampong dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, misalnya kelompok pemuda/ karangtaruna, remaja mesjid dan lain-lain. Jumlah Kelompok binaan LPM dalam Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 72
Kelompok Binaan LPM Tahun 2017-2021 Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	2017			2018			2019			2020			2021		
		Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah LPM	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jum lah LPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)
1	Baiturrahman	10	21	2,1	10	21	2,1	10	21	2,1	10	21	2,1	10	21	2,1
2	Kuta Alam	11	25	2,27	11	25	2,27	11	25	2,27	11	25	2,27	11	25	2,27
3	Meuraxa	16	30	1,88	16	30	1,88	16	30	1,88	16	30	1,88	16	30	1,88
4	Syiah Kuala	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2
5	Lueng Bata	9	22	2,44	9	22	2,44	9	22	2,44	9	22	2,44	9	22	2,44
6	Kutaraja	6	14	2,33	6	14	2,33	6	14	2,33	6	14	2,33	6	14	2,33
7	Banda Raya	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2	10	22	2,2
8	Jaya Baru	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22
9	Ulee Kareng	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22	9	20	2,22
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	90	196	2,18	90	196	2,18	90	196	2,18	90	196	2,18	90	196	2,18

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2021
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Data di atas menggambarkan bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini tiap gampong mempunyai 1 LPM dan setiap LPM mempunyai 2 kelompok binaan. Hal ini mencerminkan aktifitas dalam gampong tersebut. Apabila dapat ditingkatkan lagi jumlah kelompok binaannya maka akan menunjukkan penambahan aktifitas yang terorganisir dengan baik di setiap gampong.

4) Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 5/2007 Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota;
b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan;
h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
i. melaksanakan tertib administrasi; dan
j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kota Banda Aceh melaksanakan pembinaan secara berjenjang dari TP. PKK Kecamatan sampai TP. PKK Gampong. Selanjutnya TP. PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun,Kelompok Dasa Wisma, Kelompok UP2K dan lain-lain. Jumlah Kelompok PKK Dusun dan Dasawisma adalah sesuai dengan jumlah dusun dan dasawisma yang ada di gampong.

Tabel 2. 73
Kelompok Binaan PKK Tahun 2017-2021 Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	2017			2018			2019			2020			2021		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-rata Jumlah PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17=16/15)
1	Baiturrahman	11	470	42,73	11	470	42,73	11	424	38,55	11	412	37,45	11	412	37,45
2	Kuta Alam	12	460	38,33	12	460	38,33	12	431	35,92	12	341	28,42	12	341	28,42
3	Meuraxa	17	266	15,65	17	266	15,65	17	312	18,35	17	361	21,24	17	361	21,24
4	Syiah Kuala	11	428	38,91	11	428	38,91	11	407	37	11	321	29,18	11	321	29,18
5	Lueng Bata	10	269	26,9	10	269	26,9	10	310	31	10	405	40,5	10	405	40,5
6	Kutaraja	7	153	21,86	7	153	21,86	7	166	23,71	7	324	46,29	7	324	46,29
7	Banda Raya	11	270	24,55	11	270	24,55	11	336	30,55	11	239	21,73	11	239	21,73
8	Jaya Baru	10	318	31,8	10	318	31,8	10	310	31	10	309	30,9	10	309	30,9
9	Ulee Kareng	10	328	32,8	10	328	32,8	10	347	34,7	10	350	35	10	350	35
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	99	2,962	29,92	99	2,962	29,92	99	3,043	30,74	99	3,062	30,93	99	3,062	30,93

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2021
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

TP PKK Kota Banda Aceh terdiri dari 90 TP PKK gampong, 9 TP PKK kecamatan sehingga jumlah TP PKK adalah 99 yang dibina oleh TP PKK kota. Kelompok binaan TP sehingga berjumlah 100 utk kota. TP PKK membina Dasawisma, UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), Posyandu balita & lansia), Posbindu, Jumantik (Juru Mantau Jentik). Pada tabel di atas dapat dibahwa terdapat 3.062 kelompok binaan yang ada di seluruh Kota Banda Aceh. Jumlah kelompok binaan ini dapat berubah karena karena ada peleburan di tingkat desa tergantung kondisi desa.

5) Persentase PKK aktif

Berdasarkan pembinaan, jumlah PKK aktif meningkat setiap tahun, karena dukungan dari pemerintah gampong melalui Dana ADG dan Dana Desa. Jumlah PKK Aktif dari tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 74
PKK Aktif Tahun 2017-2021 Kota Banda Aceh

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah TP. PKK	100	100	100	100	100
2	Jumlah TP. PKK tidak aktif	-	-	-	-	-
3	Jumlah TP. PKK aktif (1-2)	100	100	100	100	100
4	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2017
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Keaktifan TP PKK menunjukkan bahwa tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada TP PKK telah dilaksanakan dengan baik terutama dalam membantu mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan

6) Persentase Posyandu aktif

Posyandu merupakan bentuk kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan pada tingkat gampong dan kegiatan ini diawasi oleh petugas kesehatan di gampong tersebut.

Keaktifan kegiatan Posyandu dapat menjadi indikator kualitas kesehatan pada tingkat gampong. Berikut adalah gambaran jumlah Posyandu aktif yang ada di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 75
Jumlah Posyandu dalam Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu Aktif				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Baiturrahman	18	18	19	19	19
2	Kuta Alam	15	15	15	15	15
3	Meuraxa	18	18	18	18	18
4	Syiah Kuala	12	12	12	12	12
5	Lueng Bata	9	9	9	9	9
6	Kutaraja	6	6	6	6	6
7	Banda Raya	10	10	10	10	10
8	Jaya Baru	16	16	16	16	16
9	Ulee Kareng	9	9	9	9	9
	Jumlah se-Kota Banda Aceh	113	113	114	114	114

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2021
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah Posyandu aktif adalah 113 unit dan setelah itu menjadi 114 unit mulai 2019 sampai 2021. Pada tahun 2019 terjadi penambahan posyandu aktif di kecamatan Baiturahman. Keaktifan posyandu diklasifikasikan berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh posyandu tersebut. Posyandu Pratama adalah posyandu yang masih belum memiliki kegiatan rutin, Posyandu Madya adalah posyandu yang memiliki kegiatan rutin lebih dari 8 kali per tahun dengan minimal 5 orang kader tetapi cakupan kegiatan utama masih di bahwa 50%. Selanjutnya, Posyandu Purnama merupakan posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu. Peringkat tertinggi yang ingin dicapai adalah Posyandu Mandiri, yaitu Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dan kelompok usaha bersama (usaha dikelola oleh masyarakat) yang dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu.

Posyandu dalam Kota Banda Aceh memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Strata Posyandu dalam Kota Banda Aceh selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 76
Strata Posyandu Tahun 2017 – 2021 di Kota Banda Aceh

No	Strata Posyandu	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pratama	3	3	4	0	1
2	Madya	87	89	89	90	88
3	Purnama	24	22	22	24	25
4	Mandiri	0	0	0	0	0
	Jumlah	114	114	115	114	114

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2021
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Pada awal periode yaitu tahun 2017 Kota Banda Aceh mempunyai 3 Posyandu Pratama, 87 Posyandu Madya, dan 24 Posyandu Purnama, sedangkan pada akhir periode yaitu tahun 2021 jumlah posyandu dengan peringkat Pratama hanya tinggal 1 posyandu dan Posyandu Madya dan Posyandu Purnama telah bertambah menjadi 88 dan 25 posyandu.

7) Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)

Fasilitasi pemilihan kepala desa di Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui kegiatan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung). Selama tahun 2017 s/d 2021 data kegiatan Pilchiksung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 77
Data Partisipasi Masyarakat dalam Pilchiksung di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa Pelaksana Pilchiksung	Gampong	15	16	22	0	24
2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Orang	28,108	29,620	24,999	0	40.651
3	Jumlah Pemilih	Orang	16,059	18,067	17,058	0	25.513
4	Partisipasi Masyarakat	%	57,13	61	68,23	0	62,76

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Pada tahun 2020 tidak ada pemilihan Geuchiek secara langsung (pilchiksung) karena tahun ini adalah masa transisi untuk pemilihan serentak. Jadwal pemilihan Geuchiek untuk Kota Banda Aceh adalah tahun 2021, 2023, dan 2025. Dimasa penyesuaian pemilihan geuchiek maka ditunjuk pejabat sementara sebagai pelaksana tugas Geuchiek.

8) Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kota

Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki gedung pemerintahan yang unik dan megah. Kemegahan tersebut diiringi dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang bersih dan berwibawa serta pelayanan yang optimal bagi warga kota. Sampai tahun 2017, sesuai dengan SOTK Baru Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki 44 satuan kerja (termasuk 9 kecamatan).

Secara administratif Kota Banda Aceh terdiri atas 9 kecamatan, 90 gampong, dan 17 mukim, dari 90 gampong di Kota Banda Aceh, 16 gampong atau sekitar 17,78 persen terdapat di Kecamatan Meuraxa. Selanjutnya disusul Kecamatan Kuta Alam sebanyak 11 gampong (12,22 persen). Kemudian, tiga kecamatan masing-masing memiliki 10 gampong, meliputi Banda Raya, Baiturrahman, dan Syiah Kuala. Tiga kecamatan lainnya, seperti Jaya Baru, Lueng Bata, dan Ulee Kareng, masing-masing memiliki 9 gampong. Adapun Kuta Raja hanya memiliki 6 gampong (6,67 persen).

Sebagaimana halnya kabupaten/ kota lainnya di Aceh, di Kota Banda Aceh terdapat pula mukim yang fungsinya dinilai penting dalam mendorong perkembangan aktivitas sosial-kemasyarakatan di gampong dan kecamatan. Dari 17 mukim yang ada di Banda Aceh, 3 mukim terdapat di Kecamatan Syiah Kuala. Di Kecamatan Lueng Bata dan Kuta Raja masing-masing memiliki 1 mukim dan kecamatan lainnya memiliki masing-masing 2 mukim. Secara lebih rinci, jumlah gampong dan mukim menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 78
Data Mukim Dalam Kota

No	Kecamatan		Nama Mukim	Jumlah Gampong
1	2		3	4
1	Baiturrahman	1	Baiturrahman	5
		2	Putro Phang	5
2	Kuta Alam	3	Kuta Alam	5
		4	Lam Kuta	6
3	Meuraxa	5	Meuraxa	8
		6	Tgk. Chik Lamjabat	8
4	Syiah Kuala	7	Tgk. Syeh Abdurrauf	4
		8	Tgk.Chik di Lamnyong	2
		9	Kayee Adang	4
5	Lueng Bata	10	Lueng Bata	9
6	Kutaraja	11	Tgk. Dianjong	6
7	Banda Raya	12	Banda Jaya	4
		13	Lam Ara	6
8	Jaya Baru	14	Pos Blang	5
		15	Lambaro Banda	4
9	Ulee Kareng	16	Simpang Tujoh	4
		17	Poeteumeureuhom	5

Sumber : DPMG Kota Banda Aceh Tahun 2021
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

9) Presentase Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada poin (b) lebih dikenal dengan nama Dana Desa (DD), sedangkan alokasi Dana Desa pada poin (d) untuk Provinsi Aceh dikenal dengan nama Alokasi Dana Gampong (ADG). ADG paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sementara itu, untuk Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota poin (c) paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah. Besaran dana pembangunan untuk gampong periode tahun 2017 s/d tahun 2021 untuk Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 79
Fasilitasi Dana Pembangunan Untuk Gampong di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Alokasi Dana Gampong (ADG)	57.280.292.476	57.736.964.520	58.357.906.650	48.862.057.710	57.111.381.200
2	Dana Desa (DD)	70.923.443.000	64.464.666.000	74.192.333.000	75.977.398.000	77.702.442.000
3	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	5.048.550.000	6.336.885.233	6.993.885.233	6.064.790.652	5.142.160.652
4	Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah	2.527.597.700	2.639.828.700	3.031.474.257	2.565.987.274	2.565.987.274
	Jumlah	135.779.883.176	131.178.344.453	142.575.599.140	133,470.233.636	142.521.971.126

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2021
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

ADG untuk gampong yang berada dalam wilayah Kota Banda Aceh pada periode than 2017-2021 berkisar antara 48,86 milyar rupiah sampai dengan 58, 35 milyar rupiah. Alokasi terendah terjadi pada tahun 2020 dimana pada tahun ini dampak pandemi Covid-19 sudah sangat terasa sehingga mempengaruhi pendapatan Kota Banda Aceh yang berakibat pada dana gampong yang dialokasikan pada APBD juga berkurang. Demikian juga untuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah menurun akibat pandemic pada tahun 2020 dan 2021.
Walaupun alokasi dana untuk gampong mengalami penurunan akibat pandemic, kemampuan gampong dalam mengelola dana gampong telah menjadi lebih baik dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar pada tabel capaian pengelolaan keuangan gampong berikut ini.

Tabel 2. 80
Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang Baik Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik	25%	30%	40%	47%	64,44%

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2021
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Pada awal periode capaian pengelolaan keuangan gampong relatif masih rendah. Kemampuan aparat gampong dalam mengelola dana gampong mengalami beberapa kendala dan belum mampu memenuhi kriteria cakupan yang baik yaitu Perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kendala yang dialami antara lain dari segi perencanaan sering terlambat akibat ketidakharmonisan dengan tuha peut gampong; penatausahaan, kelengkapan berkas/dokumen pencairan; pelaksanaan, perubahan harga barang, menyebabkan perubahan proses pengadaan. Akibatnya mempengaruhi proses pertanggungjawaban. Pergantian geuchiek dapat menyebabkan kapasitas aparat yang juga berbeda dan bermasalah dengan proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Untuk itu perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan keuangan gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Upaya berkesinambungan ini kemudian berdampak kepada membaiknya capaian pengelolaan keuangan gampong yang hanya 25 persen di awal periode menjadi 64,44 persen pada tahun 2021.

10) Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dilaksanakan melalui fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dengan pemberian dana revolving. Pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan BPRS Baiturrahman sejak tahun 2009 telah melaksanakan program PUEM dengan tingkat suku bunga 6% per tahun. Pada Tahun 2013 Program PUEM ini dihentikan dan digantikan dengan PUEM Al Qardhul Hasan (pinjaman tanpa bunga) sejak tahun 2015. Untuk lebih jelasnya Jumlah Penyaluran Dana Bergulir dan jumlah penerima permodalan melalui program PUEM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 81
Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Program PUEM di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyaluran Dana Bergulir (Rp)	1.627.000.000	839.000.000	227.000.000	187.000.000	N/A
2	Jumlah Penerima (orang)	396	206	48	40	N/A

Sumber: Diskopdag_UKM Kota Banda Aceh, 2021

Pada tahun 2017-2018 permohonan masyarakat diajukan ke DPMG kemudian DPMG mendisposisikan ke BPRS dan dilakukan studi kelayakan peminjaman, setelah verifikasi maka penerima di sk kan dari DPMG. Namun, sejak 2019 sampai dengan 2021 debitur mengajukan pembiayaan ke LKMS Mahirah dan setelah diverifikasi dan dianggap layak menerima dana bergulir maka setelah itu DPMG mengeluarkan sk penerima. Dengan demikian penurunan jumlah penerima bantuan PUEM berhubungan dengan kemampuan usaha mikro tersebut dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh LKMS Mahirah.

11) Presentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang Baik

Definisi asset desa yang diuraikan dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Oleh karena itu kemampuan aparat gampong dalam mengelola asset desa menjadi indikator penting dalam pembangunan di gampong. Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik di Kota Banda Aceh periode 2017 -2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 82
Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik Tahun 2017-2021 (dalam persen)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik	25	27	37	40	44,44

Sumber: DPMG, 2021
**Tahun 2021 adalah data per 31 November 2021*

Capaian yang diraih pada awal periode belum begitu menggembirakan. Kapasitas apparat gampong dalam mengelola asset ini masih perlu untuk ditingkatkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kemapuan dalam inventarisir barang, laporan asset sangat kurang dilakukan oleh desa. Kemampuan ini terus diupayakan oleh DPMG sebagai OPD yang membantu gampong melalui program pelatihan pelaporan asset. Upaya ini kemudian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan apparat gampong yang terlihat dari meningkatnya capaian pengelolaan asset gampong diakhir periode yaitu tahun 2021 yang mencapai 44,44 persen. Namun, tentu belum dapat berpuas diri dengan capaian ini. Perlu upaya peningkatan kapasitas aparatur gampong di bidang pengelolaan aset gampong perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.

12) Presentase Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik

Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan mukim/gampong. Penyusunan perencanaan gampong, pengelolaan keuangan dan aset gampong, penyusunan profil gampong, pembuatan produk hukum gampong dan

pelaksanaan administrasi pemerintahan mukim/gampong akan dapat berjalan baik bila gampong memiliki SDM yang baik. Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/ Gampong yang baik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 83
Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik Tahun 2017-2021
(dalam persen)

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik	25	30	38	45	59,81

Sumber: DPMG Kota Banda Aceh, 2021

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-undang no 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

1) Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Program Keluarga Berencana sudah berjalan cukup baik di Kota Banda Aceh, hal ini karena dalam pelaksanaan program dan kegiatan didukung pendanaan yang lumayan yakni dari Dana Alokasi Khusus (DAK) KB. Saat ini secara prasarana telah tersedia 5 (lima) pos KB yang dibangun dari dana tersebut, secara sarana telah sangat baik yakni tersedianya berbagai kelengkapan operasional yang mendukung kader dalam pelayanan KB hingga ke tingkat gampong.

Tabel 2. 84
Jumlah Anak Per Keluarga

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata Jumlah Anak Per-Keluarga	1,7	1,31*)	1,35*)	1,57	N/A

Sumber: DP3A2KB
**) Data 2018 dan 2019 disesuaikan*

Rata-rata jumlah anak di Kota Banda Aceh sejak tahun 2017 sampai 2021 tidak mencapai 2 orang anak per keluarga. Hal ini di satu sisi menunjukkan keberhasilan dalam pembatasan jumlah anak, namun di sisi lain juga perlu digali lebih dalam penyebab mengapa keluarga di Kota Banda Aceh tidak memiliki anak lebih dari 2 orang per keluarga. Hal ini perlu dilakukan agar Kota Banda Aceh dapat memperoleh dampat positif dari bonus demografi dan tetap mempertahankan kesejahteraan masyarakatnya.

2) Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Berikut perkembangan rasio akseptor KB Kota Banda Aceh periode tahun 2017-2021.

Tabel 2. 85
Ratio Akseptor KB

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase PUS/Rasio Akseptor KB	45,43	43,69	45,21	55,76	69,01*

Sumber: DP3AP2KB, 2021

Data akseptor KB di Kota Banda Aceh mengalami trend yang positif atau meningkat. Kondisi ini menunjukkan peningkatan jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi akseptor KB dimana pada tahun 2017 hanya 45,43 persen menjadi 69,01 persen di tahun 2021.

h. Perhubungan

Kabupaten/kota dalam urusan perhubungan melalui Dinas Perhubungan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 139 tahun 2016. Dalam hal ini untuk Kota Banda Aceh meliputi moda angkutan darat dan juga moda angkutan sungai/danau/penyebrangan.

1) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum merujuk kepada pengangkutan orang dan atau barang oleh kendaraan umum baik berupa mobil/bis penumpang ataupun kapal/pesawat. Layanan angkutan ini diperlukan untuk memperlancar aktifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan sektor ekonomi dan non ekonomi. Penggunaan jasa angkutan umum oleh masyarakat di Kota Banda Aceh pada periode tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 86
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021**
1.	Jumlah penumpang Bis	1.214.664	1.558.205	1.829.375	1.529.375	839.128
2.	Jumlah penumpang ASDP	703.501*)	794.364*)	859.982*)	508.964	496.142
3.	Total Jumlah Penumpang	1.918.165	2.352.569	2.689.267	2.038.339	1.335.270

**) Data tahun 2016-2019 disesuaikan*
***Data Untuk Tahun 2021 (status data bulan Nopember 2021)*
Sumber: Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Jumlah penumpang angkutan umum di Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun terus meningkat kecuali tahun 2020 dan 2021 dimana pandemi terjadi. Penambahan jumlah penumpang terjadi pada angkutan bis dan juga ASDP tahun 2017-2019, ketika PPKM diberlakukan untuk mecegah penularan pada tahun 2020-2021 maka tingkat mobilitas penduduk juga berkurang yang terlihat dari berkurangnya jumlah penumpang angkutan umum baik di darat (bis) maupun di air (ASDP).

Secara khusus pergerakan atau mobilitas masyarakat dalam menggunakan angkutan darat dilakukan baik di dalam Kota Banda Aceh maupun antar kabupaten/kota dan antar provinsi. Kemampuan untuk memindahkan orang dan barang dari satu wilayah ke wilayah lain ini sangat ditentukan oleh sarana angkutan yang tersedia, dalam hal ini yaitu jumlah angkutan yang menawarkan jasa mobilisasi. Secara rinci jumlah angkutan umum dan penumpang di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 87
Jumlah Penumpang dan Angkutan Umum Darat Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021*	
		Jml Ang	Jml Pen	Jml Ang	Jml Pen	Jml Ang	Jml Pen	Jml Ang	Jml Pen	Jml Ang	Jml Pen
1	AKDP	787	815.042	787	1.187.403	796	1.463.613	901	1.097.859	1.316	665.184
2	AKAP	157	399.622	157	370.802	169	365.762	157	431.512	219	173.944
Jumlah		944	1.214.664	944	1.558.205	965	1.829.375	1.058	1.529.375	1.535	839.128
Jumlah ang/ pen X 100%		0,08		0,06		0,05		0,06		0,18	

Sumber: Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Pada perhubungan jalur darat dapat dibedakan menjadi angkutan darat dalam provinsi (AKDP) dan angkutan darat antar provinsi (AKAP). Jumlah angkutan umum yang tersedia mencerminkan jumlah penumpang yang dimobilisasi. Pada Kota Banda Aceh, jumlah angkutan dari tahun ke tahun meningkat dari 944 unit angkutan umum pada tahun 2017 bertambah menjadi 1.535 angkutan umum pada tahun 2021 dengan jumlah penumpang yang dipindahkan dari 1.214.664 penumpang pada tahun 2017 menjadi 1.829.375 penumpang pada 2019 tapi kemudian menurun pada tahun 2020 dan 2021. Penurunan jumlah penumpang ini berhubungan erat dengan kebijakan PPKM yang membatasi mobilitas penduduk antar daerah.

2) Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk menyediakan layanan penumpang umum. Berikut adalah data jumlah izin trayek yang dikeluarkan Kota Banda Aceh pada periode 2017-2021.

Tabel 2. 88
Rasio Izin Trayek Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Izin Trayek perkotaan (Jumlah Kendaraan)	198	172	207	210	22
2.	Izin Trayek perdesaan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Izin Trayek (KPS)	19	12	37	24	22
4.	Jumlah penduduk	259.913*)	265.111	270.321*)	252 899	Belum tersedia
5.	Rasio Izin Trayek	0,08	0,06	0,08	0,08	**

Sumber : Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
*Catatan : *Data Untuk Tahun 2021 (status data bulan Nopember 2021)*
*** Rasio Izin Trayek belum dapat dihitung karena data penduduk Tahun 2021 belum tersedia*

Pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah izin trayek perkotaan pada tahun 2021 yaitu turun dari 210 kendaraan menjadi 22 kendaraan saja. Hal ini terjadi karena pada tahun ini masa izin trayek yang diberikan telah berakhir dan tidak diperpanjang. Izin trayek dikeluarkan untuk masa 5 tahun, jika sudah habis masa berlaku maka dapat diajukan kembali. Sementara itu, Izin trayek KPS merupakan izin trayek yang masa berlakunya adalah 6 bulan sampai dengan 1 tahun dan melekat pada kendaraan.

3) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji Kir adalah rangkaian pengujian kelayakan bagi kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjamin keselamatan pengguna kendaraan bermotor terutama bagi angkutan umum. Peraturan uji KIR tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara khusus menyebutkan pada Pasal 53 ayat 1 yaitu "Uji berkala wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum dan mobil barang, bus, mobil berkereta gandengan dan berkereta tempelan yang beroperasi di jalan"

Tabel 2. 89
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2021

No	Angkutan Umum	2017			2018			2019			2020			2021		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1	Mobil penumpang umum	103	72	34,95*)	104	57	27,40*)	74	30	20,27*)	74	14	9,46	22	12	27,27
2	Mobil bus	1.295	1.402	54,13*)	1.446	2.074	71,72*)	1.637	2.150	65,67*)	1.817	1.581	43,51	1.513	1.845	60,97
3	Mobil barang	4.881	7.408	75,89*)	5.446	6.748	61,95*)	5.958	7.353	61,71*)	6.348	4.871	38,37	4.835	3.434	35,51
4	Kereta gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kereta tempelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	63	100	60	101	84,17
	Jumlah	6.279	8.882	70,73	7.053	8.879	63,46	7.669	9.533	62,15	8.267	6.529	39,49	6.430	5.392	41,93

Sumber : Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
*Catatan : *Data Untuk Tahun 2021 (status data bulan Nopember 2021)*
*** Rasio Izin Trayek belum dapat dihitung karena data penduduk Tahun 2021 belum tersedia*

Permasalahan yang muncul disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji KIR pada kendaraan bermotor serta banyaknya pemilik kendaraan yang melakukan uji KIR pada daerah lain. Strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan sosialisai kepada masyarakat terhadap pentingnya melakukan uji KIR sesuai waktu yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan, strategi lainnya adalah melakukan operasi ketertiban angkutan umum/ razia bekerja sama dengan pihak kepolisian.

4) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Tabel 2. 90
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Jumlah angkutan umum yg memiliki KIR	4.441	4.440	4.767	4.252	5.392
2	Jumlah angkutan umum	6.279	7.053	7.669	6.743	6.430
Persentase (%)		70,73	62,95	62,16	63,06	83,86

Sumber : Bidang LLAJ dan UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
*Catatan : *Data Untuk Tahun 2021 (status data bulan Nopember 2021)*

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum dihitung berdasarkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dibagi dengan jumlah angkutan umum dikali 100%. Setiap angkutan umum wajib melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, namun tidak semua angkutan umum di Kota Banda Aceh yang melakukan uji KIR sebanyak 2 (dua) kali, hal ini disebabkan karena:

1. Angkutan Kota sebagian besar sudah tidak beroperasi lagi
2. Kendaraan dalam keadaan rusak/tidak jalan lagi
3. Kendaraan melakukan numpang uji pada daerah lain
4. Kendaraan yang telah di mutasi tidak mencabut berkas uji
5. Kendaraan yang beroperasi dijalan tidak melakukan pengujian tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.

Maka solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu:

1. Melakukan Pengawasan/razia terhadap kendaraan wajib uji
2. Menyurati kepada setiap perusahaan angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan tepat waktu dan perpanjangan uji bagi yang telah mati KIR nya.

3. Mensosialisasikan persyaratan mutasi dan numpang uji.\

5) Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Berdasarkan SOP Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh , lamanya pengujian KIR adalah 40-50 menit untuk setiap kendaraan dengan biaya sebesar Rp 75.000 sampai dengan Rp 150.000 tergantung jenis kendaraan. Aturan ini ditetapkan pada Peraturan Walitkota Kota Banda Aceh no 30 tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Qanun Kota Banda Aceh nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan.

6) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Banda Aceh

Penggunaan moda angkutan darat sangat diperngaruhi oleh jalan yang tersedia di wilayah Kota Banda Aceh. Sebagai barang publik yang merupakan bagian dari layanan public pemerintah Kota Banda Aceh, jalan raya mempunyai kapasitas tertentu agar dapat dilalui dengan nyaman. Berikut perkembangan panjang jalan dan kendaraan di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 91
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Banda Aceh tahun 2017-2020

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan (km)	765,66	765,66	676,13	676,13
2	Jumlah kendaraan	271.625	280.967	281.698	294.244
Rasio		0,29	0,27	0,24	0,22

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

Peningkatan pendapatan dan aktifitas ekonomi menyebabkan jumlah kendaraan yang melalui jalan-jalan di Kota Banda Aceh bertambah dari tahun ke tahun sementara penambahan jalan sulit dilakukan mengingat luas area kota tidak mungkin bertambah. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan di jalan-jalan utama dalam kota. Oleh karena itu, kemacetan manjadi permasalahan yang mempunyai urgensi tinggi untuk diselesaikan dalam urusan perhubungan di Kota Banda Aceh.

7) Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis

Pada Tahun 2017 sampai Tahun 2021 jumlah pelabuhan ASDP berjumlah 1 (satu) unit yaitu berada di Kecamatan Meuraxa bernama Pelabuhan Ulee Lheue. Pelabuhan ini juga sebagai pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran. Jumlah terminal bis adalah 3 (tiga) unit yaitu:

1. Terminal Penumpang Type A (Batoh)
2. Terminal Penumpang Type B (Lueng Bata)
3. Terminal Penumpang Type C (APK Keudah)

Tabel 2. 92
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pelabuhan ASDP	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
	Jumlah	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

8) Persentase Layanan Angkutan Darat

Angkutan darat adalah angkutan utama yang berlaku di Kota Banda Aceh. Mobilitas masyarakat pada umumnya menggunakan moda angkutan ini untuk kegiatan sehari-hari.

Tabel 2. 93
Persentase Angkutan Darat tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Angkutan darat	944	944	965	1.058	1.535
2	Jumlah penumpang Angkutan Darat	1.214.664	1.133.403*)	1.453.613*)	1.529.375	839.128
3	Persentase (%)	0,08	0,16	0,11	0,12	0,18

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
*Catatan : *) Data tahun 2016-2019 disesuaikan*

9) Pemasangan Rambu-rambu

Tabel 2. 94
Persentase Pemasangan Rambu Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pemasangan Rambu	2.104 Unit	2.237 Unit	2.305 Unit	2.325 Unit	2.424 Unit

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah Rambu yang seharusnya tersedia	2.250 Unit	2.360 Unit	2.360 Unit	2.360 Unit	2.360 Unit
Persentase (%)		**93**	**94**	**97**	**98**	**103**

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan dihitung berdasarkan Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) yang sudah ada dibagi dengan Jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka) dikali dengan 100%.Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas perlengkapan jalan bertambah dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dalam mempertahankan kondisi ini maka diperlukan perawatan/pemeliharaan, peremajaan dan pergantian fasilitas perlengkapan jalan secara berkesinambungan.

10) Perparkiran

Tabel 2. 95
Kondisi Perparkiran Di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021

No	Kegiatan	2018	2019	2020	2021
1	Lokasi parkir kendaraan	80 Titik	85 Titik	90 Titik	101 Titik
2	Jumlah juru parkir (berdasarkan kontrak)	352 Orang	396 Orang	452 Orang	480 Orang
3	Tarif parkir • Kend. R2 • Kend. R4	 Rp. 1.000 Rp. 2.000	 Rp. 1.000 Rp. 2.000	 Rp. 1.000 Rp. 2.000	 Rp. 1.000 Rp. 2.000
4	PAD retribusi perparkiran	3.912.170.000	4.394.108.000	3.003.287.000	4.390.131.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

i. Komunikasi dan Informatika

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) ditargetkan di dalam SPM yaitu sebesar 50%, dihitung berdasarkan Jumlah KIG dibagi dengan Jumlah kecamatan yang ada pada kabupaten/ kota dikali 100%. Capaian indikator SPM pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 96
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Tingkat Kecamatan

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber : https://sinergi.bandaacehkota.go.id/statistics

Terget ditetapkan masing-masing kecamatan adalah satu kelompok Informasi Gampong (KIG) sementara yang telah terbentuk dalam Wilayah Kota Banda Aceh sebanyak 20 (dua puluh) kelompok dari sembilan Kecamatan, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan sebesar 100% berada diatas nilai SPM yang telah ditetapkan. Selain itu penerapan kebijakan yang disampaikan dalam KIG perlu didukung oleh semua *stakeholder*. Kebutuhan pengembangan website-website gampong dan tenaga IT di gampong sudah selayaknya di dukung oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Saran dari permasalahan yang timbul yaitu harus adanya alokasi dana untuk kebijakan yang disampaikan dalam KIG salah satunya seperti perlu adanya web site gampong dimana butuh dana untuk sarana dan prasarana pendukung web tersebut.

j. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1) Persentase Koperasi Aktif

Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, menyatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Peran ini diberikan karena koperasi merupakan bentuk usaha yang mencerminkan sikap khas bangsa Indonesia yang saling tolong menolong dan selalu begotong royong. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk menfasilitasi masyarakat dalam menggiatkan koperasi. Kota Banda Aceh turut mendorong tumbuhnya dan aktifnya koperasi dalam pemberdayaan ekonomi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perkembangan koperasi selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 500 jumlah koperasi aktif pada tahun 2017 menjadi 513 koperasi pada tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 97
Persentase Koperasi Aktif Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi Aktif	362	364	384	386	395
2	Jumlah Koperasi	500	502	506	507	513
3	Persentase Koperasi Aktif	72,4	72,51	75,88	76,13	76,69

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh 2021

Persentase koperasi aktif di kota Banda Aceh mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata-rata persentase koperasi aktif per tahun 74,72 persen dari total koperasi yang dibentuk. Peningkatan jumlah koperasi aktif dari awal periode yaitu tahun 2017 adalah 72,4 persen bertambah menjadi 76,69 persen pada akhir periode tahun 2021.

2) Jumlah UMKM dan BPR/ LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai sebuah lembaga keuangan telah mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh bagi para pelaku ekonomi lemah, dimana pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada masyarakat tanpa peraturan yang ketat, yang menjadi permasalahan sekarang permodalan lembaga keuangan mikro sangat terbatas sementara masih banyak UMKM yang membutuhkan modal dari LKM. Perkembangan jumlah BPR/ LKM dari Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 98
Jumlah UMKM dan BPR/LKM di Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021 (November)
1	Jumlah seluruh UMKM	9.591	10.944	12.012	15.107	16.970
2	Jumlah BPR/LKM	4	4	4	4	4

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh 2021

k. Penanaman Modal

1) Jumlah Investasi (PMDN dan PMA)

Investasi adalah indicator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan variable yang dapat merefleksikan besarnya aktifitas ekonomi saat ini dan di masa hadapan. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan yang kondusif bagi investor untuk melakukan investasi, apalagi untuk wilayah Aceh yang pernah mengalami masa konflik dan bencana alam besar. Kota Banda Aceh yang juga merupakan ibu kota provinsi Aceh menjadai wajah keamanan investasi bagi Aceh secara keseluruhan, keberhasilan investasi di Kota Banda Aceh akan mencerminkan keamanan dan profitibalitas yang tinggi bagi para investor. Fakta tentang perkembangan investasi yang ditanamkan di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 99
Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kota Banda Aceh Tahun 2016-2021

Tahun	PMDN (Rp)	PMA (Rp)	Jumlah PMDN dan PMA (Rp)	Jumlah Investor
2017	118.166.350.000	-	118.166.350.000	22
2018	62.474.407.981	186.176.268.012	248.650.675.993	82
2019	185.577.364.240	380.740.108.449	566.317.472.689	87
2020	257.206.290.684	2.000.000.000	259.206.290.684	806
2021	227.945.665.191	156.381.146.842	384.326.812.033	1081

Sumber : Data DPMPTSP tahun 2021

Pelayanan Perizinan yang selama ini dilakukan secara *offline* saat ini berubah menjadi online, dimana investor/pelaku usaha dapat mendaftarkan izinnya secara mandiri melalui kemudahan teknologi informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS) merupakan terobosan dalam mempercepat proses perizinan kepada investor/pelaku usaha.

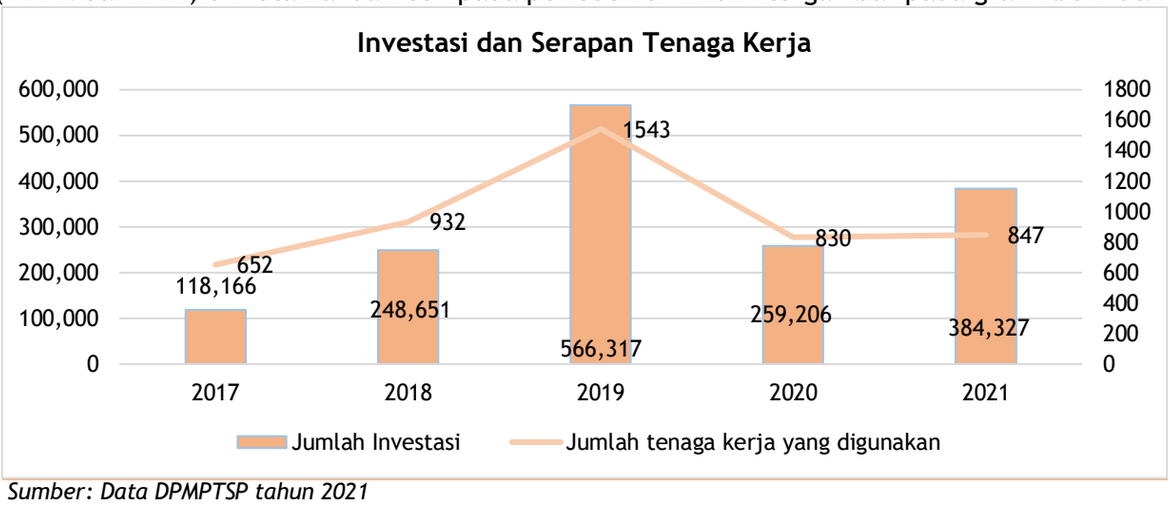
DPMPTSP Kota Banda Aceh sejak 1 Agustus 2019 telah menjalankan OSS dalam proses perizinan. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh investor/pelaku usaha dalam mendaftarkan tempat usahanya dan menginput data usahanya melalui Sistem OSS maupun kendala dalam penginputan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada LKPM Online. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan bagi para investor/pelaku usaha, khususnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Pergantian sistem pelaporan ini mempengaruhi pencatatan investasi di Kota Banda Aceh khususnya bagi Penanaman Modal Dalam Negeri sehingga terlihat pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah investasi PMDN yang dilaporkan. Namun, setelah masa transisi ini berlalu dapat dilihat bahwa

jumlah investasi terutama PMDN menjadi lebih tercatat dengan baik. Untuk Penanaman Modal Asing tidak melalui sistem Kota Banda Aceh tetapi tercatat pada sistem di badan penanaman modal pusat.

Pencatatan terhadap nilai investasi ini adalah pencatatan atas nilai asset tetap, dimana nilai asset tetap berarti pembentukan modal tetap bruto *(gross fixed capital formation)* yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dengan demikian mempunyai dampak yang berjangka menengah dan panjang untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu diharapkan akan selalu bertambah dan bergerak aktif dalam mendorong investasi terpengaruh *(induced investment)* lainnya.

2) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Investasi yang ditanamkan di Kota Banda Aceh telah memberikan dampak positif dari sisi ketenagakerjaan. Setiap tahun terjadi penyerapan tenaga kerja sesuai dengan investasi yang ditanamkan pada tahun tersebut. Perkembangan penyerapan tenaga kerja akibat investasi (PMDN dan PMA) di Kota Banda Aceh pada periode 2017-2021 tergambar pada grafik berikut:



Sumber: Data DPMPTSP tahun 2021

Gambar 2. 51
Serapan Tenaga Kerja dari PMDN dan PMA di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

I. Kepemudaan dan Olahraga

1) Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Pemuda

Organisasi Kepemudaan (OKP) adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Organisasi kepemudaan ini berdiri bersama dengan visi dan stgruktur kepemimpinan, budaya dan model aktualisasi ide dan gagasannya. Dari data pada tahun 2017 terdapat 69 OKP di Kota Banda Aceh yang terdaftar di Dispora Banda Aceh. Berikut perkembangan jumlah organisasi pemuda di Kota Banda Aceh periode 2017-2021.

Tabel 2. 100
Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Organisasi Pemuda
1	2017	69
2	2018	68
3	2019*)	53*)
4	2020*)	53*)
5	2021	54

**) Data 2018 dan 2019 disesuaikan*
Sumber: Dispora Kota Banda Aceh dan BPS Kota Banda Aceh

2) Olahraga

Pemuda dan olah raga merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Keaktifan pemuda dalam menggiatkan olah raga bukan hanya mencerminkan kepada kesadaran terhadap kesehatan tetapi juga menunjukkan peran serta pemuda dalam menyumbang prestasi untuk daerah. Kegiatan/even olah raga juga dapat menjadi pemicu kegiatan ekonomi lainnya yang mendorong tumbuhnya aktifitas ekonomi pendukung seperti produsen alat olah raga, penyedia tempat olah raga, dan juga penyedia lapangan kerja di sektor olah raga sebagai pelatih/instruktur atau pemain profesional. Bahkan saat ini, olah raga sudah merupakan bagian dari gaya hidup sehat yang sedang menjadi tren di seluruh dunia. Kota Banda Aceh juga sudah mulai mengubah persepsi tentang pentingnya olah raga yang tercermin dari

meningkatnya jumlah klub olah raga yang dibangun. Berikut adalah perkembangan jumlah prasarana dan sarana olah raga yang tersedia di Kota Banda Aceh Periode 2016 -2020

Tabel 2. 101
Perkembangan Olahraga Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk.	32	-	148	148	151
2	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk.	1	1	3	3	4

Sumber : Dispora Kota Banda Aceh, 2021

3) Pembinaan Atlet dan Pelatih

Olah raga sebagai sarana untuk mencapai prestasi tentu harus direncanakan dan dibina dengan baik. Pembinaan olahraga adalah sistem pembibitan yang melibatkan individu atlet dalam pembangun keprofesionalan diri melalui sistem yang telah ditetapkan dengan tujuan prestasi. Pada tahun 2021 Kota Banda Aceh sudah memiliki 11 cabang olah raga yang dibina secara khusus dengan para pelatih yang berlisensi. Berikut data cabang olah raga dan atlit yang dibina Kota Banda Aceh tahun 2021.

Tabel 2. 102
Data Cabang Olahraga dan Atlit Binaan Dispora Kota Banda Aceh Tahun 2021

No	Cabang olahraga	Jumlah atlit	Jumlah pelatih		
			Memiliki lisensi	Belum memiliki lisensi	Total
1	Atletik	12	4	1	5
2	Sepak bola	18	4	1	5
3	Bola voly	24	4	2	6
4	Bola basket	24	4	2	6
5	Pencak silat	14	4	1	5
6	Bulu tangkis	7	2	1	3
7	Tenis lapangan	8	3	-	3
8	Tenis meja	8	3	-	3
9	Karate	12	3	2	5
10	Taekwondo	12	3	2	5
11	Panahan	8	2	3	5
Total		147	36	15	51

Sumber: Dispora Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa saat ini atlit binaan di Kota Banda Aceh ada 147 atlit dengan 51 pelatih. Atlit terbanyak adalah dari cabang olah raga Basket dan Voly sebanyak 24 orang masing-masing cabang olah raga dan yang paling sedikit adalah bulu tangkis hanya sebanyak 7 orang atlit.

m. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu layanan public yang penting karena menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Keberadaan pustaka dapat meningkatkan minat baca dan juga tingkat literasi yang tinggi. Kota Banda Aceh terus berupaya untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat dengan menyediakan pustaka-pustaka mulai dari tingkat gampong. Berikut gambaran kondisi kepustakaan di Kota Banda Aceh periode tahun 2018-2021.

Tabel 2. 103
Kondisi perpustakaan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021

No	Indikator	2018	2019	2020	2021*
1	Jumlah perpustakaan	43	43	45	45
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan umum dan Perpustakaan Keliling Per Tahun (org)	18.581	15.475	7.215	9.852
3	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	8,68%	7.53%	4.37%	**
4	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	34.918	28.514	29.174	28.948
5	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	967	1824	1227	1962

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Jumlah Pustaka adalah 45 unit dengan rician Perpustakaan Gampong 43, Perpustakaan Kecamatan 1 dan 1 Perpustakaan Pukesmas. Perpustakaan ini secara keseluruhan mempunyai

koleksi buku terakhir tahun 2021 sebanyak 28.948 dengan jumlah pengujung sebanyak 1962 pengunjung pada tahun tersebut.

n. Kearsipan

Kearsipan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan dan pengelolaan dokumen-dokumen penting pemerintahan dari masa ke masa. Naskah-naskah dokumen ini perlu dijaga dan dilestarikan keberadaan nya sebagai bukti sejarah berbagai aktifitas pemerintahan dalam kurun masa tertentu agar dapat dijadikan rujukan bagi kegiatan di masa depan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kota Banda Aceh di bidang kearsipan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 104
Kondisi Kearsipan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021

No	Indikator	2018	2019	2020	2021*
1	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	20%	20%	20%	20%
2	Peningkatan SDM Pengelola kearsipan	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan
3	Sistem dokumentasi arsip digital yang diaplikasikan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	-	-	-	1 Sistem

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Berdasarkan tabel di atas maka masih diperlukan peningkatan kapasitas kearsipan baik dari segi prasarana, sarana dan juga sumber daya manusia dalam pengelolaan lebih lanjut.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Kota Banda Aceh telah menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik minat banyak wisatawan. Sebagaimana telah berkembangnya tren *travelling* di seluruh dunia maka Kota Banda Aceh juga memanfaatkan gaya hidup baru ini menjadi peluang untuk meningkatka pariwisata. Berbagai event wisata baik yang bertaraf national dan international yang dilaksanakan oleh Pemko Banda Aceh, kegiatan-kegiatan promosi diluar daerah, keikutsertaan pada kegiatan pameran baik tingkat national maupun international serta tak lepas dari semakin baiknya tata kelola Pemerintahan Kota Banda Aceh. Namun demikian pandemic yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Banda Aceh. Perubahan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Banda Aceh sejak tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 105
Kunjungan Wisatawan ke Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Wisatawan	2018			2019			2020			2021		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah wisatawan	300.000	393.400	131,13	350.000	503.992	143,99	400.000	172.197	43,05	450.000	190.285	42,28

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 2021

Pada tahun 2018 dan 2019 jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh meningkat dengan pesat melampaui target yang diperkirakan. Namun, tahun 2020 dan 2021 jumlah wisatawan yang berkunjung hanya sekitar 40 persen dari yang ditargetkan. Pembatasan pergerakan dalam rangka mencegah *Covid-19* telah menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis.

Walaupun demikian wisatawan yang berkunjung bukan hanya wisatawan local tetapi juga wisatawan mancanegara. Hal ini membuktikan bahwa daya Tarik Kota Banda Aceh cukup besar sehingga masih merupakan salah tujuan wisata yang diminati oleh pelancong mancanegara. Wisatawan mancanegara ini berasal dari paling ramai berasal dari Filipina, Amerika Serikat dan Malaysia yang merupakan pelancong yang mendominasi wisatawan mancanegara tahun 2020 yang datang ke Kota Banda Aceh. Secara lebih rinci informasi mengenai asal negara wisatawan mancanegara yang datang ke Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 106
Wisatawan ke Kota Banda Aceh Menurut Daerah Asal Tahun 2020

No	Negara Asal *Major Country*	Jumlah Wisman *Number of Foreign Tourists*	*%*
1	Malaysia	39	20,63
2	Republik Rakyat Cina	3	1,59
3	J e r m a n	3	1,59
4	Australia	17	8,99
5	Perancis	9	4,76
6	I n g g r i s	1	0,53
7	Singapura	3	1,59
8	Amerika Serikat	49	25,93
9	Thailand	-	-
10	Filipina	65	34,39
11	Lainnya	-	-
	Kota Banda Aceh	189	100

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2021
(https://bandaacehkota.bps.go.id/statictabel/2021/08/26/114/banyaknya-wisatawan-mancanegara-menurut-negara-asal-utama-di-kota-banda-aceh-2020.html)

b. Pertanian

1) Produktivitas Padi Per Hektar

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh merupakan kota yang berkembang pesat dan menjadi tujuan urbanisasi. Oleh sebab itu kegiatan ekonomi utama yang dimiliki adalah perdagangan dan jasa, sedangkan lahan pertanian semakin lama semakin berkurang seiring dengan meluasnya area perkotaan. Kondisi ini telah mempengaruhi sektor pertanian di Kota Banda Aceh terutama pada tanaman padi. Luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas padi di Kota Banda Aceh tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 107
Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kota Banda Aceh

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Tanam (Ha)	37,5	80,8	63,5	86,6	31,7
2	Luas Panen (Ha)	68,4	68,3	63,5	16	13,19
3	Produksi (Ton)	295,2	370,8	358,6	87	70,32
4	Produktivitas (Kw)	43,16	54,29	56,47	54,38	53,31

Sumber: DKPP Kota Banda Aceh, 2021

Tabel di atas memperlihatkan telah terjadi pengurangan luas lahan tanam padi yang signifikan yang mempengaruhi turunnya jumlah produksi padi.

2) Cakupan Bina Kelompok Petani

Perkembangan kelompok binaan pertanian/peternakan dari tahun 2017 sampai 2021 terjadi fluktuasi karena pembinaan terhadap kelompok pertanian/ peternakan dipengaruhi oleh permintaan masyarakat pada tingkat Musrenbang dan juga ketersediaan lahan pertanian/ peternakan semakin berkurang serta ketersediaan dana terbatas. Permasalahan dalam pembinaan kelompok pertanian/peternakan yaitu kurangnya sarana dan prasarana.

Tabel 2. 108
Rumus Cakupan Bina Kelompok Pertanian

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	RUMUS	2012	2013	2014	2015	2016	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
Cakupan Bina Kelompok Pertanian/ Peternakan	Jumlah Kelompok petani yang mendapatkan Bantuan pemda tahun n ———————— x 100% Jumlah kelompok tani	6,00 %	37,00 %	12,00 %	22,00 %	22,00 %	DKPP

Sumber: DKPP Kota Banda Aceh, 2021

c. Peternakan

Kawasan peternakan di Kota Banda Aceh lebih luas terutama di Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Lueng Bata dan Kecamatan Syiah Kuala. Pengembangan peternakan di Kota Banda Aceh sangat tergantung pada lahan yang tersedia, sedangkan lahan peternak di Kota Banda Aceh semakin menurun karena telah terjadi konversi lahan atau telah diperuntukkan untuk pembangunan lain.

Tabel 2. 109
Data Potensi Ternak Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jenis Ternak		
		Sapi/ Kerbau	Kambing/ Domba	Unggas

1.	2017	-	94,49	825,74
2.	2018	408,81	86,63	1.587,54
3.	2019	927,14	52,24	1.652.56
4.	2020	501,86	61,21	1.711,52
5.	2021	282,65	23,40	1.819,04

Sumber: DKPP Kota Banda Aceh, 2021

- Permasalahan
  Kita ketahui bahwa Kota Banda Aceh bukan kawasan produsen ternak, lahan-lahan di Kota Banda Aceh sudah berubah fungsi sehingga lahan semakin lama semakin berkurang dan apabila populasi ternak di Kota Banda Aceh semakin meningkat maka akan terjadi pencemaran lingkungan dan juga konflik sosial.
- Tingginya harga daging
  Masalah tingginya harga daging bukan terjadi di Kota Banda Aceh saja akan tetapi telah meluas bahkan seluruh Indonesia. Salah satu tingginya harga daging karena permintaan sangat meningkat apalagi di Kota Banda Aceh pada hari-hari besar keagamaan.
  Lebih lanjut pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun destinasi makanan halal untuk menjamin ketenangan masyarakat Kota Banda Aceh. Dan kendala yang dihadapi saat ini belum tersedianya RPH dan RPU yang representatif di Kota Banda Aceh yang menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan. Dalam hal ini pemerintah perlu membangun Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) yang presentatif sesuai ketentuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) di Kota Banda Aceh menuju destinasi makanan yang ASUH.

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi listrik di Kota Banda Aceh disediakan oleh PLN melalui pembangkit listrik yang terkoneksi ke system transmisi dan pembangkit listrik yang tidak terkoneksi ke sistem transmisi. Pembangkit listrik yang terkoneksi merupakan sambungan koneksi jaringan listrik dari Sumatera Utara. Seluruh kecamatan (9 kecamatan) dan 90 gampong di wilayah Kota Banda Aceh sudah dialiri oleh listrik. Secara lebih rinci kelistrikan Kota Banda Aceh sejak tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 110
Data Kelistrikan Kota Banda Aceh Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi (kWh)	508.772.814	528.207.244	736.556.209	39.534.227	42.825.326
2	Penjualan (X Rp 1.000)	621.788.518	727.439.236	791.522.061	858.033.592	730.241
3	Gardu Hubung (Unit)	10	11	12	14	13
4	Trafo Distribusi (Buah)	2.306	2.479	2.712	2712	2.828
5	Panjang JTM (kms)	3.872,75	3981,95	4.218,47	4.218,47	1.717,14
6	Panjang JTR (kms)	2.428,32	2510,06	5.579,05	5.579,05	2.745,45
7	Pembangkit Non PLN (kVA)	-	-	-	-	-
8	Pelanggan (Orang)	207.568	219.822	232.622	246.451	259.149
9	Daya Tersambung (VA)	365.428.612	392.684.492	419.265.196	453.517.296	485.823,57
10	Terima (kWh Salur) (kWh)	508.772.814	528.207.244	736.556.209	792.105.366	791.834.788
11	Penjualan (kWh)	603.189.095	622.166.266	664.974.359	725.790.292	730.241.630
12	Daya Trafo Distribusi (kVA)	216.238	232.467	260.368	260.368	261.757
13	Jumlah Kecamatan Terlistriki	9	9	9	9	9
14	Jumlah Desa Terlistriki	90	90	90	90	90
15	Jumlah Desa Seluruhnya	90	90	90	90	90
16	Rata-rata tarif per Kwh	1.083	1.214	1.190	1.201	1.135

Sumber : BPS Kota Banda Aceh

e. Perindustrian

1) Jumlah IKM yang Mendapatkan Bantuan Perbankan

Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan penambahan penduduk dan terbukanya informasi dari berbagai penjuru daerah. Berikut data Perkembangan Industri Kecil Kota Banda Aceh tahun 2017–2021.

Tabel 2. 111
Data Perkembangan Industri Kecil Kota Banda Aceh

Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja (Org)	Nilai Investasi (Rp)	Nilai Produksi (Rp)	Nilai Tambah
2017	2.404	8.300	58.570.000.000	248.570.000.000	195.580.000.000
2018	2.457	7.871	123.162.000.000	115.289.700.000	109.323.700.000
2019	2.560	8.272	175.066.033.000	155.691.240.000	112.022.700.000
2020	2.594	8.373	176.696.533.000	158.009.768.000	113.478.292.000
2021	2.620	8.434	189.240.055.000	162.349.118.000	116.348.950.000

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

Sementara Perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Banda Aceh jika dilihat dari setiap sektor adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 112
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah

No	Sektor	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sektor Pangan	681	701	835	849	867
2	Sektor Sandang	550	565	689	694	699
3	Sektor Kimia	541	549	329	329	330
4	Sektor Logam	392	396	213	228	228
5	Sektor Kerajinan Umum	240	246	248	248	250
6	Sektor Jasa Lainnya	0	0	246	246	246
	Jumlah	**2.404**	**2.457**	**2.560**	**2.594**	**2.620**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

Industri Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh didominasi oleh sektor pangan pada peringkat pertama kemudian diikuti oleh sektor sandang dan kimia. Ketiga sektor ini merupakan lahan utama perkembangan industri di Kota Banda Aceh sejak 2017 sampai dengan 2021.

2) Jumlah IKM yang Mampu Melakukan Pemasaran Komoditi

Industri di Kota Banda Aceh sangat bervariasi dan terdiri dari berbagai macam komoditas. Peningkatan pemasaran yang paling tinggi dan efektif adalah secara online melalui sosial media, Peningkatan wawasan IKM dalan menemukan pasar yang cocok dan membangun kreatifitas untuk variasi produk, sehingga produk dan komoditas IKM semakin diterima ditengah tengah masyarakat, selain adanya peran pemerintah dalam memasarkan produk perajin baik melalui event pameran, pelatihan maupun media massa. Kualitas IKM yang telah semakin baik ditunjukkan oleh kemampuan IKM dalam menembus pasar nasional dan memiliki sertifikasi. Berikut kondisi IKM Kota Banda Aceh tahun 2021.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

Gambar 2. 52
Kondisi IKM Kota Banda Aceh Tahun 2021

3) Jumlah Produk yang Menunjang Program One Village One Product

Kota Banda Aceh adalah daerah yang mempunyai produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah. Salah satu cara untuk peningkatan dan pengembangan produk unggulan adalah melalui penetapan produk *One Village One Product* (OVOP). Sejak tahun 2016, Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten dan fokus dalam pembinaan produk OVOP dan menentiukan cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh sesuai dengan petunjuk teknis OVOP pada Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/2007 (Tahun 2020) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 113
Cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk OVOP Kota Banda Aceh

No	Nama Produk	Nama Gampong

1	Makanan ringan	Lampulo, Lambung, Lhong Cut
2	Minuman sari buah dan sirup buah	Lambaro Skep, Lamdingin, Pango Raya, Lamteh, Ulee Kareng
3	Kain tenun	Lamgugob, Lamteumen
4	Batik	Lambaro Skep
5	Kerajinan anyaman	Neusu, Pango Raya, Lamteumen
6	Kerajinan gerabah	Penyerat

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021

Variasi produk IKM di Kota Banda Aceh sudah cukup banyak dan dapat menjadi mata pencaharian bagi masyarakat.

4) Jumlah Pasar yang Sudah Berfungsi Secara Optimal

Pasar-pasar di Kota Banda Aceh masih berfungsi dengan sangat baik. Namun, perkembangan zaman dan pembangunan ekonomi menuntut perubahan terutama dari sisi tata ruang dan keindahan kota. Dengan sebab itu maka beberapa lokasi pasar perlu dipindahkan atau diremajakan sehingga menimbulkan beberapa pasar yang tertunda untuk berfungsi dengan baik. Berikut kondisi pasar di Kota Banda Aceh yang sudah berfungsi dengan baik dan belum.

Tabel 2. 114
Nama Pasar di Kota Banda Aceh

No	Nama Pasar	Pasar yang sudah berfungsi optimal					Pasar yang belum berfungsi				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasar Aceh	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
2	Pasar Gp. Baru	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
3	Pasar Seutui	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
4	Pasar Peuniti	V	V	V	V	V	-	-	-	-	-
5	Pasar Kartini	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
6	Pasar Ikan	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
7	Pasar Daging	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
8	Pasar Bumbu	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
9	Pasar Unggas	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
10	Pasar Nasabe	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
11	Pasar Rex	V	V	V	V	-	-	-	-	-	V
12	Pasar Ulee Kareng	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V
13	Pasar Newtown	-	V	-	-	-	V	-	V	V	V
14	Pasar Pusat Kuliner dan Souvenir	-	V	-	-	-	V	-	V	V	V
15	Pasar Kuliner Ulee Lheue	V	V	-	-	-	-	-	V	V	V
16	Pasar Al-Mahirah Lamdingin	-	-	-	V	V	V	V	V	-	-
17	Pasar Rakyat - Batoh	-	-	V	V	-					
18	Pasar Rakyat Ulee Lheu										
Total		**12**	**14**	**12**	**14**	**5**	**4**	**2**	**5**	**4**	**11**

Sumber :Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2021

f. Kelautan dan Perikanan

1) Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Pembinaan terhadap kelompok nelayan terus dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat Kota Banda Aceh adalah kota yang dikelilingi lautan dan ramai masyarakat yang bekerja di sektor ini. Berikut cakupan binaan kelompok nelayan di Kota Banda Aceh periode tahun 2017-2021.

Tabel 2. 115
Rumus Cakupan Binaan Kelompok Nelayan

Bidang Urusan/ Indikator	Rumus	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Bantuan pemda tahun n / Jumlah Kelompok Nelayan X100%	387	61	133	107	115

Sumber :DP2KP Tahun 2021

2) Produksi Perikanan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Kota Banda Aceh merupakan Sentra terbesar pendaratan ikan yang terdapat di Provinsi Aceh. Hampir seluruh armada dengan berbagai jenis komoditi perikanan didaratkan, produksi perikanan dari tahun ketahun telah terjadi peningkatan, hal ini sangat didukung oleh armada dan teknik penangkapan ikan yang diterapkan oleh nelayan di Kota Banda Aceh, selain itu

dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam memberantas *Illegal Fishing* telah berdampak positif bagi usaha perikanan tangkap, meningkatnya ketersedian sumber daya ikan di perairan laut Aceh. Penerapan tegnologi usaha penangkapan ikan telah berhasi lmeningkatkan produksi perikanan di Kota Banda Aceh sehingga membantu nelayan dalam meningkatnya taraf hidup mereka.

Tabel 2. 116
Produksi Ikan Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021

Uraian		2018	2019	2020	2021
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Realisasi	235	251	340,3	399
	Target	228	233	243	243
Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	Realisasi	9.825	10.715	27.203,63	582
	Target	9.200	9.400	9.600	9.800
Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Realisasi	52,1	54,81	174,71	Tidak tersedia data
	Target	50,7	51,7	53,73	Tidak tersedia data

Sumber :DP2KP Tahun 2021

D. Penunjang Urusan

a) Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan aspiratif dimaksudkan bahwa RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan mengacu kepada RPJP Daerah yang telah menyerap aspirasi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan serta merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh.

RPJM Kota Banda Aceh juga menjadi pedoman bagi SKPD di dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), serta Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), yang selanjutnya, keduanya akan mengacu untuk menyusun Rencana Kinerja SKPD. Selama periode 2017-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal). Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kota Banda Aceh dalam periode tersebut sudah terakomodasi secara optimal.

b) Keuangan

1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Banda Aceh memperoleh opini wajar tanpa pengecualian terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK. Opini dari BPK-RI merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu; (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) Kecukupan Pengungkapan, (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern. Berikut opini BPK tahun 2018-2021.

Tabel 2. 117
Opini BPK Tahun 2018 - 2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
OPINI	WTP (LKPD 2017)	WTP (LKPD 2018)	WTP (LKPD 2019)	WTP (LKPD 2020)

Kota Banda Aceh selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa *UNQUALIFIED OPINION* (WAJAR TANPA PENGECUALIAN/ WTP), yang diberikan oleh BPK-RI, dimana Auditor BPK-RI telah meyakini secara material bahwa, (a) penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh telah sesuai SAP(PP 24/2005), tidak ada salah saji material dan telah diuangkapkan secara memadai, (b). Sistem pengendalian intern yang dibangun/diterapkan telah cukup memadai, sehingga dapat mengamankan harta dan kebijakan manajemen, (c). Semua transaksi yang dilakukan telah sesuai ketentuan yang berlaku (tidak ada temuan yang material yang mempengaruhi opini auditor).

2) Persentase SiLPA

Tabel 2. 118
Persentase SiLPA Kota Banda Aceh

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Persentase SiLPA	100%	100%	100%	100%	193,50%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2021

Pada tahun 2021 persentase SiLPA nilainya adalah 193 persen yang berarti nilai realisasi jauh lebih besar daripada anggaran. Biasanya persentase SiLPA itu tetap 100 persen karena pada penyusunan perubahan anggaran akan disesuaikan. Tapi pada tahun 2021 tidak terjadi perubahan qanun APBD-P maka nilai realisasi menjadi besar. Perihal waktu penetapan anggaran 2021 paling telat 30 Desember 2020 juga berpengaruh terhadap realisasi karena laporan keuangan yang diperiksa BPK baru selesai pada April 2021 sehingga realisasi menjadi lebih besar dari anggaran.

3) Persentase SILPA Terhadap APBD

Tabel 2. 119
Persentase SILPA Terhadap APBD

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Persentase SiLPA Terhadap APBD	5%	7%	2%	1%	2%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2021

Rasio SiLPA Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap total belanja mengalami penurunan bila dibandingkan Rasio SiLPA dari lima tahun anggaran terhitung sejak Tahun Anggaran 2017–2021. Dimana rasio SiLPA Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap total belanja mengalami penurunan dimana tahun 2017 dan 2018 sebesar 5 dan 7 persen sedangkan tahun 2019 menjadi 2 persen. Hal ini menunjukkan perencanaan yang semakin baik karena semakin sesuai antara anggaran dan realisasi belanja.

4) Persentase Belanja Pendidikan

Tabel 2. 120
Persentase Belanja Pendidikan

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Persentase belanja pendidikan (20%)	25,59%	23,59%	20,97%	20,13%	20,33%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2021

Persentase belanja pendidikan dari tahun 2017-2021 di kota Banda Aceh telah dialokasikan melebihi ketentuan minimal yaitu 20 persen. Namun, setelah mengalami pandemi maka terjadi refocusing anggaran sehingga tahun 2019-2021 alokasi belanja Pendidikan cukup untuk memenuhi syarat 20 persen dari total belanja saja

5) Persentase Belanja Kesehatan

Tabel 2. 121
Persentase Belanja Kesehatan

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Persentase belanja kesehatan (10%)	18,93%	18,96%	18,53%	15,73%	17,71%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2021

Belanja untuk bidang kesehatan pada APBD Pemko Banda Aceh dialokasikan di Dinas Kesehatan dan RSU Meuraxa. Peningkatan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2017-2019 disebabkan oleh adanya penambahan pendapatan pada BLUD RSU Meuraxa yang diiringi belanja pada BLUD tersebut juga menjadi meningkat.

6) Persentase Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 2. 122
Persentase Belanja Langsung

Tahun	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Persentase belanja langsung	52,53%	50,18%	52,37%	53,82%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2021

Alokasi belanja langsung yang diperuntukkan untuk belanja rutin dan juga untuk pembiayaan pembangunan kota dan untuk kepentingan masyarakat lebih besar dari 50 persen pada periode tahun 2017 s/d 2020. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik terus meningkat juga menjadi penyebab dari kenaikan persentase alokasi belanja langsung.

Tabel 2. 123
Persentase Belanja Tidak Langsung

Tahun	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Persentase belanja tidak langsung	47,47%	49,82%	48,80%	46,18%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2021

Persentase belanja tidak langsung memiliki proporsi sedikit lebih kecil dibandingkan belanja langsung di kota Banda Aceh. Belanja Tidak Langsung mencakup Belanja pegawai yang cukup besar dan juga dialokasikan untuk kebutuhan Belanja Bunga, Belanja Hibah, Bansos, Belanja Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga.

7) Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa

Tabel 2. 124
Persentase Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Persentase Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	11%	11%	11%	10%	13%

Sumber: BPKK Kota Banda Aceh, 2021

Persentase bagi hasil Kota Banda Aceh ke desa /gampong meliputi Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBN, Alokasi Dana Gampong yang berasal dari APBK Kota Banda Aceh, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh dalam hal bagi hasil untuk desa sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada **pasal** 72, ketentuan tersebut memuat tentang pendapatan Desa yang berasal dari Alokasi APBN (ADD), Bagian Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah juga Alokasi Dana Desa (ADG) dengan ketentuan 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kota Banda Aceh dalam APBD setelah dikurangi DAK. Pada PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN memuat bahwa ADD merupakan dana yang dialokasikan Pemerintah untuk Desa yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

8) Penetapan APBD

Penetapan APBD yang tepat waktu mempunyai dampak terhadap kelancaran realisasi anggaran pada tahun tersebut. Oleh sebab itu, ketepatan waktu penetapan APBD menjadi hal penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Berikut gambaran ketepatan penetapan APBD di Kota Banda Aceh.

Tabel 2. 125
Penetapan APBD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Penetapan APBD	Tepat Waktu 30 Des 2016	Tepat Waktu 29 Des 2017	Tepat Waktu 28 Des 2018	Tepat Waktu 27 Des 2019	Tepat Waktu 30 Des 2020

Kota Banda Aceh setiap tahunnya dari 2017 s/d 2021 selalu berhasil untuk menetapkan APBD tepat waktu, hal ini menunjukkan singkronisasi dan harmonisasi antara eksekutif dan yudikatif dalam proses perencanaan sampai dengan penetapan APBD.

c) Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas aparat pemerintah merupakan salah satu upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dilakukan utamanya melalui peningkatan pendidikan baik secara formal ataupun kegiatan pendidikan lainnya yang berhubungan dengan kapasitas struktural-fungsional. Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun mengirimkan aparaturnya untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan formal sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 126
Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan formal di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Tahun	Izin Belajar	Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan	Izin Belajar Politeknik	Tugas Belajar	Total
2018	53	18	84	35	190
2019	66	31	84	30	211
2020	70	14	84	33	201
2021	61	25	74	21	181

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2021

Tiap tahun sejak 2018 sampai saat ini (2021) Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengirimkan ratusan pegawai negeri sipil untuk menyelesaikan pendidikannya di lembaga pendidikan formal. Bentuk pendidikan yang juga diselesaikan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh adalah pendidikan dan pelatihan struktural. Berikut jumlah aparatur yang dikirimkan selama periode tahun 2018 – 2021.

Tabel 2. 127
Pejabat Struktural yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Tahun	Jumlah Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	Jumlah Total Jabatan	Target (%)	Realisasi (%)
2018	438	669	42	65,47
2019	425	656	48	64,79
2020	356	655	54	54,35
2021	349	642	60	54,36

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2021

Pengiriman aparatur untuk pendidikan dan pelatihan struktural selain dilakukan berdasarkan kebutuhan jabatan tetapi juga dipengaruhi oleh anggaran yang ditetapkan pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, dalam proses realisasi nya terkadang mengalami hambatan. Berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan selain untuk meningkatkan kemampuan pribadi aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka peningkatan pelayanan publik, juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh pemerintah kota, misalnya administrator dan pengawas. Fungsi administrator dan pengawas ini harus diakui secara nasional sebagai bentuk perwujudan standarisasi pelayanan publik di Indonesia. Sampai saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkatkan jumlah administrator dan pengawas sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah gambaran tentang jumlah administrator dan pengawas dari tahun 2018-2021

Tabel 2. 128
Jumlah Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi

Tahun	Jumlah Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi *(Assessment)*	Jumlah Total Administrator dan pengawas	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2018	-	636	-	-	-
2019	95	628	15	15,13	100,08
2020	118	589	23	20,03	87,08
2021	130	607	23	21,42	93,12

Sumber: BKPSDM Kota Banda Aceh, 2021

d) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan didaerah memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan didaerah. Tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan di Pemerintah Kota Banda Aceh diamanatkan kepada Bappeda Kota Banda Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh dimana salah satu tupoksinya membidangi Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan analisa, pengkajian, penelitian, dan pengembangan pembangunan. Pada proses pelaksanaannya fungsi kelitbangan dilakukan berbagai kajian, Penelitian dan diseminasi hasil-hasil Penelitian yang akan digunakan sebagai landasan kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh. Selama periode RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, orientasi kelitbangan Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan kajian, Penelitian dan diseminasi pada aspek Koperasi dan UMKM, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Aspek-aspek Sosial dan Ekonomi, Pelayanan Publik, serta perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi.

Selain itu penelitian dan pengembangan Kota Banda Aceh juga memiliki peran dalam meningkatkan inovasi daerah dalam upaya untuk mendorong penerapan Good Governance dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh OPD terkait yang dilakukan dalam bentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi bentuk lainnya sesuai kewenangan daerah.

e) Pengawasan

Penyelesaian Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari Pengawas Eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) dan Inspektorat Aceh, maupun

Pengawas internal (Inspektorat Kota Banda Aceh) sangat tergantung pada keseriusan SKPK dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Berikut rincian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan inspektorat dan BPK di Kota Banda Aceh Tahun 2016-2021.

Tabel 2. 129
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh	4004*)	4732*)	5351*)	5865*)	6340	6827
2	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Kota Banda Aceh yang ditindak lanjuti	3951*)	4642*)	5189*)	5502*)	5836	6027
3	Persentase Tindak Lanjut (%)	98,68*)	98,10*)	96,97*)	93,81*)	92,05	88,28

Sumber : Inspektorat Kota Banda Aceh,2021

Tindak lanjut atas hasil rekomendasi inspektorat yang telah dilaksanakan secara umum sudah mencapai lebih dari 90 persen pada periode 2016-2020.

Tabel 2. 130
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan BPK Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK	676*)	744*)	773*)	816*)	885	923
2	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPK yang ditindaklanjuti	574*)	624*)	674*)	700*)	755	785
3	Persentase Tindak Lanjut (%)	84,91*)	83,87*)	87,19*)	85,78*)	85,31	85,05

Tindak lanjut atas hasil rekomendasi BPK yang telah dilaksanakan secara umum sudah mencapai lebih dari 80 persen pada periode 2016-2021.

f) Sekretariat DPRD

Layanan urusan penunjang Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan yang antara lain tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh; tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pembentukan perda, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD); dan terintegrasinya program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRK

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Tingkat daya saing *(competitiveness)* merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia untuk meningkatkan daya aing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global[1].

2.1.4.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) memiliki asas: kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat serta keberlanjutan. Dengan tujuan dari pengukuran Indeks Daya Saing daerah, antara lain adalah[2] :

- ✓ Mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosisten, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan

[1] https://indeks-inovasi.brin.go.id/tentang/latar-belakang
[2] https://indeks-inovasi.brin.go.id/tentang/tujuan-sasaran-dan-kegunaan

- ✓ Menjadi pendorong kepada seluruh stakeholder terutama para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam rangka meningkatkan tingkat daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
- ✓ Sebagai upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
- ✓ Menjadikan dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
- ✓ Menjadi alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program pembangunan baik pada level nasional dan daerah

NO	ASPEK/FAKTOR	PILAR	DIMENSI	INDIKATOR
I	**Aspek Faktor Penguat/Enabling Environment**	Pilar Kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan	4
			Keamanan dan Ketertiban	1
		Pilar Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi	2
			Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan	2
		Pilar Perekonomian Daerah	Keuangan Daerah	5
			Stabilitas Ekonomi	4
II	**Aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital**	Pilar Kesehatan	Kesehatan	1
		Pilar Pendidikan dan Keterampilan	Pendidikan	6
			Keterampilan	3
III	**Aspek Pasar/Market**	Pilar Efisiensi Pasar Produk	Kompetisi Dalam Negeri	2
			Pajak dan Retribusi	3
			Stabilitas Pasar	1
		Pilar Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	2
			Kapasitas tenaga kerja	3
		Pilar Akses Keuangan	Akses Keuangan	6
		Pilar Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	3
IV	**Aspek Ekosistem Inovasi**	Pilar Dinamika Bisnis	Regulasi	4
			Kewirausahaan	5
		Pilar Kapasitas Inovasi	Interaksi dan Keberagaman	6
			Penelitian dan Pengembangan (R & D)	9
		Pilar Kesiapan Teknologi	Komersialisasi	3
			Telematika	2
			Teknologi	1

Sumber: Laporan Hasil Pemetaan IDSD se-Indonesia 2019

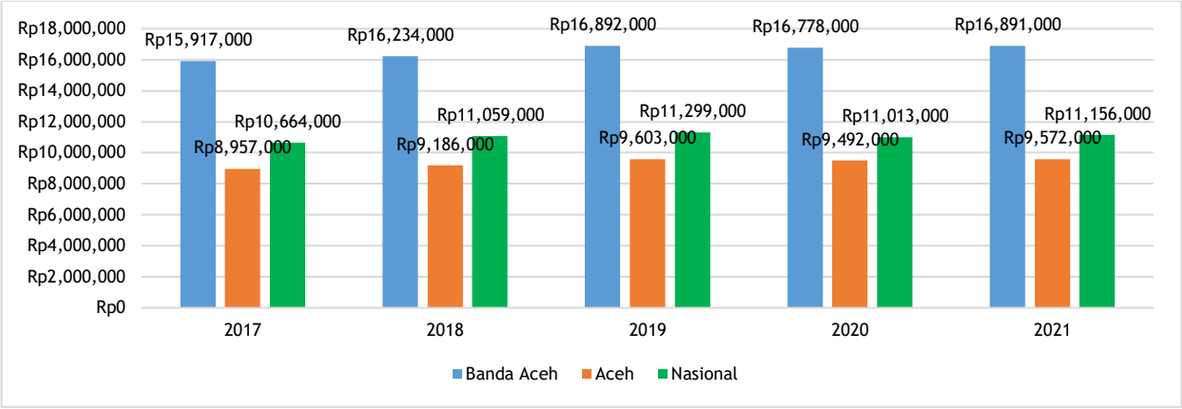
Gambar 2. 53
Aspek Pemetaan IDSD

Pada tahun 2019 nilai IDSD Kota Banda Aceh berada pada kategori rendah. Skor terendah berada pada aspek pasar. Namun, hasil IDSD tahun 2020 menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh sudah mencapai kategori sedang. Hal ini menunjukkan kondisi yang membaik.

2.1.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

PDRB penggunaan atau pengeluaran merupakan nilai pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh berbagai golongan dalam masyarakat baik untuk memenuhi modal, stok, maupun ekspor dan impor. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rum ah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita penduduk Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan berada di atas pengeluaran per kapita provinsi dan nasional. Perbandingan pengeluaran per kapita pada periode 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

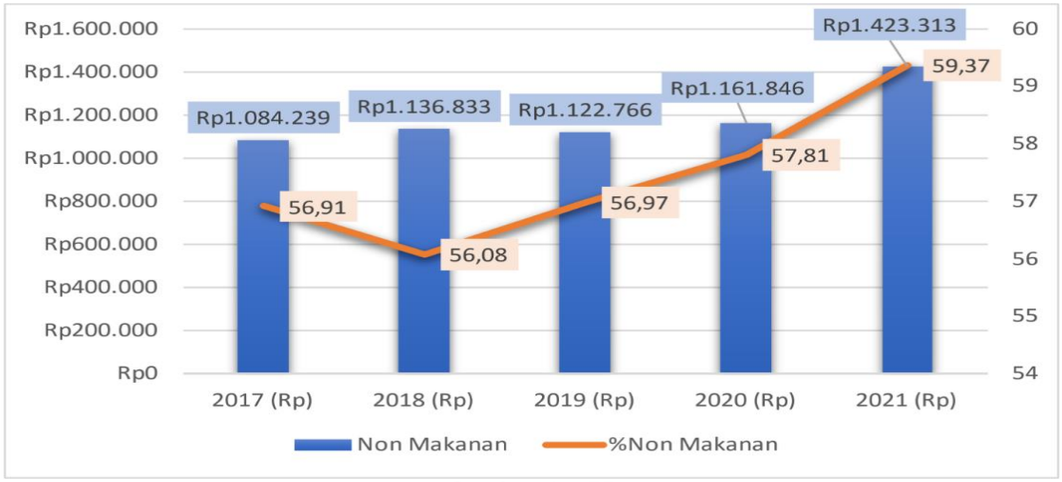


Sumber : Badan Pusat Statistik Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional 2017-2021

Gambar 2. 54
Pengeluaran Perkapita per Tahun di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional pada Tahun 2017-2021

B. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Non-Makanan

Pengeluaran untuk konsumsi dapat dikategorikan kepada pengeluaran untuk makanan dan non-makanan. Pengeluaran untuk makanan berarti bagian pendapatan yang digunakan untuk keperluan konsumsi makanan, sedangkan pengeluaran non-makanan menunjukkan alokasi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi non-makanan. Pengeluaran non-makanan juga berarti bahwa sudah tercukupinya kebutuhan pangan pokok sehingga masyarakat mempunyai kelebihan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan lain. Grafik berikut menggambarkan kondisi penduduk Kota Banda Aceh yang semakin baik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.



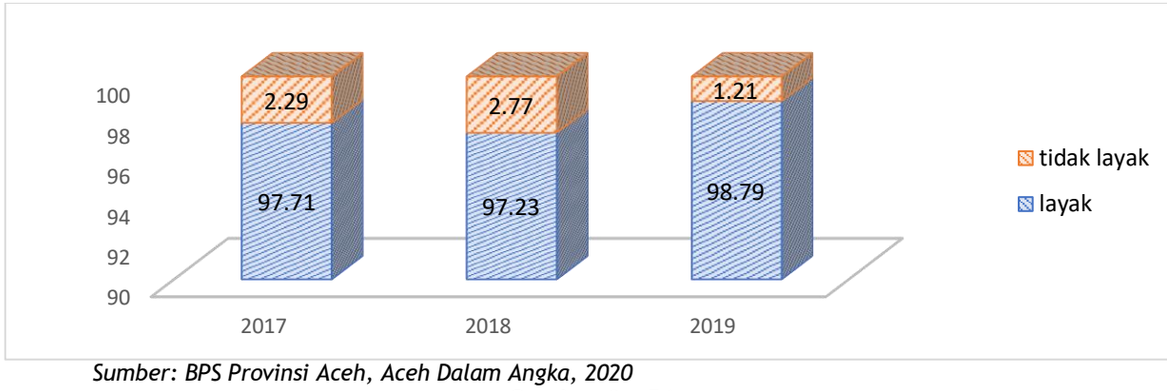
Gambar 2. 55
Pengeluaran Perkapita Non-Makanan per Tahun di Kota Banda

Grafik di atas menunjukkan bahwa penduduk Kota Banda Aceh sudah menggunakan lebih dari 50 persen pendapatannya untuk kebutuhan non-makanan. Pada tahun 2017 penduduk menggunakan 56,91 persen pendapatan untuk pengeluaran non-makanan dan pada tahun 2021 pengeluaran non-makanan sudah mencapai 59,37 persen dari pendapatan per kapita penduduk Kota Banda Aceh.

2.1.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Persentase Penduduk yang menggunakan Air Bersih

Kota Banda Aceh sudah berhasil memenuhi pelayanan air minum layak sejak 2017 sampai saat ini. Persentase penduduk yang menggunakan air bersih di Kota Banda Aceh sudah mencapai lebih dari 97 persen. Gambaran akses air minum layak tahun 2017 sampai 2019 terlihat pada grafik berikut



Sumber: BPS Provinsi Aceh, Aceh Dalam Angka, 2020

Gambar 2. 56
Cakupan Akses Air Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2017-2019

B. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Layanan Listrik di Kota Banda untuk tahun 2021 sudah mencapai 100 persen. Penggunaan listrik oleh tiap pelanggan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 131
Ketersediaan Daya Listrik

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Produksi (kWh)	508.772.814	528.207.244	736.556.209	39.534.227	42.825.326
2	Pelanggan (Orang)	207.568	219.822	232.622	246.451	259.149
3	Rasio pelanggan: produksi	1: 2451	1:2403	1:3166	1: 160	1: 165

Sumber : BPS Kota Banda Aceh
(https://bandaacehkota.bps.go.id/statictabel/2021/08/25/88/data-kelistrikan-pt-pln-persero-wil-nad-cabang-kota-banda-aceh-2016-2020.html)

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator pada RPJMD Periode Sebelumnya

Tabel 2. 132

Tabel Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018-2021

Visi, Misi & Sasaran	Indikator	2018			2019			2020			2021			SKPD Penanggung Jawab
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah														
Misi 1 :Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Bidang Aqidah. Syariah. dan Akhlak														
Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Nilai Survey Pelaksanaan Syariat Islam Banda Aceh	65%	70.20%	108%	70%	69.70%	99.60%	75%	75.22%	100.29%	80%			**DSI**. Disdikday. Sekretariat MPU. Sekretariat MAA
	Penurunan angka pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam	180 Kasus	215 Kasus	119.44%	160 Kasus	97 Kasus	60.62%	120 Kasus	90 Kasus	75%	100 Kasus	53 Kasus	53%	DSI. Disdikday. **Satpol PP & WH**. Sekretariat MPU. Sekretariat MAA
Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah														
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Kebudayaan. Kepemudaan. dan Olahraga														
Sasaran 1: Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Sekolah yang memenuhi SNP	70%	76,31%	109,01%	72%	79,98%	111,08%	75%	92,39%	123,19%	77			**Disdikbud**. Dinas Perpustakaan & Kearsipan. Disdikday. Sekretariat MPD
	Persentase siswa yang mampu menghafal Al-Quran	5%	4,15%	83%	6%	11,56%	192,67%	7%	6,59%	94,14%	8%	6,12%	76,50%	**Disdikbud**. Dinas Perpustakaan & Kearsipan. Disdikday. Sekretariat MPD
	Tingkat Prestasi kota di POPDA	4	4	100%	-	-	tidak dilaksanakan	Peringkat 3	Tahun ini Tidak di Laksanakan dikarenakan Pandemi *Covid*-19	-	-	-	tidak dilaksanakan	**Dispora**
Sasaran 1 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB	3.41%	4.49%	131.67%	3.60%	4.50%	125%	3.78%	-3.29%	-87.04%	3.96%	4.5%	113.64 %	Disnaker, Diskop UKM dan Dag, DP2KP, DLHK3, BPKK, DPMPTSP, Dispar, Dinsos, DPMG, **Sekretariat Baitul Mal**
	gini	0.325	0.294	90.46%	0.321	0.294	91.59%	0.319	0.303	94.98%	0.317	0.347	109.4%	**Sekretariat Baitul Mal**
	Angka kemiskinan	18621 Jiwa	19130 Jiwa	102.73%	18531 Jiwa	20287 Jiwa	109.48%	18442 Jiwa	18970 Jiwa	102.86%	18352 Jiwa	18227 Jiwa	99.32%	Dinsos, Disnaker, **Sekretariat Baitul Mal**, Diskop UKM & Dag, DPMG, DP2KP
	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.35%	7.29%	99.18%	6.95%	6.92%	99.57%	6.55%	9.54%	145.65%	6.08%	8.94%	147.04 %	Dinsos, **Disnaker**, Sekretariat Baitul Mal, Diskop UKM & Dag
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	15%	184.17%	1227%	25%	84.26%	337.04%	50%	179.38%	358.76%	75%			**DPMPTSP**
	Jumlah kunjungan wisatawan	300.000 Orang	393.400 orang	131,13%	350.000 Orang	503.992 Orang	143.99%	400.000 Orang	172.197 Orang	43.05%	450.000 Orang	190.285 Orang	43.29%	**Dispar**, Dinas PUPR
Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah														
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat														
Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.5	0.38	76%	0.6	0.46	76.67%	0.7	0.5	71.43%	0.8	0.57	71.25%	**Dinkes**. RSU Meuraxa
Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah														
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik														
Sasaran 1 : Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	84,18	120.26%	75	85.61	114.15%	80	86.49	108.11%	85			Sekretariat Daerah, Bappeda, Sekretariat DPRK, BKPSDM, Disdukcapil, Kesbangpol, DPMG, Inspektorat, Satpol PP & WH, Kecamatan
Sasaran 2 : Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Nilai Pemeringkatan pemerintahan berbasis elektronik	2,65 (CC)	2,42 (CC)	91,32%	2,7 (CC)	2,24 (CC)	82,96%	2,8 (CC)	2,87 (B)	102,5%	2,9 (CC)			Sekretariat Daerah, **Diskominfotik**, DP2KP, BPKK
Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah														
Misi 6 : Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan														
Sasaran 1 : Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Kota Layak Huni	61.40	60.90	99.19%	61.90	- (tidak dilakukan survey)	0,00	62.4	(tidak dilakukan survey)-	0,00	62,90			Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas PUPR, DLHK3, Dinas Perkim, DPKP, Dishub, BPBD
Sasaran 2 : Mitigasi kebencanaan yang tangguh	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	0,8	0,8	100%	0,81	0,81	100%	0,83	0,83	100%	0,85			**BPBD**, DPKP

Visi, Misi & Sasaran	Indikator	2018			2019			2020			2021			SKPD Penanggung Jawab
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran 3 : Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan	Jumlah daya pasokan listrik dari energi terbarukan	14,76 KWp	13,6	KWp	92,14%	21,76 KWp	22,5 KWp	103,40%	28,76 KWp	22,5 KWp	78,23%	30,50 KWp	85,29%	DLHK3
Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah														
Misi 7 : Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
Sasaran 1 : Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	Indkes Pembangunan Gender (IPG)	95,66 %	99,4	99,73%	96,02%	95,17%	99,11	96,38%	95,46%	99,05%	96,74%	95,26%	98,47%	DP3AP2KB
	Persentase Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi	53%	64%	120.75%	56%	76.40%	136.43%	59%	76.4%	129.49%	62%	79.2%	127.74 %	DP3AP2BK
Sasaran 2 : Pengendalian pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0.09%	3.04%	2.96%	0.09%	0.04%	4.55%	0.09%	1.21%		0.09%			DP3AP2KB

Tabel 2. 133
Indikator Kinerja Daerah dalam Aspek Kesejahteraan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pertumbuhan PDRB*		4,49	4,18	-3,29	3,96			
	Laju Inflasi*		3,13	1,38	3,46	4,26			
	PDRB per kapita*	Rp.	65.520.000	67.380.000	66.180.000	78.876.540			
	Indeks Gini*		0,294	0,294	0,303	0,317	0,347		
	Persentase Penduduk Miskin*	%	7,25	7,22	6,90	6,54	7,61		
	Pengeluaran per kapita*	Rp.	16.234.000	1.970.813	2.009.893	2.266.849			
	IPM*		84,37	85,07	85,41	85,43	85,71		
1	Angka Melek Huruf		99,66	100	99,79	100	100	Tercapai	Disdikbud
2	Angka rata-rata lama sekolah		12,59	12,64	12,64	12,59	12,83	Tercapai	Disdikbud
3	Angka usia harapan hidup		71,10	71,36	71,45	72,7	71,52	Tidak tercapai	Dinkes
4	Persentase balita gizi buruk		0,03	0,07	0,03	0,03	0,21	Tidak tercapai	Dinkes
5	Prevalensi balita gizi kurang		3,08	4,7	0,3	0,4	1,79	Tidak tercapai	Dinkes
6	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	90	100	100	61,8	100	Tercapai	Dinkes
7	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	Persen	60,22	61,39	61,54%	62,59	63	Tercapai	Disnaker
8	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	92,71	95,68	90,46%	89,68	91,06	Tercapai	Disnaker
9	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	7,29	6,92	9,54%	6,08	8,94	Tercapai	Disnaker
10	Peroleh Opini dari BPK terhadap laporan Keuangan daerah	Persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai	BPKK
11	Persentase target PAD Kota	Persen	-3%	7%	96,86%	12%			BPKK

2.2.1 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pendidikan, pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut ini merupakan aspek pelayanan umum kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan bidang urusan, yaitu:

A Pendidikan

Kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh semakin baik hal ini dapat dilihat dari terus membaiknya tingkat capaian indikator pendidikan. Capaian kinerja indikator daerah dibidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 134
Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Sekolah Dasar (SD) Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	76,76	80,54	94,14	77	84,71	Tercapai	Disdikbud
2	Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	75,86	79,32	90,64	77	81,71	Tercapai	Disdikbud
3	Persentase lulusan SD yang mampu menghafal minimal satu juz Al Qur'an	Persen	5,01	6,48	6,41	8	6,69	Tidak tercapai	Disdikbud
4	Persentase lulusan SMP yang mampu menghafal minimal dua juz Al Qur'an	Persen	3,28	7,10	6,76	8	5,55	Tidak tercapai	Disdikbud

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	Persen	30,08	33,74	36,18	41	42,79	Tercapai	Disdikbud
6	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi	Persen	16,36	21,82	32,73	40	37,04	Tidak tercapai	Disdikbud
7	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/Paket A)		99,78	99,67	99,83	100	99,76	Tidak tercapai	Disdikbud
8	Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs/Paket B)		84,74	86,75	88,54	100	86,94	Tidak tercapai	Disdikbud
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS SD/MI/Paket A)		99,96	99,97	99,98	99,70	99,98	Tercapai	Disdikbud
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS SMP/MTs/Paket B)		99,42	99,94	99,98	75,50	99,99	Tercapai	Disdikbud
11	Angka Putus Sekolah (APtS SD/MI/Paket A)		0	0,03	0	0	0	Tidak ada data	Disdikbud
12	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs/Paket B		0	0,03	0	0	0,03	Tidak tercapai	Disdikbud
13	Angka Kelulusan (AL) (SD/MI/Paket A)		100	100	100	100	100	Tercapai	Disdikbud
14	Angka Kelulusan (AL) (SMP/MTs/Paket B)		100	100	100	100	100	Tercapai	Disdikbud
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		100	100	100	100	100	Tercapai	Disdikbud
	Fasilitas Pendidikan :								
16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi Ruang kelas baik		65,01	70,01	94,02	98,97	58,79	Tidak tercapai	Disdikbud
17	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas baik		40,05	44,23	90,95	90,15	53,35	Tidak tercapai	Disdikbud
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :								
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI(%)	%	0,31	0,31	0,32	0,53	0,33	Tidak tercapai	Disdikbud
19	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs(%)	%	0,31	0,37	0,32	0,34	0,32	Tidak tercapai	Disdikbud
	Rasio guru/murid:								Disdikbud
20	Rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar (SD/MI)	%	1:22	1:22	1:19	1:20	1:20	Tercapai	Disdikbud
21	Rasio guru/murid jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs)	%	1:14	1:15	1:16	1:20	1:12	Tidak tercapai	Disdikbud
22	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	69,16	86,96	89,07	89,50	90,59	Tercapai	Disdikbud
23	Jumlah sosialisasi/workshop kebijakan pendidikan bagi lembaga kemitraan keluarga, komite sekolah, orang tua siswa dan MPD	keg	0	2	0	2	1	Tidak tercapai	Disdikbud
24	Jumlah sekolah yang tersedia ruang kelas,ruang pimpinan,ruang guru, ruang ibadah,perpustakaan, Lab IPA, UKS, ruang OSIS, jamban, gudang dan lapangan tempat bermain/ olahraga	sek	5	5	11	10	11	Tercapai	Disdikbud
25	Jumlah pengawas, kepala sekolah, guru dan tenaga administari yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dan pendidikan karakter	org	728	654	1417	678	1290	Tercapai	Disdikbud
26	Terpenuhinya biaya operasi non personalia untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama		SD Rp.901.100/ siswa/tahun SMP Rp. 1.200.000 siswa/tahun	SD Rp.901.100/ siswa/tahun SMP Rp. 1.200.000 siswa/tahun	SD Rp. 1.001.100/ siswa/ tahun SMP Rp. 1.300.000/ siswa/ tahun	0	SD Rp. 1.041.100/ siswa/ tahun SMP Rp. 1.340.000/ siswa/ tahun	Tidak ada target di tahun 2021	Disdikbud
27	jumlah lembaga Pendidikan Vocasional Non Formal yang akan diakreditasi	lembaga	5	5	0	5	0	Tidak tercapai	Disdikbud

B Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan di Kota Banda Aceh ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam Permendagri No 86 tahun 2017, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 135
Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		54	38	113	29	119	Tidak tercapai	Dinkes
2	Angka kelangsungan hidup bayi		998	998	998	997	999	Tercapai	Dinkes
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		2	8	0,08	3	0,60	Tercapai	Dinkes
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		2	2	1,88	0,07	0,22	Tidak tercapai	Dinkes
5	Rasio posyandu per satuan balita	osyandu: balit	1:192	1:183	1:457	1:200	1:993	Tercapai	Dinkes
6	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Puskesmas: Penduduk	1:22.244	1:24.378	1:25.118	1:20.000	1:3002	Tidak tercapai	Dinkes
7	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk							tidak ada data	Dinkes
		RS:Penduduk	1:18.937	1:19.154	1:20.000	1:17.000	1:18.415	Tercapai	Dinkes
8	Rasio dokter persatuan penduduk							tidak ada data	Dinkes
			1 : 9.468	1 : 6.094	1 :6.094	1 : 5000	1 : 396	Tidak tercapai	Dinkes
9	Rasio tenaga medis persatuan penduduk								Dinkes
			1 : 541	1 : 541	1 : 507	1 : 3300	1 : 528	Tidak tercapai	Dinkes
10	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	%	94	91	99,5	98	85,73	Tidak tercapai	Dinkes
11	Setiap Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	%	94	91	91	99	80,22	Tidak tercapai	Dinkes
12	Setiap Bayi Baru Lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	%	96	96	99,5	80	84,42	Tercapai	Dinkes
13	Setiap Balita Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	%	68	68	80,9	70	57,42	Tidak tercapai	Dinkes
14	Setiap Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	92	95	33,8	99	0	Tidak ada data	Dinkes
15	Setiap Warga Negara Indonesia Usia 15 sd 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	53	67	16	Tidak tercapai	Dinkes
16	Setiap Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	34	60	63	67	42,10	Tidak tercapai	Dinkes
17	Setiap Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	23	67	28	Tidak tercapai	Dinkes
18	Setiap Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	100	67	100	Tercapai	Dinkes
19	Setiap Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	%	61	90	53	95	98,8	Tercapai	Dinkes
20	Setiap Orang Beresiko Terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/ Transgender, Pengguna NAPZA dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	%	4	73	33,5	9	86,4	Tercapai	Dinkes
21	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	93	85	78,06	60	63	Tercapai	Dinkes
22	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	100	80,9	60	57,42	Tidak tercapai	Dinkes
23	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
24	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	92	92	21,03	90	75,66	Tidak tercapai	Dinkes

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
25	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
26	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes
27	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinkes

C Pekerjaaan Umum

Pencapaian kinerja dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan ruang. Berikut indikator kinerja daerah yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan di bidang pekerjaan umum, yaitu:

Tabel 2. 136
Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Pekerjaan Umum

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Cakupan Layanan Air Minum	persen	91,54	91,45	91,37	100	92,83	Tidak tercapai	Dinas PUPR
2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	91,51	91,68	87,36	91,84	87,58	Tidak tercapai	Dinas PUPR
3	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	persen	86,40	87,11	87,91	87,05	99,93	Tercapai	Dinas PUPR
4	Persen Gampong yang Terkoneksi Drainase dalam Kondisi Baik	persen	78,62	79,45	83,99	81	80,49	Tidak tercapai	Dinas PUPR
5	Persentase Pengurangan Luas Genangan	persen	51,41	52,50	55,89	55,5	44,11	Tidak tercapai	Dinas PUPR
6	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	persen	86,73	89,48	94,35	93,12	94,53	Tercapai	Dinas PUPR
7	Persentase Panjang Jalan Gampong yang Terkoneksi dalam Kondisi Baik	persen	65.68	66,89	69,62	70,26	56,25	Tidak tercapai	Dinas PUPR
8	Bertambahnya Panjang Jalan Baru	km	0	0	0	0,5	0	-	Dinas PUPR
9	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	persen	13.20	13,20	13,20	16,33	13,20	Tidak tercapai	Dinas PUPR
10	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	persen	66	66	66	75,28	66	Tidak tercapai	Dinas PUPR
11	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	persen	73,40	73,60	74,20	74,01	74,37	Tercapai	Dinas PUPR
12	Ketaatan terhadap RTRW	persen	73,40	76,13	78,57	81,07	81,07	Tercapai	Dinas PUPR
13	Persentase bangunan Umum yang Memiliki Aksesibilitas	persen	31,50	42	59,60	40	55,90	Tercapai	Dinas PUPR
14	Aparatur Yang Memahami Aturan Tata Ruang	aparatur	1850	2100	2100	2600	2100	Tidak tercapai	Dinas PUPR
15	Masyarakat Yang Memahami Dan Taat Aturan Tata Ruang	masyarakat	1800	2200	2200	3000	2200	Tidak tercapai	Dinas PUPR
16	Jumlah Pemilik Lahan Yang Mendapatkan Insentif dan Disentif	Objek	0	0	0	60	0	-	Dinas PUPR
17	Jumlah kawasan Strategis Yang Tertata	kawasan	0	0	0	0	0	-	Dinas PUPR

D Perumahan

Kebutuhan akan perumahan terus meningkat akibat dampak dari meningkatnya jumlah penduduk. Pemerintah daerah memiliki peran yang penting untuk menciptakan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni. Berikut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dibidang perumahan dan pemukiman.

Tabel 2. 137
Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio rumah layak huni		24,20	24,36	25,84	22,99	19,94	Tidak tercapai	Perkim
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97,15	97,39	93,88	99,92	92,20	Tidak tercapai	Perkim
3	Persentase Luas Pemukiman yang Tertata	%	17,61	18,22	23,54	97,65	76,71	Tidak tercapai	Perkim
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	10,29	2,44	7,81	3,5	7,64	Tercapai	Perkim

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	76,32	2,66	1,06	1	-	Tidak ada data	Perkim
6	Propinsi rumah tangga kumuh perkotaan	%		2,05	20,76	1,95	31,27	Tercapai	Perkim
7	Cakupan lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	98,8	97,07	97,33	97,65	97,60	Tidak tercapai	Perkim

E Perencanaan Pembangunan

Dalam bidang perencanaan pembangunan daerah hanya ada satu indikator yang digunakan untuk menukur tingkat keberhasilan perencanaan, yaitu persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD. Tingkat capaian keberhasilan terhadap indikator dimaksud mencapai 100%. Ini berarti untuk tingkat keselarasan tidak ada prog ram yang berbeda antara program RKPD dengan program RPJMD. Tingkat capaian keberhasilan urusan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 138
Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Perencaaan Pembangunan Daerah

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase keselarasan program RKPK terhadap RPJMD	%	100	100	100			Tercapai	Bappeda

F Perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pelayanan Masyarakat di bidang transportasi dan angkutan kota. Indikator kinerja daerah di bidang perhubungan dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 2. 139
Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum		2.352.569	2.689.357	2.038.339	1.633.133	1.335.270	Tidak tercapai	Dishub
2	Rasio ijin trayek		0,24	0,25	0,21	0,21		Tidak ada data	Dishub
3	Jumlah uji kir angkutan umum		8879	9533	6529	10000	5392	Tidak tercapai	Dishub
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Termi nal Bis	UNIT	4	4	4	4	4	Tercapai	Dishub
5	Persentase layanan Angkutan Darat	%	0,16	0,11	0,12	0,13	0,18	tercapai	Dishub
6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	62,95	62,16	63,06	21	83,06	Tercapai	Dishub
7	Pemasangan Rambu-rambu	%	94	95	98	98	103	Tercapai	Dishub

G Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup memegang peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang sehat/tidak sehat secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan makhluk hidup disekitarnya. Tingkat capaian keberhasilan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 140
Capaian Indikator Kinerja Daerah bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Menurunnya TPS Liar		111	64	19	15	65	Tercapai	DLHK3
2	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	persen	14,31	14,32	14,33	16,33	14,33	tidak tercapai	DLHK3
3	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	persen	0	10	10	40	0	tidak tercapai	DLHK3

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Ramah Anak								
4	Persentase Penerangan Jalan Umum	persen	79,51	81,16	82,38	65,66	82,42	Tercapai	DLHK3
5	Cakupan Pelayanan Persampahan (Persentase Penduduk Terlayani)	persen	95,94	95,15	92,89	91	97,42	tercapai	DLHK3
6	Penghargaan Adipura		Tidak Ada	Belum Ada Pengumuman dari KLHK	Belum Ada Pengumuman dari KLHK	Ada	Belum Ada Pengumuman dari KLHK	Menunggu hasil pengumuman	DLHK3

H Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dengan diberlakukannya Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) secara Nasional, administrasi kependudukan di Kota Banda Aceh semakin tertib. Dari 13 indikator kinerja daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 13 indikator tersebut dapat direalisasikan dengan nilai 100 %. Berikut indikator kinerja daerah yang dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel 2. 141
Indikator Kinerja Daerah Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	persen	100	100	100	100	100	Tercapai	Disdukcapil
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	persen	99,30	99,48	99,93	97,5	99,31	Tercapai	Disdukcapil
3	Persentase Pasangan Ber-akte Nikah	persen	63,30	65	70,85	70	72,84	Tercapai	Disdukcapil
4	Cakupan Kepemilikan akta kelahiran	persen	76,30	78,50	80	78	84	Tercapai	Disdukcapil
5	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	persen	86	88	90	80	96,73	Tercapai	Disdukcapil
6	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	Nilai	90,88	92,77	94.41	90	95,36	Tercapai	Disdukcapil
7	Persentase Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Digital	persen	80	82	84	86	86	Tercapai	Disdukcapil
8	Persentase Peningkatan Akurasi Database Kependudukan	persen	89	93	94	94	96	Tercapai	Disdukcapil
9	Rasio bayi berakte kelahiran		0,90	0,92	0,94	0,96	0,99	Tercapai	Disdukcapil
10	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	persen	77	78	80	81	100	Tercapai	Disdukcapil
11	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Disdukcapil
12	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Tercapai	Disdukcapil
13	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 tahun	persen	88	89	92	86,5	96,82	Tercapai	Disdukcapil

I Pemberdayaan Perempuan dan, Perlindungan Anak

Peran pemerintah sangat penting dalam melakukan upaya-upaya untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di Kota Banda Aceh, perempuan diberi hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan melibatkan peran perempuan dalam membuat usulan-usulan terkait peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kegiatan Musyawarah Rencana Aksi Perempuan. Pemerintah Kota Banda Aceh juga memiliki komitmen yang tinggi untuk perlindungan anak. Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk menjadikan kota Banda Aceh sebagai Kota layak anak. Berikut disajikan indikator kinerja daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tabel 2. 142
Indikator Kinerja Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan peserta KB aktif	%	43,69	45,21	55,76	47	69,01	Tercapai	Dinas P3AP2KB
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	8,05	2,28	2,34	32	5,99	Tidak tercapai	Dinas P3AP2KB
3	Rasio KDRT	%	0,30	0,11	0,12	0,45		Tidak ada data	Dinas P3AP2KB
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas P3AP2KB
5	Persentase penanganan kasus KDRT	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas P3AP2KB
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas P3AP2KB
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas P3AP2KB
8	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	43,68	45,21	55,75	47	69,01	Tercapai	Dinas P3AP2KB
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	32,09	34,44	44,24	33	13,73	Tidak tercapai	Dinas P3AP2KB
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	21,08	23,38	12,74	24	24,23	Tercapai	Dinas P3AP2KB
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	51,92	51,56	67,15	63	55,37	Tidak tercapai	Dinas P3AP2KB
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	36,59	28,43	52,13	39	33	Tidak tercapai	Dinas P3AP2KB
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	5,88	7,52	15,41	30	29	Tidak tercapai	Dinas P3AP2KB
14	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	477,77	122,22	233,33	100	200	Tercapai	Dinas P3AP2KB
15	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	136,36	100	100	100	100	Tercapai	Dinas P3AP2KB
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	493,33	493,33	100	100	Tercapai	Dinas P3AP2KB
17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	73,62	100	100	100	100	Tercapai	Dinas P3AP2KB
18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	45,21	41,09	28,97	56	33,64	Tidak tercapai	Dinas P3AP2KB
19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas P3AP2KB
20	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	21	21	21	21	21	Tercapai	Dinas P3AP2KB

Bidang urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana memiliki 20 indikator, 15 indikator tercapai, dan 5 indikator tidak tercapai.

J Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial meliputi kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) dan Pembinaan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Berikut indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Tabel 2. 143
Indikator Kinerja Daerah Bidang Sosial

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase PMKS yang Mampu Memiliki Kemandirian Ekonomi	%	0,02	0,04	5,07	1,00	50,86	Tercapai	Dinas Sosial
2	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	0	37	8,33	82	8,33	Tidak tercapai	Dinas Sosial
3	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Tersertifikasi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	0	58	0	50	0	Tidak tercapai	Dinas Sosial
4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	36,88	36	40	42	50,86	Tercapai	Dinas Sosial
5	Persentase PMKS yang Tertangani	%	36,88	36	84,94	42	90,39	Tercapai	Dinas Sosial
6	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	46	36	99,83	67,2	51,68	Tidak tercapai	Dinas Sosial
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	18	21	30	77,78	0	Tidak tercapai	Dinas Sosial
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Sosial
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	8	15	27	35,6	66,94	Tercapai	Dinas Sosial
10	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan uang duka	jiwa	365	637	746	400	253	Tidak tercapai	Dinas Sosial

K Tenaga Kerja

Untuk mengukur keberhasilan Indikator kinerja daerah di bidang tenaga kerja ada 17 indikator yang telah ditetapkan dan menjadi tanggungjawab dinas tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 144
Indikator Kinerja Daerah Bidang Tenaga Kerja

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,29	6,92	9,54	6,08	8,94	Tercapai	Disnaker
2	Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif		2457	2560	2594	2621	2620	Tidak tercapai	Disnaker
3	Jumlah Penetapan Sentra Industri		0	0	0	1	1	Tercapai	Disnaker
4	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	69,40	57,04	41,18	44,00	52,25	Tercapai	Disnaker
5	Persentase penyelesaian perselisihan buruh dengan pengusaha	%	93	140	135	94,29	113	Tercapai	Disnaker
6	Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif		16253 (Jlh Naker)	18828	19930		29744		Disnaker
			8675 (BPJS Kes Aktif))	9,074					
7	Rasio daya serap tenaga kerja	%	-	-	Tidak Ada Data	27,16	-	Tidak ada data	Disnaker

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		100	93	94	39,37	65	Tercapai	Disnaker
9	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	-	-	92	97,14	65	Tidak tercapai	Disnaker
10	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		78,48	79,81	75,29	75,00	60,82	Tidak tercapai	Disnaker
11	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		0,00	86,15	0,00	72,73	0,00	Tidak ada data	Disnaker
12	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan		0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	Tidak ada data	Disnaker
13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2.25	2.26	2,13	2,20	-	Tidak ada data	Disnaker
14	Kontribusi Rumah Tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	17,03	16,45	16,78	25,62	-	Tidak ada data	Disnaker
15	Pertumbuhan Industri	%	2.16	4.02	1.31	6,20	0,99	Tidak tercapai	Disnaker
16	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program JAMSOSTEK	%	23,38	22,31	23,33	69,99	23,24	Tidak tercapai	Disnaker
17	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	64	25	80	95,11	71	Tidak tercapai	Disnaker

L Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemerintah Kota Banda Aceh sangat memperhatikan Perkembangan dan pertumbuhan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Untuk memperoleh pinjaman modal pinjaman masyarakat dapat mengajukannya kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik pemerintah Kota Banda Aceh yaitu PT Mahirah. Untuk mengukur keberhasilan Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan dapat dilihat dari capaian indikator yang dilakukan selama tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel 2. 145
Indikator Kinerja Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Satuan	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Pertumbuhan UMKM yang Unggul	%	1	1,25	6,97	1,75	6,34	Tercapai	DISKOP UKM
2	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro (UM) yang Memanfaatkan jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah	UM	0	100	110	120	120	Tercapai	DISKOP UKM
3	Persentase koperasi aktif	%	72,51	76	76,13	92,34	77	Tidak tercapai	DISKOP UKM
4	Persentase Pasar yang Representatif	%	11,76	17,65	22,22	35,29	41,66	Tercapai	DISKOP UKM
5	Jumlah Usaha Mikro	UM	10944	12012	15107	13500	16600	Tercapai	DISKOP UKM
6	Jumlah Koperasi	UNIT	502	506	507	522	513	Tidak tercapai	DISKOP UKM
7	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam /Usaha Simpan Pinjam	UNIT	397	426	435	414	439	Tercapai	DISKOP UKM
8	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro (UM)	UM	800	1000	1200	1400	1400	Tercapai	DISKOP UKM
9	Jumlah pasar yang sudah berfungsi optimal	Pasr	8	9	11	15	5	Tidak tercapai	DISKOP UKM
10	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah	UTTP	0	1641	1253	1200	1303	Tercapai	DISKOP UKM
11	Jumlah Videotron yang Memberikan Informasi Harga Bahan Pokok dan Strategis Lainnya	Unit	2	2	2	5	2	Tidak tercapai	DISKOP UKM

M Kebudayaan

Seni dan budaya menjadi satu faktor penting yang perlu dikembangkan. Seni budaya menjadi salah satu ajang untuk memperkenalkan suatu daerah kepada dunia. Kebudayaan

Aceh memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dibidang seni dan kebudayaan dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut:

Tabel 2. 146
Indikator Kinerja Daerah Bidang Kebudayaan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	EVEN	2	1	0	5	0	Tidak tercapai	Disdikbud
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		18	18	18	45	50	Tercapai	Disdikbud
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Karya	0	0	0	5	0	Tidak tercapai	Disdikbud
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		62	64	68	26	69	Tercapai	Disdikbud
5	Jumlah pelatihan komunitas seni dan budaya	Komunitas	28	28	0	28	0	Tidak tercapai	Disdikbud
6	Jumlah even/festival daerah dan Nasional yang diikuti	Even	2	2	0	2	1	Tidak tercapai	Disdikbud

N Pemuda Dan Olahraga

Pemerintah Kota Banda Aceh sangat konsen terhadap perkembangan Olahraga. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya event-event pertandingan Olahraga yang dilakukan di Kota Banda Aceh selama tahun 2018-2019. Berikut indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang olahraga.

Tabel 2. 147
Indikator Kinerja Daerah Bidang Pemuda dan Olahraga

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahrga Sesuai Standar	Fasilitas	4	4	5	5	6	Tercapai	Dispora
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	91	91	91	89	91	Tercapai	Dispora
3	Persentase Wirausaha Muda	%	0	0	7	49	0	Tidak tercapai	Dispora
4	Cakupan Pembinaan Olahraga	Cabor	100	92	92	85	92	Tercapai	Dispora
5	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	65	65	35	82	35	Tidak tercapai	Dispora
6	Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	20	20	34	50	35	Tidak tercapai	Dispora
7	Jumlah atlet berprestasi	Orang	36	39	0	35	23	Tidak tercapai	Dispora
8	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	36	39	0	13	10	Tidak tercapai	Dispora

O Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kondisi keamanan di Kota Banda Aceh sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya aksi-aksi demontrasi/pelanggaran dan tindak kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh. Berikut disajikan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan di bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Tabel 2. 148
Indikator Kinerja Daerah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		5	5	5,72	6,5	5,26	Tidak tercapai	Satpol PP & WH
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	97,7	86,08	100	84,80	100	Tercapai	Satpol PP & WH
3	Persentase Penegakan PERDA	persen	70	82,82	100	75	100	Tercapai	Satpol PP & WH
4	Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana)		6	7	0	9	1	Tidak tercapai	BPBD
5	Persentase Ketersediaan Insfrastruktur Mitigasi Bencana		80	81	0	95	95	Tercapai	BPBD
6	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	persen	160.04	100	100	85,56	100	Tercapai	DPKP
7	Tingkat Waktu Tanggap	persen	100	100	100	86,56	100	Tercapai	DPKP

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)								
8	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	persen	44,87	58,18	58,18	90,64	58,18	Tidak tercapai	DPKP
9	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 pada WMK	persen	50	50	50	66,67	50	Tidak tercapai	DPKP
10	Jumlah kasus Konflik Sosial Masyarakat	kasus	15	10	10	55	9	Tidak tercapai	Kesbangpol
11	Tersedianya regulasi yang efektif dan efisien		91	91	127			Tidak ada data	Bagian Hukum Setda

P Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Pada bidang urusan otonomi daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian terdiri dari OPD sekretariat DPRK, Inspektorat, Keuangan dan kepegawaian. Untuk mengukur kinerja keberhasilan dari sekretariat DPRK ada 3 indikator yang digunakan. Hasil evaluasi menunjukan bahwa ketiga indikator tersebut berhasil dicapai. Untuk jelasnya ketiga indikator yang dinilai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 149
Indikator Kinerja Daerah Bidang Sekretariat DPRK

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Terget 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Set. DPRK Banda Aceh
2	Tersusun dan terintegrasi Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Set. DPRK Banda Aceh
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Set. DPRK Banda Aceh

Dibidang pengawasan, ada dua indikator yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Penyelesaian Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari Pengawas Eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) maupun Pengawas internal (Inspektorat Kota Banda Aceh) sangat tergantung pada keseriusan OPD dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.

Tabel 2. 150
Indikator Kinerja Daerah Bidang Inspektorat

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Presentase tindak lanjut rekomendasi BPK	%	84.35	85.54	92,05			Tidak tercapai	Inspektorat
2	Presentase tindak lanjut rekomendasi inspektorat Banda Aceh	%	83.97	94.45	84,51			Tercapai	Inspektorat

Dibidang keuangan ada 16 (enam belas) indikator yang menjadi tanggaung jawab Badan Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan

manfaat untuk masyarakat. Untuk mengukur kinerja keberhasilan dari pengelolaan keuangan ada 16 indikator yang digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 151
Indikator Kinerja Daerah Bidang Keuangan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio kemadirian keuangan daerah	%	29	25	23	32	*33,59	Tercapai	BPKK
2	Persentase peningkatan penerimaan PAD	%	-9	-4,53	-3,14	15	*Belum dapat dihitung	*Belum dapat dihitung	BPKK
3	Persentase penerimaan pajak daerah	%	106,62	110,19	86	100	*57,75	Tidak tercapai	BPKK
4	Persentase penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah	%	183,98	192,93	88	100	*41,88	Tidak tercapai	BPKK
5	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	30	36	33	61	*83,90	Tercapai	BPKK
6	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP (LKPD 2017)	WTP (LKPD 2018)	WTP (LKPD 2019)	WTP	WTP (LKPD 2020)	Tercapai	BPKK
7	Adanya dokumen laporan barang milik daerah yang akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	Tercapai	BPKK
8	Adanya dokumen laporan milik daerah yang sesuai SAP dan berbasis Acrual	Dokumen	1	1	1	1	1	Tercapai	BPKK
9	Adanya dokumen RAPBK dan RAPBK-P yang sesuai perundang-undangan	Dokumen	2	2	2	2	1	Tercapai	BPKK
10	Jumlah SP2D yang dikeluarkan sebagai bukti pembayaran	Dokumen	14262	15397	14290	14300	6684	Tidak tercapai	BPKK
11	Adanya dokumen pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	Tercapai	BPKK
12	Predikat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD dari inspektorat Kota Banda Aceh		B (72,65) (SAKIP 2017)	BB (75,41) (SAKIP 2018)	CC (51,60) (SAKIP 2019)	A	CC (56.06) (SAKIP 2020)	Tidak tercapai	BPKK
13	Adanya dokumen perencanaan yang sesuai dengan perundang-undangan	Dokumen	4	4	4	4	4	Tercapai	BPKK
14	Adanya dokumen laporan kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	Tercapai	BPKK
15	Adanya dokumen laporan keuangan SKPD yang sesuai SAP dan berbasis acrual	Laporan	4	4	4	4	4	Tercapai	BPKK
16	Adanya dokumen pengelolaan aset SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2	Tercapai	BPKK

Hasil evaluasi menunjukkan dari 16 indikator yang dikerjakan oleh badan pengelola keuangan, 14 indikator tercapai, dan 2 indikator tidak tercapai. Adapun penjelasan mengenai indikator yang tidak dapat dicapai adalah sebagai berikut:

a. Persentase peningkatan penerimaan PAD tidak tercapai Hal ini disebabkan pada saat penyusunan Rencana Strategis BPKK 2017-2022 Dana BOS masih merupakan komponen PAD namun mulai tahun 2018 masuk ke dalam komponen lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan hibah, sehingga untuk tahun 2018 dan 2019 tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Selain itu penerimaan PAD dari sektor retribusi daerah masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan. Dalam hal ini peningkatan PAD, BPKK terus berupaya dan selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas pengelola PAD lainnya. Diantaranya dengan melakukan pemantauan penerimaan PAD setiap minggu.
b. Presentase tindak lanjut rekomendasi inspektorat Banda Aceh juga belum tercapai. Dalam hal ini BPKK terus berupaya dan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Banda Aceh dalam memperbaiki nilai SAKIP BPKK. Peningkatan kualitas Sumber daya apartur menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian. Ada 9 (Sembilan) indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja dibidang kepegawaian sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2. 152
Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan latar belakang Diklat Penjenjangan	%	65,47	64,79	54,35	93	54,36	Tidak tercapai	BKPSDM
2	Jumlah PNS yang indisipliner	Orang	2	13	8	19	7	Tercapai	BKPSDM
3	Pelaksanaan seleksi JPT	JPT	7	8	4	3	2	Tidak tercapai	BKPSDM
4	Persentase Administrator dan Pengawas yang memenuhi Standar Kompetensi	%	0	15,12	20,03	23	21,42	Tidak tercapai	BKPSDM
5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,53	4,94	4,72	20	4,23	Tidak tercapai	BKPSDM
6	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	65,47	64,79	54,35	60	54,36	Tidak tercapai	BKPSDM
7	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		33	28	33	37	35	Tidak tercapai	BKPSDM
8	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		2118	2245	2259	2106	2117	Tercapai	BKPSDM
9	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		2042	2001	1963	2220	1953	Tidak tercapai	BKPSDM

Q Pangan

Untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di Kota Banda Aceh, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pembinaan/pelatihan bagi aparatur penyuluh pertanian dan petani. Dengan keterbatasan lahan pertanian di Kota banda aceh salah satu cara yang dilakukan agar ketersediaan pangan keluarga terpenuhi adalah mengoptimalkan lahan pekarangan masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman pangan (jagung, ubi dan lain-lain), Hortikultura (sayur, buah dan lain-lain) dan Biofarmaka (tanaman obat-obatan). Untuk mengukur keberhasilan dibidang pangan, dapat dilihat dari indikator keberhasilan yang dapat dicapai dalam tabel berikut:

Tabel 2. 153
Indikator Kinerja Daerah Bidang Pangan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama	kg	109,5	100,6	116,3	100	121,31	Tercapai	DP2KP
2	Persentase Keanekaragaman Pangan	persen	60,38	61,59	81,7	12,59	-	Tidak ada data	DP2KP
3	Jumlah Produksi Ternak								
	a. Sapi	ton	409	507	1021	77	2,27	tercapai	DP2KP
	b. Unggas	ton	886	1166	1572	77	716,8	tercapai	DP2KP
	c. Kambing	ton	112	55	59,1	8	1,3	tercapai	DP2KP
4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	235	251	0,73	8	399	tercapai	DP2KP
5	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	ton	9825	10715	28.498,6	41	27.203,63	tercapai	DP2KP
6	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	ton	52,1	54,81	174,71	40	-	tercapai	DP2KP

R Pertanian

Bidang Urusan Pertanian hanya memiliki 1 indikator yaitu jumlah produksi hasil pertanian dengan tingkat capaian realisasi sebesar 109,35%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 154
Indikator Kinerja Daerah Bidang Pertanian

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Produksi Hasil Pertanian	ton	295	371,8	341,9	150	-	Tidak ada data	DP2KP

S Kelautan Dan Perikanan

Bidang Urusan kelautan dan perikanan hanya memilki 1 indikator yaitu jumlah produksi hasil perikanan dengan tingkat capaian realisasi sebesar 113,99%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 155
Indikator Kinerja Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Produksi Hasil Perikanan	ton	9825	10715	28.498,6	130	981	Tercapai	DP2KP

T Peternakan

Untuk indikator bidang peternakan, Jumlah produksi hasil peternakan di kota banda aceh belum mengembirakan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian realisasi yang belum mencapai target. Tingkat realisasi hanya 76,46%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 156
Indikator Kinerja Daerah Bidang Peternakan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Produksi Hasil Peternakan	ton	408,81	506,91	1.021	99,70	720,37	Tercapai	DP2KP

U Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2. 157
Indikator Kinerja Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah BUMG yang aktif	BUMG	31	28	47	40	43	Tercapai	DPMG
2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	%	61	68,23	0	67	62,76	Tidak tercapai	DPMG
3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan desa yang Baik	%	97,78	97,78	97,78	100	100	Tercapai	DPMG
4	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Mukim yang Baik	%	23,53	35,29	35,29	45	35,29	Tidak tercapai	DPMG
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		2,18	2,18	2,18	2,5	2,18	Tidak tercapai	DPMG
6	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		29,92	30,74	30,93	22	30,93	Tercapai	DPMG
7	PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	Tercapai	DPMG
8	Posyandu Aktif	%	99,12	99,13	99,13	100	100	Tercapai	DPMG
9	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Gampong yang baik	%	30	40	47	60	64,44	Tercapai	DPMG
10	Fasilitasi Permodalan program PUEM	%	206	48	40	500	38	Tidak tercapai	DPMG
11	Prosentase Capaian Pengelolaan Aset Gampong yang baik	%	27	37	40	60	44,44	Tidak tercapai	DPMG
12	Capaian Penataan Administrasi Pemerintahan Mukim/Gampong yang baik	%	30	38	45	60	59,81	Tidak tercapai	DPMG

V Komunikasi Dan Informatika

Dari 5 indikator kinerja daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan informasi, keberhasilan realisasi pencapaian kinerja semuanya bernilai 100%. Ini berarti pembangunan di bidang komunikasi dan informasi di Kota Banda Aceh sangat baik. Hal ini

tentu sejalan dengan cita-cita Pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan Banda Aceh sebagai *Smart City*.

Tabel 2. 158
Indikator Kinerja Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Diskominfotik
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		-	-	-	-	-	-	Diskominfotik
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	%	-	-	-	-	-	-	Diskominfotik
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		-	-	-	-	-	-	Diskominfotik
5	Propersi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		-	-	-	-	-	-	Diskominfotik

W Perpustakaan

Perpustakaan memegang peran penting bagi menumbuhkan minat baca terutama bagi anak. Perpustakaan yang representatif tentu menjadi idaman bagi masyarakat. Dengan pelayanan dan koleksi buku yang berkualitas tentu akan dapat meningkatkan minat baca bagi anak. Indikator kinerja dibidang perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 159
Indikator Kinerja Daerah Bidang Perpustakaan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah perpustakaan		43	43	43	54	45	Tidak tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling Per Tahun (org)		18.581	15.475	7215	18.666	9852	Tidak tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	%	8,68	7,53	2,89	18,93	**	Tidak ada data	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah		34.918	28.514	29.174	74.371	28.948	Tidak tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun		967	1824	1227	0,074	1962	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

X Kearsipan

Untuk pengelolaan arsip di Kota Bada Aceh masih belum optimal. Tidak semua dokumen penting di Kota Banda Aceh terarsipkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja bidang kearsipan yaitu persentase pengelolaan arsip secara baku sampai dengan tahun 2019 hanya 44%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 160
Indikator Kinerja Daerah Bidang Kearsipan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	20	20	20	36	20	Tidak tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Peningkatan SDM Pengelola kearsipan	Kegiatan	-	-	-	1	1	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Y Pariwisata

Untuk mengukur tingkat keberhasilan di bidang pariwisata telah ditetapkan 2 indikator kinerja yaitu jumlah kunjungan wisata dan Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh. Kedua indikator tersebut pencapaiannya telah mencapai diatas 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 161
Indikator Kinerja Daerah Bidang Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Kunjungan Wisataan		393,400	503,992	172.197	450.000	190.285	Tidak tercapai	Dinas Pariwisata
2	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh	%	12.80	15.70	5,5	5,4	15	Tercapai	Dinas Pariwisata

Z Syariat Islam

Syariat Islam memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kota Banda Aceh. Berbagai upaya untuk penyemarakan syiar Islam dilakukan di Kota Banda Aceh, diantaranya zikir rutin setiap malam sabtu yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh di Pondopo Walikota/di masjid-masjid yang ditunjukkan. Berikut indikator terkait pelaksanaan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam, Baitul Mal dan Badan dayah.

Tabel 2. 162
Indikator Kinerja Daerah Bidang Keagamaan

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peringkat Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)	Peringkat	-	5	-	1	Tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Covid-19	-	Dinas Syariat Islam

Tabel 2. 163
Indikator Kinerja Daerah Bidang Baitul Mal

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Baitul Mal Gampong Yang Baik	Baitul Mal Gampong	0	30	0	35	-	Tidak ada data	Baitul Mal
2	Jumlah Objek harta agama yang terjaga	Objek	0	-	0	500	-	Tidak ada data	Baitul Mal
3	Jumlah Muzakki	Muzakki	6079	7191	1461	9364	-	Tidak ada data	Baitul Mal
4	Jumlah penerima zakat	Mustahiq	12224	12173	20726	12935	-	Tidak ada data	Baitul Mal
5	Persentase peningkatan penerimaan ZIS	%	96.55	83.99	75,63	77	-	Tidak ada data	Baitul Mal

Tabel 2. 164
Indikator Kinerja Daerah Bidang Disdikdayah

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah data base Dayah berbasis Teknologi	%	48	70	77	70	77	Tercapai	Disdikdayah
2	Jumlah lulusan santri yang diterima di perguruan tinggi	%	57	74	74	74	76	Tercapai	Disdikdayah
3	Jumlah pembinaan Guru Dayah	%	50	60	80	70	80	Tercapai	Disdikdayah
4	jumlah pembinaan pemberdayaan ekonomi dayah		0	0	20	5	0	Tidak dilaksanakan	Disdikdayah
5	persentase daya yang memiliki izin operasional	%	63	68	70	34	80	Tercapai	Disdikdayah
6	persentase dayah yang memiliki tipe sesuai dengan standar	%	6	6	6	5	6	Tercapai	Disdikdayah

2.2.2 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dibanding daerah lainnya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan indikator yang digunakan untuk menilai daya saing daerah di kota Banda Aceh

Tabel 2. 165
Indikator dalam Aspek Daya Saing Daerah

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Tahun 2021		Status Target 2021	OPD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0,29	0,27	0,27	0,26	belum dapat di hitung karena belum tersedia jumlah kendaraan tahun 2021	-	Dishub
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		1.206.671	1.216.000	2.085.245	1.218.000	839.128	Tidak tercapai	Dishub
			106.347	171.937	237.000	73.375	168.912	Tercapai	Dishub
3	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun		2.352.569	2.689.357	2.038.339	1.633.133	1.335.270	Tidak tercapai	Dishub
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha		0	0	0	1	0	Tidak tercapai	DPM-PTSP

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban tersebut mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur tentang dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya. Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 memberikan gambaran mengenai arah kebijakan keuangan dengan melihat potensi keuangan yang dimiliki dan kebutuhan terhadap pendanaan pembangunan. Dalam penjabarannya gambaran pengelolaan keuangan daerah akan dituangkan dalam APBD sebagai instrumen operasional pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. APBD merupakan komitmen politik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mendanai program pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Arah kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh mengandung makna bahwa :

1. Arah belanja APBD Kota Banda Aceh digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, 5 tahunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana, maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Atas dasar ini, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh selama periode tahun 2017-2021 menunjukkan trend penurunan rata-rata pendapatan sebesar minus 1,59 persen, sedangkan belanja sebesar minus 1,79 persen. APBD Kota Banda Aceh pada kurun waktu di atas mengalami dampak ekonomi yang relatif besar akibat dampak pandemi COVID-19 dan pengurangan Dana Transfer ke daerah. Hal ini membawa dampak signifikan pada perkembangan ekonomi makro karena struktur pendukung ekonomi daerah Kota Banda Aceh yang berbasis pada sektor perdagangan dan jasa.

Pendapatan daerah merupakan tolok ukur kemampuan keuangan daerah sebagai pijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan. Sehingga setiap pengeluaran pembangunan akan mampu diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah. Perkiraan pendapatan daerah yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya akan sangat membantu proses perencanaan secara maksimal dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan.

Era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah agar secara bertahap mampu melepaskan ketergantungannya kepada pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah sebagai modal utama pembangunan daerah. Daerah yang tidak mampu mencapai nilai PAD-nya minimal 25 persen dari nilai APBD-nya akan sulit berkembang, bahkan diindikasikan akan mengalami kebangkrutan. Pada kenyataannya angka minimal tersebut sangat sulit diwujudkan karena minimnya potensi PAD masing-masing daerah. Untuk menutup semua kebutuhan belanja Pemerintah Kota harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya, semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup semua kebutuhan belanja.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Selama periode tahun 2017-2021, realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh cenderung mengalami penurunan dari Rp. 1.244,5 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.209,3 triliun pada tahun 2021. Sedangkan pada periode yang sama, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengalami penurunan dari Rp. 270,3 miliar menjadi Rp. 224,1 miliar. Hal tersebut terjadi disebabkan karena pengalihan beberapa objek potensi PAD ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta menurunnya realisasi penerimaan disebabkan karena pandemi COVID-19.

Sebagian besar pendapatan daerah dipergunakan untuk memenuhi fungsi Pemerintah Daerah seperti pemenuhan Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, Belanja Peningkatan Perekonomian dan Belanja Aparatur dan Pelayanan Publik. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus berusaha untuk meningkatkan PAD dengan menggali potensi-potensi yang ada melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD. Sehingga dengan adanya peningkatan PAD, maka akan semakin memperbesar ruang fiskal daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan belanja publik.

Sumber Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Realisasi Pendapatan Tranfer pada APBD Pemerintah Kota Banda mengalami penurunan rata-rata sebesar minus 0,65 persen dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2021. Rata - rata realisasi penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Tranfer sekitar 77,41% persen dari total realisasi penerimaan Pendapatan Daerah, ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh masih sangat tergantung kepada anggaran dari pemerintah pusat.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Dari Penerimaan Pajak Dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa merupakan sumber pendanaan

bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Serta Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang sumber pendapatannya bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukan trend yang stagnan mengikuti kebijakan pada Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Selama periode tahun 2017-2021, realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar minus 1,79 persen. Anggaran Belanja Daerah dipergunakan untuk Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Serta Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	*2021 (Unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4	**PENDAPATAN**	**1.244.558.125.701**	**1.145.487.944.179**	**1.228.717.025.692**	**1.259.058.432.365**	**1.209.349.152.863**	**-1,59%**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**270.313.871.948**	**283.679.115.133**	**273.178.091.698**	**227.847.318.871**	**224.133.382.080**	**-2,44%**
4.1.01	Pajak Daerah	70.965.850.260	74.998.953.730	85.244.539.560	74.863.963.375	75.064.173.500	2,10%
4.1.02	Retribusi Daerah	22.549.380.095	23.241.826.439	25.704.873.595	20.061.904.939	21.028.298.989	0,23%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.008.081.651	1.639.034.460	5.029.633.175	5.999.134.330	4.850.599.755	53,17%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.790.559.943	183.799.300.505	157.199.045.368	126.922.316.227	123.190.309.836	-5,31%
4.2	**Pendapatan Transfer**	**966.309.055.426**	**861.808.829.046**	**955.538.933.994**	**979.538.413.494**	**950.603.596.783**	**-0,65%**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**807.645.803.666**	**830.080.447.950**	**848.981.493.051**	**825.714.653.961**	**814.093.612.075**	**-1,09%**
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	39.988.298.626	39.875.441.906	36.187.097.917	37.035.613.531	51.918.404.818	12,50%
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	591.711.772.000	591.711.772.000	605.014.830.000	547.629.398.000	539.238.114.000	-2,11%
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	105.782.661.134	116.595.706.007	111.593.861.259	123.927.630.430	134.589.048.057	-2,34%
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	17.750.000.000	23.010.581.000	41.144.614.000	10.998.041.000	7,03%
	Dana Desa	70.163.071.906	64.147.528.037	73.175.122.875	75.977.398.000	77.350.004.200	7,35%
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**158.663.251.760**	**31.728.381.096**	**106.557.440.943**	**153.823.759.533**	**136.509.984.708**	**41,79%**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.824.590.078	31.728.381.096	33.697.507.240	39.183.527.017	34.256.571.353	24,06%
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	128.838.661.682	-	72.859.933.703	114.640.232.516	102.253.413.355	-8,78%

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	*2021 (Unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**7.935.198.327**	**-**	**-**	**51.672.700.000**	**34.612.174.000**	**0,00%**
4.3.01	Hibah	-	-	-	36.672.700.000	34.612.174.000	0,00%
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.935.198.327	-	-	15.000.000.000	-	0,00%
5	**BELANJA DAERAH**	**1.221.423.020.910**	**1.174.464.744.085**	**1.264.161.179.338**	**1.271.581.148.706**	**1.207.614.088.958**	**-1,79%**
5.1	**Belanja Operasi**	**858.645.653.302**	**947.014.936.924**	**974.636.713.591**	**946.969.335.289**	**890.260.557.707**	**-1,52%**
5.1.01	Belanja Pegawai	432.523.570.079	443.048.210.030	435.650.045.303	436.060.250.991	443.495.524.864	-6,17%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.321.562.385	416.177.859.894	457.783.288.892	426.854.477.670	390.145.490.646	11,97%
5.1.03	Belanja Bunga	3.219.792.144	2.851.421.323	2.645.251.114	2.541.992.607	2.121.063.639	-9,22%
5.1.04	Belanja Subsidi	-			-	285.400.000	20,00%
5.1.05	Belanja Hibah	64.994.608.694	82.570.445.677	73.157.634.282	76.698.586.021	52.421.197.558	-6,19%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.586.120.000	2.367.000.000	5.400.494.000	4.814.028.000	1.791.881.000	19,36%
5.2	**Belanja Modal**	**227.580.086.099**	**100.756.250.369**	**149.561.805.479**	**194.069.510.384**	**186.488.463.086**	**1,25%**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**0**	**0**	**0**	**4.680.098.372**	**2.223.104.729**	**-10,50%**
5.4	**Belanja Transfer**						**7,35%**

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	*2021 (Unaudited)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		135.197.281.509	**126.693.556.792**	**139.962.660.268**	**125.862.204.661**	**128.641.963.436**	
	Surplus / (Defisit)	**23.135.104.791**	**(28.976.799.906)**	**(35.444.153.646)**	**(12.522.716.341)**	**1.735.063.905**	
6	**Pembiayaan**						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.147.070.563	79.138.668.088	0	36.499.603.370	19.349.907.595	1477,51%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.300.000.000	14.236.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	10.925.769.376	20,34%
	Pembiayaan Netto	**-7.152.929.437**	**64.902.668.088**	**-3.800.000.000**	**32.699.603.370**	**8.424.138.219**	

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu tahun 2017 - 2021 mengalami penurunan dengan rata - rata sebesar minus 1,59 persen untuk Pendapatan Daerah dan minus 1,79 persen untuk Belanja Daerah. Di tahun mendatang, Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat controllability-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah antara lain :

a) Meningkatkan penyuluhan pajak/restribusi kepada masyarakat.
b) Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/wajib retribusi.
c) Meningkatkan penagihan dengan mendatangi ke lokasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
d) Menyusun Qanun baru dan merevisi Qanun pajak/retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.
e) Mencari sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
f) Meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang tidak taat pajak.
g) Meningkatkan koordinasi dan evaluasi PAD secara rutin dengan instansi terkait.

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan instrument hukum yang menjadi dasar pengelolaan keuangan bagi daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 ini disusun untuk menyempurnakan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mengetahui realisasi APBD Kota Banda Aceh tahun anggaran 2021 dan target APBD Kota Banda Aceh tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Realisasi APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 dan Target APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	*2021 (Unaudited)	2022
		(Rp.)	(Rp.)
1	*2*	*3*	*4*
4	**PENDAPATAN**	**1.209.349.152.863**	**1.374.271.730.417**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**224.133.382.080**	**279.624.722.566**
4.1.01	Pajak Daerah	75.064.173.500	111.905.791.887
4.1.02	Retribusi Daerah	21.028.298.989	43.544.169.903
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.850.599.755	7.000.000.000
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	123.190.309.836	117.174.760.776
4.2	**Pendapatan Transfer**	**950.603.596.783**	**1.094.647.007.851**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	814.093.612.075	861.720.548.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.509.984.708	232.926.459.851
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**34.612.174.000**	**-**
4.3.01	Hibah	34.612.174.000	
4.3.02	Dana Darurat	-	-

No.	Uraian	*2021 (Unaudited)	2022
		(Rp.)	(Rp.)
1	*2*	*3*	*4*
4.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
5	**BELANJA DAERAH**	**1.207.614.088.958**	**1.378.971.730.417**
5.1	**Belanja Operasi**	**890.260.557.707**	**1.013.228.651.229**
5.1.01	Belanja Pegawai	443.495.524.864	440.733.767.545
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.145.490.646	444.045.268.722
5.1.03	Belanja Bunga	2.121.063.639	3.511.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	285.400.000	131.250.000
5.1.05	Belanja Hibah	52.421.197.558	120.024.948.750
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.791.881.000	4.782.416.212
5.2	**Belanja Modal**	**186.488.463.086**	**228.953.224.562**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	16.253.158.300	7.187.822.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.775.940.321	62.224.264.355
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.518.690.339	122.309.079.089
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.366.875.612	30.728.958.618
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.573.798.514	6.503.100.000
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**2.223.104.729**	**1.500.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.223.104.729	1.500.000.000
5.4	**Belanja Transfer**	**128.641.963.436**	**135.289.854.626**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.550.096.206	7.708.147.926
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	127.091.867.230	127.581.706.700
	Surplus / (Defisit)	**1.735.063.905**	**(4.700.000.000)**
6	**Pembiayaan**		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	19.349.907.594	10.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.925.769.376	5.300.000.000
	Pembiayaan Netto	**8.424.138.218**	**4.700.000.000**

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat diketahui perubahan yang mendasar terkait dengan komponen maupun struktur APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ditambah lagi dengan berubah dan bertambahnya Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Disamping itu juga dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah juga wajib menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah disusun dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui rasio likuiditas, rasio solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana Pemerintah Daerah. Neraca daerah ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan neraca daerah Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

Uraian	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	*TAHUN 2021 (Unaudited)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
ASET						
ASET LANCAR	**166.201.766.485**	**88.456.918.074**	**96.352.898.236**	**77.028.658.171**	**103.204.905.034**	**-5,98%**
Kas dan Setara Kas	79.273.094.915	29.515.980.079	14.592.320.566	19.349.907.594	16.706.118.484	-23,60%
Piutang Pendapatan	121.234.712.559	101.115.801.108	130.118.086.229	107.741.658.669	117.830.345.856	1,06%
Penyisihan Piutang	(48.475.258.991)	(52.343.670.218)	(58.269.870.798)	(66.005.181.289)	(66.005.181.289)	8,14%
Beban Dibayar Dimuka	168.786.800	407.233.121	223.316.263	310.349.179	110.587.217	17,68%
Persediaan	14.000.431.202	9.761.573.984	9.689.045.976	15.631.924.019	34.563.034.767	37,86%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**105.260.038.446**	**159.003.373.834**	**160.739.361.376**	**164.010.632.929**	**164.010.632.929**	**13,55%**
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	4.279.155.498	4.336.662.647	3.489.487.439	3.440.350.913	3.440.350.913	-4,90%
Investasi Jangka Panjang Permanen	100.980.882.948	154.666.711.187	157.249.873.937	160.570.282.016	160.570.282.016	14,24%
ASET TETAP	**5.308.127.675.696**	**5.274.005.654.254**	**4.864.263.657.300**	**4.705.340.675.795**	**4.871.042.274.137**	**-2,04%**
Tanah	3.417.429.635.275	3.420.792.655.548	3.008.789.692.532	3.262.025.354.520	3.278.176.080.460	-0,76%
Peralatan dan Mesin	410.859.133.931	450.330.470.479	496.576.297.399	556.262.704.928	579.858.958.427	9,03%
Gedung dan Bangunan	870.591.261.921	975.899.927.899	1.051.098.620.751	1.125.255.068.978	1.197.072.608.746	8,31%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.451.859.745.366	1.479.041.398.806	1.515.060.489.648	1.559.548.801.046	1.610.874.231.167	2,63%
Aset Tetap Lainnya	17.782.818.324	19.113.646.721	21.120.602.671	26.404.458.001	29.216.107.015	13,41%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	199.059.881.584	108.297.922.607	52.812.136.129	57.198.554.829	57.198.554.829	-22,13%
Akumulasi Penyusutan	(1.059.454.800.705)	(1.179.470.367.806)	(1.281.194.181.830)	(1.881.354.266.507)	(1.881.354.266.507)	16,70%
ASET LAINNYA	**401.881.935.916**	**93.843.168.633**	**243.180.947.663**	**212.081.481.136**	**211.066.068.783**	**17,30%**
Tagihan Jangka Panjang	89.500.000	89.500.000	89.500.000	89.500.000	89.500.000	0,00%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	93.128.572.980	92.524.321.250	87.817.673.640	85.829.990.784	85.096.599.654	-2,21%

Uraian	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	*TAHUN 2021 (Unaudited)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Aset Tidak Berwujud	888.296.400	1.019.305.023	685.842.046	524.200.823	242.179.600	-23,83%
Aset Lain-lain	307.775.566.536	210.042.360	154.587.931.977	125.637.789.529	125.637.789.529	18344,95%
JUMLAH ASET DAERAH	**5.981.471.416.543**	**5.615.309.114.795**	**5.364.536.864.575**	**5.158.461.448.031**	**5.349.323.880.883**	**-2,68%**
KEWAJIBAN	**81.140.740.238**	**61.818.370.059**	**71.081.273.423**	**154.611.224.113**	**50.588.107.344**	**10,35%**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**44.740.740.238**	**28.218.370.059**	**40.281.273.423**	**102.466.216.142**	**9.368.868.749**	**17,33%**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	460.196.552	460.196.552	0,00%
Utang Bunga	383.705.174	321.989.552	329.591.111	268.322.886	268.322.886	-8,08%
Pendapatan Diterima Dimuka	1.076.841.667	2.128.462.568	2.418.375.000	2.354.558.333	1.913.000.000	22,47%
Utang Belanja	42.963.055.500	24.750.707.882	37.533.307.311	99.383.138.372	6.727.349.312	20,20%
Utang Jangka Pendek Lainnya	317.137.897	1.017.210.056	-	-	-	0,00%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**36.400.000.000**	**33.600.000.000**	**30.800.000.000**	**52.145.007.971**	**41.219.238.595**	**8,08%**
Utang Dalam Negeri	36.400.000.000	33.600.000.000	30.800.000.000	52.145.007.971	41.219.238.595	8,08%
EKUITAS DANA	**5.900.330.676.305**	**5.553.490.744.736**	**5.293.455.591.152**	**5.003.850.223.918**	**5.298.735.773.539**	**-2,53%**
EKUITAS.	**5.900.330.676.305**	**5.553.490.744.736**	**5.293.455.591.152**	**5.003.850.223.918**	**5.298.735.773.539**	**-2,53%**
Ekuitas..	5.900.330.676.305	5.553.490.744.736	5.293.455.591.152	5.003.850.223.918	5.298.735.773.539	-2,53%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**5.981.471.416.543**	**5.615.309.114.795**	**5.364.536.864.575**	**5.158.461.448.031**	**5.349.323.880.883**	**-2,68%**

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2021

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh selama periode tahun 2017-2021 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Dari Penerimaan Pajak Dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Serta Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi. Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis, berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2017-2021 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu: dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan aparatur daerah maka kebijakan umum belanja daerah yang telah ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung adalah untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan PNS di jajaran Pemko Banda Aceh melalui Peningkatan Tunjangan Prestasi Kerja, disamping gaji yang diterima setiap bulannya.
b. Peningkatan Belanja Langsung ditujukan pada peningkatan pelayanan publik, peningkatan SDM, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan serta peningkatan pengamalan Syariat Islam.
c. Melakukan penghematan dan efisiensi yang tinggi dengan mengurangi jumlah kepanitiaan suatu kegiatan, menghemat belanja pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, belanja modal aparatur dan belanja–belanja lain yang kurang prioritas, dengan menghitung secara cermat biaya satuan dan volume yang dibutuhkan.
d. Anggaran belanja dialokasikan untuk melaksanakan urusan wajib dan pilihan, yang diprioritaskan pada program/kegiatan, dengan terlebih dahulu melihat dan mempertajam indikator kinerja yang terukur dan pencapaian program yang jelas.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2017-2021, rata-rata proporsi belanja aparatur terhadap jumlah belanja daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebesar 35,48 persen, yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan penghasilan bagi ASN di Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sedangkan rata-rata belanja untuk peningkatan pelayanan publik periode tahun 2017-2021 adalah sebesar 64,52 persen, yang terdiri dari Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja

Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Serta Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer kepada Pemerintah Desa. Secara rinci analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Banda Aceh tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Banda Aceh
Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Total belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan pengeluaran) (Rp.)	Persentase
	1	2	3	4 = 2 / 3 x 100%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	2017	Rp. 432.523.570.079	Rp. 1.229.723.020.910	35,17%
2	2018	Rp. 443.048.210.030	Rp. 1.188.700.744.085	37,27%
3	2019	Rp. 435.650.045.303	Rp. 1.267.961.179.338	34,36%
4	2020	Rp. 436.060.250.991	Rp. 1.275.381.148.706	34,19%
5	*2021 (Unaudited)	Rp. 443.495.524.864	Rp. 1.218.539.858.334	36,40%

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2021

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK. Surplus APBK terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah. Sementara defisit APBK terjadi bila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja.

Dalam hal APBK diperkirakan surplus, maka diutamakan untuk membiayai pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah pemberian pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya, atau pendanaan jaminan sosial. Sementara dalam hal APBK diperkirakan defisit, maka pembiayaan diutamakan untuk menutup defisit yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan baik penerimaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Penetapan angka pembiayaan sangat mempengaruhi jumlah alokasi belanja yang dianggarkan dalam APBK, sehingga dari penerimaan SiLPA dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan. Namun karena anggaran pendapatan Kota Banda Aceh dalam setiap tahunnya selalu defisit, maka kita tidak pernah dapat menyisihkan dana untuk saving (transfer ke dana cadangan), sehingga sumber dana yang dapat diperoleh dari pembiayaan hanya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya. Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dapat dilihat pada Tabel 3.5, sedangkan untuk menutupi defisit riil anggaran pada kurun waktu yang sama dapat digambarkan komposisinya pada Tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.5
Defisit Rill Anggaran Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	*2021 (Unaudited)
		(Rp.)	*(Rp.)*	*(Rp.)*	*(Rp.)*	*(Rp.)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.244.558.125.701	1.145.487.944.179	1.228.717.025.692	1.259.058.432.365	1.209.349.152.863
2	Belanja Daerah	1.221.423.020.910	1.174.464.744.085	1.264.161.179.338	1.271.581.148.706	1.207.614.088.958
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.300.000.000	14.236.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	10.925.769.376
Defisit Riil		**14.835.104.791**	**(43.212.799.906)**	**(39.244.153.646)**	**(16.322.716.341)**	**(9.190.705.471)**

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2021

Tabel 3.6
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2017	2018	2019	2020	*2021 (Unaudited)
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	0,09%	6,74%	0,00%	0,97%	1,60%
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	0,00%
5	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2021

Untuk mengetahui realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah selama periode tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.7:

Tabel 3.7
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017		2018		2019		2020		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Jumlah SILPA	Rp 1.147.070.563	1,68%	Rp 79.138.668.088	99,83%	Rp -	0,00%	Rp 12.354.595.399	100,00%	50,38%
2	Pelampauan Penerimaan PAD	Rp (10.563.159.785)	-15,44%	Rp 12.208.341.683	15,40%	Rp (16.600.216.938)	-56,24%	Rp (26.233.866.037)	-212,34%	-67,16%
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	Rp (15.320.719.240)	-22,40%	Rp (23.563.018.087)	-29,72%	Rp (21.359.192.824)	-72,36%	Rp (6.281.480.039)	-50,84%	-43,83%
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp (15.778.053.763)	-23,07%	Rp (61.026.287.653)	-76,99%	Rp (34.376.267.868)	-116,47%	Rp (11.898.394.763)	-96,31%	-78,21%
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	Rp 23.135.104.791	33,82%	Rp (28.328.271.406)	-35,74%	Rp (35.444.153.644)	-120,08%	Rp (12.522.716.340)	-101,36%	-55,84%
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai Akhir Tahun belum terselesaikan	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	0,00%
7	Kegiatan Lanjutan	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	Rp -	0,00%	0,00%

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2021

3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi - proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2026, direncanakan berdasarkan realisasi pertumbuhan pendapatan 5 tahun yang lalu dan potensi-potensi untuk tahun yang akan datang. Selain itu Pemerintah Kota Banda Aceh akan terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan pendapatan daerah adalah antara lain :

a. Meningkatkan penyuluhan pajak/restribusi kepada masyarakat.
b. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak/wajib retribusi.
c. Meningkatkan penagihan dengan mendatangi ke lokasi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
d. Merevisi Qanun pajak/retribusi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini.
e. Mencari sumber-sumber penerimaan baru yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
f. Meningkatkan penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang lalai.
g. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi PAD secara rutin.

Proyeksi Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2026, direncanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan aparatur daerah maka kebijakan umum belanja daerah untuk tahun yang akan datang adalah:

a. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan PNS di jajaran Pemko Banda Aceh melalui Peningkatan Tunjangan Tambahan Penghasilan, disamping gaji yang diterima setiap bulannya.
b. Meningkatkan pelayanan publik, peningkatan SDM, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kapasitas pemerintahan serta peningkatan pengamalan Syariat Islam.
c. Melakukan penghematan dan efisiensi yang tinggi dengan mengurangi jumlah kepanitiaan suatu kegiatan, menghemat belanja pengadaan barang/jasa, perjalanan dinas, belanja modal aparatur dan belanja–belanja lain yang kurang prioritas, dengan menghitung secara cermat biaya satuan dan volume yang dibutuhkan.
d. Anggaran belanja dialokasikan untuk melaksanakan urusan wajib dan atau, dengan terlebih dahulu melihat dan mempertajam indikator kinerja yang terukur dan pencapaian program yang jelas.

Proyeksi Pembiayaan Kota Banda Aceh Aceh Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2026, diupayakan untuk menutupi defisit anggaran melalui alokasi belanja berdasarkan skala prioritas dan estimasi jumlah pendapatan daerah yang akurat. Jika tidak dapat diusahakan surplus, hendaknya tidak menimbulkan besarnya defisit anggaran akibat alokasi belanja yang tidak efisien.

Untuk mengetahui proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 - 2026

No.	Uraian	Data Dasar Tahun 2022	Pertumbuhan (%)	2023	2024	2025	2026
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4	**PENDAPATAN**	**1.374.271.730.417**	**-0,93%**	**1.303.088.344.063**	**1.251.166.816.351**	**1.258.526.426.432**	**1.266.048.361.290**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**279.624.722.566**	**1,98%**	**285.142.273.443**	**290.785.371.462**	**296.556.938.284**	**302.459.964.167**
4.1.01	Pajak Daerah	111.905.791.887	2,10%	114.254.242.590	116.651.977.791	119.100.031.772	121.599.460.520
4.1.02	Retribusi Daerah	43.544.169.903	0,23%	43.643.901.058	43.743.860.631	43.844.049.146	43.944.467.127
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.000.000.000	2,00%	7.140.000.000	7.282.800.000	7.428.456.000	7.577.025.120
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.174.760.776	2,50%	120.104.129.795	123.106.733.040	126.184.401.366	129.339.011.400
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.094.647.007.851**	**-1,77%**	**1.017.946.070.620**	**960.381.444.889**	**961.969.488.148**	**963.588.397.123**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**861.720.548.000**	**0,16%**	**863.075.697.316**	**864.459.887.585**	**865.873.762.584**	**867.317.980.795**
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	35.571.923.000	1,70%	36.176.645.691	36.791.648.668	37.417.106.695	38.053.197.509
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	539.238.114.000	0,00%	539.238.114.000	539.238.114.000	539.238.114.000	539.238.114.000
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	186.792.743.000	0,00%	186.792.743.000	186.792.743.000	186.792.743.000	186.792.743.000
	Dana Insentif Daerah (DID)	30.017.065.000	2,50%	30.767.491.625	31.536.678.917	32.325.095.889	33.133.223.286
	Dana Desa	70.100.703.000	0,00%	70.100.703.000	70.100.703.000	70.100.703.000	70.100.703.000
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**232.926.459.851**	**-12,57%**	**154.870.373.304**	**95.921.557.304**	**96.095.725.564**	**96.270.416.328**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.865.470.756	0,00%	37.865.470.756	37.865.470.756	37.865.470.756	37.865.470.756
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	195.060.989.095	-21,70%	117.004.902.548	58.056.086.548	58.230.254.808	58.404.945.572
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3.01	Hibah	-	0,00%	-	-	-	-

No.	Uraian	Data Dasar Tahun 2022	Pertumbuhan (%)	2023	2024	2025	2026
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4.3.02	Dana Darurat	-	0,00%	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00%	-	-	-	-
5	**BELANJA DAERAH**	**1.378.971.730.417**	**-0,93%**	**1.303.088.344.063**	**1.251.166.816.351**	**1.258.526.426.432**	**1.266.048.361.290**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.013.228.651.229**	**-0,06%**	**1.057.381.893.080**	**1.057.413.393.080**	**1.055.451.193.080**	**1.055.496.553.080**
5.1.01	Belanja Pegawai	440.733.767.545	0,00%	485.901.759.396	485.901.759.396	485.901.759.396	485.901.759.396
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.045.268.722	11,97%	444.045.268.722	444.045.268.722	444.045.268.722	444.045.268.722
5.1.03	Belanja Bunga	3.511.000.000	0,00%	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	131.250.000	20,00%	157.500.000	189.000.000	226.800.000	272.160.000
5.1.05	Belanja Hibah	120.024.948.750	-6,19%	122.024.948.750	122.024.948.750	120.024.948.750	120.024.948.750
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.782.416.212	19,36%	1.852.416.212	1.852.416.212	1.852.416.212	1.852.416.212
5.2	Belanja Modal	228.953.224.562	1,25%	108.856.124.088	56.841.596.078	66.100.860.356	73.513.826.133
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.187.822.500					
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.224.264.355					
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.309.079.089					
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.728.958.618					
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.503.100.000					
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	-10,50%	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga			-	-	-	-
5.4	Belanja Transfer	135.289.854.626	0,05%	135.350.326.895	135.411.827.193	135.474.372.996	135.537.982.077
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.708.147.926					
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	127.581.706.700					
				575.414.759.691	576.029.762.668	576.655.220.695	577.291.311.509
	Surplus / (Defisit)	**(4.700.000.000)**		**-**	**-**	**-**	**-**

No.	Uraian	Data Dasar Tahun 2022	Pertumbuhan (%)	2023	2024	2025	2026
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				(461.647.769.361)	(406.645.206.458)	(410.864.284.140)	(415.185.007.062)
6	**Pembiayaan**						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	0,00%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.300.000.000	0,00%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	Pembiayaan Netto	**4.700.000.000**		-	-	-	-

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2021

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dengan mengetahui proyeksi APBK Kota Banda Aceh periode Tahun Anggaran 2023-2026 sebagai kerangka keuangan Kota Banda Aceh untuk masa yang akan datang, digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian diatas dan pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasikas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiyaan yang wajib dan mengikat serta merupakan prioritas utama.

Sebelum dialokasikan berbagai pos belanja dan pengeluaran besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan antara lain :

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan pelayanan dimana retribusi tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintah daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kota Banda Aceh periode tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

No.	Uraian	Data Tahun Dasar 2022	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi			
				2023	2024	2025	2026
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Pendapatan	1.374.271.730.417	-1,99%	1.303.088.344.063	1.251.166.816.351	1.258.526.426.432	1.266.048.361.290
2	Pencairan Dana Cadangan	-					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	10.000.000.000	0,00%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	Total Penerimaan	**1.384.271.730.417**		**1.313.088.344.063**	**1.261.166.816.351**	**1.268.526.426.432**	**1.276.048.361.290**
	Dikurangi :						
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1.113.732.260.829	3,55%	1.142.556.787.119	1.179.454.221.430	1.225.083.084.917	1.280.199.412.506
	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	**270.539.469.588**		**170.531.556.944**	**81.712.594.921**	**43.443.341.515**	**(4.151.051.216)**

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2022

Jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai :

1. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan alokasi belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
2. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan alokasi belanja pemenuhan Indikator Kinerja Utama.
3. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya : belanja hibah, belanja bansos, dan penyertaan modal.

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan daerah Kota Banda Aceh periode tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2022	Proyeksi							
			2023		2024		2025		2026	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kapasitas rill kemampuan keuangan	**1.378.971.730.417**	**-54,69%**	**624.809.586.291**	**0,01%**	**624.902.586.589**	**0,02%**	**625.002.932.391**	**0,02%**	**625.111.901.473**
1	Prioritas I (belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar)	1.113.732.260.829	2,59%	1.142.556.787.119	3,23%	1.179.454.221.430	3,87%	1.225.083.084.917	4,50%	1.280.199.412.506
2	Prioritas II (belanja pemenuhan Indikator Kinerja Utama)	133.632.104.626	151,66%	336.294.862.296	-13,01%	292.558.567.116	-1,29%	288.771.452.027	14,32%	330.135.938.038
3	Prioritas III (belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya : belanja hibah, belanja bansos, penyertaan modal)	131.607.364.962	-5,06%	124.951.938.094	-4,80%	118.951.373.105	-4,49%	113.610.214.811	-4,11%	108.941.659.412

Sumber : BPKK Kota Banda Aceh, 2023

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Aceh telah melalui banyak hal dan melakukan banyak hal dalam pembangunannya. Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan seluruh upaya yang optimal dalam membangun Kota Banda Aceh. Akan tetapi, ketidaksesuaian capaian pembangunan dengan rencana yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan masih saja ada, hal ini merupakan sesuatu yang lazim terjadi, tidak hanya di Kota Banda Aceh saja, karena banyak faktor atau variabel yang dapat membuat rencana yang telah disusun dengan baik menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Faktor pendukung yang dapat menstimulasi pembangunan dan faktor penghambat yang dapat mengganggu pembangunan berasal dari dalam dan luar Kota Banda Aceh mengerucut pada masalah dan tantangan yang harus diminimalisir atau bahkan dihilangkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

4.1 Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh

Masalah dan tantangan yang dihadapi menjadi penting untuk diperhatikan dan dianalisis agar di pembangunan periode selanjutnya hal yang menjadi kesenjangan antara kinerja pembangunan dengan rencana dapat ditutupi. Secara umum, yang menjadi masalah dan tantangan dalam pembangunan tercipta dari ketidakmampuan dan pemahaman dalam memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang/kesempatan, dan meminimalisir ancaman. Sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan dan peluang yang dapat mendorong pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga kelemahan dan ancaman yang dapat mengganggu pembangunan yang sudah direncanakan dapat dicegah dan diminimalisirkan efeknya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Pengidentifikasian yang demikian bertujuan untuk memudahkan pemetaan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan tujuan-tujuan sebagaimana disebutkan di atas maka dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi permasalahan dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat antara lain: Cakupan masalah yang terjadi di beberapa wilayah, Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan akan berdampak negatif, dan permasalahan itu memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Banda Aceh merupakan kota terbesar di Provinsi Aceh yang juga sebagai ibukota Provinsi Aceh. Dilihat dari sisi lokasi yang berada di ujung pulau Sumatera, tentu Banda Aceh masih kalau bersaing dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Walaupun Banda Aceh bukan kota terluar, namun sebagai ibukota provinsi yang jauh dari ibukota negara menjadi kurang strategis di dalam bersaing dengan kota-kota lainnnya di Indonesia. Akan tetapi, dari sisi kewilayahan terkait dengan wilayah internasional dan regional tertentu, Kota Banda Aceh memiliki keunggulan strategis.

B. Wilayah Rawan Bencana

Kota Banda Aceh tergolong sebagai salah satu kota yang rawan bencana, sepeti gempa bumi dan tsunami. Hal berkenaan ini dengan lokasinya yang langsung berbatasan dengan laut lepas dan berada di jalur patahan gempa. Walaupun mitigasi bencana telah diupayakan, namun untuk ini juga masih dirasakan kurang. Kota Banda Aceh dalam dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki indeks risiko bencana tinggi dengan skor 117,02 (kategori sedang). Sementara itu, Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana Kota Banda

Aceh tahun 2021 adalah sebesar 0,58 (kategori sedang). IKD yang masih sedang menunjukkan perlu ditingkatkan kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana agar dapat menjadi tinggi.

Adapun ancaman bencana di Kota Banda Aceh secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Ancaman bencana banjir
   Skor 20,02 dengan tingkat risiko tinggi
2. Ancaman bencana gempa bumi
   Skor 12,01 dengan tingkat risiko tinggi
3. Ancaman bencana tsunami
   Skor 13,35 dengan tingkat risiko tinggi
4. Ancaman kebakaran hutan dan lahan
   Skor 13,35 dengn tingkat risiko tinggi
5. Ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi
   Skor 13,35 dengan tingkat risiko tinggi
6. Ancaman tanah longsor
   Skor 6,67 dengan risiko sedang
7. Ancaman kekeringan
   Skor 6,67 dengan risiko sedang
8. Ancaman cuaca ekstrim
   Skor 7,56 dengan risiko sedang

C. Demografi

Kota Banda Aceh memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi mencapai 4.121 jiwa per ㎢. Tinggginya tingkat kepadatan penduduk ini membutuhkan tingkat pelayanan yang ekstra di setiap sudut wilayah kota. Berbagai jenis pelayanan yang optimal harus menjadi perhatian pemerintah kota.

D. Penggunaan Lahan dan Lingkungan Hidup

Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah yang relatif sempit, hanya 61,36 ㎢. Penggunaan lahan yang sudah terbangun telah melebihi 50 persen dari luas wilayah. Dari penggunaan tersebut, sekitar 60 persen penggunaannya untuk perumahan. Hanya sekitar 7 persen penggunaannya untuk perdagangan dan jasa serta 4 persen untuk perkantoran. Sebagai sebuah kota di mana peran dan fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa, maka penggunaan lahan untuk investasi bisnis masih dirasakan kekurangan. Padahal peluang untuk itu masih sangat memungkinkan dalam pengembangan ekonomi Kota Banda Aceh.

Sebagai sebuah kota yang terus berkembang, persoalan lingkungan tidak dapat diabaikan. Perekonomian yang berkembang terait erat dengan sampah yang banyak. Kota Banda Aceh setiap saat berhubungan dengan volume sampah yang semakin banyak. Bukan hanya sampah dari warga sendiri, tapi juga sampah dari warga daerah tetangga yang biasanya menumpuk di daerah pinggiran. Keterbatasan lahan untuk TPA dan pelayanan persampahan yang belum optimal menjadi kendala yang terus menerus disebakan oleh masih rendahnya infrastruktur yang dimiliki. lebih dari 50 persen lahan di Kota Banda Aceh adalah ruang terbuka (3218,62 Ha), sedangkan pemukiman dan perairan masing-masing sebesar 18,74 persen (1105,92 Ha) dan 11,79 persen (695,58 Ha). Penggunaan lahan untuk TPA dan IPA menempati bagian terkecl dari luas Kota Banda Aceh, yaitu seluas 0,62 Ha (0,01 persen).

4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang mencakup pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan Aceh, Laju Inflasi, Pendapatan per kapita, Ketimpangan pendapatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh yang tinggi terjadi pada tahun 2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh pada tahun 2017 mengalami pelambatan dari 6,31 menjadi 3,39. Kemudian pada tahun 2018 mulai membaik atau meningkat 1.1 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami pelambatan kembali pada tahun 2019

dan 2020 akibat dari pandemi COVID-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami pelambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Pelambatan terjadi pada tahun 2019 sebanyak 0.31 persen dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya menurun drastis menjadi -3.29 di tahun 2020.

B. Angka Kemiskinan

Penduduk miskin Kota Banda Aceh selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan dari 7,44 persen di tahun 2017 menjadi 6,77 persen pada tahun 2021. Ini merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan karena Kota Banda Aceh terus menuju pemberantasan kemiskinan. Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, angka kemiskinan Kota Banda Aceh masih lebih rendah dibandingkan keduanya. Walaupun jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan. Peningkatan jumlah penduduk miskin di tiga tahun tersebut tidak terlepas dari adanya pandemi COVID-19 yang menghantam Kota Banda Aceh dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Garis kemiskinan di Kota Banda Aceh terus menunjukkan peningkatan. Jika dilihat dari trend sejak tahun 2017 sampai dengan 2020, garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp102.682 dimana rata-rata peningkatan per tahun adalah Rp20.536.

C. Laju Inflasi

Secara umum, laju inflasi Kota Banda Aceh pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019, laju inflasi mengalami peningkatan mencapai 2,08 persen. Fluktuasi dari laju inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh menunjukkan adanya kejutan/shock yang disebabkan faktor-faktor penyebab inflasi baik dari sisi permintaan (masyarakat) atau yang lebih dikenal dengan istillah tarikan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) ataupun dari sisi penawaran (pelaku usaha) atau dikenal dengan istillah dorongan dari sisi penawaran (*cost push inflation*).

D. Pendapatan Perkapita

Selama periode tahun 2017-2021 terjadi kenaikan tingkat PDRB mencapai angka 68,40 juta rupiah di tahun 2021. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, PDRB per kapita Kota Banda Aceh atas dasar harga konstan sudah mencapai 68,40 juta rupiah bila dibandingkan pencapaian 62,94 juta rupiah di tahun 2017. Kenaikan 5,46 juta rupiah selama periode 5 tahun tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan rata-rata 1,09 juta rupiah PDRB perkapita setiap tahunnya.

E. Ketimpangan Pendapatan

Indikator refleksi ketimpangan pendapatan yang digunakan Kota Banda Aceh adalah indeks gini. Indeks Gini Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan penurunan dari 0,314 menjadi 0,290. Penurunan indeks gini menunjukkan angka yang terus mendekati nol yang artinya kesenjangan pendapatan di Kota Banda Aceh sangat kecil bisa disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan sudah hampir sama.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari 7,75 persen pada tahun 2017 menjadi 8,94 persen pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Aceh dan Nasional, kondisi pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun 2017 sampai dengan 2021 berada diatas kedua angkat TPT Provinsi Aceh dan Nasional. Tingkat pengangguran yang tinggi ini, terutama di tahun 2020 dan 2021 sangat dipengaruhi dengan melambatnya kondisi ekonomi Kota Banda Aceh yang terimbas dengan adanya pandemi *Covid-19*.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda Aceh terus membaik seiring berjalannya waktu. IPM Kota Banda Aceh telah melewati IPM Aceh dan Nasional. Kesenjangan IPM antara Banda Aceh dan Provinsi Aceh menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pembangunan manusia antara Kota Banda Aceh dan kabupaten

lainnya di Propinsi Aceh. Kesenjangan ini adalah salah satu pemicu tingginya migrasi penduduk terutama tenaga kerja ke Kota Banda Aceh.

4.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Dalam hal pelayanan umum Kota Banda Aceh secara umum telah memiliki infrastruktur yang baik. Akan tetapi, dalam beberapa sektor hal itu masih dirasakan belum optimal. Beberapa masalah dalam urusan layanan umum:

A. Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

Syariat Islam adalah pedoman hidup bagi warga Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai dengan visi jangka panjangnya untuk menjadi kota yang modern tapi islami. Sebagai sebuah kota yang terbuka Kota Banda Aceh selalu berhadapan dengan warga luar kota baik sebagai wisatawan maupun sebagai migran yang ingin menetap di Kota Banda Aceh. Sebagai pusat pendidikan, kesehatan, budaya dan politik daerah, Kota Banda Aceh menjadi wilayah yang selalu menjadi perhatian dan pusat daya tarik wilayah. Banyak warga luar yang berdatangan ke kota Banda Aceh dengan berbagai budaya yang berbeda. Sebagai sebuah kota yang memiliki visi tentang syariat tentu selalu berhadapan dengan berbagai persoalan pelanggaran syariat islam tersebut, baik karena kekurangtahuan dari masyarakat, terutama pendatang, maupun kekurangan kepedulian terhadap penegakannya. Oleh karenanya, penegakan syariat islam masih dirasakan belum optimal, disebabkan oleh karena masih adanya pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Akan tetapi, penegakan syariat islam ini juga masih sering menjadi bahasan dan stigma tertentu bagi pihak-pihak tertentu yang membuat pihak pendatang atau wisatawan untuk takut berkunjung, karena salah persepsi dan salah informasi terhadap syariat islam di Kota Banda Aceh. Belum optimalnya penyampaian informasi syariat islam juga menjadi kendala bagi pengembangan pariwisata Kota Banda Aceh, sehingga juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kota.

Kota Banda Aceh mampu meningkatkan indeks keberhasilan penerapan syariat Islam dari 70,2 pada tahun 2018 menjadi 75,22 pada tahun 2020. Namun demikian, Indeks Penerapan Syariat Islam ini masih belum optimal sebagaimana yang diharapkan yaitu di atas 80,00. Di samping itu, penurunan angka kasus pelanggaran qanun Syariat Islam sudah mampu diturunkan dari 215 kasus di tahun 2018 menjadi 97 kasus pada tahun 2019 dan terus menurun di tahun 2020 menjadi 90 kasus. Akan tetapi, penurunan kasus pelanggaran Qanun Syariat Islam dari tahun ke tahun ini menunjukkan masih terjadinya pelanggaran.

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan penerimaan zakat. Pada tahun 2018, penerimaan zakat menjadi berkurang dari Rp.17.155.702.285 menjadi Rp 14.103.274.443 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi *Covid-19*. Di samping itu, jumlah Muzakki pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.694 orang. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 5.621. Namun demikian, peningkatan jumlah Muzakki ini tidak signifikan dengan jumlah penerimaan zakat.

B. Layanan Urusan Wajib

1) Layanan Urusan Wajib Dasar

a. Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Kota Banda Aceh masih belum optimalnya optimalisasi Kualitas Pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh 5 (lima) komponen yaitu:

1) Angka Rata-Rata Lama Sekolah;
2) Angka Harapan Lama Sekolah;
3) Persentase Capaian SPM;
4) Persentase Rekomendasi MPD yang Dihasilkan;
5) Persentase Dayah yang Terakreditasi

Dari 5 (lima) komponen pengukuran Indeks Kualitas Pendidikan (IKP) tersebut di atas, untuk Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Banda Aceh telah menunjukkan capaian di atas angka nasional dan provinsi. Namun demikian, untuk Komponen Persentase Capaian SPM, Persentase Rekomendasi MPD yang dihasilkan, dan Persentase Dayah yang Terakreditasi masih belum Optimal.

Pada tahun 2019, Rata Rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh sebesar 12,64 tahun sedangkan pada tahun 2020 sebesar 12,65 tahun. Angka harapan lama sekolah tahun 2019 sebesar 17,39 tahun, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 17,79 tahun. Jumlah Dayah Kota Banda Aceh pada tahun 2019 sebanyak 42 Dayah, sedangkan yang terakreditasi masih 17 Dayah. Pada tahun 2021 jumlah Dayah sebanyak 45 dan yang terakreditasi sebanyak 26 Dayah. Namun demikian, jumlah Dayah yang terakreditasi masih rendah dan akan ditingkatkan semua Dayah terakreditasi ditahun berikutnya.

b. Kesehatan

Permasalahan Kesehatan di Kota Banda Aceh masih belum optimalnya optimalisasi kualitas kesehatan. Hal ini ditunjukkan oleh 3 (tiga) komponen yaitu:

1) SPM Kesehatan;
2) SPM Rumah Sakit;
3) Angka Harapan Hidup.

Ketiga Indeks di atas akan digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Kesehatan (IKK) Kota Banda Aceh. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan Indeks Kualitas Kesehatan antara lain SPM Kesehatan dan SPM Rumah Sakit. SPM Kesehatan dan SPM Rumah Sakit merupakan permasalahan yang dihadapi Kota Banda Aceh karena belum optimalnya capaian SPM-nya. Sedangkan, untuk komponen Angka Harapan Hidup, capaian Kota Banda Aceh berada di atas capaian angka nasional dan provinsi. Rata-rata capaian SPM Kesehatan Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sebesar 89 persen, capaian terendah adalah pada layanan lanjut usia (14 persen), Penyakit Tidak Menular (Hipertensi) sebesar 33 persen, layanan pada balita (Imunisasi) sebesar 60,99 persen. Sedangkan rata-rata capaian SPM Rumah Sakit sebesar 96,80 persen, pada layanan di beberapa instalasi yang belum mencapai angka maksimal.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan Kota Banda Aceh di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:

1) Kondisi Jalan;
2) Akses Sanitasi;
3) Pelayanan Air Minum;
4) Kondisi Drainase.

Panjang jalan Kota Banda Aceh pada tahun 2021 telah mencapai 620,96 Km yang terdiri dari jalan dengan kondisi baik sepanjang 591,03 Km, jalan dengan kondisi sedang sepanjang 18,89 Km, jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 9,11 Km dan jalan dengan kondisi rusak berat adalah sepanjang 1,92 Km. Permasalahan jalan di Kota Banda Aceh saat ini berkaitan dengan masih terdapatnya jalan dengan kondisi rusak berat (1,92 Km) dan jalan dengan kondisi rusak ringan (9,11 Km). Perbaikan jalan ini dan pemeliharaan rutin/berkala jalan untuk mempertahankan kondisi baik akan menjadi fokus pembangunan Kota Banda Aceh pada tahun berikutnya.

Persentase rumah tangga bersanitasi layak pada tahun 2021 baru mencapai 87,58 persen. Kondisi ini belum memenuhi target nasional sebesar 90 persen. Hal ini juga menjadi fokus pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh ke depan. Cakupan pelayanan air minum pada tahun 2021 telah mencapai 92,83 persen. Kondisi ini belum memenuhi target nasional sebesar 100%. Hal ini menjadi fokus pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh ke depan.

Persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2021 sudah mencapai 82,01 persen, selebihnya sebesar 17,99 persen dalam kondisi rusak sehingga membutuhkan rehabilitasi dan pemeliharaan. Di samping itu masih adanya kawasan banjir genangan sebesar 44,11 persen dari total luasan kawasan berpotensi rawan genangan. Kondisi tersebut akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan drainase dan pengendalian banjir genangan ke depan.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan Kota Banda Aceh dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah belum optimalnya penataan kawasan permukiman yang meliputi:

1) Pemenuhan Rumah Layak Huni;
2) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh;

Persentase rumah layak huni di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Persentase rumah layak huni pada tahun 2020 sebesar 93,88 persen menurun menjadi 92,20 pada tahun 2021. Luas wilayah Kota Banda Aceh 5.910,36 Ha. Dari luas tersebut, pada tahun 2021 masih terdapat Kawasan kumuh sebesar 451,40 Ha. Hal ini akan menjadi prioritas pembangunan Kota Banda Aceh pada tahun berikutnya terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan Kota Banda Aceh dalam Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

1) Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung);
2) Ketertiban, ketentraman, keindahan

Kegiatan Pilpres, Pileg, Pilkada, dan Pilchiksung ini memerlukan kegiatan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat. Pilpres, Pileg, dan Pilkada direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan pelaksanaan Pilchiksung di Kota Banda Aceh akan dilaksanakan khusus kepada Kepala Desa atau Keuchik yang direncanakan akan diadakan serantak pada tahun 2023 dan 2025.

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 90 (sembilan puluh) Gampong. Pada tahun 2021, Kota Banda Aceh telah melaksanakan Pilchiksung serantak terhadap 24 gampong. Kegiatan Pilchiksung terhadap Kepala Desa atau Keuchik akan dilaksanakan pada tahun berikutnya (2023 dan 2025) untuk sisa gampong yaitu sebanyak 66 gampong. Pada tahun 2020, jumlah pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) di Kota Banda Aceh sebanyak 66 kasus, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 163 kasus. Di samping itu, persentase penyelesaian K3 pada tahun 2020 sebesar 100 persen, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 99,40 persen.

f. Sosial

Permasalahan Sosial di Kota Banda Aceh masih belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini ditunjukkan oleh 2 (dua) komponen yaitu:

1) SPM Sosial
2) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Terkait dengan SPM Sosial, capaiannya sudah cukup baik yakni sebesar 90 persen, terendah pada penanganan disabilitas terlantar (59 persen) dan penanganan gelandang dan pengemis sebesar 93 persen. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baru mencapai 50,98 persen jumlah penduduk miskin hasil verifikasi dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin hasil pengesahan kementerian. DTKS digunakan sebagai rujukan dalam pemberian bantuan sosial dan lainnya.

2) Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a. Koperasi, UKM, dan Perdagangan

Permasalahan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan meliputi:

1) Masih terdapat koperasi yang tidak aktif.
   Jumlah koperasi di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 sebanyak 513 unit. Dari jumlah koperasi tersebut sebanyak 395 unit koperasi yang aktif, sedangkan jumlah koperasi yang tidak aktif sebanyak 118 unit (23 persen). Relatif masih banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif ini disebabkan oleh sumber daya pengelola koperasi dan kesadaran anggota dalam berkoperasi yang masih minim. Selain itu, banyak koperasi yang mengalami simpan pinjam yang kurang lancar.
2) Masih adanya pasar yang belum fungsional.
   Pada tahun 2021 jumlah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh secara aktif sebanyak 5 unit yaitu Pasar Aceh, Pasar Gampong Baru, Pasar Seutui, Pasar Peuniti, dan Pasar Al Mahirah Lamdingin. Sebelumnya, pada tahun 2020, jumlah pasar berjumlah sebanyak 18 unit. Setelah adanya pasar Al Mahirah Lamdingin, beberapa pasar bergabung dengan pasar Al Mahirah Lamdingin yaitu Pasar Kartini, Pasar Ikan, Pasar Daging, Pasar Bumbu, Pasar Unggas, Dan Pasar Nasabe. Di samping itu, beberapa pasar masih dalam peningkatan yaitu Pasar Rex, Pasar Newtown, Pasar Rakyat Batoh, Pasar Lamgapang Ulee Kareng, Pasar Rakyat Ulee Lheu, Pasar Pusat Kuliner dan

Souvenir, dan Pasar Kuliner Ulee Lheu. Permasalahan pasar yang belum fungsional ini merupakan prioritas pembangunan Kota Banda Aceh ke depan.

3) Belum optimalnya pembinaan UMKM
Jumlah UMKM di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan selama periode 2017 sampai dengan November 2021. Pada tahun 2017, jumlah UMKM sebanyak 9.591 sedangkan pada November 2021 sudah mencapai 16.970. Namun demikian, peningkatan jumlah UMKM ini dihadapkan pada permasalahan pembinaan UMKM yang belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya modal usaha, SDM, manajemen pengelolaan UMKM, dan penguasaan teknologi untuk peningkatan omzet penjualan.

b. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banda Aceh mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2017 – 2019, TPT Kota Banda Aceh cenderung mengalami penurunan, namun demikian pada tahun 2020 - 2021 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019, TPT Kota Banda Aceh sebesar 6,92 persen, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 9,54 persen. Pada tahun 2021, TPT kembali mengalami penurunan menjadi 8.94 persen. TPT yang tinggi, terutama di tahun 2020 dan 2021 dipengaruhi oleh melambatnya kondisi ekonomi Kota Banda Aceh yang terimbas dengan adanya pandemi *Covid-19*. Selain dari pandemi *Covid-19*, faktor pendukung yang menjadi pemicu meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh adalah kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan sebagian angkatan kerja. Hal ini berdampak pada melambatnya perekonomian Kota Banda Aceh, ditambah lagi dengan kondisi melambatnya perekonomian secara nasional.

c. Pangan

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kota Banda Aceh belum mempunyai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dengan indikator ketersediaan pangan utama yang masih mengalami perubahan dimana pada tahun 2018 sebesar 105,15 kg/tahun/jiwa, 100,60 kg/tahun/jiwa pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 121,31 kg/tahun/jiwa.

d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh dapat diketahui melalui:

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
2) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Persentase Partisipasi Perempuan di Pemerintah Kota Banda Aceh dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil menunjukkan persentase perempuan pada tahun 2020 (67,1 persen) lebih banyak dari persentase laki-laki (32,9 persen). Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Banda Aceh terhadap perempuan dan anak menunjukkan penurunan rasio dari tahun 2019 ke tahun 2020. Namun demikian, pada periode tahun ini masih terjadi KDRT terhadap perempuan maupun anak. Pada tahun 2019, rasio KDRT terhadap perempuan sebesar 0,10 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,05. Pada tahun yang sama, rasio KDRT terhadap anak masing-masing sebesar 0,10 dan 0,4.

Dilihat dari keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh masih menunjukkan jumlah yang relatif kecil. Hal ini dapat diketahui dari 30 jumlah anggota DPRK Banda Aceh, hanya 4 (empat) anggota DPRK perempuan atau 13,33%.

e. Kepemudaan dan Olahraga

Untuk mengukur Indeks Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga (IP30) digunakan 2 (dua) komponen, yaitu:

1) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
2) Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Banda Aceh pada tahun 2019-2021 sebesar 91 persen. Namun demikian, persentase ini belum optimal dan masih bisa ditingkatkan. Sedangkan Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kota Banda Aceh selama periode yang sama masing-masing sebanyak 20, 34, dan 35 orang. Jumlah cakupan pembinaan atlet muda ini masih minim dan belum dioptimalkan.

Permasalahan lain yang dihadapi tentang kepemudaan dan olahraga adalah persentase wirausaha muda, cakupan pelatih yang bersertifikat, atlet berprestasi, dan prestasi olahraga.
Pada tahun 2021, Indeks Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga (IP30) Kota Banda Aceh sebesar 19,47. Pencapaian indeks yang lebih baik akan menjadi prioritas dalam pembinaan kepemudaan dan olahraga Kota Banda Aceh.

f. Lingkungan Hidup

Menjaga dan melestarikan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup merupakan salah satu cara mengendalikan keberlangsungan hidup untuk masa-masa yang akan datang. Lingkungan yang bersih dengan sampah yang semakin meningkat timbulan menjadi efek dari meningkatnya mobilitas dan pertumbuhan penduduk dengan persentase yang belum mencapai 100 persen (hanya di angka 97,50 persen) untuk penanganan timbulan sampah untuk Kota Banda Aceh. Hal ini menjadi permasalahan terkait dengan lingkungan hidup. Selanjutnya, hal lain yang menjadi permasalahan di Kota Banda Aceh dalam bidang lingkungan hidup adalah menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator yang memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup, Kota Banda Aceh pada tahun 2019 memiliki IKLH 69,71 atau masuk dalam predikat sedang. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020, nilai IKLH menurun menjadi 67,01 dan tahun 2021 turun lagi menjadi 57,29.

Selain itu, belum optimal penurunan emisi gas rumah kaca dianggap menjadi faktor yang mendukung rusaknya lingkungan hidup. Terdapat 6 (enam) sektor penyumbang emisi rumah kaca yaitu energi; pertanian; transportasi; pertambangan; industri; dan limbah. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi dan sektor limbah. Pada tahun 2017, sektor transportasi menyumbang emisi GRK sebesar 265.212 ton CO^2eq, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 298.428 ton CO^2eq. Permasalahan ini akan menjadi prioritas pembangunan Kota Banda Aceh ke depan terkait dengan GRK.

Di samping itu. permasalahan lainnya yang dihadapi adalah berkaitan dengan pemenuhan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah 30 persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20 persen untuk RTH *public* dan 10 persen untuk RTH *private*. Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Banda Aceh adalah masih belum terpenuhinya luasan RTH baik *public* maupun *private*. Pada tahun 2018 luas RTH Kota Banda Aceh adalah 14,31 persen dan pada tahun 2021 adalah sebesar 14,34 persen.

g. Perhubungan

Permasalahan bidang perhubungan berkaitan dengan kemacetan yang terjadi di Kota Banda Aceh sebagai akibat tingginya rasio pertumbuhan kendaraan dibandingkan penambahan jaringan jalan. Pada tahun 2018 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 0,29. Kemudian, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi masing-masing 0,27, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 0,26.

3) Layanan Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 503.992 wisatawan, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi masing-masing 172.197 dan 190.285 wisatawan. Penurunan kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh ini sebagai akibat dampak dari pandemi *Covid-19*.

b. Kebudayaan

Pelestarian budaya daerah yang menjadi icon Kota Banda Aceh masih rendah dengan Indeks Pelestarian Budaya Daerah (IPBD) sebesar 73,41 pada tahun 2021. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelestarian budaya daerah adalah belum optimalnya indeks yang dicapai terkait dengan benda, situs, Kawasan cagar budaya yang dilestarikan, sanggar seni yang aktif, dan rekomendasi Majelis Adat Aceh (MAA) yang dihasilkan tentang adat istiadat.

4) Penunjang Urusan Pilihan

a. Keuangan

Sumber pendapatan yang akan mendanai pembangunan di Kota Banda Aceh ke depan akan menghadapi tantangan, terutama dengan menurunnya Dana Transfer, Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Provinsi, Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota (DOKA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2020 PAD Kota Banda Aceh sebesar Rp 227.847.318.871 sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp 224.133.382.080. Penurunan ini disebabkan karena pandemi *Covid-19* di tahun 2020 dan 2021. Hal ini menjadi permasalahan dari sisi sumber pendapatan daerah.

Dana OTSUS dan Dana DOKA terhitung tahun 2023 juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 2 (dua) persen DAU Nasional menjadi 1 (satu) persen sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sedangkan dana transfer dan PAD mengalami penurunan akibat dampak pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2020 DOKA yang diterima Kota Banda Aceh sebesar Rp 112.174.533.540 dan mengalami penurunan menjadi 108.204.473.126 pada tahun 2021. Dengan akan diberlakukannya pagu OTSUS Aceh yang diterima dari 2 persen DAU nasional sebelumnya menjadi 1 persen DAU nasional pada tahun 2023, jumlah DOKA yang akan diterima oleh Kota Banda Aceh hanya sebesar 50 persen dari pagu tahun 2022.

b. Birokrasi dan Pelayanan

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh dan pelayanan kepada masyarakat digunakan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai AKIP Kota Banda Aceh belum optimal. Hal ini ditandai dengan nilai AKIP Kota Banda Aceh Tahun 2020 masih CC. Pada tahun 2021 AKIP Kota Banda Aceh sudah mencapai nilai B. Namun demikian, nilai ini masih belum optimal dan direncanakan akan ditingkatkan menjadi nilai A pada tahun berikutnya. Di samping itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banda Aceh pada tahun 2020 sebesar 86,49 sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 87,97. Namun demikian, indeks ini masih belum optimal karena masih bisa ditingkatkan pada tahun berikutnya menuju 100.

4.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing Kota Banda Aceh berkaitan dengan kemampuan untuk meningkatkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Selama periode 2017-2021 nilai investasi PMDN Kota Banda Aceh cenderung berfluktuasi dengan nilai investasi yang belum maksimal. Pada tahun 2020, nilai investasi PMDN sebesar 257,21 Miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 227,95 Miliar rupiah. Hal ini terjadi akibat pandemi *Covid-19* sejak awal tahun 2020. Begitu juga halnya dengan nilai investasi PMA, dimana pada tahun 2020 sebesar 2 Miliar rupiah, namun demikian mengalami peningkatan menjadi 156,38 Miliar rupiah. Belum optimalnya nilai investasi tahun 2020 dan 2021 ini dihadapkan kepada permasalahan berkaitan dengan dampak pandemi *Covid-19*. Permasalahan lainnya akibat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung investasi seperti SDM, teknologi, manajemen pengelolaan, dan jaminan keamanan serta utilitas pendukung lainnya (energi dan air).

4.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi saat ini dengan harapan yang terefleksi dalam tujuan pembangunan. Isu Strategis Kota Banda Aceh mengacu kepada Isu Strategis Internasional, Isu Strategis Nasional, dan Isu Strategis Aceh.

Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan bisnis digital;
2. Transformasi Teknologi berbasis *Artificial Intelligence*;
3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
4. Sumber energi alternatif;
5. Perubahan iklim global; dan
6. Munculnya pusat dan kekuatan ekonomi baru di Samudera Hindia.

Isu Strategis Nasional meliputi:

1. Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan (melalui *food estate* dan korporasi petani dan nelayan);
2. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan perkapita (melalui pengembangan *major project* pengembangan industri dan UMKM terpadu);
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik);
4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan
5. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Ekosistem Leuser, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Isu Strategis Aceh meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana; dan
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Isu Strategis Pembangunan Kota Banda Aceh mengacu pada isu strategis provinsi, nasional dan internasional diatas. Untuk mengetahui Isu Strategis Kota Banda Aceh secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Penguatan Syariat Islam

Syariat Islam merupakan ikon dan amanah dalam pembangunan Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu, pemahaman, penguatan, dan pengamalan Syariat Islam menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan diberbagai sektor pembangunan. Penegakan Syariat Islam belum merambah ke aspek-aspek ekonomi dan politik, namun hanya sebagian dari aspek-aspek sosial saja yang baru diterapkan. Atas dasar ini maka, penguatan Syariat Islam menjadi isu strategis dalam pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

4.2.2 Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum

Kota Banda Aceh sebagai bagian dari Provinsi Aceh yang juga terintegrasi sebagai bagian dari Indonesia, harus melaksanakan Pemilu dan Pilkada Serentak yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Peningkatan kualitas demokrasi dan ketenteraman umum dijadikan sebagai isu strategis dalam pembangunan Kota Banda Aceh karena berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak termasuk pelaksanaan Pilchiksung dalam periode 2023-2026. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan tersebut di atas, Pemerintah Kota Banda Aceh juga akan memprioritaskan ketenteraman umum dalam masyarakat untuk suksesnya kegiatan yang dimaksud.

4.2.3 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah

Reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi isu strategis dalam pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 atas dasar permasalahan belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah di Kota Banda Aceh. Untuk

mewujudkan hal ini, diperlukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, efektif dan efisien.

4.2.4 Optimalisasi Kualitas Pendidikan

Optimalisasi kualitas pendidikan dijadikan isu strategis dalam pembangunan Kota Banda Aceh karena belum optimalnya optimalisasi kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Optimalisasi kualitas pendidikan ini masih bisa ditingkatkan meskipun secara umum kualitas pendidikan Kota Banda Aceh sudah baik. Namun demikian, upaya optimalisasi kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan factor-faktor pendukung lainnya terkait dengan kualitas prasarana pendidikan termasuk kualitas dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan.

4.2.5 Optimalisasi Kualitas Kesehatan

Sama halnya dengan sektor pendidikan, optimalisasi kualitas kesehatan juga dijadikan isu strategis dalam pembangunan Kota Banda Aceh karena belum optimalnya optimalisasi kualitas kesehatan di Kota Banda Aceh. Optimalisasi kualitas kesehatan ini masih bisa ditingkatkan lagi meskipun secara umum kualitas kesehatan Kota Banda Aceh sudah lebih baik. Akan tetapi, upaya optimalisasi kualitas kesehatan masih perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan faktor pendukung kesehatan lainnya terkait dengan kualitas prasarana kesehatan, tenaga medis dan paramedik. Dampak akibat pandemi *Covid-19* masih dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan prioritas program pembangunan.

4.2.6 Penguatan Ekonomi dan Sosial

Penguatan ekonomi dan sosial dijadikan isu strategis dalam pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 karena dihadapkan kepada masih berfluktuasinya tingkat pertumbuhan ekonomi dan belum optimalnya pelayanan dan penanganan sosial di Kota Banda Aceh. Berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh khususnya di masa periode 2020 dan 2021 sebagai akibat dari pandemi *Covid-19* . Di samping itu, Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang sosial masih belum optimal dan dapat ditingkatkan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

4.2.7 Pariwisata dan Budaya

Pariwisata dan Budaya dijadikan isu strategis dalam pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 karena turunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh khususnya selama masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 dan 2021. Dengan harapan pulihnya pandemic Covid-19, kunjungan wisatawan ini akan bisa ditingkatkan. Permasalahan lainnya terkait dengan belum optimalnya pelestarian budaya dan memerlukan perhatian khusus terhadap upaya pelestarian budaya pada tahun berikutnya.

4.2.8 Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi di bidang infrastruktur dan kawasan permukiman saat ini dijadikan sebagai isu strategis pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah belum optimalnya akses air minum dan sanitasi layak dan aman, belum optimalnya penanganan kerusakan jalan, masih terjadinya kemacetan lalu lintas, belum optimalnya penataan kawasan permukiman, dan adanya kawasan banjir genangan.

4.2.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dijadikan sebagai isu strategis pembangunan Kota Banda Aceh karena masih belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya keterwakilan perempuan didalam berbagai sektor pembangunan. Demikian juga halnya dengan perlindungan anak masih ditandai dengan masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak meskipun relatif kecil.

4.2.10 Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH Perkotaan, dan Mitigasi Bencana

Permasalahan yang disebabkan oleh menurunnya kualitas lingkungan hidup, terbatasnya lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan, belum optimalnya pengelolaan kawasan RTH, belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan belum optimalnya pengelolaan mitigasi bencana menjadikan Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH Perkotaan, dan Mitigasi Bencana menjadi isu strategis pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Hal ini juga ditandai oleh masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Banda Aceh.

4.2.11 Pemuda dan Olah Raga

Pemuda dan olahraga dijadikan sebagai isu strategis pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 karena belum optimalnya pemberdayaan pemuda dan pembinaan olahraga. Pemberdayaan pemuda dan pembinaan olahraga ini sangat diperlukan karena berkaitan dengan keterlibatan pemuda dalam pembangunan. Pemuda yang berkualitas, memiliki moral dan berintegritas sangat diperlukan dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi global saat ini.

4.2.12 Sumber Pendapatan

Penurunan sumber pendapatan daerah dijadikan sebagai isu strategis dalam pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 karena menurunnya sumber pendapatan daerah dari OTSUS Aceh, dan DOKA Kabupaten/Kota yang diterima setelah pemberlakuan dana OTSUS Aceh 1 (satu) persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional mulai tahun 2023 sampai dengan 2027. Sumber pendapatan lainnya yang menyebabkan menurunnya sumber pendapatan daerah adalah menurunnya dana transfer dari pusat sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* sejak tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial, juga mengalami penurunan realisasi PAD selama periode 2020 dan 2021. Hal ini juga disebabkan sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* sejak tahun 2020. Atas dasar ini maka diperlukan berbagai upaya oleh Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini terutama berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pendapatan dengan potensi baru melalui intensifikasi dan ekstenstifikasi sumber pendapatan.

Untuk mengetahui secara rinci permasalahan dan isu strategis RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4. 1
Permasalahan dan Isu Strategis RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

No	Permasalahan	No	Isu Strategis Daerah
1	Belum Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1	Penguatan Syariat Islam
2	Belum Optimalnya Partisipasi Publik dalam Pemilu, Pilkada, dan Pilchiksung	2	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketentraman Umum
3	Adanya Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap Ketentraman Umum		
4	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
5	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Pendidikan	4	Optimalisasi Kualitas Pendidikan
6	Belum Optimalnya Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kesehatan	5	Optimalisasi Kualitas Kesehatan
7	Berfluktuasinya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6	Penguatan Ekonomi dan Sosial
8	Belum Optimalnya Pelayanan dan Penanganan Sosial		
9	Penurunan kunjungan wisatawan akibat pandemi	7	Pariwisata dan Budaya
10	Belum Optimalnya Pelestarian Budaya		
11	Belum optimalnya akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	8	Pengembangan Infrastuktur dan Penataan Kawasan Permukiman
12	Belum Optimalnya Penanganan Kerusakan Jalan		
13	Masih Terjadinya Kemacetan Lalu Lintas		
14	Belum Optimalnya Penataan Kawasan Permukiman		
15	Adanya Kawasan Banjir Genangan		
16	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	10	Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH Perkotaan dan Mitigasi Bencana
18	Terbatasnya Lahan RTH Perkotaan		
19	Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan RTH		
20	Belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		
21	Belum optimalnya pengelolaan Mitigasi Bencana		

No	Permasalahan	No	Isu Strategis Daerah
22	Belum Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	11	Pemuda dan Olahraga
23	Menurunnya Sumber Dana OTSUS Aceh, DOKA Kabupaten/Kota, dan Realisasi PAD Akibat Pandemi	12	Sumber Pendapatan

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa pembangunan Kota Banda Aceh periode tahun 2023-2036 dihadapkan kepada 23 permasalahan dengan 12 isu strategis. Diharapkan dengan mengetahui permasalahan dan isu strategis ini akan memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh ke depan.

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tahun 2023, merupakan awal tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ke empat atau dimulainya tahap akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh, sesuai dengan Qanun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007–2027. Di akhir periode Pembangunan Jangka Panjang ini, pembangunan Kota Banda Aceh diharapkan akan terwujudnya Banda Aceh sebagai kota tamaddun, modern dan islami.

Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh 2007–2027 diarahkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan untuk mengembangkan daerah sesuai dengan prioritas dan potensi wilayah/Kawasan. Berdasarkan RPJPK Banda Aceh, pada akhir periode jangka panjang ini pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan (ADHK) diperkirakan berkisar 2,32 persen, dengan pendapatan per kapita diharapkan mencapai Rp 11.380.000, dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 350 ribu jiwa. Sementara itu, tingkat diperkirakan masing-masing mencapai 3,87 persen.

Sehubungan dengan perkiraan bahwa pada tahun 2027, Kota Banda Aceh akan mengalami proses aglomerasi yang akan semakin membebani daya dukung infrastruktur, sosial, dan lingkungan hidup perkotaan, sehingga kepadatan aktivitas sosial ekonomi di wilayah Kota Banda Aceh semakin tinggi, maka pembangunan Kota Banda Aceh di masa depan harus mampu mengakomodir dan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur mampu mewujudkan pengamalan syariat islam secara kaffah, aman, nyaman serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi juga harus diarahkan sebagai pusat perkembangan ekonomi dengan fungsi utama mengolah dan memasarkan hasil-hasil pertanian, industri, perikanan dan kegiatan-kegiatan perdagangan lainnya. Pembangunan sosial juga perlu diarahkan kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing nasional dan internasional. Oleh karenanya, penguasaan teknologi dan informasi menjadi suatu hal yang patut dikembangkan. Ini mengingat perkembangan teknologi dan informasi hingga saat ini yang sulit untuk dibendung.

Sebagai kota yang terbuka, Banda Aceh juga perlu memperhatikan pengembangan pariwisata. Pariwisata merupakan satu momentum bagi pembangunan Kota Banda Aceh, karena pariwisata akan mampu menggerakkan berbagai sector ekonomi dan sosial. Pariwisata akan mampu mendatangkan aliran uang masuk ke Kota Banda Aceh. Pembangunan Kota Banda Aceh tidak dapat dipisahkan dari pembangunan keagamaan. Hal ini sesuai dengan visi dan misinya pembangunan syariat islam secara kaffah. Oleh karenanya, pembangunan Kota Banda Aceh harus menjadi kota yang terbuka namun memiliki ciri khas syariat islam pada berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik.

Atas dasar itu, maka Visi RPJP Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 adalah "Terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami”

5.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran juga memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah memiliki indikator yang dapat diukur untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan untuk mengetahui isu strategis, prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir Pada Tahun	OPD
						2021	2023	2024	2025	2026	2026	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Peningkatan Indeks Kota Syariah (IKS)	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	76,77	78,27	79,77	81,27	82,77	82,77	Dinas Syariat Islam Sekretariat MPU
2	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Peningkatan Indeks Ketenteraman Umum	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Indeks Ketenteraman Umum	Indeks	80,51	81,51	82,01	82,34	83,67	83,67	Kesbangpol Kecamatan
3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Peningkatan Nilai AKIP	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,73	91,12	92,51	93,9	95,29	95,29	Dinas Tenaga Kerja Kecamatan DPMPTSP Disdukcapil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan BKPSDM DAMKAR Satpol PP dan WH
				Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	BB	BB	BB	A	A	Inspektorat Sekretariat Daerah Sekretariat DPRK BAPPEDA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Diskominfotik
4	Mengoptimalkan kualitas pendidikan	Peningkatan Indeks Kualitas Pendidikan	Optimalnya Kualitas Pendidikan	Indeks Kualitas Pendidikan	Indeks	82,64	90,08	92,73	95,38	96,97	96,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir Pada Tahun	OPD
						2021	2023	2024	2025	2026	2026	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
												Dinas Pendidikan Dayah
												Sekretariat MPD
5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	Peningkatan Indeks Kualitas Kesehatan	Optimalnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kualitas Kesehatan	Indeks	85,451	94,715	94,716	94,717	94,718	94,718	Dinas Kesehatan
												RSUD Meuraxa
												DP3AP2KB
6	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,53***	4	4,4	4,8	5,2	5,2	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
												Dinas Tenaga Kerja
												DPMPTSP
												DPMG
												DP2KP
		Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,94	8,54	8,14	7,74	7,34	7,34	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Peningkatan Pemenuhan Layanan SPM Sosial		Persentase Pemenuhan Layanan SPM Sosial	%	97	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
7	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jiwa	251.836	350.000	450.000	550.000	650.000	650.000	Dinas Pariwisata
8	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	Peningkatan Indeks Pelestarian Budaya Daerah	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Budaya Daerah	Indeks	73,41	77,73	79,05	81,84	83,98	83,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
												Sekretariat MAA
9	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan	Persentase Peningkatan Rata-Rata Capaian Layanan Infrastuktur Perkotaan	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan	Rata-rata Capaian Layanan Infrastuktur Dasar Perkotaan	%	89,49	90,49	90,99	91,49	91,99	91,99	Dinas PUPR
												Dinas Perkim
												Dinas Perhubungan

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir Pada Tahun	OPD
						2021	2023	2024	2025	2026	2026	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Permukiman		Permukiman									
10	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	63,05	69,35	72,71	76,08	79,45	79,45	DP3AP2KB
11	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	57,29	62,37	64,92	67,46	70,00	70,00	DLHK3 Dinas PUPR
		Peningkatan Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota	%	14,33	14,365	14,370	14,375	14,380	14,380	DLHK3
		Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Kelas Risiko (Skor)	Sedang (117,02)	Sedang (107,02)	Sedang (102,02)	Sedang (97,02)	Sedang (92,02)	Sedang (92,02)	BPBD
12	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga	Indeks	19,47	22,32	23,75	25,18	26,91	26,91	Dinas Pemuda dan Olahraga
13	Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	1.61	1.96	2.52	3.18	3.97	3.97	BPKK

***) Data sangat sangat sementara (Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2022)

5.3. Penyelarasan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, RPA Tahun 2023-2026, dan RPJMN Tahun 2020-2024

Untuk mengetahui keselarasan antara RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, RPA Tahun 2023-2026, dan RPJMN Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Penyelarasan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026,
RPA Tahun 2023-2026, dan RPJMN Tahun 2020-2024

NO	Sasaran RPJMN 2020-2024	NO	Tujuan RPA Aceh	Sasaran RPA Aceh	NO	RPD BANDA ACEH	
						Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi	Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Aceh, laki-laki dan perempuan, serta peran lembaga demokrasi.	1	Mengoptimalkan Pemahaman Pengamalan Syariah Islam	Optimalnya Pemahaman Pengamalan Syariat Islam
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	2	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan Fungsional	Mempertahankan Opini audit BPK atas laporan keuangan	2	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Ketentraman Umum	Meningkatnya Kualitas Demokrasi Ketentraman Umum
				Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
				Meningkatnya Tingkat maturitas SPIP	4	Mengoptimalkan kualitas pendidikan	Optimalnya Kualitas Pendidikan
				Meningkatnya Nilai SAKIP	5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	Optimalnya Kualitas Kesehatan
				Meningkatkan profesionalitas ASN	6	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Sosial	Meningkatnya Penguatan Ekonomi Sosial
				Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	7	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
3	Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	3	Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah	Menguatnya Kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al-Quran	8	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya
				Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dayah	9	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman
				Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan	10	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

				ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	11	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
		4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan menengah, vokasional, dan SLB serta tenaga pendidik dan kependidikan	12	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
				Meningkatnya Sekolah yang terakreditasi	13	Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah
				Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.			
				Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olahraga			
				Meningkatnya Minat Baca Masyarakat			
				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan			
4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid19	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan			
				Menurunkan Beban Penduduk Miskin			
				Pengendalian Inflasi			
5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk			Meningkatkan Kemandirian Desa			
				Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19			
6	Terpenuhinya layanan dasar			Meningkatnya potensi sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dan perikanan			
7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda			Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian			

8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan			Meningkatnya peran industri dan dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian aceh	
9	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing			Meningkatnya realisasi penanaman modal di Aceh	
10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya			Meningkatnya sub kontribusi pariwisata	
11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dana Pembangunan	
12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial			Meningkatnya Kemandirian dan keragaman Pangan	
13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat			Meningkatkan kualitas dan kuantitas Tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan Pasar	
14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	6	Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	
15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif			Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	
16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar			Meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik	
17	Meningkatnya konektivitas wilayah			Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan infrastruktur pelayanan dasar	
18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan			Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	
19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien			Meningkatkan Pelestarian Hutan	
20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi			Meningkatkan Kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	

21	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	7	Meningkatkan Penguatan Perdamaian	Mitigasi munculnya potensi konflik horizontal	
22	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim				
23	Pembangunan Rendah Karbon				
24	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik				

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1. Strategi

Rencana pembangunan Daerah Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh dimana RPD 2023-2026 merupakan bagian akhir dari RPJP Kota Banda Aceh 2007-2027 dan menjadi bagian yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan sekaligus akan menjadi tahap persiapan penyusunan RPJP berikutnya. Oleh sebab itu, penentuan strategi dan arah kebijakan RPD akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan dalam 4 (empat) tahun kedepan sekaligus menentukan keberhasilan pembangunan jangka Panjang 2007-2027.

Strategi adalah cara untuk mengatasi permasalahan serta mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis, dan komprehensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam kebijakan dan program merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebagai upaya mencapai tujuan akhir pembangunan. Perumusan strategi pembangunan disusun berdasarkan kerangka analisis terhadap factor lingkungan strategis. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan, perkembangan zaman, serta kemajuan teknologi. Dengan demikian, rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai.

Keterkaitan tujuan, sasaran dan Strategi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 dijabarkan pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1.1	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	1.1.1	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Optimalisasi Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam
2	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	2.1	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	2.1.1	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum
3	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3.1	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	3.1.1	Optimalisasi Reformasi Birokrasidan Tata Kelola pemerintahan	Optimalisasi Reformasi Birokrasidan Tata Kelola pemerintahan
4	Mengoptimalkan Kualitas Pendidikan	4.1	Optimalnya Kualitas Pendidikan	4.1.1	Optimalisasi Kualitas Pendidikan	Optimalisasi Kualitas Pendidikan
5	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	5.1	Optimalnya Kualitas Kesehatan	5.1.1	Optimalisasi Kualitas Kesehatan	Optimalisasi Kualitas Kesehatan
6	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	6.1	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	6.1.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial
7	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	7.1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	7.1.1	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata
8	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	8.1	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya	8.1.1	Optimalisasi Upaya pelestarian Budaya	Optimalisasi Upaya pelestarian Budaya

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi	Arah Kebijakan
9	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	9.1	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	9.1.1	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman
10	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.1	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.1.1	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	11.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	11.1.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana
12	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	12.1	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	12.1.1	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Optimalisasi Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga
13	Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah	13.1	Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah	13.1.1	Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Sumber Pendapatan Asli Daerah

6.2. Kebijakan

Kebijakan pembangunan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun mulai 2023 sampai dengan 2026. Kebijakan Pembangunan ini merupakan kondisi yang ingin dicapai pada setiap tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tahunan merupakan tahapan pembangunan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam 4 (empat) tahun yang telah diuraikan sebelumnya. Penetapan kebijakan pembangunan ini menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan yang ditetapkan akan menjadi pedoman dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Kebijakan pembangunan tahunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 disajikan dalam Tabel 6.2 di bawah ini:

Tabel 6.2.
Kebijakan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Tahun	Kebijakan Pembangunan
2023	Penguatan Penegakan Syariat Islam, Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Ekonomi, Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kualitas dan Fungsionalisasi Infrastuktur
2024	Penguatan Sosial Ekonomi dan Budaya serta Menyukseskan Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak
2025	Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata serta Perikanan.
2026	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Layanan Investasi, Perdagangan dan Jasa, Pariwisata, Perikanan serta Fungsionalisasi Infrastruktur Sektor Strategis

6.3. Program Prioritas

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan RPJMN 2020-2024, Rencana Pembangunan Aceh (RPA) dan RPJP Kota Banda Aceh 2007-2027, ditetapkan program prioritas pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 sebagai instrumen untuk melaksanakan RPD Kota Banda Aceh. Program prioritas ini menjadi instrumen dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2023-2026 dan RKPD Tahunan Kota Banda Aceh.

Untuk mengetahui program prioritas pembangunan Kota Banda Aceh dan pagu indikatif Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 6.3 di bawah ini:

Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh dan Pagu Indikatif Tahun 2023-2026

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Mengoptimalkan Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Peningkatan Indeks Kota Syariah (IKS)	%	0	40		60		80		100		100		
1.1.1	Optimalnya Pemahaman dan Pengamalan Syariat Islam	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	76,77	78,27	10.899.606.657	79,77	8.931.991.288	81,27	10.055.035.463	82,77	10.117.386.642	82,77	40.004.020.051	
1.1.1.1	Program Syariat Islam Aceh	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	76,77	78,27	10.307.148.062	79,77	8.539.532.693	81,27	9.532.576.868	82,77	9.512.928.047	82,77	37.892.185.670	Dinas Syariat Islam
1.1.1.2	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase meningkatnya kapasitas dan peran ulama	%	100	100	592.458.595	100	392.458.595	100	522.458.595	100	604.458.595	100	2.111.834.381	Sekretariat MPU
2.1	Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Peningkatan Indeks Ketenteraman Umum	Indeks	0	100		100		100		100		100		
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Ketenteraman Umum	Indeks Ketenteraman Umum	Indeks	0	100	7.811.627.172	100	8.313.136.637	100	5.799.608.092	100	5.932.708.092	100	27.857.079.994	

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.1.1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	100	90	5.318.682.850	90	6.153.154.611	90	3.380.876.066	90	3.357.876.066	90	18.210.589.594	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2.1.1.2	Program Pembinanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	90.870.937	100	62.851.857	100	87.851.857	100	87.851.857	100	329.426.508	Kecamatan Kuta Alam
2.1.1.3	Program Pembinanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	93.856.052	100	68.856.052	100	93.856.052	100	93.856.052	100	350.424.208	Kecamatan Lueng Bata
2.1.1.4	Program Pembinanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	82.275.350	100	57.275.350	100	82.275.350	100	82.275.350	100	304.101.400	Kecamatan Ulee Kareng
2.1.1.5	Program Pembinanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	81.512.500	100	66.512.500	100	92.512.500	100	93.612.500	100	334.150.000	Kecamatan Meuraxa
2.1.1.6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	75.896.578	100	50.896.578	100	75.896.578	100	75.896.578		278.586.312	Kecamatan Kuta Raja

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.1.7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	75.000.000	100	37.500.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	262.500.000	Kecamatan Syiah Kuala
2.1.1.8	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	99.910.470	100	74.910.470	100	99.910.470	100	99.910.470	100	374.641.880	Kecamatan Baiturrahman
2.1.1.9	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	102.608.169	100	77.608.169	100	102.608.169	100	102.608.169	100	385.432.676	Kecamatan Banda Raya
2.1.1.10	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	103.821.050	100	78.571.050	100	103.821.050	100	103.821.050	100	390.034.200	Kecamatan Jaya Baru
2.1.1.11	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	85	29.624.548	85	65.000.000	85	45.000.000	85	50.000.000	85	189.624.548	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2.1.1.12	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100	85	1.120.996.908	85	1.080.000.000	85	1.100.000.000	85	1.200.000.000	85	4.500.996.908	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.1.1	Program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	85	88.389.080	85	90.000.000	85	100.000.000	85	110.000.000	85	388.389.080	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2.1.1.13	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	85	448.182.680	85	350.000.000	85	360.000.000	85	400.000.000	85	1.558.182.680	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3.1	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Peningkatan Nilai AKIP	%	0	40		60		80		100		100		
3.1.1	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,73	91,12	9.356.033.659	92,51	9.550.663.626	93,9	7.704.691.939	95,29	8.004.306.711	95,29	34.615.695.934	
3.1.1.1	Program hubungan industrial	Persentase pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan	%	25	30	450.000.000	35	375.000.000	40	400.000.000	45	400.000.000	45	1.625.000.000	Dinas Tenaga Kerja
3.1.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	%	100	100	34.452.792	100	35.452.792	100	35.570.815	100	38.452.792	100	143.929.191	Kecamatan Syiah Kuala

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	%	100	100	31.250.000	100	21.250.000	100	31.250.000	100	31.250.000	100	115.000.000	Kecamatan Kuta Raja
3.1.1.4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	%	100	100	71.397.582	100	50.397.582	100	71.397.582	100	71.397.582	100	264.590.328	Kecamatan Kuta Alam
3.1.1.5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	%	100	100	85.677.456	100	60.677.456	100	85.677.456	100	86.272.184	100	318.304.552	Kecamatan Lueng Bata
3.1.1.6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	%	100	100	50.911.735	100	29.911.735	100	50.911.735	100	50.911.735	100	182.646.940	Kecamatan Ulee Kareng
3.1.1.7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	%	100	100	52.778.158	100	52.778.158	100	52.778.158	100	52.778.158	100	211.112.632	Kecamatan Baiturrahman

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	%	100		42.900.325	100	36.900.325	100	42.900.325	100	42.900.325	100	165.601.300	Kecamatan Banda Raya
3.1.1.9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	%	100	100	78.169.800	100	63.544.800	100	73.694.800	100	73.859.800	100	289.269.200	Kecamatan Meuraxa
3.1.1.10	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	%	100	100	66.668.500	100	62.668.500	100	66.668.500	100	66.668.500	100	262.674.000	Kecamatan Jaya Baru
3.1.1.11	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	41.212.649	100	64.383.077	100	57.983.077	100	61.383.077	100	224.961.880	Kecamatan Syiah Kuala
3.1.1.12	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	57.252.829	100	42.252.829	100	57.252.829	100	57.252.829	100	214.011.316	Kecamatan Kuta Raja
3.1.1.13	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	58.196.834	100	33.696.834	100	58.196.834	100	58.196.834	100	208.287.336	Kecamatan Baiturrahman

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.14	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	75.097.181	100	75.097.181	100	75.097.181	100	83.550.234	100	308.841.777	Kecamatan Banda Raya
3.1.1.15	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	27.203.550	100	32.203.550	100	32.703.550	100	32.043.550	100	124.154.200	Kecamatan Meuraxa
3.1.1.16	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	30.175.000	100	25.425.000	100	30.175.000	100	30.175.000	100	115.950.000	Kecamatan Jaya Baru
3.1.1.17	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	31.753.500	100	31.753.500	100	31.753.500	100	31.753.500	100	127.014.000	Kecamatan Ulee Kareng
3.1.1.18	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	40.729.613	100	35.989.257	100	35.989.257	100	35.989.257	100	148.697.384	Kecamatan Kuta Alam
3.1.1.19	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	43.080.137	100	43.080.137	100	43.080.137	100	42.485.409	100	171.725.819	Kecamatan Lueng Bata
3.1.1.20	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	2.000.000	100	1.000.000	100	5.000.000	Kecamatan Syiah Kuala

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.21	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	10.000.000	100	2.500.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	32.500.000	Kecamatan Meuraxa
3.1.1.22	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	8.000.000	Kecamatan Baiturrahman
3.1.1.23	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	10.000.000	100	2.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	32.000.000	Kecamatan Banda Raya
3.1.1.24	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	2.400.000	100	2.400.000	100	2.400.000	100	2.400.000	100	9.600.000	Kecamatan Kuta Raja
3.1.1.25	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	8.000.000	Kecamatan Kuta Alam
3.1.1.26	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	2.000.010	100	2.000.010	100	2.000.010	100	2.000.010	100	8.000.040	Kecamatan Ulee Kareng

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.27	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	2.297.364	100	2.297.364	100	2.297.364	100	2.297.364	100	9.189.456	Kecamatan Lueng Bata
3.1.1.28	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	10.250.000	100	2.250.000	100	10.250.000	100	10.250.000	100	33.000.000	Kecamatan Jaya Baru
3.1.1.29	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	8.000.000	Kecamatan Syiah Kuala
3.1.1.30	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	8.000.000	Kecamatan Kuta Raja
3.1.1.31	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	3.000.000	100	2.500.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	11.500.000	Kecamatan Baiturrahman
3.1.1.32	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	10.000.000	100	2.500.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	32.500.000	Kecamatan Meuraxa
3.1.1.33	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	10.000.000	100	2.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	32.000.000	Kecamatan Banda Raya

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.34	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	2.000.000	100	1.900.000	100	1.900.000	100	1.900.000	100	7.700.000	Kecamatan Kuta Alam
3.1.1.35	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	2.000.010	100	2.000.010	100	2.000.010	100	2.000.010	100	8.000.040	Kecamatan Ulee Kareng
3.1.1.36	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	2.630.000	100	2.630.000	100	2.630.000	100	2.630.000	100	10.520.000	Kecamatan Lueng Bata
3.1.1.37	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	10.250.000	100	2.250.000	100	10.250.000	100	10.250.000	100	33.000.000	Kecamatan Jaya Baru
3.1.1.38	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pengunjung MPP	%	100	100	157.600.000	100	110.100.000	100	157.600.000	100	157.600.000	100	582.900.000	DPMPTSP
3.1.1.39	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	100	100	73.399.743	100	40.000.000	100	80.000.000	100	70.000.000	100	263.399.743	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.1.1.40	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	110.860.717	100	100.000.000	100	130.000.000	100	180.000.000	100	520.860.717	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.41	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan	%	0	100	67.177.150	100	30.000.000	100	60.000.000	100	72.000.000	100	229.177.150	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.1.1.42	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	61.407.361	100	30.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	221.407.361	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.1.1.43	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan	%	87,5	100	1.491.381.015	100	462.881.015	100	529.351.015	100	541.151.015	100	3.024.764.060	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.1.1.44	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	%	100	100	8.850.305	100	8.850.305	100	35.850.305	100	35.850.305	100	89.401.220	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.1.1.45	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Dan Data Kepegawaian Asn	%	100	100	2.621.031.812	100	2.523.171.000	100	2.613.121.000	100	2.691.121.000	100	10.448.444.812	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.1.1.46	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi Asn	%	40	100	804.654.907	100	657.100.000	100	697.150.000	100	747.150.000	100	2.906.054.907	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.1.1.47	Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	%	100	100	89.744.076	100	57.912.263	100	57.912.263	100	91.744.076	100	297.312.678	DAMKAR

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.1.48	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	2.416.191.548	100	4.320.958.946	100	1.862.899.236	100	1.913.642.165	100	10.513.691.895	SATPOL PP & WH
3.1.2		Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	BB	190.673.792.070	BB	189.116.404.493	BB	189.747.579.053	A	190.667.286.002	A	757.896.859.892	
3.1.2.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang diselenggarakan secara optimal	%	100	100	1.418.414.207	100	1.418.414.207	100	1.418.414.207	100	1.418.414.207	100	5.673.656.828	Inspektorat
3.1.2.2	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menerapkan SPIP secara memadai minimal level 3 dari skala 5	%	100	100	22.283.750	100	22.283.750	100	22.283.750	100	22.283.750	100	89.135.000	Inspektorat
3.1.2.3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	3.505.634.841	100	3.505.634.841	100	3.505.634.841	100	3.921.634.841	100	14.438.539.364	Sekretariat Daerah
3.1.2.4	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	3.083.473.984	100	2.883.473.984	100	2.883.473.984	100	3.083.473.984	100	11.933.895.936	Sekretariat Daerah

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.2.5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	5.685.855.461	100	5.835.476.334	100	5.835.476.334	100	5.835.476.334	100	23.192.284.463	Sekretariat DPRK
3.1.2.6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kegiatan Pembangunan Daerah yang terlaksana sesuai dengan Dokumen Perencanaan	%	100	100	2.459.406.087	100	2.529.664.660	100	2.530.166.799	100	2.530.166.799	100	10.049.404.345	BAPPEDA
3.1.2.7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	845.999.420	100	845.999.420	100	845.999.420	100	845.999.420	100	3.383.997.680	BAPPEDA
3.1.2.8	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peresentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	%	100	100	1.796.877.525	100	1.381.385.105	100	1.791.081.525	100	1.791.081.525	100	6.760.425.680	BAPPEDA
3.1.2.9	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertibnya pengelolaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	%	100	100	147.453.239.515	100	147.114.018.348	100	147.328.522.860	100	147.379.380.215	100	586.966.959.212	BPKK

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.2.10	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertibnya pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan perundang-undangan	%	100	100	2.988.286.737	100	2.988.286.737	100	2.988.286.737	100	2.988.286.737	100	11.953.146.948	BPKK
3.1.2.11	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip	%	100	100	138.179.200	100	138.179.200	100	161.179.200	100	161.179.200	100	598.716.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.1.2.12	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	0	100	47.251.800	100	47.251.800	100	64.851.800	100	64.851.800	100	224.207.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.1.2.13	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip yang dikeluarkan	%	0	100	14.569.000	100	14.569.000	100	18.799.000	100	18.799.000	100	66.736.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.1.2.14	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase terlaksananya diseminasi informasi kepada masyarakat	%	100	100	1.007.390.603	100	922.263.021	100	924.095.502	100	965.933.480	100	3.819.682.606	Diskominfotik
3.1.2.15	Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan infrstruktur dan Aplikasi informatika	%	100	100	505.549.393	100	457.199.912	100	457.199.912	100	467.199.912	100	1.887.149.129	Diskominfotik

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.2.16	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	Persentase penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	%	100	100	18.127.000	100	7.076.730	100	7.076.730	100	7.076.730	100	39.357.190	Diskominfotik
3.1.2.17	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database Statistik Sektoral Daerah	%	100	100	175.002.770	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	525.002.770	Diskominfotik
3.1.2.18	Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	%	100	100	19.508.250.777	100	18.905.227.444	100	18.865.036.452	100	19.016.048.068	100	76.294.562.741	SATPOL PP & WH
4.1	Mengoptimalkan kualitas pendidikan	Peningkatan Indeks Kualitas Pendidikan	%	0	40		60		80		100		100		
4.1.1	Optimalnya Kualitas Pendidikan	Indeks Kualitas Pendidikan	Indeks	82,64	90,08	81.735.142.104	92,73	80.244.366.796	95,38	80.629.204.335	96,97	80.906.347.055	96,97	323.515.060.290	
4.1.1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	%	66,2	70,00	76.830.392.051	74,00	75.439.977.022	79,00	75.556.080.022	84,00	75.627.462.001	84	303.453.911.096	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4.1.1.2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	0	100,00	31.000.000	100,00	110.000.000	100,00	130.000.000	100,00	140.000.000	100	411.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.1.3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi pendidik	%	39,86	94,86	27.748.000	99,86	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	70.000.000	100	197.748.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4.1.1.4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persetase peningkatan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan milik masyarakat	%	75,25	77,68	35.650.000	79,42	70.000.000	80,47	80.000.000	82,21	100.000.000	82,21	285.650.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4.1.1.5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah yang melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra	%	0	40,65	2.000.000	60,98	50.000.000	73,98	50.000.000	89,43	70.000.000	89,43	172.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
4.1.1.6	Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	%	68,42%	76,32%	4.621.094.344	84,21%	4.374.389.774	92,11%	4.513.124.313	100,00%	4.636.885.054	100	18.145.493.485	Dinas Pendidikan Dayah
4.1.1.7	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait pengembangan mutu pendidikan Aceh	%	9,42	100	187.257.709	100	150.000.000	100	250.000.000	100	262.000.000	100	849.257.709	Sekretariat MPD
5.1	Mengoptimalkan Kualitas Kesehatan	Peningkatan Indeks Kualitas Kesehatan	%	0	40		60		80		100		100		
5.1.1	Optimalnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kualitas Kesehatan	Indeks	85,451	94,715	142.521.965.551	94,716	142.500.334.958	94,717	145.162.811.242	94,718	147.937.354.425	94,718	578.122.466.175	

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	79,20	90	40.297.140.669	90	35.759.110.856	90	36.520.052.012	90	37.346.713.849	90	149.923.017.386	Dinas Kesehatan
5.1.1.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	100	100	96.696.461.030	100	101.415.584.102	100	103.277.119.230	100	105.185.000.576	100	406.574.164.937	RSUD Meuraxa
5.1.1.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	95	95	841.438.214	95	760.000.000	95	770.000.000	95	780.000.000	95	3.151.438.214	Dinas Kesehatan
5.1.1.4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	%	85	84	285.194.138	84	310.000.000	84	320.000.000	84	330.000.000	84	1.245.194.138	Dinas Kesehatan
5.1.1.5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	95	100	582.562.484	100	470.000.000	100	490.000.000	100	510.000.000	100	2.052.562.484	Dinas Kesehatan
5.1.1.6	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pengendalian Penduduk	%	100	100	55.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	190.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.1.7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	73	100	3.710.790.000	100	3.710.790.000	100	3.710.790.000	100	3.710.790.000	100	14.843.160.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
5.1.1.8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	0	100	53.379.016	100	29.850.000	100	29.850.000	100	29.850.000	100	142.929.016	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
6.1	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	%	0	40		60		80		100		100		
6.1.1	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,56	4	37.991.173.203	4,4	32.504.673.703	4,8	32.825.373.703	5,2	32.959.173.203	5,2	136.280.393.812	
6.1.1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	75	75	6.000.000	80	6.000.000	90	6.000.000	100	6.000.000	100	24.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	80	80	23.000.000	85	23.000.000	95	23.000.000	100	23.000.000	100	92.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
6.1.3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%	80	80	42.000.000	85	42.000.000	95	42.000.000	100	42.000.000	100	168.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
6.1.4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Penidikan dan Latihan Perkoperasian	%	80	80	411.700.000	85	411.700.000	90	411.700.000	95	411.700.000	95	1.646.800.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
6.1.5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	%	80	80	6.000.000	90	6.000.000	95	6.000.000	100	6.000.000	100	24.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
6.1.6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	%	80	80	37.000.000	90	37.000.000	95	37.000.000	100	37.000.000	100	148.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.7	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM	%	80	80	30.000.000	90	30.000.000	95	30.000.000	100	30.000.000	100	120.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
6.1.8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	**Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industri kecil/menengah**	%	100	100	11.302.022.000	100	11.402.022.000	100	11.337.022.000	100	11.452.022.000	100	45.493.088.000	Dinas Tenaga Kerja
6.1.9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	**Persentase industri yang mendapatkan izin usaha Industri Kabupaten/Kota**	%	100	100	55.000.000	100	30.000.000	100	65.000.000	100	30.000.000	100	180.000.000	Dinas Tenaga Kerja
6.1.10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**Persentase Jumlah Penataan IKM**	%	100	100	120.000.000	100	45.000.000	100	75.000.000	100	45.000.000	100	285.000.000	Dinas Tenaga Kerja
6.1.11	Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%	80	80	3.000.000	90	3.000.000	95	3.000.000	100	3.000.000	100	12.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
6.1.12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase meningkatnya sarana distribusi perdagangan	%	80	80	16.429.097.561	90	11.429.097.561	95	11.429.097.561	100	11.429.097.561	100	50.716.390.244	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
6.1.13	Program Stabilisisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Peningkatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	80	80	737.000.000	90	587.000.000	95	637.000.000	100	687.000.000	100	2.648.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.14	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekspor	%	80	80	6.000.000	90	6.000.000	95	6.000.000	100	6.000.000	100	24.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
6.1.15	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	%	80	80	41.500.000	90	41.500.000	95	41.500.000	100	41.500.000	100	166.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
6.1.16	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	%	80	80	3.500.000	90	3.500.000	95	3.500.000	100	3.500.000	100	14.000.000	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
6.1.17	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penenaman Modal	%	0	100	37.000.000	100	27.000.000	100	37.000.000	100	37.000.000	100	138.000.000	DPMPTSP
6.1.18	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	0	100	48.123.000	100	37.623.000	100	48.123.000	100	48.123.000	100	181.992.000	DPMPTSP
6.1.19	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	0	100	130.118.164	100	100.118.164	100	130.118.164	100	130.118.164	100	490.472.656	DPMPTSP
6.1.20	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	%	0	100	433.394.000	100	433.394.000	100	433.394.000	100	433.394.000	100	1.733.576.000	DPMPTSP
6.1.21	Program Penataan Desa	**Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Gampong yang baik**	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	13.000.000	100	43.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.22	Program Peningkatan Kerjasama Desa	**Persentase Kerjasama antar gampong dan pihak ketiga yang terbentuk**	%	100	100	98.000.000	100	98.800.000	100	98.800.000	100	99.000.000	100	394.600.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
6.1.23	Program Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase gampong yang memiliki tata kelola pemerintahan gampong yang baik**	%	100	100	1.000.800.000	100	925.300.000	100	1.023.800.000	100	929.400.000	100	3.879.300.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
6.1.24	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaha Adat yang baik**	%	100	100	997.737.472	100	1.072.037.472	100	1.093.737.472	100	1.083.137.472	100	4.246.649.888	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong
6.1.25	Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Deversifikasi Jenis Pangan Baru	%	30	100	584.257.000	100	510.350.000	100	510.350.000	100	584.257.000	100	2.189.214.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
6.1.26	Program penanganan kerawanan pangan	Jumlah Gampong lokasi rawan pangan yang ditangani sesuai FSVA	%	0	100	50.800.000	100	50.800.000	100	50.800.000	100	50.800.000	100	203.200.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
6.1.27	Program pengawasan keamanan pangan	Pangan yang Memenuhi syarat	%	0	100	155.654.000	100	71.000.000	100	71.000.000	100	155.654.000	100	453.308.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
6.1.28	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pemamfaatan sarana pertanian	%	40	40	103.300.000	20	1.300.000	20	101.300.000	20	53.300.000	100	259.200.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.29	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian	%	30	30	3.417.711.506	20	3.467.711.506	30	3.517.711.506	20	3.517.711.506	100	13.920.846.024	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
6.1.30	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan Kesmavet	%	50	50	151.188.500	50	76.150.000	50	26.150.000	50	51.188.500	50	304.677.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
6.1.31	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulanagn Bencana Pertanian	%	50	50	900.000	50	900.000	50	900.000	50	900.000	50	3.600.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
6.1.32	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian	%	50	50	200.000	50	200.000	50	200.000	50	200.000	50	800.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
6.1.33	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Penyuluh Pertanian / Perkebunan	%	25	25	6.500.000	25	6.500.000	25	6.500.000	25	6.500.000	100	26.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
6.1.34	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase jumlah wilayah penangkapan	%	35	25	620.250.000	25	620.250.000	25	620.250.000	25	620.250.000	100	2.481.000.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
6.1.35	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	%	35	25	392.120.000	25	392.120.000	25	392.120.000	25	392.120.000	100	1.568.480.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
6.1.36	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Olahan Perikanan	%	25	25	500.300.000	25	500.300.000	25	500.300.000	25	500.300.000	100	2.001.200.000	Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan
6.2		Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	0	40		60		80		100		100		

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.2.1		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,94	8,15	450.000.000	7,8	375.000.000	7,45	400.000.000	7,1	400.000.000	7,1	1.625.000.000	
6.2.1.1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	0	1	60.000.000		-		-		-	1	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja
6.2.1.2	Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang bekerja	%	100	100	205.000.000	100	185.000.000	100	195.000.000	100	195.000.000	100	780.000.000	Dinas Tenaga Kerja
6.2.1.3	Program penempatan tenaga kerja	Persentase jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	35	40	185.000.000	45	190.000.000	50	205.000.000	55	205.000.000	55	785.000.000	Dinas Tenaga Kerja
6.3		Persentase Peningkatan Pemenuhan Layanan SPM Sosial	%	90	100		100		100		100		100		
6.3.1		Persentase Pemenuhan Layanan SPM Sosial	%	90	100	3.291.428.715	100	3.094.562.155	100	3.069.875.711	100	3.239.875.711	100	12.695.742.292	
6.3.1.1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	%	0	100	60.067.850	100	60.067.850	100	60.067.850	100	60.067.850	100	240.271.400	Dinas Sosial
6.3.1.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Peningkatan Rehabilitasi Sosial	%	75	100	1.103.373.915	100	1.088.373.915	100	1.103.373.915	100	1.103.373.915	100	4.398.495.660	Dinas Sosial
6.3.1.3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	%	81	100	1.958.882.560	100	1.777.016.000	100	1.737.329.556	100	1.907.329.556	100	7.380.557.672	Dinas Sosial

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.3.1.4	Program Penanganan Bencana	Persentase Peningkatan Penanganan Bencana	%	100	100	169.104.390	100	169.104.390	100	169.104.390	100	169.104.390	100	676.417.560	Dinas Sosial
7.1	Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Jiwa	251836	98164		100000		100000		100000		398164		
7.1.1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Jiwa	251836	350000	4.290.753.037	450000	4.090.753.037	550000	4.140.753.037	650000	4.240.753.037	650000	16.763.012.148	
7.1.1.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	90	90	2.420.767.665	90	2.420.767.665	90	2.570.767.665	90	2.610.767.665	90	10.023.070.660	Dinas Pariwisata
7.1.1.2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	%	90	90	1.084.845.000	90	1.009.845.000	90	989.845.000	90	999.845.000	90	4.084.380.000	Dinas Pariwisata
7.1.1.3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemamfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%	85	85	154.250.000	85	104.250.000	85	54.250.000	85	94.250.000	85	407.000.000	Dinas Pariwisata

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.1.1.4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	%	85	85	630.890.372	85	555.890.372	85	525.890.372	85	535.890.372	85	2.248.561.488	Dinas Pariwisata
8.1	Mengoptimalkan Upaya Pelestarian Budaya	Peningkatan Indeks Pelestarian Budaya Daerah	%	0	40		60		80		100		100		
8.1.1	Optimalnya Upaya Pelestarian Budaya	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	73,41	77,73	893.416.933	79,05	874.952.063	81,84	985.052.063	83,98	1.011.210.115	83,98	3.764.631.175	
8.1.1.1	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	0	43,50	250.350.768	45,50	250.350.768	46,50	250.350.768	48,50	250.350.768	48,50	1.001.403.072	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8.1.1.2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	0	62,00	28.564.870	64,00	70.000.000	67,00	80.000.000	69,00	90.000.000	69,00	268.564.870	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8.1.1.3	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	%	0	62,00	28.564.870	64,00	28.564.870	67,00	28.564.870	69,00	58.564.870	69,00	144.259.480	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8.1.1.4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	%	72,22	75,00	365.383.340	77,00	365.383.340	80,00	365.383.340	83,00	365.383.340	83,00	1.461.533.360	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
8.1.1.5	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan koleksi museum secara digital	%	0	14,12	600.000	29,94	700.000	46,89	800.000	65,54	24.958.052	65,54	27.058.052	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1.1.6	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait Pelestarian Adat Aceh	%	100	100	219.953.085	100	159.953.085	100	259.953.085	100	221.953.085	100	861.812.341	Sekretariat MAA
9.1	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Rata-Rata Capaian Layanan Infrastuktur Perkotaan	%	0	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		
9.1.1	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Tertatanya Kawasan Permukiman	Rata-rata Capaian Layanan Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	83,75	84,25	90.380.884.480	84,75	54.930.107.008	85,25	55.142.367.876	85,75	55.809.210.205	85,75	256.262.569.569	
9.1.1.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	%	91,27	92,07	19.593.484.999	93,77	4.717.529.000	93,47	4.717.529.000	94,17	4.767.529.000	94,17	33.796.071.999	Dinas PUPR
9.1.1.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	%	87,58	87,61	3.678.638.100	87,64	3.888.041.000	87,67	3.888.041.000	87,7	3.938.041.000	87,7	15.392.761.100	Dinas PUPR
9.1.1.3	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan sesuai Spesifikasi	%	93,12	95,75	21.215.118.100	95,95	20.916.630.781	96,15	20.816.630.781	96,35	20.916.630.781		83.865.010.443	Dinas PUPR

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.1.4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	%	100	100	6.723.460.298	100	6.723.460.298	100	6.723.460.298	100	6.723.460.298	100	26.893.841.192	Dinas Perhubungan
9.1.1.5	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	%	100	100	570.879.380	100	520.879.380	100	520.879.380	100	570.879.380	100	2.183.517.520	Dinas Perkim
9.1.1.6	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman kumuh	%	100	100	540.032.013	100	490.032.013	100	490.032.013	100	540.032.013	100	2.060.128.052	Dinas Perkim
9.1.1.7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman Kumuh	%	100	100	4.999.846	100	4.999.846	100	4.999.846	100	4.999.846	100	19.999.384	Dinas Perkim
9.1.1.8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	%	100	100	859.297.420	100	861.484.906	100	861.484.906	100	865.879.585	100	3.448.146.817	Dinas Perkim
9.1.1.9	Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	100	8.075.240	100	8.075.240	100	8.075.240	100	8.075.240	100	32.300.960	Dinas Perkim
9.1.1.10	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan Strategis Yang Tertata	%	30	31	13.004.449.253	31,5	275.000.000	32	375.000.000	32,5	475.000.000	32,5	14.129.449.253	Dinas PUPR
9.1.1.11	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Meningkatnya Penataan Bangunan	%	81,07	84,07	14.614.406.266	84,57	7.337.119.844	85,07	7.399.380.712	85,57	7.641.828.362	85,57	36.992.735.184	Dinas PUPR

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.1.12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Meningkatnya Pengembangan jasa Konstruksi	%	-	56	81.189.676	56,5	150.000.000	57	150.000.000	57,5	150.000.000	57,5	531.189.676	Dinas PUPR
9.1.1.13	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertatanya Ruang yang Sesuai RTRW/RRTR	%	74,01	81,37	899.999.189	81,67	650.000.000	81,97	800.000.000	82,27	820.000.000	84,27	3.169.999.189	Dinas PUPR
9.1.1.14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang Dibangun/Dipelihara	%	82	82,03	8.278.427.728	82,05	8.057.974.700	82,07	8.057.974.700	82,09	8.057.974.700	82,09	32.452.351.828	Dinas PUPR
9.1.1.15	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Cakupan Luas Area Pengendalian Banjir	%	80	44,09	308.426.972	44,07	328.880.000	44,05	328.880.000	44,03	328.880.000	44,03	1.295.066.972	Dinas PUPR
10.1	Mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	0	6,30		3,36		3,37		3,37		3,37		
10.1.1	Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	63,05	69,35	1.456.822.017	72,71	1.481.800.000	76,08	1.481.800.000	79,45	1.481.800.000	79,45	5.902.222.017	

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.1.1.1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	%	95,3	100	248.401.440	100	305.000.000	100	305.000.000	100	305.000.000	100	1.163.401.440	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
10.1.1.2	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	%	0	100	54.480.330	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	144.480.330	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
10.1.1.3	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan	%	100	100	245.740.395	100	275.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	1.070.740.395	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
10.1.1.4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	100	78.705.852	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	348.705.852	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
10.1.1.5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	69,3	100	290.000.000	100	280.000.000	100	280.000.000	100	280.000.000	100	1.130.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.1.1.6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	%	100	100	539.494.000	100	501.800.000	100	501.800.000	100	501.800.000	100	2.044.894.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
11.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	0	5,08		2,55		2,54		2,54		2,54		
11.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tata Kelola RTH, dan Mitigasi Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	57,29	62,37	8.474.929.254	64,92	7.920.565.354	67,46	8.120.565.354	70,00	8.220.565.354	70	32.736.625.316	
11.1.1.1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	%	97.78	97,5	8.040.565.354	97,75	7.740.565.354	98	7.940.565.354	98,25	8.040.565.354	98,25	31.762.261.416	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
11.1.1.2	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	%	90	91	434.363.900	92	180.000.000	93	180.000.000	94	180.000.000	94	974.363.900	Dinas PUPR
11.2		Peningkatan Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota	%	0	0,04		0,00		0,01		0,01		0,01		

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.1		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota	%	14,33	14,365	1.680.520.938	14,37	1.480.520.938	14,375	1.680.520.938	14,38	1.680.520.938	14,38	6.522.083.752	
11.2.1.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Persentase Luasan RTH	%	14,33	14.365	363.637.319	14.370	413.637.319	14.375	463.637.319	14.380	763.637.319	14.380	2.004.549.276	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
11.2.1.2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	92	100	528.258.928	100	478.258.928	100	628.258.928	100	428.258.928	100	2.063.035.712	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
11.2.1.3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	%	0	100	60.000.000	100	10.000.000	100	110.000.000	100	10.000.000	100	190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
11.2.1.4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyusunan Dokumen RPPLH	%	0	100	225.112.528	100	225.112.528	100	125.112.528	100	125.112.528	100	700.450.112	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
11.2.1.5	Program Pembinaaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelanggaran Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan/PPLH yang diterbitkan	%	0	18	185.889.800	16	135.889.800	14	135.889.800	12	135.889.800	12	593.559.200	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.1.6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	%	0	100	4.999.920	100	4.999.920	100	4.999.920	100	4.999.920	100	19.999.680	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
11.2.1.7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberi Diklat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	0	65	206.903.763	75	106.903.763	85	106.903.763	100	106.903.763	100	527.615.052	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
11.2.1.8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	0	100	77.317.500	100	77.317.500	100	77.317.500	100	77.317.500	100	309.270.000	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
11.2.1.9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	80,31	100	28.401.180	100	28.401.180	100	28.401.180	100	28.401.180	100	113.604.720	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota
11.3		Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	0	10		5		5		5		5		
11.3.1		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Kelas Risiko (Skor)	Sedang (117,02)	Sedang (107,02)	288.187.476	Sedang (102,02)	92.400.000	Sedang (97,02)	92.400.000	Sedang (92,02)	97.400.000	Sedang (92,02)	570.387.476	

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.3.1.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan dan Penanganan Bencana	%	100	100	288.187.476	100	92.400.000	100	92.400.000	100	97.400.000	100	570.387.476	BPBD
1															
12.1	Mengoptimalkan Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Peningkatan Indeks Pemberdayaan Pemuda Dan Pembinaan Olahraga	Indeks	0	2,85		1,43		1,43		1,73		1,73		
12.1.1	Optimalnya Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Indeks Pemberdayaan Pemuda dan Pembinaan Olahraga	Indeks	19,47	22,32	3.324.512.819	23,75	3.658.353.152	25,18	3.188.353.152	26,91	4.242.800.000	26,91	14.414.019.123	
12.1.1.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	100	100	428.315.661	100	425.000.000	100	425.000.000	100	495.000.000	100	1.773.315.661	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
12.1.1.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Daya saing Keolahragaan	%	95	95	2.494.797.158	95	2.831.953.152	95	2.361.953.152	95	3.346.400.000	95	11.035.103.462	Dinas Pemuda Dan Olah Raga
12.1.1.3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	100	100	401.400.000	100	401.400.000	100	401.400.000	100	401.400.000	100	1.605.600.000	Dinas Pemuda Dan Olah Raga

KODE	Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir RPD		OPD Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.1	Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	-1.63	1.98		1.98		1.98		1.98		1.98		
13.1.1	Meningkatnya Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	-1.63	1.98	23.995.868.149	1.98	23.895.868.149	1.98	23.995.868.149	1.98	23.995.868.149	1.98	95.883.472.596	
13.1.1.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	42.40	40.07	1.989.648.149	40.12	1.989.648.149	40.16	1.989.648.149	40.20	1.989.648.149	100	7.958.592.596	BPKK
13.1.1.2	Program Baitul Mal	Persentase Pelaksanaan Baitul Mal	%	100	100	22.006.220.000	100	21.906.220.000	100	22.006.220.000	100	22.006.220.000	100	87.924.880.000	Sek. Baitul Mal

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Kerangka pendanaan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 memberikan gambaran tentang kapasitas riil keuangan daerah dan proyeksi-proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan.

Untuk mengetahui kerangka pendanaan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Kode			Kapasitas Rill/ Belanja	Proyeksi (Tahun)			
				2023	2024	2025	2026
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			Kapasitas Rill Keuangan	1.303.088.344.063	1.251.166.816.349	1.258.526.426.431	1.266.048.361.290
5			BELANJA DAERAH	1.303.088.344.063	1.251.166.816.349	1.258.526.426.431	1.266.048.361.290
5	1		Belanja Operasi	**1.057.381.893.080**	**1.057.413.393.080**	**1.055.451.193.080**	**1.055.496.553.080**
5	1	01	Belanja Pegawai	485.901.759.396	485.901.759.396	485.901.759.396	485.901.759.396
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	444.045.268.722	444.045.268.722	444.045.268.722	444.045.268.722
5	1	03	Belanja Bunga	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000
5	1	04	Belanja Subsidi	157.500.000	189.000.000	226.800.000	272.160.000
5	1	05	Belanja Hibah	122.024.948.750	122.024.948.750	120.024.948.750	120.024.948.750
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	1.852.416.212	1.852.416.212	1.852.416.212	1.852.416.212
5	2		Belanja Modal	108.856.124.088	56.841.596.078	66.100.860.356	73.513.826.133
5	3		Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
5	4		Belanja Transfer	135.350.326.895	135.411.827.193	135.474.372.996	135.537.982.077

Sumber: BPKK Banda Aceh, 2022

7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Berdasarkan kerangka pendanaan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya disusun program prioritas Kota Banda Aceh berdasarkan bidang urusan dan organisasi perangkat daerah selaku penanggung jawab terhadap tercapainya program, indikator, dan target kinerja outcome. Untuk mengetahui indikasi rencana program prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut ini:

Tabel 7.2
Indikasi Rencanan Program Prioritas Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					TOTAL						1.303.088.344.062			1.251.166.816.349			1.258.526.426.430			1.266.048.361.290			5.077.270.644.299	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**681.764.782.704**			**644.748.707.944**			**645.461.532.549**			**649.698.814.549**			**2.619.936.949.840**	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**312.463.102.655**			**310.918.298.214**			**311.603.136.368**			**311.597.278.313**			**1.246.581.815.549**	
1	**1**				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**						**301.731.293.340**			**300.576.193.469**			**300.722.297.084**			**300.863.678.288**			**1.203.893.462.180**	
1	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	224.804.503.289	100	%	224.856.216.447	100	%	224.856.217.062	100	%	224.856.216.287	100	%	899.373.153.084	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi	66,2	%	70	%	76.830.392.051	74	%	75.439.977.022	79	%	75.556.080.022	84	%	75.627.462.001	84	%	303.453.911.096	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	3			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	%	33,3	%	31.000.000	33,3	%	110.000.000	33,3	%	130.000.000	100	%	140.000.000	100	%	411.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	4			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4 dan bersertifikasi pendidik	39,86	%	94,86	%	27.748.000	99,86	%	50.000.000	100	%	50.000.000	100	%	70.000.000	100	%	197.748.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	5			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persetase peningkatan penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan milik masyarakat	75,25	%	77,68	%	35.650.000	79,42	%	70.000.000	80,47	%	80.000.000	82,21	%	100.000.000	82,21	%	285.650.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	6			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase sekolah yang melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra	0	%	40,65	%	2.000.000	60,98	%	50.000.000	73,98	%	50.000.000	89,43	%	70.000.000	89,43	%	172.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
1	**1**				**DINAS PENDIDIKAN DAYAH**						**8.428.530.188**			**8.088.825.618**			**8.227.560.157**			**8.368.320.898**			**33.113.236.861**	
1	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	3.807.435.844	100	%	3.714.435.844	100	%	3.714.435.844	100	%	3.731.435.844	100	%	14.967.743.376	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
1	1	7			Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi	68,42	%	0,763158	%	4.621.094.344	0,842105	%	4.374.389.774	0,9211	%	4.513.124.313	1	%	4.636.885.054	100	%	18.145.493.485	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
1	**1**				**SEKRETARIAT MPD**						**2.303.279.127**			**2.253.279.127**			**2.653.279.127**			**2.365.279.127**			**9.575.116.508**	
1	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	2.116.021.418	100	%	2.103.279.127	100	%	2.403.279.127	100	%	2.103.279.127	100	%	8.725.858.799	SEKRETARIAT MPD
1	1	8			Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait pengembangan mutu	100	%	100	%	187.257.709	100	%	150.000.000	100	%	250.000.000	100	%	262.000.000	100	%	849.257.709	SEKRETARIAT MPD
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**214.593.922.491**			**214.277.550.395**			**216.940.026.680**			**219.714.569.861**			**865.526.069.427**	
1	**2**				**DINAS KESEHATAN**						**97.082.465.406**			**92.046.970.238**			**92.847.911.396**			**93.714.573.231**			**375.691.920.270**	
1	2	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	%	59,25	100	%	55.076.129.901	100	%	54.747.859.382	100	%	54.747.859.383	100	%	54.747.859.382	100	%	219.319.708.048	DINAS KESEHATAN
1	2	2			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	%	79,2	90	%	40.297.140.669	90	%	35.759.110.856	90	%	36.520.052.013	90	%	37.346.713.849	90	%	149.923.017.386	DINAS KESEHATAN
1	2	3			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	95	95	%	841.438.214	95	%	760.000.000	95	%	770.000.000	95	%	780.000.000	95	%	3.151.438.214	DINAS KESEHATAN
1	2	4			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	%	85	84	%	285.194.138	84	%	310.000.000	84	%	320.000.000	84	%	330.000.000	84	%	1.245.194.138	DINAS KESEHATAN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
1	2	5			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	%	95	100	%	582.562.484	100	%	470.000.000	100	%	490.000.000	100	%	510.000.000	100	%	2.052.562.484	DINAS KESEHATAN
1	**2**				**BLUD MEURAXA**				**100**	**%**	**117.511.457.085**	**100**	**%**	**122.230.580.157**	**100**	**%**	**124.092.115.284**	**100**	**%**	**125.999.996.630**			**489.834.149.156**	
1	2	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	20.814.996.055	100	%	20.814.996.055	100	%	20.814.996.055	100	%	20.814.996.055	100	%	83.259.984.219	BLUD MEURAXA
1	2	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	%	100	%	96.696.461.030	100	%	101.415.584.102	100	%	103.277.119.230	100	%	105.185.000.576	100	%	406.574.164.937	BLUD MEURAXA
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**97.126.577.734**			**61.519.247.960**			**61.731.508.828**			**62.293.956.478**			**282.671.291.000**	
1	**3**				**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**97.126.577.734**			**61.519.247.960**			**61.731.508.828**			**62.293.956.478**			**282.671.291.000**	
1	3	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	15.018.073.551	100	%	15.018.072.635	100	%	15.018.072.635	100	%	15.018.072.635	100	%	60.072.291.456	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Cakupan Luas Area Pengendalian Banjir	80	%	44,09	%	308.426.972	44,07	%	328.880.000	44,05	%	328.880.000	44,03	%	328.880.000	44,03	%	1.295.066.972	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	91,27	%	92,07	%	19.593.484.999	93,77	%	4.717.529.000	93,47	%	4.717.529.000	94,17	%	4.767.529.000	94,17	%	33.796.071.999	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	4			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	90	%	91	%	434.363.900	92	%	180.000.000	93	%	180.000.000	94	%	180.000.000	94	%	974.363.900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	5			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	87,58	%	87,61	%	3.678.638.100	87,64	%	3.888.041.000	87,67	%	3.888.041.000	87,7	%	3.938.041.000	87,7	%	15.392.761.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
1	3	6			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang Dibangun/Dipelihara	82	%	82,03	%	8.278.427.728	82,05	%	8.057.974.700	82,07	%	8.057.974.700	82,09	%	8.057.974.700	82,09	%	32.452.351.828	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Meningkatnya Penataan Bangunan	81,07	%	84,07	%	14.614.406.266	84,57	%	7.337.119.844	85,07	%	7.399.380.712	85,57	%	7.641.828.362	85,57	%	36.992.735.184	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	9			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Kawasan Strategis Yang Tertata	30	%	31	%	13.004.449.253	31,5	%	275.000.000	32	%	375.000.000	32,5	%	475.000.000	32,5	%	14.129.449.253	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kontruksi Jalan sesuai Spesifikasi	93,12	%	95,75	%	21.215.118.100	95,95	%	20.916.630.781	96,15	%	20.816.630.781	96,35	%	20.916.630.781		%	83.865.010.443	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	11			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Meningkatnya Pengembangan jasa Konstruksi	0	%	56	%	81.189.676	56,5	%	150.000.000	57	%	150.000.000	57,5	%	150.000.000	57,5	%	531.189.676	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertatanya Ruang yang Sesuai RTRW/RRTR	74,01	%	81,37	%	899.999.189	81,67	%	650.000.000	81,97	%	800.000.000	82,27	%	820.000.000	84,27	%	3.169.999.189	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**						**9.134.645.632**			**9.036.833.118**			**9.036.833.118**			**9.141.227.797**			**36.349.539.665**	
1	**4**				**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**9.134.645.632**			**9.036.833.118**			**9.036.833.118**			**9.141.227.797**			**36.349.539.665**	
1	4	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	7.151.361.733	100	%	7.151.361.733	100	%	7.151.361.733	100	%	7.151.361.733	100	%	28.605.446.932	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2			Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan pengembangan perumahan	100	%	100	%	570.879.380	100	%	520.879.380	100	%	520.879.380	100	%	570.879.380	100	%	2.183.517.520	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3			Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman kumuh	100	%	100	%	540.032.013	100	%	490.032.013	100	%	490.032.013	100	%	540.032.013	100	%	2.060.128.052	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
1	4	4			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Presentase Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman Kumuh	100	%	100	%	4.999.846	100	%	4.999.846	100	%	4.999.846	100	%	4.999.846	100	%	19.999.384	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	5			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100	%	100	%	859.297.420	100	%	861.484.906	100	%	861.484.906	100	%	865.879.585	100	%	3.448.146.817	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	6			Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	%	100	%	8.075.240	100	%	8.075.240	100	%	8.075.240	100	%	8.075.240	100	%	32.300.960	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	**5**				**URUSAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**38.619.791.493**			**39.370.035.558**			**36.523.284.856**			**37.125.039.401**			**149.901.263.402**	
1	**5**				**SATPOL PP DAN WH**						**21.924.442.325**			**23.226.186.390**			**20.727.935.688**			**20.929.690.233**			**86.808.254.636**	
1	5	1			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	2.416.191.548	100	%	4.320.958.946	100	%	1.862.899.236	100	%	1.913.642.165	100	%	10.513.691.895	SATPOL PP DAN WH
1	5	2			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	19.508.250.777	100	%	18.905.227.444	100	%	18.865.036.452	100	%	19.016.048.068	100	%	76.294.562.741	SATPOL PP DAN WH
1	**5**				**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**						**7.704.324.545**			**7.252.824.545**			**6.904.324.545**			**7.204.324.545**			**20.885.983.964**	
1	5	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	7.416.137.069	100	%	7.160.424.545	100	%	6.811.924.545	100	%	7.106.924.545	100	%	28.495.410.704	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan dan Penanganan Bencana	100	%	100	%	288.187.476	100	%	92.400.000	100	%	92.400.000	100	%	97.400.000	100	%	570.387.476	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
1	**5**				**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**						**8.991.024.623**			**8.891.024.623**			**8.891.024.623**			**8.991.024.623**			**42.207.024.802**	
1	5	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	8.901.280.547	100	%	8.833.112.360	100	%	8.833.112.360	100	%	8.899.280.547	100	%	35.466.785.814	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	5	4			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NON Kebakaran	100	%	100	%	89.744.076	100	%	57.912.263	100	%	57.912.263	100	%	91.744.076	100	%	297.312.678	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**9.826.742.699**			**9.626.742.699**			**9.626.742.699**			**9.826.742.699**			**38.906.970.797**	
1	**6**				**DINAS SOSIAL**						**9.826.742.699**			**9.626.742.699**			**9.626.742.699**			**9.826.742.699**			**38.906.970.797**	
1	6	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	98	%	100	%	6.535.313.984	100	%	6.532.180.544	100	%	6.556.866.988	100	%	6.586.866.988	100	%	26.211.228.505	DINAS SOSIAL
1	6	2			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	0	%	100	%	60.067.850	100	%	60.067.850	100	%	60.067.850	100	%	60.067.850	100	%	240.271.400	DINAS SOSIAL
1	6	4			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Peningkatan Rehabilitasi Sosial	75	%	100	%	1.103.373.915	100	%	1.088.373.915	100	%	1.103.373.915	100	%	1.103.373.915	100	%	4.398.495.660	DINAS SOSIAL
1	6	5			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	81	%	100	%	1.958.882.560	100	%	1.777.016.000	100	%	1.737.329.556	100	%	1.907.329.556	100	%	7.380.557.672	DINAS SOSIAL
1	6	6			Program Penanganan Bencana	Persentase Peningkatan Penanganan Bencana	100	%	100	%	169.104.390	100	%	169.104.390	100	%	169.104.390	100	%	169.104.390	100	%	676.417.560	DINAS SOSIAL
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**176.858.370.426**			**172.942.424.028**			**173.668.050.440**			**176.221.383.395**			**699.524.299.273**	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**6.458.306.000**			**6.208.306.000**			**6.358.306.000**			**6.358.306.000**			**25.383.224.000**	
2	**7**				**DINAS TENAGA KERJA**						**6.458.306.000**			**6.208.306.000**			**6.358.306.000**			**6.358.306.000**			**25.383.224.000**	
2	7	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	5.558.306.000	100	%	5.458.306.000	100	%	5.558.306.000	100	%	5.558.306.000	100	%	22.133.224.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	2			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	0	Dokumen	1	Dokumen	60.000.000			-			-			-	1	Dokumen	60.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	3			Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan yang bekerja	100	%	100	%	205.000.000	100	%	185.000.000	100	%	195.000.000	100	%	195.000.000	100	%	780.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	4			Program penempatan tenaga kerja	Persentase jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	35	%	40	%	185.000.000	45	%	190.000.000	50	%	205.000.000	55	%	205.000.000	55	%	785.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2	7	5			Program hubungan industrial	Persentase pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan	25	%	30	%	450.000.000	35	%	375.000.000	40	%	400.000.000	45	%	400.000.000	45	%	1.625.000.000	DINAS TENAGA KERJA
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**8.076.201.321**			**7.659.730.337**			**7.539.730.337**			**7.524.370.749**			**30.800.032.744**	
2	**8**				**DP3AP2KB**						**8.076.201.321**			**7.659.730.337**			**7.539.730.337**			**7.524.370.749**			**30.800.032.744**	
2	8	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	6.619.379.304	100	%	6.177.930.337	100	%	6.057.930.337	100	%	6.042.570.749	100	%	24.897.810.727	DP3AP2KB
2	8	2			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan	95,3	%	100	%	248.401.440	100	%	305.000.000	100	%	305.000.000	100	%	305.000.000	100	%	1.163.401.440	DP3AP2KB
2	8	3			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Perlindungan Perempuan	100	%	100	%	245.740.395	100	%	275.000.000	100	%	275.000.000	100	%	275.000.000	100	%	1.070.740.395	DP3AP2KB
2	8	4			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	100	%	100	%	78.705.852	100	%	90.000.000	100	%	90.000.000	100	%	90.000.000	100	%	348.705.852	DP3AP2KB

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
2	8	5			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	0	%	100	%	54.480.330	100	%	30.000.000	100	%	30.000.000	100	%	30.000.000	100	%	144.480.330	DP3AP2KB
2	8	6			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	69,3	%	100	%	290.000.000	100	%	280.000.000	100	%	280.000.000	100	%	280.000.000	100	%	1.130.000.000	DP3AP2KB
2	8	7			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	100	%	100	%	539.494.000	100	%	501.800.000	100	%	501.800.000	100	%	501.800.000	100	%	2.044.894.000	DP3AP2KB
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**15.317.556.159**			**15.144.594.659**			**15.144.594.659**			**15.317.556.159**			**60.924.301.636**	
2	**9**				**DP2KP**						**15.317.556.159**			**15.144.594.659**			**15.144.594.659**			**15.317.556.159**			**60.924.301.636**	
2	9	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	100	%	14.526.845.159	100	%	14.512.444.659	100	%	14.512.444.659	100	%	14.526.845.159	100	%	58.078.579.636	DP2KP
2	9	3			Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Deversifikasi Jenis Pangan Baru	30	%	100	%	584.257.000	100	%	510.350.000	100	%	510.350.000	100	%	584.257.000	100	%	2.189.214.000	DP2KP
2	9	4			Program penanganan kerawanan pangan	Jumlah Gampong lokasi rawan pangan yang ditangani sesuai FSVA	0	%	100	%	50.800.000	100	%	50.800.000	100	%	50.800.000	100	%	50.800.000	100	%	203.200.000	DP2KP
2	9	5			Program pengawasan keamanan pangan	Pangan yang Memenuhi syarat	0	%	100	%	155.654.000	100	%	71.000.000	100	%	71.000.000	100	%	155.654.000	100	%	453.308.000	DP2KP
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**58.856.803.783**			**57.756.803.783**			**58.156.803.783**			**58.856.803.783**			**233.627.215.132**	
2	**11**				**DLHK3**						**58.856.803.783**			**57.756.803.783**			**58.156.803.783**			**58.856.803.783**			**233.627.215.132**	
2	11	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	100	%	49.135.717.491	100	%	48.535.717.491	100	%	48.535.717.491	100	%	49.135.717.491	100	%	195.342.869.964	DLHK3
2	11	2			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyusunan Dokumen RPPLH	%	0	100	%	225.112.528	100	%	225.112.528	100	%	125.112.528	100	%	125.112.528	100	%	700.450.112	DLHK3

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
2	11	3			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	92	100	%	528.258.928	100	%	478.258.928	100	%	628.258.928	100	%	428.258.928	100	%	2.063.035.712	DLHK3
2	11	4			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	Persentase Luasan RTH	%	14,33	14,365	%	363.637.319	14,37	%	413.637.319	14,375	%	463.637.319	14,38	%	763.637.319	14,38	%	2.004.549.276	DLHK3
2	11	5			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	%	0	100	%	60.000.000	100	%	10.000.000	100	%	110.000.000	100	%	10.000.000	100	%	190.000.000	DLHK3
2	11	6			Program Pembinaaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelanggaran Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan/PPLH yang diterbitkan	%	0	18	%	185.889.800	16	%	135.889.800	14	%	135.889.800	12	%	135.889.800	12	%	593.559.200	DLHK3
2	11	7			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	%	0	100	%	4.999.920	100	%	4.999.920	100	%	4.999.920	100	%	4.999.920	100	%	19.999.680	DLHK3
2	11	8			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Diberi Diklat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	0	65	%	206.903.763	75	%	106.903.763	85	%	106.903.763	100	%	106.903.763	100	%	527.615.052	DLHK3
2	11	9			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	0	100	%	77.317.500	100	%	77.317.500	100	%	77.317.500	100	%	77.317.500	100	%	309.270.000	DLHK3
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	80,31	100	%	28.401.180	100	%	28.401.180	100	%	28.401.180	100	%	28.401.180	100	%	113.604.720	DLHK3

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	%	97.78	97,5	%	8.040.565.354	97,75	%	7.740.565.354	98	%	7.940.565.354	98,25	%	8.040.565.354	98,25	%	31.762.261.416	DLHK3
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**7.438.282.232**			**7.238.282.232**			**7.368.282.232**			**7.450.282.232**			**29.495.128.928**	
2	**12**				**DISDUKCAPIL**						**7.438.282.232**			**7.238.282.232**			**7.368.282.232**			**7.450.282.232**			**29.495.128.928**	
2	12	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	7.125.437.261	100	%	7.038.282.232	100	%	7.038.282.232	100	%	7.058.282.232	100	%	28.260.283.957	DISDUKCAPIL
2	12	2			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100	%	100	%	73.399.743	100	%	40.000.000	100	%	80.000.000	100	%	70.000.000	100	%	263.399.743	DISDUKCAPIL
2	12	3			Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	%	100	%	110.860.717	100	%	100.000.000	100	%	130.000.000	100	%	180.000.000	100	%	520.860.717	DISDUKCAPIL
2	12	4			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan dan Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan	0	%	100	%	67.177.150	100	%	30.000.000	100	%	60.000.000	100	%	72.000.000	100	%	229.177.150	DISDUKCAPIL
2	12	5			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	%	100	%	61.407.361	100	%	30.000.000	100	%	60.000.000	100	%	70.000.000	100	%	221.407.361	DISDUKCAPIL
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**						**7.292.977.345**			**7.142.977.345**			**7.242.977.345**			**7.242.977.345**			**28.921.909.380**	
2	**13**				**DPMG**						**7.292.977.345**			**7.142.977.345**			**7.242.977.345**			**7.242.977.345**			**28.921.909.380**	
2	13	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	5.186.439.873	100	%	5.036.839.873	100	%	5.016.639.873	100	%	5.118.439.873	100	%	20.358.359.492	DPMG
2	13	2			Program Penataan Desa	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Gampong yang baik	100	%	100	%	10.000.000	100	%	10.000.000	100	%	10.000.000	100	%	13.000.000	100	%	43.000.000	DPMG

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
2	13	3			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama antar gampong dan pihak ketiga yang terbentuk	100	%	100	%	98.000.000	100	%	98.800.000	100	%	98.800.000	100	%	99.000.000	100	%	394.600.000	DPMG
2	13	4			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase gampong yang memiliki tata kelola pemerintahan gampong yang baik	100	%	100	%	1.000.800.000	100	%	925.300.000	100	%	1.023.800.000	100	%	929.400.000	100	%	3.879.300.000	DPMG
2	13	5			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaha Adat yang baik	100	%	100	%	997.737.472	100	%	1.072.037.472	100	%	1.093.737.472	100	%	1.083.137.472	100	%	4.246.649.888	DPMG
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**3.819.169.016**			**3.785.640.000**			**3.785.640.000**			**3.785.640.000**			**15.010.160.000**	
2	**14**				**DP3AP2KB**						**3.819.169.016**			**3.785.640.000**			**3.785.640.000**			**3.785.640.000**			**15.176.089.016**	
2	14	2			Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pengendalian Penduduk	100	%	100	%	55.000.000	100	%	45.000.000	100	%	45.000.000	100	%	45.000.000	100	%	190.000.000	DP3AP2KB
2	14	3			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	75	%	100	%	3.710.790.000	100	%	3.710.790.000	100	%	3.710.790.000	100	%	3.710.790.000	100	%	14.843.160.000	DP3AP2KB
2	14	4			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	0	%	100	%	53.379.016	100	%	29.850.000	100	%	29.850.000	100	%	29.850.000	100	%	142.929.016	DP3AP2KB
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**22.457.562.977**			**22.171.215.949**			**22.184.909.880**			**22.498.644.893**			**89.312.333.699**	
2	**15**				**DINAS PERHUBUNGAN**						**22.457.562.977**			**22.171.215.949**			**22.184.909.880**			**22.498.644.893**			**89.312.333.699**	
2	15	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	15.734.102.679	100	%	15.447.755.651	100	%	15.461.449.582	100	%	15.775.184.595	100	%	62.418.492.507	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
2	15	2			Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	%	100	%	6.723.460.298	100	%	6.723.460.298	100	%	6.723.460.298	100	%	6.723.460.298			26.893.841.192	DINAS PERHUBUNGAN
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**9.827.528.745**			**9.815.408.785**			**9.817.241.266**			**9.869.079.244**			**39.329.258.040**	
2	**16**				**DISKOMINFOTIK**						**9.827.528.745**			**9.815.408.785**			**9.817.241.266**			**9.869.079.244**			**39.329.258.040**	
2	16	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	8.314.588.749	100	%	8.435.945.852	100	%	8.435.945.852	100	%	8.435.945.852	100	%	33.622.426.305	DISKOMINFOTIK
2	16	2			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase terlaksananya diseminasi informasi kepada masyarakat	100	%	100	%	1.007.390.603	100	%	922.263.021	100	%	924.095.502	100	%	965.933.480	100	%	3.819.682.606	DISKOMINFOTIK
2	16	3			Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan infrstruktur dan Aplikasi informatika	100	%	100	%	505.549.393	100	%	457.199.912	100	%	457.199.912	100	%	467.199.912	100	%	1.887.149.129	DISKOMINFOTIK
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**						**9.118.128.044**			**9.118.128.044**			**9.118.128.044**			**9.118.128.044**			**36.472.512.176**	
2	**17**				**DISKOP UKM DAN DAG**						**9.118.128.044**			**9.118.128.044**			**9.118.128.044**			**9.118.128.044**			**36.472.512.176**	
2	17	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	8.562.428.044	100	%	8.562.428.044	100	%	8.562.428.044	100	%	8.562.428.044	100	%	34.249.712.176	DISKOP UKM DAN DAG
2	17	2			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	75	%	75	%	6.000.000	80	%	6.000.000	90	%	6.000.000	100	%	6.000.000	100	%	24.000.000	DISKOP UKM DAN DAG
2	17	3			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	80	%	80	%	23.000.000	85	%	23.000.000	95	%	23.000.000	100	%	23.000.000	100	%	92.000.000	DISKOP UKM DAN DAG

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
2	17	4			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	80	%	80	%	42.000.000	85	%	42.000.000	95	%	42.000.000	100	%	42.000.000	100	%	168.000.000	DISKOP UKM DAN DAG
2	17	5			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Penidikan dan Latihan Perkoperasian	80	%	80	%	411.700.000	85	%	411.700.000	90	%	411.700.000	95	%	411.700.000	95	%	1.646.800.000	DISKOP UKM DAN DAG
2	17	6			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	80	%	80	%	6.000.000	90	%	6.000.000	95	%	6.000.000	100	%	6.000.000	100	%	24.000.000	DISKOP UKM DAN DAG
2	17	7			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	80	%	80	%	37.000.000	90	%	37.000.000	95	%	37.000.000	100	%	37.000.000	100	%	148.000.000	DISKOP UKM DAN DAG
2	17	8			Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Pengembangan UMKM	80	%	80	%	30.000.000	90	%	30.000.000	95	%	30.000.000	100	%	30.000.000	100	%	120.000.000	DISKOP UKM DAN DAG
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**8.864.341.476**			**8.714.341.476**			**8.864.341.476**			**8.864.341.476**			**35.307.365.904**	
2	**18**				**DPMPTSP**						**8.864.341.476**			**8.714.341.476**			**8.864.341.476**			**8.864.341.476**			**35.307.365.904**	
2	18	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	8.058.106.312	100	%	8.006.106.312	100	%	8.058.106.312	100	%	8.058.106.312	100	%	32.180.425.248	DPMPTSP
2	18	2			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penenaman Modal	0	%	100	%	37.000.000	100	%	27.000.000	100	%	37.000.000	100	%	37.000.000	100	%	138.000.000	DPMPTSP
2	18	3			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	0	%	100	%	48.123.000	100	%	37.623.000	100	%	48.123.000	100	%	48.123.000	100	%	181.992.000	DPMPTSP
2	18	4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	0	%	100	%	130.118.164	100	%	100.118.164	100	%	130.118.164	100	%	130.118.164	100	%	490.472.656	DPMPTSP
2	18	5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	0	%	100	%	433.394.000	100	%	433.394.000	100	%	433.394.000	100	%	433.394.000	100	%	1.733.576.000	DPMPTSP
2	18	6			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Pengunjung MPP	100	%	100	%	157.600.000	100	%	110.100.000	100	%	157.600.000	100	%	157.600.000	100	%	582.900.000	DPMPTSP

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**9.232.241.978**			**9.382.241.978**			**8.912.241.978**			**10.032.241.978**			**37.558.967.912**	
2	**19**				**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**						**9.232.241.978**			**9.382.241.978**			**8.912.241.978**			**10.032.241.978**			**37.558.967.912**	
2	19	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	5.907.729.159	100	%	5.723.888.826	100	%	5.723.888.826	100	%	5.789.441.978	100	%	23.144.948.789	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	2			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	%	100	%	428.315.661	100	%	425.000.000	100	%	425.000.000	100	%	495.000.000	100	%	1.773.315.661	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	3			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Daya saing Keolahragaan	95	%	95	%	2.494.797.158	95	%	2.831.953.152	95	%	2.361.953.152	95	%	3.346.400.000	95	%	11.035.103.462	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	19	4			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	%	100	%	401.400.000	100	%	401.400.000	100	%	401.400.000	100	%	401.400.000	100	%	1.605.600.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**175.002.770**			**100.000.000**			**100.000.000**			**150.000.000**			**525.002.770**	
2	**20**				**DISKOMINFOTIK**						**175.002.770**			**100.000.000**			**100.000.000**			**150.000.000**			**525.002.770**	
2	20	2			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database Statistik Sektoral Daerah	100	%	100	%	175.002.770	100	%	100.000.000	100	%	100.000.000	100	%	150.000.000	100	%	525.002.770	DISKOMINFOTIK
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**18.127.000**			**7.076.730**			**7.076.730**			**7.076.730**			**39.357.190**	
2	**21**				**DISKOMINFOTIK**						**18.127.000**			**7.076.730**			**7.076.730**			**7.076.730**			**39.357.190**	
2	21	2			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	Persentase penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	100	%	100	%	18.127.000	100	%	7.076.730	100	%	7.076.730	100	%	7.076.730	100	%	39.357.190	DISKOMINFOTIK
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.645.976.001**			**3.587.511.131**			**3.727.611.131**			**3.773.769.183**			**14.734.867.447**	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
2	**22**				**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**						**673.463.848**			**714.998.978**			**725.098.978**			**789.257.030**			**2.902.818.834**	
2	22	2			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	0	%	43,5	%	250.350.768	45,5	%	250.350.768	46,5	%	250.350.768	48,5	%	250.350.768	48,5	%	1.001.403.072	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	3			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	0	%	62	%	28.564.870	64	%	70.000.000	67	%	80.000.000	69	%	90.000.000	69	%	268.564.870	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	4			Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	0	%	62	%	28.564.870	64	%	28.564.870	67	%	28.564.870	69	%	58.564.870	69	%	144.259.480	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	5			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	72,22	%	75	%	365.383.340	77	%	365.383.340	80	%	365.383.340	83	%	365.383.340	83	%	1.461.533.360	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	6			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengelolaan koleksi museum secara digital	0	%	14,12	%	600.000	29,94	%	700.000	46,89	%	800.000	65,54	%	24.958.052	65,54	%	27.058.052	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	**22**				**SEKRETARIAT MAA**						**2.972.512.153**			**2.872.512.153**			**3.002.512.153**			**2.984.512.153**			**11.832.048.613**	
2	22	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	2.752.559.068	100	%	2.712.559.068	100	%	2.742.559.068	100	%	2.762.559.068	100	%	10.970.236.272	SEKRETARIAT MAA
2	22	7			Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Persentase kebijakan yang dihasilkan terkait Pelestarian Adat Aceh	100	%	100	%	219.953.085	100	%	159.953.085	100	%	259.953.085	100	%	221.953.085	100	%	861.812.341	SEKRETARIAT MAA
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**6.060.165.579**			**4.910.165.579**			**5.095.335.579**			**5.127.335.579**			**21.193.002.315**	
2	**23**				**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**						**6.060.165.579**			**4.910.165.579**			**5.095.335.579**			**5.127.335.579**			**21.193.002.315**	
2	23	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	96,66	%	100	%	4.559.934.259	100	%	4.438.434.259	100	%	4.530.134.259	100	%	4.550.334.259	100	%	18.078.837.035	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan	87,5	%	100	%	1.491.381.015	100	%	462.881.015	100	%	529.351.015	100	%	541.151.015	100	%	3.024.764.060	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	100	%	100	%	8.850.305	100	%	8.850.305	100	%	35.850.305	100	%	35.850.305	100	%	89.401.220	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**200.000.000**			**200.000.000**			**244.830.000**			**244.830.000**			**889.660.000**	
2	**24**				**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**						**200.000.000**			**200.000.000**			**244.830.000**			**244.830.000**			**889.660.000**	
2	24	2			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip	100	%	100	%	138.179.200	100	%	138.179.200	100	%	161.179.200	100	%	161.179.200	100	%	598.716.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	0	%	100	%	47.251.800	100	%	47.251.800	100	%	64.851.800	100	%	64.851.800	100	%	224.207.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3			Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip yang dikeluarkan	0	%	100	%	14.569.000	100	%	14.569.000	100	%	18.799.000	100	%	18.799.000	100	%	66.736.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**44.170.058.643**			**38.693.020.143**			**38.893.020.143**			**39.070.058.643**			**160.826.157.572**	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.512.670.000**			**1.512.670.000**			**1.512.670.000**			**1.512.670.000**			**6.050.680.000**	
3	**25**				**DP2KP**						**1.512.670.000**			**1.512.670.000**			**1.512.670.000**			**1.512.670.000**			**6.050.680.000**	
3	25	2			Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase jumlah wilayah penangkapan	35	%	25	%	620.250.000	25	%	620.250.000	25	%	620.250.000	25	%	620.250.000	100	%	2.481.000.000	DP2KP
3	25	4			Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	35	%	25	%	392.120.000	25	%	392.120.000	25	%	392.120.000	25	%	392.120.000	100	%	1.568.480.000	DP2KP
3	25	6			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Olahan Perikanan	25	%	25	%	500.300.000	25	%	500.300.000	25	%	500.300.000	25	%	500.300.000	100	%	2.001.200.000	DP2KP
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**10.280.469.076**			**10.080.469.076**			**10.130.469.076**			**10.230.469.076**			**40.721.876.304**	
3	**26**				**DINAS PARIWISATA**						**10.280.469.076**			**10.080.469.076**			**10.130.469.076**			**10.230.469.076**			**40.721.876.304**	
3	26	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	100	%	5.989.716.039	100	%	5.989.716.039	100	%	5.989.716.039	100	%	5.989.716.039	100	%	23.958.864.156	DINAS PARIWISATA

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
3	26	2			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	90	%	90	%	2.420.767.665	90	%	2.420.767.665	90	%	2.570.767.665	90	%	2.610.767.665	90	%	10.023.070.660	DINAS PARIWISATA
3	26	3			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	90	%	90	%	1.084.845.000	90	%	1.009.845.000	90	%	989.845.000	90	%	999.845.000	90	%	4.084.380.000	DINAS PARIWISATA
3	26	4			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemamfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	85	%	85	%	154.250.000	85	%	104.250.000	85	%	54.250.000	85	%	94.250.000	85	%	407.000.000	DINAS PARIWISATA
3	26	5			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	85	%	85	%	630.890.372	85	%	555.890.372	85	%	525.890.372	85	%	535.890.372	85	%	2.248.561.488	DINAS PARIWISATA
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**3.679.800.006**			**3.552.761.506**			**3.652.761.506**			**3.629.800.006**			**14.515.123.024**	
3	**27**				**DP2KP**						**3.679.800.006**			**3.552.761.506**			**3.652.761.506**			**3.629.800.006**			**14.515.123.024**	
3	27	2			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pemamfaatan sarana pertanian	40	%	40	%	103.300.000	20	%	1.300.000	20	%	101.300.000	20	%	53.300.000	100	%	259.200.000	DP2KP
3	27	3			Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana pertanian	30	%	30	%	3.417.711.506	20	%	3.467.711.506	30	%	3.517.711.506	20	%	3.517.711.506	100	%	13.920.846.024	DP2KP
3	27	4			Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan Kesmavet	50	%	50	%	151.188.500	50	%	76.150.000	50	%	26.150.000	50	%	51.188.500	50	%	304.677.000	DP2KP
3	27	5			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulanagn Bencana Pertanian	50	%	50	%	900.000	50	%	900.000	50	%	900.000	50	%	900.000	50	%	3.600.000	DP2KP
3	27	6			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian	50	%	50	%	200.000	50	%	200.000	50	%	200.000	50	%	200.000	50	%	800.000	DP2KP
3	27	7			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Penyuluh Pertanian / Perkebunan	25	%	25	%	6.500.000	25	%	6.500.000	25	%	6.500.000	25	%	6.500.000	100	%	26.000.000	DP2KP
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**17.220.097.561**			**12.070.097.561**			**12.120.097.561**			**12.170.097.561**			**53.580.390.244**	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
3	**30**				**DISKOP UKM DAN DAG**						**17.220.097.561**			**12.070.097.561**			**12.120.097.561**			**12.170.097.561**			**53.580.390.244**	
3	30	2			Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	80	%	80	%	3.000.000	90	%	3.000.000	95	%	3.000.000	100	%	3.000.000	100	%	12.000.000	DISKOP UKM DAN DAG
3	30	3			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase meningkatnya sarana distribusi perdagangan	80	%	80	%	16.429.097.561	90	%	11.429.097.561	95	%	11.429.097.561	100	%	11.429.097.561	100	%	50.716.390.244	DISKOP UKM DAN DAG
3	30	4			Program Stabilisisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Peningkatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	80	%	80	%	737.000.000	90	%	587.000.000	95	%	637.000.000	100	%	687.000.000	100	%	2.648.000.000	DISKOP UKM DAN DAG
3	30	5			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Pengembangan Ekspor	80	%	80	%	6.000.000	90	%	6.000.000	95	%	6.000.000	100	%	6.000.000	100	%	24.000.000	DISKOP UKM DAN DAG
3	30	6			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	80	%	80	%	41.500.000	90	%	41.500.000	95	%	41.500.000	100	%	41.500.000	100	%	166.000.000	DISKOP UKM DAN DAG
3	30	7			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	80	%	80	%	3.500.000	90	%	3.500.000	95	%	3.500.000	100	%	3.500.000	100	%	14.000.000	DISKOP UKM DAN DAG
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**11.477.022.000**			**11.477.022.000**			**11.477.022.000**			**11.527.022.000**			**45.958.088.000**	
3	**31**				**DINAS TENAGA KERJA**						**11.477.022.000**			**11.477.022.000**			**11.477.022.000**			**11.527.022.000**			**45.958.088.000**	
3	31	2			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industri kecil/menengah	100	%	100	%	11.302.022.000	100	%	11.402.022.000	100	%	11.337.022.000	100	%	11.452.022.000	100	%	45.493.088.000	DINAS TENAGA KERJA
3	31	3			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri yang mendapatkan izin usaha Industri Kabupaten/Kota	100	%	100	%	55.000.000	100	%	30.000.000	100	%	65.000.000	100	%	30.000.000	100	%	180.000.000	DINAS TENAGA KERJA
3	31	4			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Penataan IKM	100	%	100	%	120.000.000	100	%	45.000.000	100	%	75.000.000	100	%	45.000.000	100	%	285.000.000	DINAS TENAGA KERJA

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**100.710.657.753**			**98.410.657.753**			**100.510.657.753**			**99.910.657.753**			**399.542.631.012**	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**55.427.143.667**			**53.127.143.667**			**55.227.143.667**			**54.627.143.667**			**218.408.574.668**	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**55.427.143.667**			**53.127.143.667**			**55.227.143.667**			**54.627.143.667**			**218.408.574.668**	
4	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	48.838.034.842	100	%	46.738.034.842	100	%	48.838.034.842	100	%	47.622.034.842	100	%	192.036.139.368	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	100	%	3.505.634.841	100	%	3.505.634.841	100	%	3.505.634.841	100	%	3.921.634.841	100	%	14.438.539.364	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100	%	100	%	3.083.473.984	100	%	2.883.473.984	100	%	2.883.473.984	100	%	3.083.473.984	100	%	11.933.895.936	SEKRETARIAT DAERAH
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRK**						**45.283.514.086**			**45.283.514.086**			**45.283.514.086**			**45.283.514.086**			**181.134.056.344**	
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRK**						**45.283.514.086**			**45.283.514.086**			**45.283.514.086**			**45.283.514.086**			**181.134.056.344**	
4	2	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	39.597.658.625	100	%	39.448.037.752	100	%	39.448.037.752	100	%	39.448.037.752	100	%	157.941.771.881	SEKRETARIAT DPRK
4	2	2			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100	%	100	%	5.685.855.461	100	%	5.835.476.334	100	%	5.835.476.334	100	%	5.835.476.334	100	%	23.192.284.463	SEKRETARIAT DPRK
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**203.180.042.520**			**202.251.587.506**			**206.911.290.577**			**207.692.811.239**			**820.379.244.933**	
5	**1**				**PERENCANAAN**						**14.012.976.794**			**14.089.235.367**			**17.994.737.506**			**18.593.400.813**			**64.690.350.480**	
5	**1**				**BAPPEDA**						**14.012.976.794**			**14.089.235.367**			**17.994.737.506**			**18.593.400.813**			**64.690.350.480**	
5	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	10.707.571.287	100	%	10.713.571.287	100	%	14.618.571.287	100	%	15.217.234.594	100	%	51.256.948.455	BAPPEDA

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
5	1	2			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kegiatan Pembangunan Daerah yang terlaksana sesuai dengan Dokumen Perencanaan	100	%	100	%	2.459.406.087	100	%	2.529.664.660	100	%	2.530.166.799	100	%	2.530.166.799	100	%	10.049.404.345	BAPPEDA
5	1	3			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	100	%	845.999.420	100	%	845.999.420	100	%	845.999.420	100	%	845.999.420	100	%	3.383.997.680	BAPPEDA
5	**2**				**KEUANGAN**						**175.044.701.290**			**174.705.480.123**			**174.919.984.635**			**174.970.841.990**			**699.641.008.038**	
5	**2**				**BPKK**						**175.044.701.290**			**174.705.480.123**			**174.919.984.635**			**174.970.841.990**			**699.641.008.038**	
5	2	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	22.613.526.889	100	%	22.613.526.889	100	%	22.613.526.889	100	%	22.613.526.889	100	%	90.454.107.556	BPKK
5	2	2			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tertibnya pengelolaan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	100	%	100	%	147.453.239.515	100	%	147.114.018.348	100	%	147.328.522.860	100	%	147.379.380.215	100	%	589.275.160.938	BPKK
5	2	3			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertibnya pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan perundang-undangan	100	%	100	%	2.988.286.737	100	%	2.988.286.737	100	%	2.988.286.737	100	%	2.988.286.737	100	%	11.953.146.948	BPKK
5	2	4			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	100	%	100	%	1.989.648.149	100	%	1.989.648.149	100	%	1.989.648.149	100	%	1.989.648.149	100	%	7.958.592.596	BPKK
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**						**11.520.832.004**			**11.418.386.911**			**11.508.336.911**			**11.590.336.911**			**44.470.863.735**	
5	**3**				**BKPSDM**						**11.520.832.004**			**11.418.386.911**			**11.508.336.911**			**11.590.336.911**			**46.037.892.738**	
5	3	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	8.899.800.192	100	%	8.895.215.911	100	%	8.895.215.911	100	%	8.899.215.911	100	%	35.589.447.926	BKPSDM
5	3	2			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Dan Data Kepegawaian Asn	100	%	100	%	2.621.031.812	100	%	2.523.171.000	100	%	2.613.121.000	100	%	2.691.121.000	100	%	10.448.444.812	BKPSDM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**804.654.907**			**657.100.000**			**697.150.000**			**747.150.000**			**4.816.597.000**	
5	**4**				**BKPSDM**						**804.654.907**			**657.100.000**			**697.150.000**			**747.150.000**			**2.906.054.907**	
5	4	2			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi Asn	100	%	100	%	804.654.907	100	%	657.100.000	100	%	697.150.000	100	%	747.150.000	100	%	2.906.054.907	BKPSDM
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.796.877.525**			**1.381.385.105**			**1.791.081.525**			**1.791.081.525**			**6.760.425.680**	
5	**5**				**BAPPEDA**						**1.796.877.525**			**1.381.385.105**			**1.791.081.525**			**1.791.081.525**			**6.760.425.680**	
5	5	2			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peresentase hasil penelitian dan pengembangan daerah	100	%	100	%	1.796.877.525	100	%	1.381.385.105	100	%	1.791.081.525	100	%	1.791.081.525	100	%	6.760.425.680	BAPPEDA
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.390.298.728**			**10.390.298.728**			**10.390.298.728**			**10.390.298.728**			**41.561.194.912**	
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**						**10.390.298.728**			**10.390.298.728**			**10.390.298.728**			**10.390.298.728**			**41.561.194.912**	
6	**1**				**INSPEKTORAT**						**10.390.298.728**			**10.390.298.728**			**10.390.298.728**			**10.390.298.728**			**41.561.194.912**	
6	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	8.949.600.771	100	%	8.949.600.771	100	%	8.949.600.771	100	%	8.949.600.771	100	%	35.798.403.084	INSPEKTORAT
6	1	2			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang diselenggarakan secara optimal	100	%	100	%	1.418.414.207	100	%	1.418.414.207	100	%	1.418.414.207	100	%	1.418.414.207	100	%	5.673.656.828	INSPEKTORAT
6	1	3			Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menerapkan SPIP secara memadai minimal level 3 dari skala 5	100	%	100	%	22.283.750	100	%	22.283.750	100	%	22.283.750	100	%	22.283.750	100	%	89.135.000	INSPEKTORAT
7					**URUSAN WILAYAH KECAMATAN**						**29.251.416.167**			**28.811.416.167**			**29.231.316.167**			**29.250.206.167**			**116.544.354.667**	
7	**1**				**KECAMATAN**						**29.251.416.167**			**28.811.416.167**			**29.231.316.167**			**29.250.206.167**			**116.544.354.667**	
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	2.912.156.652	100	%	2.912.156.652	100	%	2.912.156.652	100	%	2.912.156.652	100	%	11.648.626.608	KEC. BAITURRAHMAN

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	%	100	%	52.778.158	100	%	52.778.158	100	%	52.778.158	100	%	52.778.158	100	%	211.112.632	KEC. BAITURRAHMAN
7	1	3			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100	%	100	%	58.196.834	100	%	33.696.834	100	%	58.196.834	100	%	58.196.834	100	%	208.287.336	KEC. BAITURRAHMAN
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	2.000.000	100	%	2.000.000	100	%	2.000.000	100	%	2.000.000	100	%	8.000.000	KEC. BAITURRAHMAN
7	1	5			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	3.000.000	100	%	2.500.000	100	%	3.000.000	100	%	3.000.000	100	%	11.500.000	KEC. BAITURRAHMAN
7	1	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	99.910.470	100	%	74.910.470	100	%	99.910.470	100	%	99.910.470	100	%	374.641.880	KEC. BAITURRAHMAN
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	3.005.357.258	100	%	3.005.357.258	100	%	3.005.357.258	100	%	2.996.904.205	100	%	12.012.975.979	KEC. BANDA RAYA
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	%	100	%	42.900.325	100	%	36.900.325	100	%	42.900.325	100	%	42.900.325	100	%	165.601.300	KEC. BANDA RAYA
7	1	3			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100	%	100	%	75.097.181	100	%	75.097.181	100	%	75.097.181	100	%	83.550.234	100	%	308.841.777	KEC. BANDA RAYA
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	10.000.000	100	%	2.000.000	100	%	10.000.000	100	%	10.000.000	100	%	32.000.000	KEC. BANDA RAYA
7	1	5			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	10.000.000	100	%	2.000.000	100	%	10.000.000	100	%	10.000.000	100	%	32.000.000	KEC. BANDA RAYA

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
7	1	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	102.608.169	100	%	77.608.169	100	%	102.608.169	100	%	102.608.169	100	%	385.432.676	KEC. BANDA RAYA
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	2.986.545.046	100	%	2.986.545.046	100	%	2.986.545.046	100	%	2.986.545.046	100	%	11.946.180.184	KEC. JAYA BARU
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	%	100	%	66.668.500	100	%	62.668.500	100	%	66.668.500	100	%	66.668.500	100	%	262.674.000	KEC. JAYA BARU
7	1	3			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100	%	100	%	30.175.000	100	%	25.425.000	100	%	30.175.000	100	%	30.175.000	100	%	115.950.000	KEC. JAYA BARU
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	10.250.000	100	%	2.250.000	100	%	10.250.000	100	%	10.250.000	100	%	33.000.000	KEC. JAYA BARU
7	1	5			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	10.250.000	100	%	2.250.000	100	%	10.250.000	100	%	10.250.000	100	%	33.000.000	KEC. JAYA BARU
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	103.821.050	100	%	78.571.050	100	%	103.821.050	100	%	103.821.050	100	%	390.034.200	KEC. JAYA BARU
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	3.450.589.073	100	%	3.458.448.509	100	%	3.458.448.509	100	%	3.458.448.509	100	%	13.825.934.600	KEC. KUTA ALAM
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Penyelengaraan Pemerintahan dan	100	%	100	%	71.397.582	100	%	50.397.582	100	%	71.397.582	100	%	71.397.582	100	%	264.590.328	KEC. KUTA ALAM
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100	%	100	%	40.729.613	100	%	35.989.257	100	%	35.989.257	100	%	35.989.257	100	%	148.697.384	KEC. KUTA ALAM
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	2.000.000	100	%	2.000.000	100	%	2.000.000	100	%	2.000.000	100	%	8.000.000	KEC. KUTA ALAM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	2.000.000	100	%	1.900.000	100	%	1.900.000	100	%	1.900.000	100	%	7.700.000	KEC. KUTA ALAM
7	1	6			Program Pembinanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	90.870.937	100	%	62.851.857	100	%	87.851.857	100	%	87.851.857	100	%	329.426.508	KEC. KUTA ALAM
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	3.501.456.681	100	%	3.501.456.681	100	%	3.501.456.681	100	%	3.501.456.681	100	%	14.005.826.724	KEC. ULEE KARENG
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	%	100	%	50.911.735	100	%	29.911.735	100	%	50.911.735	100	%	50.911.735	100	%	182.646.940	KEC. ULEE KARENG
7	1	3			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100	%	100	%	31.753.500	100	%	31.753.500	100	%	31.753.500	100	%	31.753.500	100	%	127.014.000	KEC. ULEE KARENG
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	2.000.010	100	%	2.000.010	100	%	2.000.010	100	%	2.000.010	100	%	8.000.040	KEC. ULEE KARENG
7	1	5			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	2.000.010	100	%	2.000.010	100	%	2.000.010	100	%	2.000.010	100	%	8.000.040	KEC. ULEE KARENG
7	1	6			Program Pembinanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	82.275.350	100	%	57.275.350	100	%	82.275.350	100	%	82.275.350	100	%	304.101.400	KEC. ULEE KARENG
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	2.929.347.787	100	%	2.929.347.787	100	%	2.929.347.787	100	%	2.929.347.787	100	%	11.717.391.148	KEC. LUENG BATA
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	%	100	%	85.677.456	100	%	60.677.456	100	%	85.677.456	100	%	86.272.184	100	%	318.304.552	KEC. LUENG BATA

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
7	1	3			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	100	%	100	%	43.080.137	100	%	43.080.137	100	%	43.080.137	100	%	42.485.409	100	%	171.725.819	KEC. LUENG BATA
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	2.297.364	100	%	2.297.364	100	%	2.297.364	100	%	2.297.364	100	%	9.189.456	KEC. LUENG BATA
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	2.630.000	100	%	2.630.000	100	%	2.630.000	100	%	2.630.000	100	%	10.520.000	KEC. LUENG BATA
7	1	6			Program Pembinanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	93.856.052	100	%	68.856.052	100	%	93.856.052	100	%	93.856.052	100	%	350.424.208	KEC. LUENG BATA
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	2.593.401.762	100	%	2.593.401.762	100	%	2.593.401.762	100	%	2.593.401.762	100	%	10.373.607.048	KEC. KUTA RAJA
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100	%	31.250.000	100	%	21.250.000	100	%	31.250.000	100	%	31.250.000	100	%	115.000.000	KEC. KUTA RAJA
7	1	3			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	%	100	%	57.252.829	100	%	42.252.829	100	%	57.252.829	100	%	57.252.829	100	%	214.011.316	KEC. KUTA RAJA
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	2.400.000	100	%	2.400.000	100	%	2.400.000	100	%	2.400.000	100	%	9.600.000	KEC. KUTA RAJA
7	1	5			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	2.000.000	100	%	2.000.000	100	%	2.000.000	100	%	2.000.000	100	%	8.000.000	KEC. KUTA RAJA
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	75.896.578	100	%	50.896.578	100	%	75.896.578	100	%	75.896.578	100	%	278.586.312	KEC. KUTA RAJA
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	2.881.000.221	100	%	2.869.625.221	100	%	2.867.875.221	100	%	2.867.160.221	100	%	11.485.660.884	KEC. MEURAXA

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	%	100	%	78.169.800	100	%	63.544.800	100	%	73.694.800	100	%	73.859.800	100	%	289.269.200	KEC. MEURAXA
7	1	3			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	%	100	%	27.203.550	100	%	32.203.550	100	%	32.703.550	100	%	32.043.550	100	%	124.154.200	KEC. MEURAXA
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	10.000.000	100	%	2.500.000	100	%	10.000.000	100	%	10.000.000	100	%	32.500.000	KEC. MEURAXA
7	1	5			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	10.000.000	100	%	2.500.000	100	%	10.000.000	100	%	10.000.000	100	%	32.500.000	KEC. MEURAXA
7	1	6			Program Pembinanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	81.512.500	100	%	66.512.500	100	%	92.512.500	100	%	93.612.500	100	%	334.150.000	KEC. MEURAXA
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	3.182.075.556	100	%	3.145.405.128	100	%	3.142.187.105	100	%	3.155.905.128	100	%	12.625.572.917	KEC. SYIAH KUALA
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100	%	100	%	34.452.792	100	%	35.452.792	100	%	35.570.815	100	%	38.452.792	100	%	143.929.191	KEC. SYIAH KUALA
7	1	3			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	%	100	%	41.212.649	100	%	64.383.077	100	%	57.983.077	100	%	61.383.077	100	%	224.961.880	KEC. SYIAH KUALA
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	%	1.000.000	100	%	1.000.000	100	%	2.000.000	100	%	1.000.000	100	%	5.000.000	KEC. SYIAH KUALA
7	1	5			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	%	1.000.000	100	%	1.000.000	100	%	3.000.000	100	%	3.000.000	100	%	8.000.000	KEC. SYIAH KUALA
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	75.000.000	100	%	37.500.000	100	%	75.000.000	100	%	75.000.000	100	%	262.500.000	KEC. SYIAH KUALA
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**12.370.667.932**			**12.977.946.477**			**10.250.667.932**			**10.382.667.932**			**45.981.950.274**	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**12.370.667.932**			**12.977.946.477**			**10.250.667.932**			**10.382.667.932**			**45.981.950.274**	
8	**1**				**BADAN KESBANGPOL**						**12.370.667.932**			**12.977.946.477**			**10.250.667.932**			**10.382.667.932**			**45.981.950.274**	
8	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	5.364.791.866	100	%	5.239.791.866	100	%	5.264.791.866	100	%	5.264.791.866	100	%	21.134.167.464	BADAN KESBANGPOL
8	1	2			Program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	85	%	88.389.080	85	%	90.000.000	85	%	100.000.000	85	%	110.000.000	85	%	388.389.080	BADAN KESBANGPOL
8	1	3			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	%	90	%	5.318.682.850	90	%	6.153.154.611	90	%	3.380.876.066	90	%	3.357.876.066	90	%	18.210.589.594	BADAN KESBANGPOL
8	1	4			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	%	85	%	29.624.548	85	%	65.000.000	85	%	45.000.000	85	%	50.000.000	85	%	189.624.548	BADAN KESBANGPOL
8	1	5			Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	85	%	448.182.680	85	%	350.000.000	85	%	360.000.000	85	%	400.000.000	85	%	1.558.182.680	BADAN KESBANGPOL
8	1	6			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	%	85	%	1.120.996.908	85	%	1.080.000.000	85	%	1.100.000.000	85	%	1.200.000.000	85	%	4.500.996.908	BADAN KESBANGPOL
9					**UNSUR KEKHUSUSAN**						**44.392.049.189**			**41.940.757.603**			**43.209.592.141**			**43.431.462.883**			**172.973.861.817**	
9	**1**				**KEKHUSUSAN ACEH**						**44.392.049.189**			**41.940.757.603**			**43.209.592.141**			**43.431.462.883**			**172.973.861.817**	
9	**1**				**DINAS SYARIAT ISLAM**						**15.779.504.278**			**13.638.212.692**			**14.646.947.230**			**14.805.707.972**			**58.870.372.172**	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada Awal RPD (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPD (2026)			OPD Penanggung Jawab
									2023			2024			2025			2026						
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target	Satuan	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	Target	Satuan	Rp	
9	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	62	%	100	%	5.472.356.216	100	%	5.098.679.999	100	%	5.114.370.362	100	%	5.292.779.925	100	%	20.978.186.502	DINAS SYARIAT ISLAM
9	1	2			Program Syariat Islam Aceh	Indeks Kota Syariah (IKS)	76,77	Indeks	78,27	%	10.307.148.062	79,77	%	8.539.532.693	81,27	%	9.532.576.868	82,77	%	9.512.928.047	82,77	%	37.892.185.670	DINAS SYARIAT ISLAM
9	**1**				**KECAMATAN**						**79.649.380**			**69.649.380**			**99.749.380**			**80.859.380**			**329.907.520**	
9	1	2			Program Syariat Islam Aceh	Persentase Program Syariat Islam Aceh	78,27	%	78,27	%	3.000.000	79,77	%	3.000.000	81,27	%	3.000.000	82,77	%	3.000.000	82,77	%	12.000.000	KEC. BAITURRAHMAN
9	1	2			Program Syariat Islam Aceh	Persentase Program Syariat Islam Aceh	78,27	%	78,27	%	5.000.000	79,77	%	2.000.000	81,27	%	5.000.000	82,77	%	5.000.000	82,77	%	17.000.000	KEC. BANDA RAYA
9	1	2			Program Syariat Islam Aceh	Persentase Program Syariat Islam Aceh	78,27	%	78,27	%	2.750.000	79,77	%	2.750.000	81,27	%	2.750.000	82,77	%	2.750.000	82,77	%	11.000.000	KEC. JAYA BARU
9	1	2			Program Syariat Islam Aceh	Persentase Program Syariat Islam Aceh	78,27	%	78,27	%	5.000.000	79,77	%	1.000.000	81,27	%	5.000.000	82,77	%	5.000.000	82,77	%	16.000.000	KEC. KUTA ALAM
9	1	2			Program Syariat Islam Aceh	Persentase Program Syariat Islam Aceh	78,27	%	78,27	%	50.000.000	79,77	%	50.000.000	81,27	%	50.000.000	82,77	%	50.000.000	82,77	%	200.000.000	KEC. KUTA RAJA
9	1	2			Program Syariat Islam Aceh	Persentase Program Syariat Islam Aceh	78,27	%	78,27	%	7.800.000	79,77	%	7.800.000	81,27	%	7.800.000	82,77	%	7.800.000	82,77	%	31.200.000	KEC. LUENG BATA
9	1	2			Program Syariat Islam Aceh	Persentase Program Syariat Islam Aceh	78,27	%	78,27	%	-	79,77	%	1.000.000	81,27	%	1.100.000	82,77	%	1.210.000	82,77	%	3.310.000	KEC. MEURAXA
9	1	2			Program Syariat Islam Aceh	Persentase Program Syariat Islam Aceh	78,27	%	78,27	%	1.000.000	79,77	%	1.000.000	81,27	%	20.000.000	82,77	%	1.000.000	82,77	%	23.000.000	KEC. SYIAH KUALA
9	1	2			Program Syariat Islam Aceh	Persentase Program Syariat Islam Aceh	78,27	%	78,27	%	5.099.380	79,77	%	1.099.380	81,27	%	5.099.380	82,77	%	5.099.380	82,77	%	16.397.520	KEC. ULEE KARENG
9	**1**				**SEKRETARIAT MPU**						**3.485.956.680**			**3.285.956.680**			**3.415.956.680**			**3.497.956.680**			**13.685.826.721**	
9	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	2.893.498.085	100	%	2.893.498.085	100	%	2.893.498.085	100	%	2.893.498.085	100	%	11.573.992.340	SEKRETARIAT MPU
9	1	3			Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase meningkatnya kapasitas dan peran ulama	100	%	100	%	592.458.595	100	%	392.458.595	100	%	522.458.595	100	%	604.458.595	100	%	2.111.834.381	SEKRETARIAT MPU
9	**1**				**SEKRETARIAT BAITUL MAL**						**25.046.938.851**			**24.946.938.851**			**25.046.938.851**			**25.046.938.851**			**100.087.755.404**	
9	1	1			Program Penunjang Urusan Pemarintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat daerah	100	%	100	%	3.040.718.851	100	%	3.040.718.851	100	%	3.040.718.851	100	%	3.040.718.851	100	%	12.162.875.404	SEKRETARIAT BAITUL MAL
9	1	4			Program Baitul Mal	Persentase Pelaksanaan Baitul Mal	100	%	100	%	22.006.220.000	100	%	21.906.220.000	100	%	22.006.220.000	100	%	22.006.220.000	100	%	87.924.880.000	SEKRETARIAT BAITUL MAL

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro merupakan indikator yang digunakan mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator makro ini akan menentukan arah pembangunan sekaligus mencermikan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, indikator makro yang ditetapkan sebagai indikator pembangunan Kota Banda Aceh ditunjukkan melalui kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan melalui dalam Indeks pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan yang didekati dengan persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan pemerataan pendapatan melalui koefisien Gini. Penetapan indikator makro akan membantu dalam melakukan evaluasi pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh dapat mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan.

Untuk mengetahui penetapan dan target indikator makro pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ditunjukkan pada Tabel 8.1 di bawah ini:

Tabel 8.1
Penetapan dan Target Indikator Makro Pembangunan Kota Banda Aceh
Tahun 2023-2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	85,71	86,59	87,03	87,47	87,91	87,91
2	Presentase Penduduk Miskin	%	7,61	7,25	7,07	6,89	6,71	6,71
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,94	8,54	8,14	7,74	7,34	7,34
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,53***	4	4,4	4,8	5,2	5,2
5	PDRB Per Kapita (juta rupiah) ADHB	Juta Rupiah	78,16***	82,16	84,16	86,16	88,16	88,16
6	Koefisien Gini	Nilai	0,347	0,337	0,332	0,327	0,322	0,322

***) *Data Sangat Sangat Sementara* (*Banda Aceh Dalam Angka, 2022*)

8.2. Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Guna mengukur keberhasilan tersebut, dibutuhkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja utama daerah sekaligus merupakan penjelas yang menggambarkan kemajuan pembangunan Kota Banda Aceh. Indikator kinerja utama juga berfungsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pembangunan dimana publik dapat dengan mudah mengukur dan memantau pekembangan pelaksanaan kebijakan kinerja pemerintah. Penetapan indikator kinerja utama juga merupakan bahan pengendalian dan evaluasi dampak kebijakan yang ditetapkan serta menjadi indikator laporan keberhasilan pembangunan dari pemerintah kepada publik.

Untuk mengetahui Indikator Kinerja Utama Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 8.2 di bawah ini:

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	76,77	78,27	79,77	81,27	82,77	82,77
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,73	91,12	92,51	93,9	95,29	95,29
3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	B	BB	BB	BB	A	A
4	Indeks Kualitas Pendidikan	Indeks	82,64	90,08	92,73	95,38	96,97	96,97
5	Indeks Kualitas Kesehatan	Indeks	85,451	94,715	94,716	94,717	94,718	94,718
6	Jumlah Kunjungan Wisata	Jiwa	251.836	350.000	450.000	550.000	650.000	650.000
7	Rata-rata Capaian Layanan Infrastruktur Perkotaan	%	89,49	90,49	90,99	91,49	91,99	91,99
8	Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	63,05	69,35	72,71	76,08	79,45	79,45
9	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Kelas Risiko (Skor)	Sedang 117,02	Sedang 107,02	Sedang 102,02	Sedang 97,02	Sedang 92,02	Sedang 92,02

8.3. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk mengukur penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada 3 (tiga) aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indkator *outcame* program yang bersifat mandiri setiap tahunnya sehingga diperoleh hasil yang dapat kondisi yang diinginkan pada akhir periode RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Indikator kinerja daerah dirumuskan dengan mengambil indikator program prioritas yang telah ditetapkan *(outcome)* atau kompositnya *(impact)*. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis satu atau lebih Indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian kinerja daerah yang berkenaan setelah program dan prioritas pembangunan ditetapkan.

Untuk mengetahui Indikator kinerja daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 disajikan dalam Tabel 8.3 di bawah ini:

Tabel 8.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi:								
1	Pertumbuhan PDRB	%	5,53***	4	4,4	4,8	5,2	5,2
2	Laju Inflasi	%	2,41	2,35	2,32	2,29	2,26	2,26
3	PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rupiah	60,59***	64,59	66,59	68,59	70,59	70,59
4	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	78,16***	82,16	84,16	86,16	88,16	88,16
5	Indeks Gini	Indeks	0,347***	0,337	0,332	0,327	0,322	0,322
6	Persentase Penduduk Miskin	%	7,61	7,25	7,07	6,89	6,71	6,71
7	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	20.950	20.874	20.799	20.723	20.648	20.648
8	IPM	Indeks	85,71	86,59	87,03	87,47	87,91	87,91
9	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	%	1,61	1,96	2,52	3,18	3,97	3,97
Kesejahteraan Sosial								
Pendidikan								
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,80	17,82	17,83	17,84	17,85	17,85
2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	12,83	12,84	12,84	12,85	12,85	12,85
Kesehatan								
3	Angka harapan hidup	Tahun	71,52	72,00	72,10	72,30	72,70	72,70
4	Persentase balita gizi buruk	%	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19	0,19
5	Prevalensi balita gizi kurang	%	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03	1,03
Ketenagakerjaan								
6	Tingkat pengangguran terbuka	%	8,94	8,15	7,80	7,45	7,10	7,10
Keuangan								
7	Peroleh Opini dari BPK terhadap laporan Keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	19	20	21	22	23	23
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Layanan Urusan Wajib Dasar							
1.	**PENDIDIKAN**							
1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD	%	60,12	100	100	100	100	100
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dalam Pendidikan SD	%	99,99	100	100	100	100	100
1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun dalam pendidikan SMP	%	99,99	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	Nilai	97,05	100	100	100	100	100
1.5	Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,76	1,96	2,06	2,16	2,26	2,26
1.6	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,60	1,80	1,90	2,00	2,10	2,10
1.7	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,85	2,05	2,15	2,25	2,35	2,35
1.8	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,70	1,90	2,00	2,10	2,20	2,20
1.9	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang Mendapatkan Akreditasi A	%	49,45	50	51	52	53	53
1.10	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP) yang Mendapatkan Akreditasi A	%	33,33	36	39	45	51	51
1.11	Persentase Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	39,90	48	50	52	54	54
1.12	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	%	28,50	37	50	62	75	75
1.13	Persentase Pendidik SD yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	39,78	41	43	45	47	47
1.14	Persentase Pendidik SMP yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	56,59	58	60	62	64	64
1.15	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	25,30	27	29	31	32	32
1.16	Persentase Pendidik PAUD Formal yang Memiliki Kualifikasi S1/D IV	%	79,45	82	83	84	85	85
1.17	Rasio Pengawas/Penilik PAUD	Rasio	1:34	1:28	1:25	1:22	1:20	1:20
1.18	Persentase Lulusan SD yang mampu menghafal minimal satu juz Al Qur'an	%	6,69	9	10	11	12	12
1.19	Persentase Lulusan SMP yang mampu menghafal minimal dua juz Al Qur'an	%	5,55	9	10	11	12	12
1.20	Jumlah Dayah yang terakreditasi sesuai standar	Dayah	26	29	32	35	38	38
1.21	Jumlah rekomendasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang dihasilkan	rekomendasi	2	2	2	2	2	8
2.	**KESEHATAN**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
2.1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	95,4	100	100	100	100	100
2.3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	60,9	100	100	100	100	100
2.5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	73,9	100	100	100	100	100
2.6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	123	100	100	100	100	100
2.7	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	14	100	100	100	100	100
2.8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	33	100	100	100	100	100
2.9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	154	100	100	100	100	100
2.10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	87	100	100	100	100	100
2.12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	99, 19	100	100	100	100	100
2.13	Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	80	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
2.14	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit	%	76	80	85	90	100	100
3.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
3.1	Layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	68,82	100	100	100	100	100
3.2	Layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100
3.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	91,37	92,07	92,77	93,47	94,17	94,17
3.4	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	%	87,58	87,61	87,64	87,67	87,70	87,70
3.5	Persentase Drainase Kota Dalam Kondisi Baik	%	82,01	82,03	82,05	82,07	82,09	82,09
3.6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	44,11	44,09	44,07	44,05	44,03	44,03
3.7	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	95,55	95,75	95,95	96,15	96,35	96,35
3.8	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	%	74,43	74,53	74,63	74,73	74,83	74,83
3.9	Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikasi	Orang	50	50	50	50	50	250
3.10	Ketaatan terhadap RTRW/RDTR	%	81,07	81,37	81,67	81,97	82,27	82,27
3.11	Persentase bangunan Umum yang Memiliki Aksesibilitas	%	56,85	60,43	63,78	67,03	70,20	70,20
3.12	Jumlah kawasan Strategis Yang Tertata	Kawasan	0	0	1	0	1	2
4.	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
4.1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase Luas Pemukiman yang Tertata	%	76,70	76,90	77,10	77,30	77,50	77,50
4.4	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	92,20	92,60	92,80	93,00	93,20	93,20
4.5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	7,64	7,24	6,84	6,64	6,24	6,24
4.6	Cakupan lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	96,61	98,00	98,20	98,60	98,80	98,80

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
		_						
5.	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
5.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	87,7	88,6	89,5	90,4	90,4
5.2	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Rasio	5,27	5,52	5,58	5,64	5,70	5,70
5.3	Persentase Penegakan Perda/Qanun	%	100	80	85	85	90	90
5.4	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,66
5.5	Layanan informasi rawan bencana	%	N/A	100	100	100	100	100
5.6	Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	N/A	100	100	100	100	100
5.7	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	N/A	100	100	100	100	100
5.8	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	100	100	100	100
5.9	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	0	10	20	30	40	40
5.10	Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi nonkebakaran) oleh Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan)	Kali	56	60	65	70	75	75
5.11	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100
6.	**SOSIAL**							
6.1	Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%	59	100	100	100	100	100
6.2	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar anak Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
6.4	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	%	93	100	100	100	100	100
6.5	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1.	**TENAGA KERJA**							
1.1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	40	50,60	55,56	61,23	67,35	67,35
1.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	17,47	19,22	21,14	23,26	25,58	25,58
1.3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	1,17	1,03	0,86	0,71	0,66	0,66
1.4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	59,00	61,00	63,00	65,00	67,00	67,00
1.5	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	37,06	38,91	40,86	42,90	45,04	45,04
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	7,41	11,11	14,81	18,52	22,22	22,22
1.7	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	26,36	26,97	27,57	28,16	28,74	28,74
1.8	Jumlah Industri Kecil Menengah Produktif	Jumlah IKM	1.310	1.330	1.350	1.370	1.390	1.390
1.9	Persentase jumlah IKM yang terdaftar di SIINas	%	1,80	3,70	5,50	7,30	9,10	9,10
2.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
2.1	Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	%	16	48	64	80	96	96
2.3	Rasio KDRT	%	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10
2.4	Persentase Gampong Layak Anak	%	25,56	44,44	54,44	64,44	74,44	74,44
2.5	Prevalensi pemakaian kontrasepsi	%	72,99	80,47	84,50	88,72	93,16	93,16
2.6	Persentase Indikator Gampong KB yang di penuhi	%	46,15	61,54	76,92	92,31	100,00	100,00
3.	**PANGAN**							
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	82,56	83,00	85,00	87,00	90,00	90,00
4.	**LINGKUNGAN HIDUP**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
4.1	Timbulan Sampah yang Ditangani	%	N/A	97,75	97,60	98,00	98,25	98,25
4.2	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota	%	14,330	14,360	14,365	14,370	14,375	14,375
4.2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	N/A	45,66	45,71	45,76	45,81	45,81
4.3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	N/A	83,49	83,54	83,59	83,64	83,64
4.4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	N/A	29,18	29,19	29,20	29,21	29,21
4.5	Persentase Penerangan Jalan Umum	%	82,42	86,00	86,25	86,50	86,75	86,75
4.6	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	%	N/A	97,50	97,60	97,70	97,76	97,76
4.7	Penghargaan Adipura	Ada/Tidak Ada	Belum ada pengumuman dari KLHK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
5.1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	99,31	99,35	99,40	99,50	99,70	99,70
5.2	Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	74,26	75,00	75,60	75,70	76,00	76,00
5.3	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	96,73	96,73	96,80	96,90	97,00	97,00
5.4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	84,00	84,20	85,00	85,50	86,00	86,00
5.5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	95,36	95,38	95,50	95,60	96,00	96,00
6.	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG**							
6.1	Indeks Gampong Membangun (IGM)	Indeks	0,758	0,788	0,803	0,818	0,833	0,833
6.2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan desa yang Baik	%	100	100	100	100	100	100
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok Binaan	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,00
6.4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok Binaan	22,10	22,20	22,40	22,50	22,70	22,70
6.5	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100
6.6	Persntase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100
7.	**PERHUBUNGAN**							
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1.649.464	1.665.795	1.682.126	1.698.457	1.714.788	1.714.788
7.2	Rasio ijin trayek	%	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
7.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	10.900
7.4	Jumlah Terminal Bis	Unit	3	3	3	3	3	3
7.5	Persentase layanan Angkutan Darat	%	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19
7.6	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	20	19	18	17	16	16
7.7	Pemasangan Rambu-rambu	%	102,71	100	100	100	100	100
8.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
8.1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	2,62	2,67	2,72	2,77	2,82	2,82
8.2	Persentase website OPD yang aktif	%	75	82	84	86	88	88
8.3	Cakupan layanan E-Government yang dilaksanakan	%	50	57	59	61	63	63
9.	**KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**							
9.1	Persentase koperasi aktif	%	77	79	81	83	85	85
9.2	Persentase peningkatan usaha mikro yang produktif dan bernilai tambah	%	2	7	12	17	22	22
9.3	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang berfungsi optimal	Unit	7	8	9	10	11	11
9.4	Persentase Pasar yang Representatif	%	50	50	58,33	66,67	75	75
9.5	Jumlah Usaha Mikro	UM	16.970	17.818	18.708	19.643	20.626	20.626
9.6	Jumlah Koperasi	Unit Usaha	513	513	517	519	521	521
9.7	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam /Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	395	395	400	405	410	410
9.8	Jumlah pasar yang sudah berfungsi optimal	Jumlah Pasar	5	5	6	7	8	8
9.9	Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang Bertanda Tera Sah	UTTP	1250	1378	1643	1908	2173	2173
10.	**PENANAMAN MODAL**							
10.1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (milyar)	547,88	575,27	602,67	630,06	657,45	3013,33
11.	**PEMUDA DAN OLAHRAGA**							
11.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	14,81	18,52	20,37	22,22	24,07	24,07
11.2	Cakupan pembinaan atlet muda	%	24,12	26,13	27,14	28,14	29,15	29,15
12.	**STATISTIK**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
12.1	Persentase data statistik sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	%	20	27	29	31	33	33
13	**KEBUDAYAAN**							
13.1	Indeks Pelestarian Budaya Daerah	Indeks	73,41	77,73	79,05	81,84	83,98	83,98
13.2	Persentase sanggar seni dan budaya daerah yang aktif	%	65	65	67	69	71	71
13.3	Persentase cagar budaya dan situs sejarah yang ditetapkan	%	68	73	79	85	91	91
13.4	Jumlah rekomendasi Majelis Adat Aceh (MAA) yang dihasilkan	rekomendasi	1	2	2	2	2	8
14.	**PERPUSTAKAAN**							
14.1	Jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan	Jiwa	9.852	17.023	18.725	20.597	22.657	22.657
15	**KEARSIPAN**							
15.1	Persentase OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara manual dan berbasis TIK sesuai peraturan	%	N/A	25	50	75	100	100
Layanan Urusan Pilihan								
1	**PARIWISATA**							
1.1	Jumlah Kunjungan Wisataan	Jiwa	251.836	350.000	450.000	550.000	650.000	2.000.000
1.2	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD Kota Banda Aceh	%	N/A	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
2	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
2.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	N/A	917,06	981,26	1.049,95	1.123,44	4.071,71
2.2	Jumlah Produksi Hasil Perikanan Tangkap	Ton	N/A	19.388,464	20.745,657	22.197,853	23.751,703	86.083,677
2.3	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	N/A	374,50	400,72	428,77	458,78	1.662,77
3	**PETERNAKAN**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
3.1	Jumlah Produksi Ternak							
	a. Sapi	Ton	N/A	299,86	308,86	318,13	327,67	1.255
	b. Kambing	Ton	N/A	24,22	24,95	25,70	26,97	102
	c. Unggas	Ton	N/A	1.916	1.973	2.032	2.093	8.014
	PENUNJANG URUSAN:							
1.	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD/RPD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Penjabaran konsistensi Program RPJMD/RPD kedalam RKPD	%	94,73	100	100	100	100	100
2.	**KEUANGAN**							
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	19	20	21	22	23	23
3.	**KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**							
3.1	Indeks Kepuasan ASN Kota Banda Aceh terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi	Indeks	75	77	78	79	80	80
4.	**INSPEKTORAT**							
4.1	Presentase tindak lanjut temuan	%	89,02	89,54	89,95	90,21	90,48	90,48
5.	**SEKRETARIAT DPRK**							
5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD (2021)	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
5.2	Tersusun dan terintegrasi Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	KESATUAN BANGSA							
1.	**Kesatuan Bangsa dan Politik**							
1.1	Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	%	100	100	100	100	100	100
1.2	Persentase Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	%	-	-	73,79	-	-	-
	KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH							
1.	**KEAGAMAAN**							
1.1	Indeks Kota Syariah (IKS)	Indeks	76,77	78,27	79,77	81,27	82,77	82,77
1.2	Jumlah rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang dihasilkan	Rekomendasi	9	22	26	30	34	121
	ASPEK DAYA SAING DAERAH :							
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,26	0,48	0,50	0,52	0,55	0,55
2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	839.128	1.220.000	1.221.000	1.222.000	1.228.000	1.228.000
		Barang	168.912	76.311	77.779	79.242	80.715	80.715
3	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang/Barang	1.582.397	1.665.795	1.682.126	1.698.457	1.714.788	1.714.788

***) *Data Sangat Sangat Sementara* (*Banda Aceh Dalam Angka, 2022*)

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, masyarakat dan *stakeholders* terkait lainnya dalam menyelenggarakan pembangunan Kota Banda Aceh selama periode 2023-2026, dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD, serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kota Banda Aceh selama periode 2023-2026.

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh pada masa transisi sampai dengan tersedianya Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Di samping itu, RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025 dan Tahun 2026 yang merupakan masa transisi pasca Pilkada Serentak Tahun 2024.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini dilaksanakan dengan konsisten, jujur, transparan, professional, partisipatif dan penuh tanggungjawab dengan kaedah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas/Badan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, serta dunia usaha dan masyarakat agar melaksanakan program-program dalam RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
3. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh mulai tahun 2023-2026;
4. Dinas/Badan dan OPD terkait lainnya berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 dengan Renstra OPD Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2023-2026.
5. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini juga dijadikan sebagai pedoman dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah Kota Banda Aceh selama periode 2023-2026.

WALIKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN